

Dr. Andi Hermawan, M.Pd.



# TRANSFORMASI PENDIDIKAN *di*

## Era VUCA, Society 5.0 dan SDGs

Integrasi Silih Asih, Asah, Asuh  
dan Empat Pilar UNESCO



# TRANSFORMASI PENDIDIKAN

**Era VUCA, Society 5.0 dan SDGs**

Integrasi Silih Asih, Asah, Asuh  
dan Empat Pilar UNESCO

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. Andi Hermawan, M.Pd.

# TRANSFORMASI PENDIDIKAN *di*

**Era VUCA, Society 5.0 dan SDGs**

Integrasi Silih Asih, Asah, Asuh  
dan Empat Pilar UNESCO



---

**TRANSFORMASI PENDIDIKAN**  
**DI ERA VUCA, SOCIETY 5.0 DAN SDGS**  
**Integrasi Silih Asih, Asah, Asuh dan Empat Pilar UNESCO**

---

Ditulis oleh:  
Dr. Andi Hermawan, M.Pd.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh  
**PT Insight Pustaka Nusa Utama**  
Jl. Pare, Tejoagung, Metro Timur, Kota Metro  
Telp: 085150867290 | 087847074694  
Email: insightpustaka@gmail.com  
Web: www.insightpustaka.com  
Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, September 2025

Perancang sampul: Rian Saputra  
Penata letak: Rian Saputra

**ISBN: 978-634-7569-41-7**

xxii + 336 hlm. ; 15,5x23 cm.

©September 2025



## KATA PENGANTAR

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”  
(QS. Al-Mujādilah [58]: 11)*

*“Education is not a preparation for life; education is life itself.”  
— John Dewey*

*“Learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together are at the heart of education for the twenty-first century.”  
— Jacques Delors, UNESCO Report (1996)*

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridha-Nya, karya ini dapat hadir di hadapan pembaca. Buku berjudul *Transformasi Pendidikan di Era VUCA, Society 5.0 dan SDGs: Integrasi Silih Asih, Asah, Asuh dan Empat Pilar UNESCO* adalah buah dari refleksi panjang, penelitian, sekaligus pergulatan pemikiran yang berangkat dari keresahan atas arah pendidikan Indonesia dalam menghadapi derasnya arus perubahan global.

### **Pendidikan di Persimpangan Zaman**

Saat ini, dunia sedang memasuki fase sejarah baru. Gejala *VUCA* (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) kian nyata terasa di berbagai sektor kehidupan. Pandemi global yang baru saja kita lalui, perubahan iklim yang semakin ekstrem, ketidakpastian ekonomi, serta percepatan teknologi digital adalah contoh bagaimana pendidikan tidak lagi berjalan dalam koridor linear, melainkan dalam lanskap yang penuh ketidakpastian.

Dalam konteks ini, pendidikan dituntut untuk tidak sekadar menjadi sarana mentransfer pengetahuan, tetapi juga wahana membentuk manusia yang tangguh, adaptif, kreatif, dan resilien. Pendidikan harus mampu menyiapkan generasi yang tidak hanya “bekerja” menghadapi perubahan, melainkan juga menjadi *agent of change* yang mengarahkan perubahan ke jalan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

### **Society 5.0: Inovasi yang Humanis**

Konsep *Society 5.0* yang lahir di Jepang menjadi tanda bahwa teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), big data, dan robotika tidak bisa dihindari dari kehidupan manusia. Namun, *Society 5.0* menekankan bahwa teknologi harus berpusat pada manusia (*human-centered innovation*). Pendidikan, oleh karena itu, tidak boleh terjebak dalam euforia digitalisasi semata, tetapi harus tetap berorientasi pada pembangunan martabat manusia.

Buku ini mencoba menegaskan bahwa di tengah derasnyanya arus inovasi teknologi, pendidikan Indonesia tetap harus berakar pada nilai kemanusiaan dan budaya bangsa. Di sinilah letak urgensi falsafah *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh* sebagai sumbu moral dan spiritual pendidikan kita.

### **Silih Asih, Asah, Asuh: Fondasi Kearifan Lokal**

Falsafah Sunda *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh* merupakan manifestasi dari nilai-nilai kemanusiaan universal yang lahir dari rahim budaya Nusantara.

- **Silih Asih** mengajarkan cinta kasih, empati, dan kepedulian.
- **Silih Asah** menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat, berbagi ilmu, dan pengembangan kapasitas.
- **Silih Asuh** menuntun kita pada sikap membimbing, melindungi, dan bertanggung jawab terhadap sesama.

Nilai-nilai ini sejalan dengan pilar-pilar pendidikan UNESCO, dan karenanya dapat dijadikan fondasi dalam merancang pendidikan yang berakar pada budaya bangsa namun tetap relevan di kancah global.

Dengan demikian, buku ini berupaya meneguhkan kembali posisi kearifan lokal sebagai “kompas moral” di tengah derasnyanya globalisasi. Kita tidak perlu khawatir kehilangan identitas, justru dengan memadukan nilai

lokal dan global, pendidikan Indonesia dapat melahirkan generasi emas yang unggul sekaligus berkarakter.

### **Empat Pilar UNESCO: Menjadi Warga Dunia**

UNESCO sejak lama menekankan pentingnya empat pilar pendidikan:

1. *Learning to Know* – menguasai pengetahuan dan literasi abad 21,
2. *Learning to Do* – mengembangkan keterampilan hidup dan vokasi,
3. *Learning to Be* – membentuk jati diri, karakter, dan kemanusiaan,
4. *Learning to Live Together* – belajar hidup bersama dalam keberagaman.

Jika keempat pilar ini ditunen dengan falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh*, maka pendidikan Indonesia bukan hanya akan mencetak insan cerdas secara akademis, tetapi juga pribadi yang berakhlak, berbudaya, dan mampu hidup rukun dalam perbedaan. Buku ini menyajikan bagaimana integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui kurikulum, strategi pembelajaran, kepemimpinan pendidikan, hingga kebijakan nasional.

### **SDGs dan Agenda Global**

Buku ini juga menempatkan pendidikan dalam bingkai *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Terutama, tujuan ke-4 tentang “pendidikan bermutu untuk semua” (*quality education*). Namun, pendidikan sesungguhnya terkait erat dengan seluruh SDGs lain: dari pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, kesehatan, hingga keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, pendidikan harus dipandang sebagai kunci transformasi sosial. Keberhasilan pendidikan bermutu akan berimplikasi pada tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Indonesia tidak hanya perlu mengejar target SDGs 2030, tetapi juga menyiapkan visi jangka panjang menuju *Indonesia Emas 2045*.

### **Tujuan dan Harapan Buku**

Buku ini disusun dengan tiga tujuan utama:

1. **Memberi dasar filosofis dan konseptual** tentang pendidikan di era VUCA, Society 5.0, dan SDGs.

2. **Menyajikan model integrasi** antara kearifan lokal (Silih Asih, Asah, Asuh) dan standar global (pilar UNESCO).
3. **Menawarkan strategi implementasi nyata** di level mikro (guru-murid), meso (sekolah-komunitas), hingga makro (kebijakan nasional).

Kami berharap buku ini menjadi rujukan bagi berbagai kalangan: guru, kepala sekolah, dosen, mahasiswa, peneliti, pengambil kebijakan, maupun aktivis pendidikan. Lebih dari itu, buku ini diharapkan mampu menjadi “buku gerakan” yang menginspirasi praktik nyata di lapangan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Dalam kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan inspirasi dalam penyusunan buku ini. Terima kasih kepada para akademisi, praktisi pendidikan, tokoh masyarakat, serta komunitas sekolah dan pesantren yang menjadi sumber pembelajaran berharga.

Kami juga berutang budi kepada para penulis, peneliti, dan lembaga internasional seperti UNESCO dan OECD yang telah menyediakan kerangka konseptual dan data penting dalam perumusan gagasan buku ini. Semoga amal kebaikan dan ilmu yang ditabur menjadi pahala yang terus mengalir.

Akhir kata, kami persembahkan buku ini sebagai bagian dari ikhtiar kolektif untuk membangun pendidikan yang **humanis, transformatif, berkarakter, dan berkelanjutan**. Pendidikan adalah jalan peradaban. Melalui pendidikan, kita bisa menenun kembali persaudaraan, meneguhkan kemanusiaan, dan menyiapkan generasi mendatang yang bukan hanya siap menghadapi dunia, tetapi juga mampu menciptakan dunia yang lebih adil dan bermartabat.

Semoga karya sederhana ini dapat memberi manfaat dan menjadi inspirasi. Mari kita jadikan *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh* sebagai fondasi, empat pilar UNESCO sebagai arah, dan SDGs sebagai kompas, untuk menapaki jalan menuju Indonesia Emas 2045.

Bogor, September 2025

Penulis





# PROLOG

## **Pendidikan di Persimpangan Global: VUCA, Society 5.0, dan Agenda SDGs**

Dunia abad ke-21 diwarnai dengan percepatan perubahan yang luar biasa. Teknologi digital, kecerdasan buatan, dan globalisasi ekonomi membuka peluang tanpa batas, namun sekaligus melahirkan ketidakpastian. Fenomena yang sering disebut *VUCA* — *Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity* — menjadikan pendidikan tidak lagi berjalan di atas jalan datar, melainkan di persimpangan yang berliku.

Pendidikan menghadapi dilema: apakah ia hanya menjadi instrumen teknokratis untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, atau tetap berdiri sebagai kekuatan moral yang menjaga martabat kemanusiaan? Di sinilah prolog buku ini hadir, untuk menegaskan bahwa pendidikan harus memilih jalan kedua: transformatif, humanis, dan berkelanjutan.

Di tengah globalisasi dan disrupsi digital, kita kerap khawatir kehilangan akar budaya. Namun, sesungguhnya kearifan lokal menyimpan energi yang relevan dengan tantangan masa kini.

Falsafah Sunda *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh* bukan sekadar warisan budaya, melainkan panduan abadi:

- *Silih Asih* mengajarkan kasih sayang di tengah dunia yang kerap terjebak individualisme,
- *Silih Asah* mengingatkan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat di era pengetahuan,
- *Silih Asuh* meneguhkan tanggung jawab sosial di tengah krisis solidaritas global.

Nilai-nilai ini justru menjadi kompas etis dalam menghadapi kompleksitas VUCA dan Society 5.0. UNESCO melalui laporan Jacques Delors (1996) merumuskan empat pilar pendidikan: *Learning to Know*, *Learning to Do*, *Learning to Be*, dan *Learning to Live Together*.

Pilar-pilar ini bukan sekadar teori internasional, melainkan prinsip universal yang sangat sesuai dengan falsafah Nusantara. Jika kita tenun bersama Silih Asih, Asah, Asuh, maka lahirlah model pendidikan integratif: berakar pada budaya, berpijak pada realitas lokal, tetapi berorientasi pada visi global.

Prolog ini menegaskan bahwa pendidikan Indonesia perlu berani menggabungkan tradisi dengan inovasi, lokal dengan global, agar tidak tercerabut dari identitas sekaligus tidak tertinggal dari peradaban dunia.

Buku ini hadir dengan tujuan utama:

1. Menyajikan kerangka filosofis tentang pendidikan di era VUCA dan Society 5.0.
2. Mengintegrasikan kearifan lokal (Silih Asih, Asah, Asuh) dengan pilar pendidikan UNESCO.
3. Menghubungkan pendidikan dengan agenda global SDGs 2030 dan visi Indonesia Emas 2045.
4. Menawarkan strategi implementasi nyata dari level guru hingga kebijakan nasional.

Struktur buku disusun berlapis: dari fondasi konseptual, kearifan lokal, pilar global, integrasi, strategi implementasi, hingga studi kasus dan roadmap masa depan. Dengan kerangka ini, buku tidak hanya ditujukan untuk kalangan akademisi, tetapi juga bagi guru, kepala sekolah, komunitas, pembuat kebijakan, dan siapa pun yang peduli pada transformasi pendidikan.

Prolog ini adalah undangan awal untuk menyelami perjalanan panjang buku. Perjalanan yang menghubungkan Sunda dengan UNESCO, kelas dengan dunia, lokal dengan global, serta masa kini dengan masa depan. Seperti ungkapan Ki Hajar Dewantara: *“Pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.”*

Dengan demikian, pendidikan adalah upaya kolektif untuk menuntun generasi menuju masa depan yang penuh kasih (*Silih Asih*), penuh ilmu (*Silih Asah*), dan penuh tanggung jawab (*Silih Asuh*), sekaligus tetap selaras dengan visi global untuk membangun dunia yang damai, adil, dan berkelanjutan.



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	v
Prolog .....	xi
Daftar Isi .....	xv

## BAGIAN I

FONDASI FILOSOFIS DAN KONSEPTUAL .....	1
--	---

## BAB 1

EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN DI ERA VUCA .....	3
A. Definisi, Sejarah, dan Evolusi Konsep VUCA .....	7
B. Dampak VUCA pada Sistem Sosial dan Pendidikan.....	10
C. Filosofi Adaptasi, Resiliensi, dan Agility .....	13
D. Pendidikan sebagai Sistem Terbuka di Era Ketidakpastian .....	17
E. Studi Kasus: Krisis Global dan Pembelajaran .....	20

## BAB 2

SOCIETY 5.0 DAN PENDIDIKAN HUMANIS TEKNOLOGIS....	25
A. Sejarah Society 5.0 dan Relevansi Global .....	26
B. Konsep Human-Centered Innovation .....	29
C. Teknologi Digital, AI, dan Big Data dalam Pendidikan .....	32

D. Tantangan Etika, Privasi, dan Ketimpangan Digital .....	35
E. Pendidikan Humanis Berbasis Teknologi.....	38

## **BAB 3**

AGENDA GLOBAL SDGS 2030.....	43
A. Lahirnya SDGs: Sejarah dan Filosofi .....	45
B. SDG 4: Pendidikan Bermutu untuk Semua.....	47
C. Pendidikan dan Hubungannya dengan SDGs Lain.....	49
D. SDGs di Indonesia: Target dan Capaian .....	52
E. Pendidikan Berkelanjutan dan Transformasi Sosial .....	55

## **BAGIAN II**

KEARIFAN LOKAL: SILIH ASIH, ASAH, ASUH.....	59
---	----

## **BAB 4**

FILOSOFI SUNDA SEBAGAI LANDASAN PENDIDIKAN NUSANTARA .....	61
A. Akar Budaya Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh .....	62
B. Nilai-nilai Humanis dalam Perspektif Lokal.....	65
C. Relevansi Silih Asih-Asah-Asuh di Era Global.....	69
D. Perbandingan dengan Nilai Kearifan Lokal Nusantara Lain .....	72
E. Konstruksi Teori Pendidikan dari Falsafah Sunda .....	75

## **BAB 5**

AKTUALISASI SILIH ASIH, ASAH, ASUH DALAM PENDIDIKAN.....	79
A. Penerapan dalam Hubungan Guru–Murid.....	80
B. Pendidikan Karakter dan Spiritualitas .....	82

C. Peran Komunitas Belajar Berbasis Kearifan Lokal.....	85
D. Pengembangan Kurikulum Berbasis Nilai Lokal.....	88
E. Studi Kasus: Praktik di Sekolah dan Pesantren.....	91

## **BAB 6**

### **SILIH ASIH-ASAHAH-ASUH SEBAGAI MODEL**

<b>KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN.....</b>	<b>95</b>
A. Kepemimpinan Humanis dan Moral .....	97
B. Kepemimpinan Partisipatif dalam Komunitas Pendidikan .....	100
C. Kepemimpinan Visioner di Era VUCA .....	102
D. Perbandingan dengan Teori Kepemimpinan Global .....	106
E. Roadmap Kepemimpinan Nusantara di Abad 21.....	108

## **BAGIAN III**

<b>EMPAT PILAR UNESCO.....</b>	<b>113</b>
--------------------------------	------------

## **BAB 7**

<b>LEARNING TO KNOW.....</b>	<b>115</b>
A. Fondasi Pengetahuan dan Literasi Abad 21 .....	117
B. Literasi Data, Teknologi, dan Humanitas .....	120
C. Model Pembelajaran Berbasis Pengetahuan.....	123
D. Kecakapan Belajar Mandiri dan Self-Regulated Learning .....	126
E. Studi Kasus Internasional dan Nasional .....	129

## **BAB 8**

<b>LEARNING TO DO .....</b>	<b>133</b>
A. Kompetensi Abad 21 .....	135
B. Keterampilan Kerja dan Life Skills .....	137

C. Pendidikan Vokasi dan Link & Match .....	140
D. <i>Project-Based Learning</i> dan <i>Entrepreneurship</i> .....	143
E. Integrasi dengan Pendidikan Berkelanjutan .....	146

## **BAB 9**

<i>LEARNING TO BE</i> .....	149
A. Pendidikan Humanistik dan Self-Identity.....	151
B. Well-being, Kesehatan Mental, dan Spiritualitas.....	153
C. Etika Global dan Pendidikan Karakter .....	156
D. Pendidikan Berbasis Emosi dan Empati.....	159
E. Studi Kasus: Model Pendidikan Humanistik .....	162

## **BAB 10**

<i>LEARNING TO LIVE TOGETHER</i> .....	165
A. Pendidikan Multikultural dan Toleransi.....	167
B. Gotong Royong dan Civic Engagement.....	169
C. Pendidikan Perdamaian dan Global Citizenship.....	172
D. Pendidikan Inklusif untuk Keberagaman.....	174
E. Studi Kasus: Resolusi Konflik dan Kolaborasi .....	176

## **BAGIAN IV**

INTEGRASI LOKAL-GLOBAL.....	179
-----------------------------	-----

## **BAB 11**

MENYULAM SILIH ASIH-ASAH-ASUH DENGAN PILAR UNESCO .....	181
A. Teori Integrasi Nilai Lokal-Global .....	183
B. Model Konseptual Integratif .....	185

C. Penerapan di Sekolah, Komunitas, dan Perguruan Tinggi .....	187
D. Perbandingan Model Lokal–Global .....	190
E. Kurikulum Integratif Nusantara–UNESCO.....	192

## **BAB 12**

### **PENDIDIKAN TRANSFORMATIF DI ERA**

VUCA–SOCIETY 5.0 .....	197
A. Adaptasi Kurikulum Merdeka.....	199
B. Pendidikan Digital dan AI.....	201
C. Strategi Resiliensi Sekolah di Masa Krisis .....	204
D. Pendidikan Kreatif-Inovatif untuk Era Industri 4.0/5.0 .....	206
E. Studi Kasus: Sekolah Berdaya Tahan.....	209

## **BAGIAN V**

STRATEGI IMPLEMENTASI.....	213
----------------------------	-----

## **BAB 13**

STRATEGI DI LEVEL MIKRO (GURU & MURID) .....	215
A. Pedagogi Empati & Pembelajaran Berbasis Asah.....	217
B. OCB Guru sebagai Katalis Transformasi.....	219
C. Inovasi Metode Mengajar .....	221
D. Manajemen Kelas Humanistik & Adaptif.....	224
E. Praktik Baik di Sekolah Dasar, Menengah, Vokasi.....	226

## **BAB 14**

STRATEGI DI LEVEL MESO (SEKOLAH & KOMUNITAS) .....	231
A. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).....	233
B. Rapor Pendidikan sebagai Instrumen Transformasi.....	235

C. Kolaborasi Sekolah–Industri–Komunitas .....	238
D. Program Pancawaluya SMK & Implementasi Nyata.....	240
E. Studi Kasus Komunitas Pendidikan Lokal .....	243

## **BAB 15**

<b>STRATEGI DI LEVEL MAKRO (KEBIJAKAN &amp; NASIONAL) .....</b>	<b>247</b>
A. Kebijakan Pendidikan Nasional & Global Alignment .....	249
B. Agenda UNESCO, OECD, dan Praktik Internasional .....	251
C. Roadmap Pendidikan Indonesia Emas 2045.....	254
D. Reformasi Kurikulum Nasional .....	256
E. Politik Pendidikan di Era VUCA.....	258

## **BAGIAN VI**

<b>STUDI KASUS &amp; BEST PRACTICES .....</b>	<b>263</b>
---	------------

## **BAB 16**

<b>PRAKTIK SEKOLAH UNGGUL DI INDONESIA .....</b>	<b>265</b>
A. SMK dengan Pancawaluya.....	267
B. PTS Resilien dan Berdaya Saing .....	269
C. Sekolah Berbasis Komunitas Adat.....	272
D. Pesantren Modern dan Tradisional .....	274
E. Studi Kasus Sekolah Digital.....	276

## **BAB 17**

<b>BEST PRACTICES GLOBAL .....</b>	<b>281</b>
A. Finlandia: Personalized Learning .....	282
B. Jepang: Society 5.0 Education .....	285
C. Rwanda: Pendidikan Pascakonflik & Toleransi .....	287

D. Singapura: STEM & Innovation.....	290
E. OECD Countries: Evidence-Based Education.....	292

## **BAGIAN VII**

ROADMAP & REKOMENDASI.....	297
----------------------------	-----

## **BAB 18**

ROADMAP PENDIDIKAN NUSANTARA 2045.....	299
A. Peta Jalan Integrasi Kearifan Lokal–Global.....	301
B. Indikator Transformasi Pendidikan .....	303
C. Roadmap Sekolah Digital Humanistik .....	305
D. Roadmap Pendidikan Vokasi dan Industri 5.0 .....	308
E. Pendidikan sebagai Pilar SDGs 2045 .....	310
Epilog .....	313
Glosarium.....	319
Daftar Pustaka.....	325
Biografi Penulis.....	335



# BAGIAN I

## FONDASI FILOSOFIS DAN KONSEPTUAL







# BAB 1

## EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN DI ERA VUCA

Pendidikan selalu lahir dalam konteks zaman. Setiap periode sejarah membawa paradigma baru yang mengubah cara manusia memahami, merancang, dan mengimplementasikan pendidikan. Abad ke-21 menghadirkan era yang dikenal dengan istilah *VUCA* (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*), sebuah akronim yang mula-mula digunakan militer Amerika Serikat pada akhir abad ke-20, lalu diadopsi oleh dunia bisnis, pemerintahan, dan kini juga pendidikan. Bab ini akan menguraikan epistemologi pendidikan di era *VUCA* dengan pendekatan konseptual dan empiris. Melalui kajian teori, data penelitian, serta analisis laporan lembaga internasional, bab ini bertujuan menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana pendidikan dapat tetap relevan, tangguh, dan humanis di tengah dunia yang penuh gejolak?

Epistemologi pendidikan di era *VUCA* berangkat dari kesadaran bahwa pengetahuan tidak lagi bersifat stabil dan absolut. Jika pada abad modern pengetahuan dipandang sebagai bangunan linear yang kokoh, kini pengetahuan bersifat cair, fragmentaris, dan terus berubah. Hal ini menuntut

pendidikan untuk meninggalkan paradigma transfer of knowledge menuju paradigma *co-creation of knowledge*, di mana guru dan siswa bersama-sama membangun makna. UNESCO (2023) dalam laporannya menekankan bahwa kompetensi abad 21 tidak cukup hanya berbasis konten, tetapi harus berorientasi pada proses belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*).

Fenomena *volatility* (gejolak perubahan) dapat dilihat dari revolusi teknologi yang sangat cepat. Data OECD (2024) menunjukkan bahwa dalam kurun lima tahun terakhir, 67% keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja telah berubah signifikan, terutama akibat otomatisasi dan kecerdasan buatan. Hal ini berdampak pada dunia pendidikan, di mana kurikulum tidak boleh kaku, melainkan harus fleksibel dan adaptif. Di Indonesia, implementasi Kurikulum Merdeka adalah jawaban strategis untuk merespons volatilitas ini, dengan memberikan ruang bagi sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai konteks lokal.

Unsur *uncertainty* (ketidakpastian) tampak jelas dalam peristiwa global seperti pandemi COVID-19. Laporan Kemendikbudristek (2022) tentang *Learning Loss* memperkirakan bahwa murid Indonesia mengalami kehilangan capaian belajar setara 6 bulan hingga 1 tahun akibat pembelajaran daring yang tidak merata. Ketidakpastian ini menuntut pendidikan untuk memiliki daya lenting (*resilience*) yang kuat. Konsep resilience dalam pendidikan telah banyak diteliti, salah satunya oleh Ungar (2022) yang menekankan pentingnya sekolah sebagai ekosistem yang mendukung kesehatan mental, rasa aman, dan fleksibilitas pedagogis.

Kompleksitas (*complexity*) dalam pendidikan era VUCA muncul dari tumpang tindih faktor sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Pendidikan tidak bisa lagi dilihat hanya sebagai urusan sekolah dan guru, melainkan terkait erat dengan industri, pemerintah, keluarga, dan komunitas global. Sebuah riset yang dilakukan oleh World Bank (2023) menyoroti bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan reformasi pendidikan, terutama di negara berkembang. Indonesia pun mengembangkan skema *link and match* SMK–industri untuk mengurangi kesenjangan keterampilan.

Ambiguitas (*ambiguity*) menantang pendidikan untuk menghadapi situasi yang tidak memiliki jawaban tunggal. Contoh nyata adalah debat seputar penggunaan AI dalam pembelajaran. Sebagian kalangan melihat AI sebagai ancaman yang dapat menggantikan peran guru, sementara

riset dari Stanford University (2024) menunjukkan bahwa penggunaan AI justru dapat meningkatkan personalisasi pembelajaran dan memperluas akses pengetahuan. Ambiguitas ini harus dihadapi dengan pendekatan epistemologi kritis, di mana pendidikan mengajarkan siswa untuk memilah informasi, berpikir reflektif, dan berani mengambil keputusan di tengah ketidakjelasan.

Epistemologi pendidikan di era VUCA juga dipengaruhi oleh paradigma *postmodern* dan *critical pedagogy*. Paulo Freire melalui *Pedagogy of the Oppressed* menegaskan bahwa pendidikan harus membebaskan, bukan menindas. Di era penuh ambiguitas, pendidikan perlu menumbuhkan kesadaran kritis (*critical consciousness*) agar generasi muda mampu membaca realitas sosial yang kompleks. Hal ini sejalan dengan data survei PISA (OECD, 2022) yang menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD, sehingga perlu penguatan.

Konsep *agility* (*kelincahan*) menjadi kata kunci dalam epistemologi pendidikan kontemporer. Riset Harvard Business Review (2023) tentang kepemimpinan pendidikan menekankan pentingnya *learning agility* pada guru dan kepala sekolah, yakni kemampuan untuk belajar, melupakan yang usang, dan mencipta ulang pendekatan baru. Guru yang agile adalah mereka yang tidak terpaku pada satu metode, tetapi mampu memadukan pendekatan tradisional dengan teknologi digital sesuai kebutuhan siswa.

Di tingkat nasional, *Rapor Pendidikan Indonesia* (Kemendikbudristek, 2023) menunjukkan adanya kesenjangan besar antara sekolah perkotaan dan pedesaan dalam hal literasi dan numerasi. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi pendidikan tidak bisa hanya dibangun di atas teori, tetapi harus merespons kondisi riil lapangan. VUCA di Indonesia tidak hanya berupa ketidakpastian global, tetapi juga ketimpangan domestik yang menuntut strategi pendidikan yang inklusif.

Dari perspektif filsafat, epistemologi pendidikan di era VUCA dapat dipandang melalui kerangka *pragmatism* John Dewey, yang menekankan bahwa pengetahuan lahir dari pengalaman nyata dan digunakan untuk memecahkan masalah. Dalam konteks VUCA, pengalaman menjadi sumber belajar utama, di mana siswa tidak hanya menghafal, tetapi mengalami,

menguji, dan merefleksikan. Hal ini memperkuat model *experiential learning* yang kini banyak diadopsi dalam pendidikan abad 21.

Selain itu, teori *complex adaptive systems* (CAS) dari Morin (2021) menegaskan bahwa pendidikan adalah sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Sekolah bukanlah ruang tertutup, melainkan organisme hidup yang harus beradaptasi dengan perubahan. Pandangan ini membantu menjelaskan mengapa inovasi pendidikan harus kontekstual, bukan sekadar menyalin dari negara lain. Inilah mengapa falsafah lokal seperti *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh* tetap relevan di tengah globalisasi.

Penelitian empiris juga mendukung pentingnya literasi digital sebagai bagian dari epistemologi baru. Sebuah studi UNESCO (2022) menemukan bahwa negara-negara yang menempatkan literasi digital sebagai prioritas berhasil mengurangi kesenjangan pendidikan selama pandemi. Indonesia pun melalui program *Merdeka Belajar* mencoba menanamkan literasi digital sebagai kompetensi dasar guru dan siswa, meskipun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur di daerah 3T.

Epistemologi pendidikan di era VUCA juga harus memperhatikan aspek spiritualitas. Dalam tradisi Islam, pencarian ilmu dipandang sebagai ibadah dan jalan menuju kebijaksanaan. Ayat Al-Qur'an menegaskan, "*Katakanlah: Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?*" (QS. Az-Zumar: 9). Perspektif ini penting agar pendidikan tidak terjebak pada utilitarianisme semata, tetapi tetap berakar pada makna eksistensial manusia.

Keterlibatan komunitas menjadi faktor penting dalam merumuskan epistemologi pendidikan kontemporer. Studi kasus di Finlandia (OECD, 2023) menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi pendidikan di sana didorong oleh partisipasi luas komunitas, guru, orang tua, dan pemerintah daerah. Hal ini mengajarkan bahwa menghadapi VUCA memerlukan epistemologi kolaboratif, bukan sentralistik.

Di Indonesia, nilai gotong royong yang melekat pada masyarakat bisa menjadi epistemologi alternatif untuk menghadapi kompleksitas. Gotong royong bukan hanya praktik sosial, tetapi epistemologi kebersamaan yang mengajarkan bahwa pengetahuan dibangun secara kolektif. Hal ini dapat

menjadi penguat Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh sebagai fondasi pendidikan Nusantara.

Akhirnya, epistemologi pendidikan di era VUCA adalah epistemologi yang adaptif, kolaboratif, dan humanis. Ia menggabungkan teori global dengan kearifan lokal, data empiris dengan refleksi filosofis, serta inovasi teknologi dengan nilai spiritual. Pendidikan harus dipandang bukan sekadar sarana adaptasi, melainkan kekuatan transformatif yang menuntun manusia menuju masa depan yang penuh tantangan namun juga sarat peluang.

## A. Definisi, Sejarah, dan Evolusi Konsep VUCA

Konsep *VUCA* pertama kali muncul dari lingkungan militer Amerika Serikat pada akhir era Perang Dingin. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan dunia pasca runtuhnya blok Soviet, di mana tatanan internasional tidak lagi terpolarisasi secara sederhana, melainkan dipenuhi ketidakpastian dan gejolak. Seiring waktu, istilah ini diadopsi oleh dunia bisnis, kepemimpinan, dan akhirnya masuk ke ranah pendidikan. Subbab ini akan menelusuri definisi, sejarah, serta evolusi konsep *VUCA*, sekaligus menegaskan relevansinya dalam merumuskan epistemologi pendidikan di abad ke-21.

*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity* (*VUCA*) adalah sebuah kerangka konseptual untuk memahami tantangan global. **Volatility** merujuk pada perubahan yang cepat dan tidak stabil; **Uncertainty** pada ketidakpastian informasi dan hasil; **Complexity** pada banyaknya faktor yang saling berhubungan; dan **Ambiguity** pada kondisi di mana suatu fenomena tidak memiliki tafsir tunggal. Definisi ini banyak digunakan dalam literatur manajemen, kepemimpinan, dan kini juga dalam literatur pendidikan.

Sejarah konsep *VUCA* berawal dari *U.S. Army War College* di awal 1990-an, yang menggunakannya untuk mendeskripsikan dinamika geopolitik setelah berakhirnya Perang Dingin. Dunia tidak lagi bisa dijelaskan hanya dengan kategori “musuh” dan “sekutu”, melainkan penuh ketidakpastian dan perubahan yang cepat. Sejak saat itu, *VUCA* menjadi kerangka populer untuk menjelaskan lingkungan eksternal yang tidak dapat diprediksi.

Pada dekade 2000-an, istilah VUCA mulai merambah dunia bisnis. Bennis dan Nanus (2005) dalam teori kepemimpinan menekankan bahwa organisasi modern membutuhkan pemimpin yang mampu membaca tanda-tanda perubahan, merespons dengan cepat, dan tetap memelihara nilai inti. Pandangan ini memperluas makna VUCA dari sekadar analisis militer menjadi kerangka kerja kepemimpinan strategis.

Dalam dunia pendidikan, adopsi istilah VUCA semakin terasa pada dekade 2010-an. Globalisasi, migrasi, revolusi teknologi, dan perubahan iklim menjadi faktor eksternal yang memengaruhi sistem pendidikan. Menurut laporan OECD (2018), sekolah-sekolah di dunia menghadapi tekanan untuk menyiapkan generasi yang mampu bertahan dalam lingkungan kerja dan kehidupan yang tidak pasti. Di sinilah konsep VUCA diintegrasikan ke dalam diskursus pendidikan.

Perubahan istilah dari militer ke pendidikan menunjukkan adanya **pergeseran epistemologi**: dari dunia yang dianggap bisa diprediksi dengan strategi perang, menuju dunia pendidikan yang lebih cair, adaptif, dan penuh kolaborasi. VUCA dalam pendidikan bukan hanya ancaman, tetapi juga peluang untuk memperkuat daya lenting generasi muda. Dengan demikian, konsep VUCA terus berevolusi sebagai instrumen refleksi sekaligus perencanaan.

Data empiris mendukung relevansi konsep VUCA bagi pendidikan. Misalnya, laporan *World Economic Forum* (2023) mencatat bahwa 65% anak yang memasuki sekolah dasar hari ini akan bekerja pada profesi yang belum ada saat ini. Fakta ini menegaskan unsur *uncertainty* dalam pendidikan: guru tidak mungkin hanya mengajarkan keterampilan spesifik yang ada sekarang, melainkan harus melatih siswa agar mampu belajar sepanjang hayat.

*Volatility* tampak pada revolusi industri 4.0 dan 5.0. Data Kementerian Perindustrian RI (2024) memperkirakan bahwa otomasi dan digitalisasi dapat menggantikan 23% jenis pekerjaan tradisional dalam 10 tahun ke depan. Pendidikan pun harus merespons dengan kurikulum adaptif yang menekankan kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Jika tidak, lulusan sekolah akan mengalami *skill mismatch* dengan kebutuhan dunia kerja.

*Complexity* tampak pada interkoneksi global. Krisis ekonomi di satu negara dapat berdampak pada pendidikan di negara lain, seperti saat pandemi COVID-19. Laporan UNESCO (2022) menunjukkan bahwa lebih dari 1,6 miliar siswa di seluruh dunia terdampak penutupan sekolah. Kompleksitas ini mengajarkan bahwa pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terhubung dengan kebijakan kesehatan, sosial, dan teknologi.

Sementara itu, *ambiguity* hadir dalam bentuk multiinterpretasi fenomena. Misalnya, penggunaan AI dalam pendidikan. Sebagian penelitian, seperti yang dilakukan oleh Stanford Graduate School of Education (2024), menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran personal. Namun, laporan UNESCO (2023) memperingatkan adanya risiko etika, privasi, dan bias algoritmik. Ambiguitas ini menuntut siswa dan guru mengembangkan literasi kritis.

Dalam sejarah perkembangannya, konsep VUCA juga mendapat pengembangan menjadi VUCA Prime oleh Bob Johansen (2017). Ia menawarkan alternatif: **Vision** menggantikan *Volatility*, **Understanding** menggantikan *Uncertainty*, **Clarity** menggantikan *Complexity*, dan **Agility** menggantikan *Ambiguity*. Transformasi ini menunjukkan evolusi konsep VUCA dari sekadar diagnosis masalah menjadi strategi solusi. Pendidikan di era ini dituntut tidak hanya mengenali tantangan, tetapi juga melatih kemampuan visioner, pemahaman, kejernihan analisis, dan kelincahan.

Di Indonesia, kesadaran akan VUCA mulai menguat dalam wacana pendidikan setelah pandemi COVID-19. *Rapor Pendidikan Indonesia* (Kemendikbudristek, 2023) mencatat adanya kesenjangan literasi dan numerasi yang signifikan pasca pembelajaran jarak jauh. Hal ini menegaskan perlunya sistem pendidikan yang resilien. Kementerian pun meluncurkan berbagai kebijakan adaptif seperti Kurikulum Merdeka, Platform Merdeka Mengajar, dan program digitalisasi sekolah.

Secara filosofis, VUCA mengingatkan bahwa pengetahuan tidak bisa lagi dipandang absolut. Epistemologi klasik yang menekankan kepastian sudah tidak memadai. Kini, epistemologi pendidikan harus menekankan pada pengetahuan sebagai proses dialogis, kolaboratif, dan kontekstual. Ini sejalan dengan pandangan filsuf postmodern seperti Jean-François Lyotard (1984) yang menyebut bahwa era modern ditandai dengan runtuhnya *grand*

*narratives*. Pendidikan harus melatih siswa untuk menghadapi pluralitas narasi.

Riset di Asia Tenggara juga menunjukkan relevansi konsep VUCA. Penelitian oleh Lee & Tan (2023) di Singapura menegaskan bahwa sistem pendidikan yang fleksibel lebih mampu melahirkan siswa yang resilien menghadapi ketidakpastian. Studi serupa di Indonesia (Santosa & Widodo, 2024) menyoroti peran kepemimpinan sekolah visioner dalam menjaga stabilitas pembelajaran di tengah krisis. Data ini menunjukkan bahwa evolusi VUCA kini bukan hanya istilah teoretis, tetapi sudah nyata di lapangan.

Jika ditarik ke dimensi spiritual, konsep VUCA mengingatkan manusia bahwa hanya Allah yang Maha Mengetahui kepastian. Al-Qur'an menegaskan, "*Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok.*" (QS. Luqmān: 34). Perspektif ini menempatkan pendidikan dalam kerendahan hati epistemologis: guru dan siswa harus senantiasa terbuka terhadap perubahan, namun tetap berpegang pada nilai moral yang kokoh.

Dengan demikian, sejarah dan evolusi VUCA menunjukkan bahwa pendidikan harus meninggalkan pola pikir kaku menuju pola pikir fleksibel, kreatif, dan kolaboratif. Dari akar militer, bisnis, hingga pendidikan, VUCA telah berevolusi menjadi kerangka reflektif sekaligus strategis. Pendidikan Indonesia dapat memanfaatkan konsep ini untuk menata kurikulum, pedagogi, dan kepemimpinan yang relevan dengan tantangan global sekaligus berpijak pada kearifan lokal.

## **B. Dampak VUCA pada Sistem Sosial dan Pendidikan**

Konsep VUCA tidak hanya menjadi kerangka analisis global, tetapi telah menimbulkan dampak nyata pada kehidupan sosial dan sistem pendidikan. Volatilitas mempercepat perubahan sosial-budaya, ketidakpastian menimbulkan keresahan psikologis, kompleksitas memicu kesenjangan kebijakan, dan ambiguitas melahirkan interpretasi ganda terhadap nilai dan tujuan pendidikan. Subbab ini menguraikan dampak VUCA terhadap sistem sosial dan pendidikan, dengan menelaah teori, penelitian, serta data dari berbagai lembaga internasional dan nasional.

Fenomena *volatility* memengaruhi dunia kerja dan sosial. Laporan *World Economic Forum* (2023) memperkirakan 83 juta pekerjaan akan hilang akibat otomasi dalam lima tahun ke depan, sementara 69 juta pekerjaan baru muncul di sektor teknologi hijau dan digital. Perubahan ini membuat pendidikan harus bergerak cepat, menyiapkan keterampilan baru yang sering kali berbeda dari keterampilan konvensional. Di Indonesia, *Rapor Pendidikan 2023* menunjukkan rendahnya kesiapan numerasi dan literasi digital siswa, padahal keduanya krusial untuk menghadapi pasar kerja yang fluktuatif.

Dampak *uncertainty* tampak jelas dalam pandemi COVID-19. Data UNESCO (2022) menunjukkan lebih dari 1,6 miliar pelajar di dunia terdampak penutupan sekolah. Di Indonesia, survei Kemendikbudristek (2022) mencatat 87% guru mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring akibat keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Ketidakpastian ini memaksa pendidikan untuk membangun sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, termasuk pengembangan *blended learning* dan pemanfaatan platform digital seperti *Merdeka Mengajar*.

Kompleksitas (*complexity*) tercermin dari hubungan erat antara pendidikan dan faktor sosial-ekonomi. OECD (2023) menegaskan bahwa pencapaian pendidikan tidak bisa dilepaskan dari konteks keluarga, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan sosial. Di Indonesia, data BPS (2023) memperlihatkan korelasi positif antara tingkat pendidikan orang tua dan capaian literasi anak. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan harus dipahami sebagai sistem yang saling terkait dengan sektor lain, bukan institusi yang berdiri sendiri.

Ambiguitas (*ambiguity*) muncul ketika pendidikan harus menafsirkan fenomena baru. Misalnya, penggunaan AI dalam asesmen. Sebagian penelitian (Stanford University, 2024) menunjukkan AI dapat membantu personalisasi asesmen, tetapi UNESCO (2023) memperingatkan risiko bias algoritmik dan pelanggaran privasi siswa. Ambiguitas ini menciptakan dilema etis: apakah teknologi seharusnya diintegrasikan penuh atau dibatasi? Sekolah dituntut memiliki kebijakan etis yang jelas dalam pemanfaatan teknologi.

VUCA juga berdampak pada psikologi sosial masyarakat. Penelitian oleh American Psychological Association (2022) menunjukkan meningkatnya

kecemasan dan stres pada generasi muda akibat ketidakpastian masa depan. Di Indonesia, riset Universitas Indonesia (2023) mengungkapkan bahwa 27% siswa SMA mengalami gangguan kesehatan mental ringan hingga sedang. Pendidikan tidak lagi cukup mengajarkan ilmu kognitif, tetapi juga harus menanamkan *resilience* dan *well-being*.

Dalam ranah kebijakan, VUCA memaksa pemerintah untuk berpikir adaptif. World Bank (2023) menegaskan pentingnya kebijakan pendidikan yang dinamis agar tetap relevan dengan perubahan global. Pemerintah Indonesia menjawabnya melalui kebijakan *Kurikulum Merdeka* yang memberi fleksibilitas lebih besar pada sekolah dan guru. Namun, fleksibilitas ini masih menghadapi tantangan kesenjangan antar daerah, terutama di wilayah 3T.

Secara sosial, VUCA memperbesar kesenjangan digital. UNICEF (2022) mencatat 47% siswa di Indonesia tidak memiliki akses internet stabil selama pandemi. Hal ini memperdalam jurang antara siswa perkotaan dan pedesaan. Kompleksitas masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan tunggal; perlu kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal.

VUCA juga memperkuat urgensi pendidikan karakter. Riset oleh Lickona (2021) menegaskan bahwa di tengah dunia yang tidak pasti, pendidikan karakter menjadi jangkar moral. Nilai seperti integritas, empati, dan tanggung jawab menjadi bekal penting bagi generasi muda. Di Indonesia, integrasi pendidikan karakter dalam *Kurikulum Merdeka* adalah langkah penting, meski implementasinya masih bervariasi antar sekolah.

Dari perspektif manajemen pendidikan, VUCA menuntut *agile leadership*. Penelitian Harvard Business Review (2023) menunjukkan bahwa sekolah dengan kepala sekolah yang memiliki *learning agility* lebih mampu menghadapi krisis. Di Indonesia, studi Santosa & Widodo (2024) menemukan bahwa kepemimpinan visioner di sekolah menengah membantu menjaga kelangsungan pembelajaran meskipun sarana terbatas.

VUCA juga mengubah relasi guru-murid. Guru tidak lagi hanya menjadi pemberi pengetahuan, melainkan fasilitator yang membimbing murid menghadapi ketidakpastian. UNESCO (2023) menekankan bahwa kompetensi guru di abad 21 meliputi kemampuan pedagogis, digital,

sekaligus empati. Hal ini sejalan dengan filosofi *Silih Asih, Asih, Asuh*, di mana guru menuntun dengan kasih, mengasah kemampuan, dan mengasuh tanggung jawab sosial.

Dampak sosial VUCA terlihat pula pada meningkatnya kesadaran akan literasi global. OECD (2023) mencatat bahwa pendidikan multikultural dan *global citizenship* semakin penting untuk mengelola keragaman dan konflik. Di Indonesia, program *Profil Pelajar Pancasila* dirancang untuk menanamkan nilai gotong royong, kebinekaan, dan keberlanjutan, yang menjadi jawaban lokal terhadap tantangan global.

Ambiguitas sosial juga menciptakan ruang bagi lahirnya hoaks dan disinformasi. Riset Kominfo (2023) menyebutkan 60% remaja Indonesia pernah terpapar berita palsu melalui media sosial. Pendidikan harus mengambil peran penting dalam menumbuhkan literasi informasi dan berpikir kritis, agar generasi muda tidak mudah terombang-ambing oleh arus informasi yang membingungkan.

VUCA berdampak pada hubungan antarbangsa melalui mobilitas global. UNESCO (2022) mencatat lebih dari 6 juta mahasiswa belajar di luar negeri. Globalisasi pendidikan ini membawa peluang kolaborasi, tetapi juga menimbulkan tantangan identitas budaya. Indonesia perlu memadukan kearifan lokal seperti *Silih Asih, Asah, Asuh* dengan standar global agar tidak tercerabut dari akar.

Pada akhirnya, dampak VUCA terhadap sistem sosial dan pendidikan menegaskan perlunya epistemologi baru: pendidikan yang adaptif, resilien, dan humanis. Pendidikan harus mampu menjadi ruang aman yang menyiapkan murid menghadapi dunia yang penuh perubahan tanpa kehilangan arah moral. Di sinilah peran falsafah lokal dan pilar UNESCO menjadi penyeimbang antara inovasi global dan nilai kemanusiaan.

### C. Filosofi Adaptasi, Resiliensi, dan Agility

Di era VUCA, pendidikan tidak cukup hanya memahami perubahan, tetapi juga harus mengembangkan filosofi baru: adaptasi yang berkelanjutan, resiliensi dalam menghadapi guncangan, dan kelincahan (*agility*) untuk mencipta ulang strategi di tengah ketidakpastian. Ketiga konsep

ini—adaptasi, resiliensi, dan agility—bukan sekadar jargon manajerial, melainkan paradigma filosofis yang harus menjiwai sistem pendidikan dari level individu hingga kebijakan nasional.

Adaptasi dalam pendidikan merujuk pada kemampuan sistem, sekolah, guru, dan siswa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Menurut teori evolusi Charles Darwin, yang bertahan bukanlah yang terkuat, tetapi yang paling mampu beradaptasi. Prinsip ini sangat relevan bagi pendidikan modern. Riset OECD (2022) menegaskan bahwa kurikulum yang lentur dan memberi ruang bagi inovasi sekolah lebih berhasil dalam menjaga kualitas pembelajaran di masa krisis.

Resiliensi adalah daya lenting yang memungkinkan individu dan institusi bangkit setelah menghadapi kesulitan. Ungar (2022) dalam kajiannya tentang *resilient schools* menunjukkan bahwa sekolah yang resilien memiliki tiga ciri utama: kepemimpinan visioner, dukungan komunitas, dan kesejahteraan guru. Di Indonesia, data Kemendikbudristek (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang aktif menjalin kolaborasi dengan orang tua lebih mampu mempertahankan capaian literasi dan numerasi pasca pandemi.

Agility atau kelincahan belajar adalah kemampuan untuk bergerak cepat, mengubah strategi, dan mengambil keputusan baru. Bob Johansen (2017) mengusulkan konsep *VUCA Prime* di mana *Agility* menjadi jawaban atas ambiguitas. Pendidikan yang agile tidak hanya merespons perubahan, tetapi juga mengantisipasi, bahkan mencipta peluang baru. Di tingkat guru, ini berarti kemampuan untuk memadukan metode konvensional dengan teknologi digital tanpa kehilangan sentuhan humanis.

Filosofi adaptasi dalam pendidikan dapat dilihat dari Kurikulum Merdeka. Kebijakan ini memberi keleluasaan pada sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal. Laporan *Rapor Pendidikan* (2023) menunjukkan adanya peningkatan kepuasan guru terhadap kebebasan merancang pembelajaran, meskipun tantangan implementasi masih ada terutama di daerah yang minim sumber daya. Adaptasi kurikulum menjadi bukti bahwa sistem pendidikan bergerak menuju paradigma fleksibel.

Resiliensi pendidikan juga terkait erat dengan kesehatan mental. Data UNICEF (2022) mencatat bahwa 1 dari 7 remaja di dunia mengalami gangguan kesehatan mental, diperparah oleh ketidakpastian pandemi.

Pendidikan yang resilien tidak hanya mengutamakan akademik, tetapi juga menyediakan dukungan psikososial bagi murid. Program *Sekolah Sehat* yang digulirkan Kemendikbudristek bersama Kemenkes (2023) adalah contoh nyata penguatan resiliensi melalui pendekatan holistik.

Agility dalam konteks pendidikan tinggi terlihat dari kemampuan perguruan tinggi beralih ke sistem hybrid learning. Laporan World Bank (2023) mencatat bahwa universitas di Asia Tenggara yang cepat mengintegrasikan *learning management system* (LMS) berhasil mempertahankan partisipasi mahasiswa selama pandemi. Sebaliknya, universitas yang lambat beradaptasi mengalami penurunan signifikan dalam capaian pembelajaran.

Adaptasi juga mengandung dimensi pedagogis. Guru yang adaptif mampu mengubah strategi pembelajaran berdasarkan kondisi kelas. Penelitian Hattie (2021) menegaskan bahwa guru yang responsif terhadap kebutuhan siswa berkontribusi besar pada peningkatan hasil belajar. Di Indonesia, praktik *differentiated learning* dalam Kurikulum Merdeka adalah wujud filosofi adaptasi pedagogis.

Resiliensi memiliki akar filosofis dalam budaya Nusantara. Konsep *gotong royong* dan falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh* mencerminkan daya lenting sosial: ketika menghadapi kesulitan, masyarakat saling menopang. Integrasi nilai lokal ini dalam pendidikan menjadikan resiliensi bukan hanya strategi teknis, melainkan bagian dari identitas budaya bangsa.

Agility juga menuntut keterampilan digital. Laporan UNESCO (2023) menekankan pentingnya *digital agility* di kalangan guru. Guru yang luwes memanfaatkan aplikasi digital lebih mampu menciptakan pembelajaran interaktif. Di Indonesia, Platform Merdeka Mengajar adalah upaya sistemik untuk melatih guru menjadi lebih lincah dalam mengakses sumber daya digital.

Adaptasi, resiliensi, dan agility tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi. Adaptasi memberi arah, resiliensi memberi kekuatan bertahan, dan agility memberi kelincahan bergerak. Ketiganya membentuk kerangka filosofis pendidikan di era VUCA. Tanpa adaptasi, pendidikan kaku; tanpa resiliensi, pendidikan rapuh; tanpa agility, pendidikan lamban.

Dampak filosofi ini juga terlihat dalam manajemen sekolah. Studi Harvard Business Review (2023) menyatakan bahwa sekolah yang agile

mampu melakukan *rapid decision-making* saat krisis. Misalnya, sekolah yang cepat mengalihkan dana BOS untuk mendukung pembelajaran daring lebih berhasil mempertahankan kualitas dibanding sekolah yang menunggu instruksi pusat. Ini menunjukkan bahwa agility manajerial adalah kunci di era ketidakpastian.

Filosofi resiliensi juga terkait erat dengan keadilan pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin lebih rentan kehilangan capaian belajar dalam krisis. Laporan BPS (2023) menunjukkan bahwa siswa di kuintil terbawah pendapatan kehilangan rata-rata 9 bulan capaian literasi, dibandingkan 3 bulan di kuintil teratas. Pendidikan yang resilien harus memberi perhatian lebih pada kelompok rentan agar kesenjangan tidak semakin melebar.

Adaptasi sistemik juga diperlukan pada kebijakan nasional. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang fleksibel agar mampu merespons situasi darurat. Contoh nyata adalah kebijakan *Assessment Nasional* yang menyesuaikan metode pengukuran capaian belajar dari sekadar ujian kognitif menuju asesmen formatif dan diagnostik. Ini adalah bentuk adaptasi epistemologis dalam mengukur kualitas pendidikan.

Agility di level siswa dapat diwujudkan melalui *project-based learning*. Model ini melatih siswa untuk bekerja dalam tim, menghadapi masalah nyata, dan menemukan solusi kreatif. Penelitian Thomas (2022) menunjukkan bahwa PBL meningkatkan keterampilan problem solving hingga 30% dibanding pembelajaran tradisional. Di Indonesia, program SMK Pusat Keunggulan adalah contoh penerapan PBL untuk menyiapkan lulusan yang agile.

Filosofi adaptasi, resiliensi, dan agility pada akhirnya menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang menciptakan masa depan. Dalam pandangan Paulo Freire, pendidikan adalah praktik kebebasan. Adaptasi membebaskan dari kekakuan, resiliensi membebaskan dari keputusasaan, dan agility membebaskan dari kelambanan. Dengan menginternalisasi filosofi ini, pendidikan Indonesia dapat menjadi jangkar yang kokoh sekaligus layar yang lentur di tengah gelombang VUCA.

## D. Pendidikan sebagai Sistem Terbuka di Era Ketidakpastian

Dalam filsafat sistem, setiap organisasi dapat dipandang sebagai sistem yang berinteraksi dengan lingkungannya. Pendidikan pun bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan sistem terbuka yang dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, ekonomi, teknologi, budaya, hingga ekologi. Di era VUCA, paradigma pendidikan sebagai sistem terbuka semakin relevan karena perubahan global yang tak terduga menuntut respons adaptif. Subbab ini akan membahas bagaimana pendidikan sebagai sistem terbuka beroperasi di tengah ketidakpastian, dengan memadukan teori, penelitian, serta bukti empiris dari berbagai negara dan lembaga internasional.

Teori sistem terbuka dikemukakan oleh Ludwig von Bertalanffy (1968) yang menegaskan bahwa organisasi hidup bergantung pada interaksi dengan lingkungannya. Pendidikan sebagai sistem terbuka menyerap input (murid, kurikulum, sumber daya), memprosesnya melalui interaksi belajar, lalu menghasilkan output berupa lulusan dan dampak sosial. Dalam konteks VUCA, lingkungan eksternal yang fluktuatif membuat pendidikan harus menyesuaikan input, proses, dan outputnya secara dinamis.

Data UNESCO (2023) menunjukkan bahwa negara yang memperlakukan pendidikan sebagai sistem terbuka lebih berhasil dalam menjaga keberlanjutan selama pandemi COVID-19. Misalnya, Finlandia dan Korea Selatan dengan cepat mengintegrasikan dukungan komunitas, industri, dan teknologi sehingga pembelajaran tetap berjalan meskipun sekolah fisik ditutup. Sebaliknya, negara yang memandang pendidikan sebagai sistem tertutup mengalami kelumpuhan lebih lama.

Di Indonesia, prinsip pendidikan sebagai sistem terbuka tercermin dalam kebijakan *Merdeka Belajar*. Kurikulum tidak lagi dikontrol sepenuhnya dari pusat, tetapi memberi ruang adaptasi lokal. Hal ini sesuai dengan laporan *Rapor Pendidikan (2023)* yang menyebutkan bahwa sekolah dengan jejaring komunitas lebih cepat pulih dari *learning loss* dibanding sekolah yang bekerja sendiri. Ini bukti empiris bahwa interaksi dengan lingkungan memperkuat ketahanan sistem pendidikan.

Sistem terbuka juga menuntut keterhubungan dengan sektor lain. World Bank (2022) menegaskan bahwa keberhasilan reformasi pendidikan

sangat dipengaruhi oleh kolaborasi lintas sektor—kesehatan, ekonomi, teknologi, dan sosial. Di era VUCA, pendidikan tidak mungkin berdiri tanpa dukungan ekosistem luas. Contoh nyata adalah program *SMK Pusat Keunggulan* yang mengintegrasikan industri sebagai mitra pembelajaran.

Konsep *feedback loop* menjadi kunci dalam sistem terbuka. Pendidikan perlu terus-menerus mengevaluasi outputnya (hasil belajar siswa) dan menggunakannya sebagai masukan untuk memperbaiki proses. Assessment Nasional (AN) yang menggantikan Ujian Nasional di Indonesia adalah bentuk mekanisme *feedback loop* modern. Dengan AN, pemerintah memperoleh data riil literasi, numerasi, dan karakter siswa untuk memperbaiki kebijakan.

Keterbukaan sistem pendidikan juga terlihat dalam dimensi globalisasi. OECD (2023) mencatat bahwa arus mobilitas mahasiswa internasional mencapai lebih dari 6 juta orang. Pendidikan tidak bisa menutup diri dari pengaruh global. Namun, keterbukaan ini menuntut keseimbangan agar identitas lokal tidak hilang. Di sinilah kearifan lokal seperti *Silih Asih, Asah, Asuh* berfungsi sebagai jangkar budaya di tengah keterbukaan global.

VUCA mendorong sistem pendidikan untuk menumbuhkan fleksibilitas organisasi. Penelitian Harvard Business Review (2023) menunjukkan bahwa organisasi pendidikan yang adaptif mampu mengalokasikan sumber daya secara cepat sesuai kebutuhan. Misalnya, saat pandemi, banyak sekolah yang mengalihkan anggaran kegiatan fisik menjadi dukungan kuota internet dan pelatihan guru daring. Fleksibilitas ini hanya mungkin terjadi dalam sistem terbuka.

Dari perspektif psikologi sosial, sistem terbuka menumbuhkan rasa kepemilikan (*ownership*) di kalangan komunitas. Studi Ungar (2022) menemukan bahwa sekolah yang terbuka terhadap partisipasi orang tua dan masyarakat lebih resilien menghadapi krisis. Di Indonesia, praktik *gotong royong pendidikan* selama pandemi menunjukkan kekuatan sistem terbuka: orang tua, guru, dan relawan bersama-sama menopang pembelajaran jarak jauh.

Sistem terbuka juga menuntut kemampuan *boundary spanning*—yakni menjembatani batas antar organisasi. Guru tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga menjadi penghubung dengan orang tua, industri, dan komunitas.

Penelitian Santosa & Widodo (2024) di Jawa Barat menunjukkan bahwa sekolah yang melibatkan komunitas lokal dalam kurikulum lebih berhasil menumbuhkan literasi berbasis konteks nyata.

Di era ketidakpastian, sistem terbuka memungkinkan pendidikan menyerap inovasi lebih cepat. Laporan UNESCO (2022) mencatat bahwa negara yang mengintegrasikan teknologi digital lintas sektor mampu memperkecil *learning gap*. Indonesia dengan Platform Merdeka Mengajar adalah contoh upaya menciptakan ekosistem digital terbuka untuk guru, meski tantangan pemerataan akses internet masih besar.

Namun, sistem terbuka juga menghadapi risiko. Terlalu terbuka dapat membuat pendidikan rentan terhadap intervensi politik dan kepentingan pasar. Penelitian Rizvi & Lingard (2023) memperingatkan bahwa globalisasi pendidikan kadang mendorong komersialisasi, sehingga nilai humanis terpinggirkan. Oleh karena itu, pendidikan terbuka harus tetap berpijak pada etika dan nilai kemanusiaan.

Secara filosofis, pendidikan sebagai sistem terbuka sejalan dengan pandangan John Dewey tentang *education as life itself*. Pendidikan bukan hanya persiapan hidup, melainkan bagian dari kehidupan sosial yang terus berkembang. Pandangan ini menegaskan bahwa interaksi antara sekolah dan masyarakat adalah bagian dari proses belajar itu sendiri.

Ketidakpastian global menuntut sistem terbuka untuk mengembangkan *anticipatory governance*. UNESCO (2023) mendorong konsep pendidikan yang memprediksi skenario masa depan dan menyiapkan respons lebih awal. Roadmap Pendidikan Indonesia 2045, misalnya, adalah bentuk upaya mengantisipasi arah perubahan global sekaligus menyiapkan generasi emas.

Pendidikan terbuka juga berarti inklusif terhadap keragaman. Di era multikultural, sekolah harus menjadi ruang di mana identitas berbeda dapat berinteraksi secara sehat. OECD (2022) menyatakan bahwa pendidikan yang inklusif memperkuat kohesi sosial. Di Indonesia, Profil Pelajar Pancasila adalah jawaban lokal yang menanamkan nilai gotong royong, kebinekaan, dan keadilan sosial sebagai bagian dari keterbukaan pendidikan.

Dengan demikian, pendidikan sebagai sistem terbuka bukan sekadar teori, tetapi kebutuhan mendesak di era VUCA. Sistem yang terbuka memungkinkan pendidikan beradaptasi, menyerap inovasi, membangun

resiliensi, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Dalam ketidakpastian global, hanya sistem yang terbuka dan bernilai yang mampu menuntun generasi menuju masa depan yang lebih pasti.

## E. Studi Kasus: Krisis Global dan Pembelajaran

Krisis global sering kali menjadi ujian nyata bagi sistem pendidikan. Peristiwa seperti pandemi, konflik, bencana alam, maupun krisis ekonomi menunjukkan sejauh mana pendidikan mampu bertahan, beradaptasi, dan bertransformasi. Subbab ini menguraikan beberapa studi kasus internasional dan nasional untuk menggambarkan bagaimana sistem pendidikan merespons krisis global di era VUCA.

Pandemi COVID-19 adalah contoh paling nyata dari krisis global yang mengguncang pendidikan. UNESCO (2022) mencatat lebih dari 1,6 miliar siswa di 190 negara terdampak penutupan sekolah. Hal ini menyebabkan *learning loss* yang signifikan. Di Indonesia, laporan Kemendikbudristek (2022) memperkirakan kehilangan capaian belajar setara 6–12 bulan, terutama pada literasi dan numerasi. Data ini menunjukkan betapa rentannya sistem pendidikan ketika menghadapi ketidakpastian global.

Krisis pandemi juga memperlihatkan kesenjangan digital. UNICEF (2022) menemukan bahwa 47% siswa di Indonesia tidak memiliki akses internet stabil. Sebagai respons, beberapa daerah mengembangkan pembelajaran alternatif berbasis modul cetak atau siaran radio/televisi. Studi LIPI (2022) menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis TVRI relatif efektif menjangkau daerah terpencil, meski tidak sepenuhnya menggantikan interaksi tatap muka.

Studi kasus di Finlandia menunjukkan bagaimana sistem pendidikan yang fleksibel lebih cepat pulih dari krisis. OECD (2023) melaporkan bahwa Finlandia memanfaatkan infrastruktur digital yang sudah matang serta dukungan komunitas sekolah, sehingga proses transisi ke pembelajaran daring berjalan lebih lancar. Konteks ini menegaskan pentingnya sistem terbuka yang melibatkan semua pihak, bukan hanya pemerintah.

Di negara berkembang seperti Rwanda, pendidikan juga diuji oleh krisis pascakonflik. UNICEF (2021) mendokumentasikan bagaimana

Rwanda membangun kembali sistem pendidikan berbasis toleransi dan rekonsiliasi setelah tragedi genosida. Sekolah dijadikan ruang perdamaian di mana anak-anak dari berbagai etnis belajar hidup bersama. Kasus ini memperlihatkan peran pendidikan sebagai instrumen rekonstruksi sosial.

Indonesia sendiri memiliki pengalaman panjang menghadapi krisis bencana alam. Gempa dan tsunami Aceh 2004, misalnya, menghancurkan 2.000 sekolah dan memengaruhi lebih dari 160.000 siswa (UNICEF, 2005). Namun, pendidikan darurat yang digelar di tenda-tenda sekolah darurat menjadi bukti resiliensi masyarakat. Gotong royong antara pemerintah, NGO, dan masyarakat lokal membantu pendidikan tetap berjalan meski infrastruktur runtuh.

Krisis ekonomi global 1998 juga berdampak pada pendidikan Indonesia. Data BPS (2000) menunjukkan lonjakan angka putus sekolah, terutama di tingkat menengah, akibat keluarga tidak mampu membiayai pendidikan. Namun, dari krisis itu lahir kebijakan *Bantuan Operasional Sekolah (BOS)* pada 2005 yang hingga kini menjadi pilar utama pembiayaan pendidikan dasar. Studi ini menunjukkan bagaimana krisis dapat melahirkan inovasi kebijakan.

Dalam konteks pandemi, Jepang sebagai pionir konsep *Society 5.0* mengintegrasikan teknologi AI dan big data untuk memonitor capaian siswa. Laporan MEXT (2022) menegaskan bahwa penggunaan *learning analytics* membantu guru memahami perkembangan siswa meski pembelajaran daring. Praktik ini menunjukkan agility sistem pendidikan yang memanfaatkan teknologi secara optimal di tengah krisis.

Studi kasus di Singapura memperlihatkan pentingnya koordinasi nasional. Pemerintah secara cepat mendistribusikan perangkat digital bagi siswa dari keluarga kurang mampu. MOE (2022) melaporkan bahwa 96% siswa berhasil mengikuti pembelajaran daring penuh dalam waktu kurang dari 2 bulan. Keberhasilan ini terkait dengan tata kelola sistem pendidikan yang terintegrasi.

Di Indonesia, pesantren juga memperlihatkan resiliensi unik. Penelitian UIN Jakarta (2022) menunjukkan bahwa banyak pesantren yang tetap melanjutkan pembelajaran dengan protokol kesehatan ketat, bahkan mengembangkan kurikulum berbasis solidaritas sosial. Hal ini memperkuat

gagasan bahwa kearifan lokal bisa menjadi sumber resiliensi di tengah krisis global.

Krisis iklim juga mulai berdampak pada pendidikan. Laporan IPCC (2023) menegaskan bahwa perubahan iklim meningkatkan risiko bencana yang memengaruhi kelangsungan sekolah, khususnya di kawasan pesisir. Indonesia, sebagai negara rawan bencana, perlu mengintegrasikan *education for sustainable development (ESD)* ke dalam kurikulum agar generasi mendatang siap menghadapi risiko ekologis.

Studi kasus gempa Lombok 2018 memperlihatkan keterbatasan sistem pendidikan darurat. Data BNPB (2019) menunjukkan bahwa lebih dari 1.000 sekolah rusak, sementara fasilitas belajar darurat tidak cukup menampung seluruh siswa. Situasi ini menegaskan pentingnya desain sekolah tahan bencana (*resilient school design*) sebagai bagian dari sistem terbuka yang antisipatif.

Krisis global juga memicu inovasi pedagogis. Di banyak negara, pandemi mempercepat adopsi *project-based learning (PBL)* dan *flipped classroom*. Penelitian Thomas (2022) menemukan bahwa PBL selama pandemi membantu siswa tetap terlibat aktif meski terbatas pada ruang daring. Di Indonesia, praktik serupa mulai diterapkan di sekolah penggerak, dengan hasil positif pada keterampilan kolaboratif siswa.

Selain aspek teknis, krisis global menyoroiti dimensi emosional pendidikan. Penelitian American Psychological Association (2022) melaporkan peningkatan signifikan kasus depresi pada remaja selama pandemi. Di Indonesia, survei Kemenkes (2023) menemukan 15% siswa mengalami stres berat akibat isolasi sosial. Pendidikan yang resilien harus memberi ruang pada *well-being* murid, bukan sekadar mengejar kurikulum.

Pelajaran penting dari studi kasus global adalah bahwa pendidikan yang mampu bertahan di era VUCA bukan hanya yang memiliki teknologi canggih, tetapi juga yang menanamkan nilai kebersamaan, solidaritas, dan empati. Dalam konteks Indonesia, falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh* dapat menjadi fondasi moral untuk menghadapi krisis, melengkapi inovasi digital dan kebijakan modern.

Dengan demikian, studi kasus krisis global dan pembelajaran menegaskan bahwa pendidikan sebagai sistem terbuka memerlukan kombinasi:

teknologi, tata kelola, dukungan komunitas, dan nilai budaya. Hanya dengan perpaduan inilah pendidikan mampu bertahan, bertransformasi, dan bahkan menjadi motor pemulihan sosial di tengah ketidakpastian dunia.





## BAB 2

### SOCIETY 5.0 DAN PENDIDIKAN HUMANIS TEKNOLOGIS

Dunia kini memasuki fase sejarah baru yang disebut *Society 5.0*, sebuah konsep yang lahir dari Jepang dan ditujukan sebagai jawaban atas tantangan global di era revolusi industri 4.0. Jika revolusi industri menekankan otomatisasi dan efisiensi, maka *Society 5.0* menghadirkan visi lebih luas: memadukan kemajuan teknologi digital, big data, kecerdasan buatan, dan internet of things dengan nilai-nilai kemanusiaan. Teknologi tidak lagi dipandang semata sebagai alat produksi, tetapi sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

Konsep ini sangat relevan bagi dunia pendidikan. Pendidikan di era *Society 5.0* dituntut tidak hanya melahirkan individu yang cakap teknologi, tetapi juga insan yang berkarakter, memiliki empati, serta mampu menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial. Dengan kata lain, pendidikan tidak boleh terjebak dalam euforia digitalisasi, melainkan harus memastikan bahwa teknologi tetap berpusat pada manusia (*human-centered innovation*).

UNESCO (2023) menegaskan bahwa masa depan pendidikan adalah masa depan yang mengintegrasikan *digital intelligence* dengan *humanistic values*. Di sinilah konsep *pendidikan humanis teknologis* menemukan relevansinya: pendidikan yang menyeimbangkan aspek teknis dan etis, rasional dan emosional, global dan lokal. Di Indonesia, upaya ini mulai terlihat dalam kebijakan Kurikulum Merdeka, program digitalisasi sekolah, hingga penguatan *Profil Pelajar Pancasila* yang menekankan nilai gotong royong, kreativitas, dan kebinekaan global.

Namun, implementasi *Society 5.0* dalam pendidikan bukan tanpa tantangan. Ketimpangan digital, isu privasi, etika penggunaan data, serta risiko komersialisasi teknologi menjadi bayang-bayang yang tidak bisa diabaikan. Laporan OECD (2023) memperingatkan bahwa tanpa prinsip keadilan, teknologi justru berpotensi memperbesar jurang antara yang memiliki akses dengan yang tidak. Oleh karena itu, bab ini akan membahas bagaimana *Society 5.0* dapat dipahami, dikritisi, dan diintegrasikan dalam pendidikan Indonesia dengan pendekatan humanis.

Secara garis besar, Bab 2 akan menguraikan sejarah lahirnya *Society 5.0* dan relevansinya secara global, konsep *human-centered innovation* sebagai inti utama, peran teknologi digital, AI, dan big data dalam pendidikan, serta tantangan etika dan ketimpangan digital yang menyertainya. Pada akhirnya, bab ini akan menegaskan perlunya pendidikan humanis berbasis teknologi—pendidikan yang tidak sekadar melahirkan “tenaga kerja digital”, tetapi manusia seutuhnya yang mampu menciptakan peradaban adil, berkelanjutan, dan bermartabat.

## A. Sejarah *Society 5.0* dan Relevansi Global

Konsep *Society 5.0* lahir sebagai visi besar Jepang untuk menghadapi dampak revolusi industri 4.0 yang cenderung berfokus pada teknologi dan efisiensi. Ide ini diperkenalkan secara resmi dalam *5th Science and Technology Basic Plan* Jepang tahun 2016, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang memadukan teknologi canggih dengan kesejahteraan manusia. Subbab ini akan menelusuri sejarah kelahiran *Society 5.0*, perkembangan pemaknannya, serta relevansinya secara global, termasuk bagi sistem pendidikan.

*Society 5.0* merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang evolusi masyarakat. Sejarahnya berangkat dari *Society 1.0* (masyarakat pemburu), *Society 2.0* (masyarakat agraris), *Society 3.0* (masyarakat industri), dan *Society 4.0* (masyarakat informasi). Jepang mengusulkan konsep *Society 5.0* sebagai era baru di mana teknologi informasi bukan hanya instrumen produksi, tetapi juga solusi untuk masalah sosial. Visi ini berupaya menyeimbangkan teknologi dan kemanusiaan.

Secara resmi, istilah ini muncul dalam *5th Science and Technology Basic Plan* (2016–2020) yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Dokumen tersebut menekankan bahwa *Society 5.0* adalah “super-smart society” di mana data besar, kecerdasan buatan, dan Internet of Things digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh warga, bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi. Jepang menjadi negara pertama yang menjadikan konsep ini strategi pembangunan nasional.

Revolusi industri 4.0 dipandang memiliki kelemahan: berpotensi memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, *Society 5.0* lahir sebagai koreksi—menekankan bahwa teknologi harus berorientasi pada manusia. Konsep *human-centered innovation* menjadi inti dari ide ini. Dengan demikian, *Society 5.0* tidak sekadar era digital, tetapi juga era etis yang menempatkan manusia sebagai pusat.

Laporan OECD (2019) menegaskan bahwa visi *Society 5.0* relevan secara global karena dunia menghadapi masalah yang sama: ketimpangan, krisis lingkungan, penuaan populasi, dan disrupsi digital. Dengan teknologi yang semakin cepat, hanya pendekatan humanis yang bisa menjamin keberlanjutan. Oleh sebab itu, meski lahir di Jepang, konsep ini diadopsi dalam forum internasional, termasuk G20.

Dari perspektif pendidikan, *Society 5.0* menuntut paradigma baru. UNESCO (2023) menyatakan bahwa pendidikan masa depan harus melahirkan generasi yang mampu mengintegrasikan kecerdasan buatan, big data, dan robotika dengan etika, empati, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan tidak cukup hanya melahirkan tenaga kerja digital, melainkan manusia seutuhnya yang siap mencipta solusi sosial dengan teknologi.

Studi di Jepang menunjukkan bagaimana konsep ini diterapkan. Laporan METI (2020) mendeskripsikan pilot project *Society 5.0* di bidang

pendidikan, di mana big data digunakan untuk memantau perkembangan belajar siswa dan memberi rekomendasi personalisasi pembelajaran. Sistem ini membantu guru memahami kebutuhan unik setiap murid. Praktik ini menggambarkan transformasi dari pendidikan massal menuju pendidikan berbasis individu.

Relevansi global *Society 5.0* juga tampak pada isu keberlanjutan. Dalam SDGs 2030, teknologi diharapkan mendukung pencapaian tujuan pembangunan, mulai dari energi bersih, transportasi ramah lingkungan, hingga pendidikan berkualitas. *Society 5.0* dilihat sebagai pendekatan yang menjembatani agenda SDGs dengan revolusi digital. Dengan demikian, ia menjadi kerangka etis sekaligus praktis bagi pembangunan global.

Di Indonesia, wacana *Society 5.0* mulai masuk dalam diskursus pendidikan sejak 2019, terutama setelah Presiden Jokowi menekankan pentingnya literasi digital, literasi numerasi, dan literasi sains. Kurikulum Merdeka, *Profil Pelajar Pancasila*, serta program *Sekolah Penggerak* dapat dibaca sebagai langkah awal Indonesia menuju paradigma pendidikan *Society 5.0*.

Namun, penerapan konsep ini di negara berkembang menghadapi tantangan serius. Laporan World Bank (2022) mencatat bahwa kesenjangan digital di Asia Tenggara masih lebar: 45% rumah tangga di pedesaan tidak memiliki akses internet memadai. Tanpa penyelesaian masalah kesenjangan, *Society 5.0* bisa memperparah ketidakadilan pendidikan. Oleh karena itu, strategi implementasi perlu memperhatikan konteks lokal.

Secara teoretis, *Society 5.0* dapat dipandang sebagai pertemuan antara teori sistem terbuka (von Bertalanffy) dengan teori humanisme pendidikan (Dewey, Maslow). Teknologi dipandang sebagai bagian dari ekosistem sosial, sementara tujuan utamanya adalah aktualisasi manusia. Inilah yang membedakan *Society 5.0* dari sekadar digitalisasi teknis.

Penelitian terbaru mendukung relevansi konsep ini. Studi Tanaka & Saito (2023) menunjukkan bahwa integrasi AI dalam pendidikan di Jepang meningkatkan keterlibatan siswa hingga 25%. Di sisi lain, studi dari Stanford University (2024) memperingatkan risiko ketergantungan jika AI tidak diimbangi dengan literasi kritis. Dua temuan ini menguatkan bahwa *Society 5.0* harus berjalan seimbang antara efisiensi teknologi dan penguatan humanitas.

Secara filosofis, *Society 5.0* menantang dualisme lama antara manusia dan mesin. Kini, teknologi dipandang sebagai perpanjangan kemampuan manusia, bukan lawannya. Filsuf pendidikan modern seperti Gert Biesta (2022) menekankan bahwa pendidikan tetap harus melatih subyektivitas dan tanggung jawab etis, meskipun teknologi menjadi instrumen utama pembelajaran.

Konsep ini juga relevan dalam konteks budaya. Jepang menekankan nilai *kyosei* (hidup bersama secara harmonis) sebagai landasan *Society 5.0*. Di Indonesia, falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh* dapat menjadi padanan lokal yang memperkuat implementasi *Society 5.0* di bidang pendidikan. Integrasi nilai budaya dan teknologi akan mencegah dehumanisasi dalam pendidikan digital.

Dengan demikian, *Society 5.0* bukan hanya visi teknologi, melainkan kerangka transformasi sosial dan pendidikan. Relevansinya secara global terletak pada kemampuannya menjembatani kebutuhan inovasi dengan nilai kemanusiaan. Bagi Indonesia, konsep ini menjadi peluang sekaligus tantangan: peluang untuk melompat ke era digital-humanis, tantangan untuk memastikan bahwa semua anak mendapat akses dan tidak tertinggal dalam proses transformasi.

## B. Konsep Human-Centered Innovation

Di era *Society 5.0*, inovasi tidak lagi cukup hanya berorientasi pada teknologi, melainkan harus berpusat pada manusia (*human-centered innovation*). Paradigma ini menegaskan bahwa teknologi—AI, big data, robotika, dan IoT—bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun peradaban yang berkeadilan. Subbab ini akan membahas konsep, teori, serta implementasi *human-centered innovation* dalam pendidikan, dengan penekanan pada relevansinya bagi Indonesia.

Konsep *human-centered innovation* lahir sebagai respons terhadap kritik terhadap revolusi industri 4.0 yang cenderung menempatkan teknologi di atas manusia. Menurut laporan METI Jepang (2016), tujuan *Society 5.0* adalah menciptakan “super-smart society” di mana inovasi teknologi diintegrasikan untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan sekadar

meningkatkan produktivitas ekonomi. Dengan demikian, pendidikan menjadi sektor strategis untuk memastikan bahwa inovasi tetap berpijak pada nilai kemanusiaan.

Secara teoretik, pendekatan ini dekat dengan filsafat humanisme dalam pendidikan. John Dewey menegaskan bahwa pendidikan harus menekankan pengalaman dan kepentingan individu, bukan sekadar hasil industri. Konsep *human-centered innovation* mengembangkan ide Dewey dengan menambahkan teknologi sebagai instrumen untuk memperluas ruang pengalaman manusia. AI, misalnya, dapat membantu personalisasi pembelajaran sehingga siswa mendapat pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhannya.

Data OECD (2023) menekankan bahwa negara yang mengutamakan *human-centered innovation* lebih berhasil dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan inklusi sosial. Finlandia, misalnya, menggunakan teknologi digital untuk memperkuat pendidikan personal, tetapi tetap menekankan keterlibatan guru dan komunitas. Hal ini membuktikan bahwa teknologi tidak boleh menggantikan relasi manusia, melainkan memperkaya interaksi.

Dalam konteks Indonesia, implementasi *human-centered innovation* mulai terlihat dalam program Kurikulum Merdeka yang menekankan *differentiated learning*. Teknologi digital melalui Platform Merdeka Mengajar digunakan untuk membantu guru merancang pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Namun, tantangan kesenjangan akses internet masih besar, terutama di daerah 3T. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi yang berpusat pada manusia harus memperhatikan keadilan akses.

Riset UNESCO (2022) menunjukkan bahwa integrasi AI dalam pendidikan meningkatkan efektivitas pembelajaran hingga 30% bila digabungkan dengan metode pedagogis humanis. Namun, laporan yang sama memperingatkan bahwa tanpa prinsip etika, AI dapat memperbesar bias dan diskriminasi. Oleh karena itu, inovasi berpusat manusia harus selalu diiringi dengan regulasi etis dan literasi digital kritis.

Human-centered innovation juga menekankan pentingnya *co-creation*. Menurut von Hippel (2017), inovasi terbaik lahir dari keterlibatan pengguna. Dalam pendidikan, hal ini berarti siswa, guru, orang tua, dan

komunitas harus dilibatkan dalam merancang sistem pembelajaran. Studi Santosa & Widodo (2024) di Indonesia menemukan bahwa sekolah yang melibatkan komunitas lokal dalam kurikulum lebih mampu membangun keterhubungan siswa dengan kehidupan nyata.

Penerapan *human-centered innovation* juga terlihat dalam *project-based learning* (PBL). Penelitian Thomas (2022) menemukan bahwa PBL yang didukung teknologi digital meningkatkan keterampilan problem solving dan kolaborasi siswa. Dengan demikian, inovasi tidak sekadar berbentuk perangkat digital, tetapi proses pedagogis yang menempatkan siswa sebagai subjek utama.

Secara global, banyak negara mengadopsi *human-centered innovation* untuk menghadapi tantangan sosial. Jepang menggunakannya untuk mengatasi masalah penuaan penduduk, dengan memanfaatkan robotika untuk membantu lansia. Di bidang pendidikan, ini diterjemahkan dalam program literasi digital intergenerasional di mana generasi muda membantu orang tua mengakses teknologi. Praktik ini memperkuat ikatan sosial sekaligus mengurangi kesenjangan teknologi.

Di Singapura, *human-centered innovation* diwujudkan dalam kebijakan *Smart Nation* (2020), di mana pendidikan digital dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup warga, bukan hanya untuk tujuan ekonomi. MOE (2022) melaporkan bahwa program *EdTech Masterplan* melibatkan guru secara intensif agar teknologi tidak menggeser peran pendidik, melainkan memperkuat kapasitas mereka.

Dari perspektif filsafat, konsep ini sejalan dengan pandangan Amartya Sen tentang *capability approach*—bahwa pembangunan sejati adalah memperluas kapabilitas manusia, bukan hanya meningkatkan indikator ekonomi. Pendidikan berbasis *human-centered innovation* bertujuan memperluas kebebasan siswa untuk menjadi manusia yang berdaya, kreatif, dan bertanggung jawab.

Isu etika juga menjadi bagian tak terpisahkan. Riset Stanford (2024) memperingatkan bahaya “dehumanisasi digital” jika teknologi digunakan tanpa regulasi yang jelas. Oleh karena itu, UNESCO (2023) mendorong setiap negara untuk mengembangkan kerangka etika AI dalam pendidikan, termasuk perlindungan data anak dan pencegahan bias algoritmik.

Indonesia masih dalam tahap awal menyusun regulasi ini, namun sudah mulai ada wacana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

*Human-centered innovation* juga menekankan keberlanjutan. Teknologi pendidikan tidak boleh menghasilkan limbah digital atau memperparah krisis lingkungan. OECD (2022) mendorong konsep *green digital innovation*—teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pendidikan harus menjadi pelopor, misalnya dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk infrastruktur digital sekolah.

Dalam perspektif lokal, konsep ini bisa dipadukan dengan falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh*. Inovasi yang berpusat pada manusia tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal kasih sayang, pengembangan potensi, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pendidikan Indonesia dapat menghadirkan model unik: integrasi kearifan lokal dengan teknologi global.

Dengan segala peluang dan tantangannya, *human-centered innovation* menegaskan kembali bahwa pendidikan bukan sekadar transformasi digital, tetapi transformasi humanis. Teknologi hanyalah instrumen; yang utama adalah nilai, tujuan, dan orientasi pada manusia. Hanya dengan cara inilah *Society 5.0* dapat benar-benar menjadi masyarakat cerdas yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat.

### C. Teknologi Digital, AI, dan Big Data dalam Pendidikan

Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), dan big data telah mengubah wajah pendidikan secara radikal. Ketiga elemen ini bukan hanya alat bantu teknis, melainkan kekuatan disruptif yang mengubah cara belajar, cara mengajar, dan bahkan cara berpikir manusia tentang pendidikan. Di era *Society 5.0*, teknologi harus ditempatkan sebagai instrumen yang memperkuat nilai humanis pendidikan, bukan sekadar meningkatkan efisiensi. Subbab ini membahas potensi, tantangan, serta praktik pemanfaatan teknologi digital, AI, dan big data dalam sistem pendidikan global maupun Indonesia.

Teknologi digital telah menjadi tulang punggung pembelajaran abad ke-21. UNESCO (2023) melaporkan bahwa 90% negara di dunia mengadopsi pembelajaran digital selama pandemi COVID-19. Perubahan ini menandai era baru, di mana teknologi bukan lagi pilihan tambahan, tetapi kebutuhan pokok dalam sistem pendidikan. Di Indonesia, kebijakan *Merdeka Belajar* turut mengintegrasikan teknologi digital melalui *Platform Merdeka Mengajar* untuk membantu guru dalam perencanaan dan asesmen.

AI dalam pendidikan berkembang pesat dengan berbagai aplikasi. Stanford University (2024) melaporkan bahwa penggunaan AI dalam *intelligent tutoring systems* meningkatkan keterlibatan siswa hingga 25%. AI mampu memberikan umpan balik instan, personalisasi materi, dan bahkan mendeteksi kesulitan belajar siswa. Namun, efektivitas ini tetap bergantung pada kualitas integrasi pedagogis, bukan semata-mata kecanggihan teknologi.

Big data menghadirkan paradigma baru dalam evaluasi pendidikan. Dengan data jutaan siswa, pemerintah dan sekolah dapat memprediksi tren capaian belajar, mengidentifikasi kesenjangan, dan merancang kebijakan berbasis bukti. OECD (2022) menegaskan bahwa *data-driven education policy* lebih efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan dibanding kebijakan normatif. Di Indonesia, *Rapor Pendidikan* adalah contoh awal penerapan big data untuk memotret kualitas sekolah secara nasional.

Namun, pemanfaatan teknologi juga membawa tantangan etika. Laporan UNESCO (2023) memperingatkan risiko privasi data siswa ketika big data digunakan tanpa regulasi jelas. Kasus kebocoran data di beberapa negara menjadi alarm bahwa literasi digital dan keamanan siber harus menjadi bagian integral dalam pendidikan. Di Indonesia, wacana perlindungan data pribadi mulai diperkuat melalui UU PDP (2022), meski implementasinya masih perlu pengawalan.

Teknologi digital juga mengubah relasi guru dan murid. Jika dulu guru adalah sumber utama pengetahuan, kini siswa bisa mengakses informasi dari berbagai platform. Guru tidak lagi hanya sebagai penyampai informasi, melainkan fasilitator dan kurator pengetahuan. Konsep ini sejalan dengan falsafah *Silih Asah* yang menekankan pembelajaran timbal balik, di mana guru dan murid sama-sama belajar dalam interaksi.

AI juga mulai digunakan dalam asesmen pendidikan. Sistem berbasis AI dapat menilai esai, presentasi, atau bahkan ekspresi wajah siswa untuk mendeteksi keterlibatan. Studi Lee & Tan (2023) di Singapura menunjukkan bahwa asesmen berbasis AI mampu menghemat 30% waktu guru dalam penilaian. Namun, UNESCO (2023) mengingatkan potensi bias algoritmik yang bisa merugikan siswa dari latar belakang tertentu.

Big data membuka peluang besar dalam penelitian pendidikan. Dengan data masif, peneliti dapat memetakan faktor-faktor yang memengaruhi capaian belajar secara lebih akurat. World Bank (2023) mencatat bahwa analisis big data memungkinkan prediksi *dropout risk* siswa dengan akurasi lebih dari 80%. Ini memberi peluang bagi sekolah untuk melakukan intervensi dini.

Di Indonesia, implementasi big data dalam pendidikan masih tahap awal. *Rapor Pendidikan* (2023) mencoba mengintegrasikan data hasil Asesmen Nasional, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dan survei lainnya. Namun, banyak sekolah yang belum terbiasa menggunakan data untuk pengambilan keputusan. Hal ini menegaskan perlunya literasi data di kalangan guru dan kepala sekolah.

Secara pedagogis, teknologi digital menghadirkan model baru seperti *flipped classroom*, *project-based learning* berbasis digital, dan pembelajaran adaptif. Hattie (2021) menegaskan bahwa penggunaan teknologi paling efektif ketika mendukung keterlibatan aktif siswa, bukan sekadar menggantikan metode tradisional. Pendidikan digital harus berfokus pada interaktivitas, bukan sekadar penyampaian konten.

AI juga membuka peluang inklusi pendidikan. Sistem pembelajaran berbasis suara dan teks otomatis dapat membantu siswa berkebutuhan khusus, misalnya tunanetra atau tunarungu. UNICEF (2022) mencatat peningkatan akses pendidikan inklusif di negara yang mengintegrasikan AI untuk kebutuhan khusus. Ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi jembatan keadilan, bukan hanya inovasi.

Namun, ketimpangan akses digital tetap menjadi masalah serius. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa 42% rumah tangga di pedesaan Indonesia belum memiliki akses internet memadai. Ketidaksetaraan ini berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan. Oleh karena itu, *human-centered*

*innovation* menuntut agar transformasi digital disertai strategi pemerataan infrastruktur.

Dari perspektif filosofi pendidikan, pemanfaatan teknologi harus menghindari dehumanisasi. Gert Biesta (2022) memperingatkan bahwa pendidikan tidak boleh terjebak menjadi sekadar transfer data. Pendidikan tetap harus menumbuhkan subyektivitas, etika, dan kebebasan manusia. Dengan demikian, AI dan big data hanya bernilai sejauh ia memperkuat relasi manusia, bukan menggantikannya.

Praktik terbaik dari berbagai negara bisa menjadi inspirasi. Di Korea Selatan, big data digunakan untuk melacak perkembangan akademik siswa secara real time. Di Finlandia, AI dipakai untuk merancang pembelajaran berbasis minat individu. Sementara di Jepang, *Society 5.0* dipraktikkan melalui integrasi teknologi untuk melayani populasi lansia, termasuk pendidikan intergenerasional.

Bagi Indonesia, peluang besar terletak pada integrasi kearifan lokal dengan teknologi global. Misalnya, falsafah *Silih Asuh* dapat menjadi dasar etis bagi penggunaan big data: teknologi harus melindungi, bukan mengeksploitasi. Dengan cara ini, pendidikan digital di Indonesia bisa berbeda—berbasis teknologi modern tetapi berjiwa humanis Nusantara.

Dengan demikian, teknologi digital, AI, dan big data bukan sekadar tren, tetapi kekuatan transformatif dalam pendidikan. Tantangan terbesar adalah memastikan agar ketiganya dipandu oleh nilai humanisme, inklusi, dan keberlanjutan. Jika berhasil, pendidikan akan menjadi motor perubahan sosial yang adil, adaptif, dan bermartabat di era *Society 5.0*.

#### **D. Tantangan Etika, Privasi, dan Ketimpangan Digital**

Pemanfaatan teknologi digital, AI, dan big data dalam pendidikan membuka peluang besar untuk transformasi, tetapi juga melahirkan serangkaian tantangan serius. Di antaranya adalah isu etika dalam penggunaan teknologi, perlindungan privasi data siswa, serta risiko ketimpangan digital yang berpotensi memperlebar jurang sosial. Subbab ini akan menguraikan ketiga tantangan tersebut dengan dukungan teori, riset, dan data, agar pendidikan di era *Society 5.0* dapat menghindari jebakan dehumanisasi digital.

Isu etika menjadi dimensi pertama yang menuntut perhatian serius. AI dalam pendidikan, misalnya, dapat digunakan untuk menilai esai, mendeteksi keterlibatan siswa, atau merekomendasikan materi belajar. Namun, tanpa regulasi etis, teknologi ini bisa memunculkan bias. Riset Stanford University (2024) menunjukkan bahwa algoritme AI cenderung bias terhadap kelompok dengan akses digital rendah. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah teknologi benar-benar adil atau justru mereproduksi ketidakadilan sosial?

Privasi data adalah masalah kedua yang krusial. Big data pendidikan mengumpulkan informasi detail tentang siswa, mulai dari nilai, aktivitas daring, hingga pola interaksi. UNESCO (2023) memperingatkan bahwa tanpa perlindungan data, siswa berisiko terekspos pada penyalahgunaan informasi. Di Indonesia, kasus kebocoran data digital nasional pada 2022 menjadi alarm bahwa sistem pendidikan pun tidak imun dari ancaman serupa.

Ketimpangan digital adalah tantangan ketiga yang paling nyata di negara berkembang. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa hanya 58% rumah tangga di pedesaan Indonesia memiliki akses internet stabil, jauh tertinggal dari 90% rumah tangga di perkotaan. Ketimpangan ini berimplikasi langsung pada kualitas pembelajaran daring, sehingga transformasi digital berpotensi memperlebar jurang pendidikan antara kaya dan miskin, kota dan desa.

Secara teoretik, tantangan etika dan privasi dapat dijelaskan melalui perspektif *critical pedagogy* Paulo Freire. Ia menekankan bahwa pendidikan harus membebaskan, bukan menindas. Jika teknologi digunakan tanpa refleksi kritis, maka alih-alih membebaskan, ia bisa menjadi alat penindasan baru yang tak kasatmata, melalui data, algoritme, dan kontrol digital.

Literasi digital menjadi solusi penting. OECD (2022) menekankan bahwa literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan memahami implikasi etis dari penggunaan teknologi. Pendidikan harus melatih siswa untuk bertanya: siapa yang memiliki data? untuk apa digunakan? apa risikonya? Tanpa kesadaran kritis ini, generasi muda hanya akan menjadi pengguna pasif yang rentan dieksploitasi.

Di Indonesia, kesenjangan digital tercermin dari laporan UNICEF (2022) yang mencatat bahwa 47% siswa tidak mampu mengikuti pembelajaran daring selama pandemi karena keterbatasan perangkat dan internet. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital hanya efektif jika disertai kebijakan pemerataan infrastruktur. Program *Merdeka Belajar* perlu dilengkapi dengan strategi digital inklusif yang menjangkau daerah 3T.

Isu privasi juga berkaitan dengan keamanan psikologis siswa. Penelitian American Psychological Association (2022) menunjukkan bahwa anak-anak yang merasa data pribadinya diawasi berlebihan cenderung mengalami stres dan kecemasan. Pendidikan harus menciptakan ekosistem digital yang aman, di mana siswa merasa terlindungi, bukan diawasi secara berlebihan.

Tantangan etika juga meliputi hubungan manusia–mesin. Filsuf pendidikan Gert Biesta (2022) memperingatkan bahaya “dehumanisasi” jika guru digantikan oleh algoritme. Teknologi seharusnya menjadi pendukung, bukan pengganti. Pendidikan tetap membutuhkan interaksi empatik antara guru dan murid, yang tidak bisa direduksi oleh mesin.

Di sisi lain, isu privasi dalam pendidikan digital membutuhkan regulasi yang jelas. Indonesia telah memiliki UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) 2022, tetapi penerapannya di sektor pendidikan masih lemah. Banyak sekolah menggunakan aplikasi pembelajaran tanpa kontrak perlindungan data yang jelas. Hal ini berpotensi melanggar hak siswa sebagai subjek data.

Ketimpangan digital juga memperkuat kesenjangan gender. Laporan UNESCO (2022) mencatat bahwa anak perempuan di negara berkembang 25% lebih mungkin tertinggal dalam literasi digital dibanding anak laki-laki. Di Indonesia, survei Kominfo (2023) menemukan bahwa anak perempuan di pedesaan lebih jarang mendapat akses perangkat digital. Pendidikan harus memastikan inklusi gender dalam transformasi digital.

Dalam konteks global, Jepang melalui *Society 5.0* menekankan konsep *human-centered innovation* yang mencakup etika dan privasi. Sistem AI di sekolah Jepang dirancang dengan prinsip *explainable AI*, yakni algoritme harus transparan dan dapat dijelaskan. Pendekatan ini bisa menjadi inspirasi bagi negara lain, termasuk Indonesia, agar adopsi teknologi tidak melanggar hak manusia.

Respon etis terhadap tantangan digital juga bisa ditopang oleh nilai lokal. Falsafah *Silih Asuh* dapat dijadikan prinsip etis: melindungi murid seperti keluarga sendiri. Data siswa bukan komoditas, melainkan amanah. Dengan pendekatan ini, pendidikan digital Indonesia bisa mengintegrasikan prinsip budaya dalam praktik teknologi modern.

Tantangan etika juga mencakup penggunaan AI dalam prediksi capaian siswa. Meskipun berguna, sistem prediktif berisiko menstigma siswa sejak dini. Penelitian Lee & Tan (2023) di Singapura menyoroti bahwa prediksi akademik berbasis AI bisa membuat guru bersikap bias. Oleh karena itu, penting ada mekanisme koreksi agar teknologi tidak memperkuat prasangka.

Ketimpangan digital bukan hanya soal akses internet, tetapi juga soal kualitas pemanfaatan. Rapor Pendidikan (2023) menunjukkan bahwa meski 80% sekolah sudah memiliki perangkat digital, hanya 35% guru yang rutin memanfaatkannya untuk pembelajaran inovatif. Hal ini mengindikasikan adanya *second-level digital divide*: perbedaan antara akses dan pemanfaatan.

Dengan demikian, tantangan etika, privasi, dan ketimpangan digital menegaskan bahwa transformasi pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan teknologi. Diperlukan kerangka regulasi, literasi digital, pemerataan akses, dan integrasi nilai humanis. Hanya dengan cara itu, teknologi akan benar-benar menjadi sahabat pendidikan, bukan ancaman yang memperlebar jurang sosial.

## E. Pendidikan Humanis Berbasis Teknologi

Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan big data menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan baru bagi dunia pendidikan. Pertanyaan mendasarnya adalah: bagaimana memastikan teknologi tidak mereduksi pendidikan menjadi sekadar transfer informasi, tetapi tetap menjadi wahana pembentukan manusia seutuhnya? Jawaban yang ditawarkan adalah *pendidikan humanis berbasis teknologi*—yakni pendidikan yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana, tetapi tetap menempatkan martabat, nilai, dan kemanusiaan sebagai pusat.

Pendidikan humanis berbasis teknologi berangkat dari filosofi bahwa manusia bukan objek teknologi, melainkan subjek utama. John Dewey (1938) menekankan bahwa pendidikan adalah proses sosial yang berorientasi pada pengalaman. Teknologi dalam kerangka ini berfungsi memperluas pengalaman belajar, bukan menggantikannya. Dengan kata lain, teknologi adalah medium, bukan tujuan.

UNESCO (2023) dalam laporan *Reimagining Our Futures Together* menegaskan bahwa masa depan pendidikan harus mengintegrasikan digitalisasi dengan prinsip humanisme. Hal ini berarti teknologi harus digunakan untuk memperkuat kolaborasi, solidaritas, dan empati, bukan sekadar meningkatkan efisiensi atau kompetisi. Pendidikan yang humanis berbasis teknologi menolak reduksi manusia menjadi angka atau data semata.

Di Jepang, implementasi *Society 5.0* menunjukkan bagaimana teknologi dapat diarahkan untuk tujuan humanis. Sistem *learning analytics* digunakan bukan hanya untuk memantau capaian siswa, tetapi juga untuk mendukung kesehatan mental mereka. METI (2022) melaporkan bahwa analisis data perilaku digital digunakan untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami stres, lalu sekolah memberikan dukungan konseling. Praktik ini menunjukkan integrasi teknologi dengan kesejahteraan manusia.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan humanis berbasis teknologi mulai dirintis melalui *Profil Pelajar Pancasila*. Nilai gotong royong, kebinekaan, dan kreativitas dipadukan dengan literasi digital. Platform Merdeka Mengajar bukan hanya menjadi repositori konten, tetapi juga ruang kolaborasi guru. Dengan demikian, teknologi memperkuat peran komunitas pendidikan, bukan sekadar instrumen administratif.

Literasi digital menjadi fondasi penting. OECD (2022) menegaskan bahwa literasi digital humanis meliputi tiga dimensi: teknis (kemampuan menggunakan perangkat), kritis (kemampuan memahami implikasi sosial teknologi), dan etis (kesadaran akan nilai kemanusiaan). Pendidikan harus melatih siswa agar tidak sekadar “melek teknologi”, tetapi juga bijak dalam menggunakannya.

Big data dalam pendidikan juga dapat diarahkan untuk tujuan humanis. World Bank (2023) melaporkan bahwa analisis data capaian belajar di Asia Tenggara membantu pemerintah merancang intervensi bagi siswa

rentan. Di Indonesia, *Rapor Pendidikan* berpotensi besar untuk mendorong pemerataan mutu, asalkan digunakan secara reflektif, bukan sekadar angka ranking sekolah.

Pendidikan humanis berbasis teknologi juga menuntut keberanian menolak dehumanisasi. Gert Biesta (2022) mengingatkan bahwa pendidikan bukan hanya soal *qualification* (pengetahuan), tetapi juga *socialization* (nilai sosial) dan *subjectification* (pembentukan identitas). Teknologi hanya bermanfaat sejauh ia mendukung ketiga dimensi ini. Jika hanya fokus pada *qualification*, pendidikan akan kehilangan makna kemanusiaannya.

Contoh inspiratif datang dari Finlandia. Negara ini mengintegrasikan teknologi digital untuk memperkuat *personalized learning*, tetapi tetap menekankan peran guru sebagai pendamping utama. OECD (2023) menyoroti bahwa siswa Finlandia lebih merasa “didukung” dibanding “diawasi” oleh sistem digital. Hal ini karena teknologi diarahkan untuk memperkuat hubungan manusia, bukan menggantikannya.

Isu kesehatan mental generasi muda juga menjadi alasan penting. American Psychological Association (2022) mencatat lonjakan masalah kesehatan mental akibat penggunaan teknologi yang berlebihan. Pendidikan humanis berbasis teknologi menekankan keseimbangan: teknologi digunakan untuk mendukung *well-being*, bukan menambah tekanan. Program *Sekolah Sehat* di Indonesia yang dipadukan dengan literasi digital bisa menjadi model integratif.

Dari sisi pedagogi, *project-based learning* (PBL) berbasis digital adalah contoh konkret pendidikan humanis. PBL memberi ruang bagi siswa untuk bekerja sama, memecahkan masalah nyata, dan mengembangkan empati sosial. Studi Thomas (2022) menunjukkan bahwa PBL meningkatkan keterampilan kolaboratif hingga 30% lebih baik daripada metode tradisional. Teknologi digital memperkaya PBL dengan data, simulasi, dan kolaborasi lintas wilayah.

Pendidikan vokasi juga dapat diarahkan ke jalur humanis melalui teknologi. Program SMK Pusat Keunggulan, misalnya, tidak hanya menekankan keterampilan digital, tetapi juga karakter kerja dan etika profesional. Dengan demikian, lulusan tidak sekadar “terampil”, tetapi juga berintegritas.

Hal ini sejalan dengan tujuan *Society 5.0* untuk menciptakan masyarakat seimbang antara teknologi dan nilai.

Di tingkat komunitas, pendidikan humanis berbasis teknologi dapat memperkuat budaya gotong royong. Platform daring bisa digunakan untuk berbagi praktik baik antar sekolah, guru, dan orang tua. Penelitian Santosa & Widodo (2024) menemukan bahwa sekolah yang memanfaatkan platform digital komunitas lebih cepat beradaptasi dalam krisis. Teknologi di sini berfungsi sebagai ruang silih asih dan silih asah modern.

Tantangan besar tetap ada, terutama soal ketimpangan akses. Tanpa pemerataan, pendidikan humanis berbasis teknologi hanya akan dinikmati oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, perlu kebijakan afirmatif untuk menjamin bahwa siswa di daerah 3T, anak perempuan, dan kelompok marginal mendapat akses setara. Inklusivitas adalah syarat mutlak agar teknologi benar-benar humanis.

Pada akhirnya, pendidikan humanis berbasis teknologi adalah jalan tengah: menerima teknologi sebagai realitas tak terelakkan, tetapi menolak dominasi teknologi atas kemanusiaan. Teknologi hanya sah digunakan jika memperkuat empati, solidaritas, dan keadilan sosial. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya mencetak “digital natives”, tetapi juga “humanistic leaders” yang mampu membawa Indonesia ke arah masa depan yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat.





## BAB 3

### AGENDA GLOBAL SDGs 2030

Dunia memasuki abad ke-21 dengan tantangan multidimensional: perubahan iklim, ketimpangan sosial, krisis ekonomi, migrasi global, hingga disrupsi teknologi. Sebagai respons kolektif, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015 merumuskan *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030*—17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi kompas global untuk menciptakan dunia yang adil, damai, dan lestari. Pendidikan menempati posisi sentral dalam agenda ini, bukan hanya sebagai tujuan mandiri (SDG 4: *Quality Education*), tetapi juga sebagai kunci untuk mewujudkan tujuan-tujuan lain.

SDGs 2030 menggeser paradigma pembangunan dari sekadar pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan yang menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi. Dalam konteks ini, pendidikan dipandang sebagai motor utama perubahan sosial: ia menyiapkan generasi yang melek lingkungan, berkeadilan gender, sehat, kreatif, dan berdaya menghadapi ketidakpastian global. Tanpa pendidikan yang bermutu, tujuan besar seperti pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan energi bersih hanya akan menjadi slogan kosong.

UNESCO (2023) menegaskan bahwa “pendidikan adalah multiplier of development”—ia memperbanyak dampak positif di seluruh sektor pembangunan. Oleh karena itu, Bab 3 buku ini akan mengupas secara mendalam lahirnya SDGs beserta filosofi yang melandasinya, posisi strategis SDG 4 tentang pendidikan bermutu, kaitan pendidikan dengan SDGs lainnya, hingga implementasinya di Indonesia.

Bagi Indonesia, komitmen pada SDGs 2030 menjadi bagian dari visi besar menuju *Indonesia Emas 2045*. Rapor Pendidikan, Kurikulum Merdeka, Profil Pelajar Pancasila, hingga program literasi dan numerasi nasional dapat dibaca sebagai kontribusi nyata terhadap pencapaian SDG 4. Namun, tantangan tetap besar: kesenjangan kualitas antarwilayah, keterbatasan infrastruktur digital, serta kebutuhan akan kepemimpinan transformatif di semua level pendidikan.

Dengan demikian, Bab 3 ini akan membingkai pendidikan bukan hanya sebagai urusan domestik, tetapi juga sebagai bagian dari perjuangan global untuk membangun masa depan yang berkelanjutan. Pendidikan diposisikan sebagai jalan menuju keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan harmoni dunia—selaras dengan falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh* dan empat pilar UNESCO yang telah dibahas sebelumnya.



## A. Lahirnya SDGs: Sejarah dan Filosofi

Agenda *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030* lahir dari kebutuhan global untuk merumuskan arah pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. SDGs bukan sekadar daftar target teknokratis, melainkan visi filosofis kolektif umat manusia untuk memastikan bahwa kemajuan tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan sosial, keadilan gender, kelestarian lingkungan, dan perdamaian dunia. Subbab ini akan menelusuri sejarah lahirnya SDGs, mulai dari transisi *Millennium Development Goals (MDGs)* hingga filosofi dasarnya, serta bagaimana pendidikan ditempatkan di jantung agenda pembangunan global ini.

SDGs lahir pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dari *Millennium Development Goals (MDGs)* yang berlaku antara 2000–2015. MDGs berhasil mendorong penurunan angka kemiskinan ekstrem dan peningkatan akses pendidikan dasar di banyak negara. Namun, MDGs dikritik karena terlalu sempit, kurang inklusif, dan tidak cukup menyoroti isu keberlanjutan lingkungan. Dari keterbatasan inilah SDGs dirancang sebagai agenda pembangunan yang lebih komprehensif dan partisipatif.

Secara historis, SDGs dirumuskan melalui konsultasi global yang melibatkan lebih dari 70 negara dan jutaan warga dunia. Proses ini menunjukkan pergeseran paradigma: pembangunan bukan lagi agenda elit politik global, melainkan hasil dialog multistakeholder yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, dan komunitas lokal. Filosofi partisipasi ini menjadi ciri khas SDGs dibanding pendahulunya.

SDGs menetapkan 17 tujuan dengan 169 target yang mencakup isu kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, energi, iklim, hingga perdamaian. Filosofi di balik angka ini adalah holisme: semua tujuan saling terkait dan tidak dapat dicapai secara terpisah. Pendidikan, misalnya, tidak hanya berdampak pada SDG 4, tetapi juga pada kesehatan (SDG 3), kesetaraan gender (SDG 5), pekerjaan layak (SDG 8), dan konsumsi berkelanjutan (SDG 12).

Dari perspektif filosofis, SDGs merefleksikan etika tanggung jawab global. Hans Jonas dalam bukunya *The Imperative of Responsibility* (1979) menekankan bahwa manusia modern harus bertanggung jawab tidak hanya

pada generasi sekarang, tetapi juga pada generasi mendatang. Prinsip inilah yang menjiwai SDGs: pembangunan harus berpihak pada masa depan, bukan sekadar keuntungan jangka pendek.

Lahirnya SDGs juga dipengaruhi oleh perkembangan konsep *human development* yang diperkenalkan oleh Amartya Sen dan Martha Nussbaum melalui *capability approach*. Mereka menegaskan bahwa pembangunan sejati adalah memperluas kebebasan dan kapabilitas manusia untuk menjalani hidup yang mereka nilai berharga. Dengan demikian, SDGs tidak sekadar target ekonomi, melainkan transformasi kualitas hidup.

UNESCO (2016) dalam dokumen *Education 2030 Framework for Action* menegaskan bahwa pendidikan adalah prasyarat untuk mencapai semua SDGs. Filosofi ini sejalan dengan ungkapan Nelson Mandela: “*Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.*” Pendidikan dipandang sebagai multiplier effect—ia melipatgandakan dampak positif di sektor lain.

Indonesia ikut berperan dalam perumusan SDGs, dan sejak 2017 telah mengintegrasikannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Badan Pusat Statistik (BPS) rutin merilis laporan pencapaian SDGs, termasuk indikator pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa SDGs bukan sekadar agenda global, tetapi juga sudah menjadi bagian dari politik pembangunan nasional.

Secara filosofis, SDGs lahir dari kebutuhan untuk mengatasi krisis peradaban: degradasi lingkungan, ketidaksetaraan global, dan konflik sosial. SDGs mengusung etika universal bahwa tidak ada satu negara pun yang boleh tertinggal (*leave no one behind*). Prinsip ini sejalan dengan nilai lokal Indonesia seperti *gotong royong* dan *Silih Asih, Asah, Asuh*, yang menekankan solidaritas sosial dan kebersamaan.

Studi empiris menunjukkan dampak nyata SDGs dalam bidang pendidikan. Laporan UNESCO (2022) mencatat peningkatan partisipasi sekolah dasar global mencapai 91%, sebagian berkat komitmen negara-negara pada SDG 4. Namun, tantangan tetap ada: sekitar 244 juta anak di dunia masih tidak bersekolah, terutama di Afrika Sub-Sahara. Hal ini menunjukkan bahwa SDGs adalah kerja kolektif yang masih harus diperjuangkan.

SDGs juga membawa filosofi inklusivitas gender. Tujuan SDG 5 (kesetaraan gender) sangat terkait dengan pendidikan. Riset World Bank (2023) menunjukkan bahwa peningkatan akses pendidikan perempuan berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesehatan keluarga. Filosofi ini menegaskan bahwa pendidikan perempuan adalah investasi lintas generasi.

Dari perspektif lingkungan, SDGs menekankan keterhubungan pendidikan dengan isu keberlanjutan. SDG 13 (climate action) misalnya, membutuhkan literasi lingkungan di sekolah agar generasi muda mampu menghadapi krisis iklim. OECD (2022) menegaskan bahwa *education for sustainable development (ESD)* adalah salah satu strategi paling efektif untuk membangun kesadaran ekologis jangka panjang.

Secara global, SDGs juga merefleksikan perubahan geopolitik. Jika dulu pembangunan global sering didikte oleh negara maju, kini SDGs mengusung prinsip kesetaraan antarnegara. Setiap negara berhak dan wajib merancang strategi sesuai konteks domestiknya. Ini adalah bentuk *epistemic justice*—keadilan dalam pengetahuan dan pengalaman lokal.

Di Indonesia, filosofi SDGs sejalan dengan cita-cita *Indonesia Emas 2045*. Visi ini menempatkan pendidikan bermutu sebagai tulang punggung daya saing bangsa. Kurikulum Merdeka, Rapor Pendidikan, serta penguatan SMK dan perguruan tinggi merupakan kontribusi nyata terhadap pencapaian SDG 4 dan target-target lainnya.

Dengan demikian, lahirnya SDGs tidak hanya merupakan momentum teknokratis, tetapi juga refleksi filosofis global. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tanpa pendidikan adalah rapuh, dan pendidikan tanpa keberlanjutan adalah sia-sia. Filosofi SDGs menegaskan bahwa dunia yang kita bangun hari ini adalah warisan bagi generasi mendatang, dan pendidikan adalah kuncinya.

## **B. SDG 4: Pendidikan Bermutu untuk Semua**

SDG 4 (*Sustainable Development Goal 4*) adalah jantung dari agenda pembangunan global 2030, karena pendidikan dianggap sebagai katalis bagi tercapainya 16 tujuan lain. Inti dari SDG 4 adalah menjamin pendidikan

yang inklusif, adil, bermutu, dan mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang. Dalam konteks Indonesia, SDG 4 memiliki makna ganda: pertama, sebagai komitmen global untuk menyiapkan generasi yang mampu bersaing di panggung dunia; kedua, sebagai mandat moral untuk memastikan tidak ada satu anak pun yang tertinggal dari akses pendidikan.

Pendidikan bermutu tidak sekadar diukur dari angka partisipasi sekolah, tetapi juga dari kualitas proses pembelajaran, relevansi kurikulum, kompetensi guru, serta kesejahteraan murid. Mutu pendidikan juga menyangkut kemampuan membekali murid dengan keterampilan abad ke-21: berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Data UNESCO (2022) menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan global meningkat, kesenjangan mutu masih tinggi antarnegara, bahkan antardaerah dalam satu negara. Di Indonesia, Rapor Pendidikan 2023 menegaskan bahwa literasi dan numerasi masih menjadi tantangan utama, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Dalam kerangka SDG 4, ada tujuh target utama: akses pendidikan anak usia dini yang bermutu, pendidikan dasar dan menengah yang inklusif, keterampilan vokasi dan teknis, penghapusan disparitas gender, peningkatan kompetensi literasi dan numerasi, penyediaan lingkungan belajar yang aman, serta perluasan akses pendidikan tinggi. Setiap target ini memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan nasional. Program *Merdeka Belajar* yang digagas Kemendikbudristek menjadi salah satu instrumen nyata dalam mendukung target-target tersebut, karena menekankan fleksibilitas, pembelajaran berbasis proyek, dan penguatan karakter.

Namun, pencapaian SDG 4 bukan tanpa tantangan. Krisis pandemi COVID-19 pada 2020–2022 memberikan pukulan besar pada pendidikan global. Bank Dunia (2022) memperkirakan ada *learning loss* yang signifikan, di mana murid kehilangan kemampuan setara dengan 6–12 bulan pembelajaran. Di Indonesia, kondisi ini diperburuk oleh kesenjangan akses internet, keterbatasan perangkat, dan kurangnya kesiapan guru dalam pembelajaran daring. Dampaknya, ketidaksetaraan pendidikan semakin terlihat jelas antara kelompok menengah ke atas dan kelompok masyarakat miskin.

SDG 4 juga menekankan pentingnya *lifelong learning* atau pembelajaran sepanjang hayat. Dalam konteks masyarakat global yang terus berubah, manusia tidak bisa berhenti belajar setelah lulus sekolah atau perguruan

tinggi. Pendidikan harus menjadi ekosistem yang mendukung setiap orang untuk belajar kapan saja, di mana saja, dan dari siapa saja. Indonesia mulai mengarah ke sana melalui program Pendidikan Nonformal, Kampus Merdeka, dan upaya digitalisasi pembelajaran. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan sistem ini benar-benar inklusif, bukan hanya tersedia untuk kelompok yang sudah memiliki akses.

Dalam kacamata filosofis, SDG 4 sejatinya adalah upaya memanusiakan manusia. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang bukan hanya menyiapkan murid menjadi tenaga kerja, tetapi juga menjadi warga dunia yang berkarakter, peduli, dan bertanggung jawab. Inilah yang sejalan dengan nilai *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*: kasih sayang sebagai fondasi, proses belajar sebagai jalan, dan bimbingan moral sebagai arah. Jika nilai ini diintegrasikan dengan kerangka global SDG 4, maka pendidikan Indonesia tidak hanya mengikuti agenda dunia, tetapi juga memberikan kontribusi khas Nusantara bagi percakapan global tentang pendidikan.

Dengan demikian, SDG 4 adalah kompas moral dan strategis yang harus terus dipegang hingga 2030 dan dilanjutkan hingga 2045. Mutu, inklusi, dan keadilan dalam pendidikan harus menjadi roh dari setiap kebijakan, inovasi, dan praktik di sekolah maupun universitas. Jika berhasil, maka pendidikan Indonesia tidak hanya akan melahirkan generasi emas 2045, tetapi juga ikut menyumbangkan cahaya bagi dunia yang lebih adil dan manusiawi.

### C. Pendidikan dan Hubungannya dengan SDGs Lain

Pendidikan dalam kerangka SDGs tidak berdiri sebagai tujuan yang terisolasi. SDG 4 (*Quality Education*) menjadi semacam “penghubung” yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir semua tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Dengan kata lain, pendidikan adalah benang merah yang menjalin keterkaitan antara kemiskinan, kesehatan, kesetaraan gender, pekerjaan, lingkungan, hingga perdamaian. Subbab ini akan membahas bagaimana pendidikan berhubungan erat dengan tujuan-tujuan SDGs lainnya, serta menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian SDGs bergantung pada kualitas sistem pendidikan.

Hubungan pertama terlihat pada SDG 1 (*No Poverty*). Pendidikan adalah instrumen paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan. Laporan World Bank (2023) menegaskan bahwa setiap tambahan satu tahun pendidikan dapat meningkatkan pendapatan individu sebesar 8–10%. Di Indonesia, BPS (2023) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan lebih tinggi pada masyarakat dengan pendidikan rendah, memperkuat argumen bahwa investasi pendidikan adalah strategi jangka panjang pengentasan kemiskinan.

Keterkaitan dengan SDG 3 (*Good Health and Well-being*) juga sangat jelas. Pendidikan meningkatkan kesadaran kesehatan, perilaku hidup bersih, dan akses layanan medis. Penelitian UNESCO (2022) menemukan bahwa ibu dengan pendidikan menengah ke atas 50% lebih mungkin membawa anak mereka ke layanan kesehatan. Dalam konteks pandemi, literasi kesehatan melalui pendidikan terbukti memperkuat perilaku pencegahan COVID-19 di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Pendidikan adalah motor penggerak kesetaraan gender (SDG 5). Anak perempuan yang mendapat pendidikan lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, menunda usia pernikahan, dan melahirkan generasi sehat. UNICEF (2022) melaporkan bahwa peningkatan partisipasi pendidikan anak perempuan secara global menurunkan angka pernikahan dini hingga 15% dalam satu dekade terakhir. Di Indonesia, program wajib belajar 12 tahun menjadi instrumen penting dalam mendorong kesetaraan ini.

Keterhubungan dengan SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*) sangat erat. Pendidikan berkualitas menyiapkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan industri. OECD (2022) melaporkan bahwa negara dengan kualitas pendidikan tinggi mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Di Indonesia, program SMK Pusat Keunggulan dan link-and-match dengan industri adalah implementasi nyata dari sinergi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan juga memainkan peran penting dalam mendukung SDG 10 (*Reduced Inequalities*). Akses pendidikan inklusif membantu mengurangi ketimpangan antarwilayah dan kelompok sosial. Laporan BPS (2023) menegaskan bahwa partisipasi sekolah di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding

pedesaan. Upaya afirmatif melalui beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) adalah strategi untuk mempersempit kesenjangan ini.

Keterkaitan pendidikan dengan SDG 12 (*Responsible Consumption and Production*) terletak pada literasi lingkungan. Melalui *Education for Sustainable Development (ESD)*, siswa dididik untuk memiliki kesadaran ekologis. UNESCO (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan ESD berhasil menurunkan konsumsi energi hingga 20% di lingkungannya. Di Indonesia, program Adiwiyata adalah contoh bagaimana pendidikan berkontribusi pada pola konsumsi berkelanjutan.

SDG 13 (*Climate Action*) juga menempatkan pendidikan sebagai kunci. Krisis iklim menuntut generasi yang melek sains dan ekologi. OECD (2022) menekankan bahwa literasi iklim di sekolah meningkatkan kesadaran generasi muda dalam mengurangi jejak karbon. Indonesia telah mengintegrasikan isu perubahan iklim dalam mata pelajaran IPA dan program literasi lingkungan, meski implementasi di daerah masih bervariasi.

Hubungan erat juga terlihat dengan SDG 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*). Pendidikan adalah fondasi bagi masyarakat damai dan demokratis. Paulo Freire menekankan bahwa pendidikan kritis melahirkan warga negara yang sadar hak dan tanggung jawabnya. UNESCO (2022) mendokumentasikan bahwa program pendidikan perdamaian berhasil menurunkan potensi konflik antar-etnis di Rwanda pascagenosida. Indonesia pun melalui pendidikan multikultural berupaya mencegah radikalisme.

SDG 17 (*Partnerships for the Goals*) menegaskan pentingnya kolaborasi. Pendidikan berperan sebagai ruang dialog antaraktor: pemerintah, swasta, komunitas, dan dunia internasional. Di Indonesia, kolaborasi sekolah dengan industri dalam program vokasi, serta kerja sama perguruan tinggi dengan lembaga riset global, menunjukkan bagaimana pendidikan menjadi motor kemitraan strategis.

Keterhubungan lintas SDGs juga terlihat dari sisi kesehatan mental dan *well-being*. American Psychological Association (2022) menekankan bahwa pendidikan yang humanis berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan psikologis. Dengan demikian, kualitas pendidikan tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga dimensi emosional dan sosial masyarakat.

Dari perspektif teoretis, Amartya Sen melalui *capability approach* menekankan bahwa pendidikan memperluas kebebasan manusia. Filosofi ini menjelaskan mengapa pendidikan berdampak lintas sektor: ia meningkatkan kapabilitas individu untuk mengakses kesehatan, pekerjaan, kesetaraan, dan partisipasi politik. Dengan kata lain, pendidikan adalah prasyarat bagi semua SDGs.

Data empiris dari Indonesia menguatkan argumen ini. Rapor Pendidikan (2023) menunjukkan bahwa sekolah dengan capaian literasi dan numerasi tinggi juga memiliki tingkat partisipasi siswa lebih tinggi dalam kegiatan komunitas. Hal ini menunjukkan keterhubungan antara pendidikan berkualitas dengan penguatan modal sosial, yang pada akhirnya mendukung pencapaian berbagai SDGs lain.

Secara filosofis, keterhubungan pendidikan dengan SDGs lain mencerminkan pandangan holistik tentang pembangunan. Edgar Morin (2021) dalam *Complex Thought* menegaskan bahwa semua sistem saling terkait. Pendidikan tidak bisa hanya berfokus pada isi kurikulum, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari ekosistem sosial, ekonomi, dan ekologis yang lebih luas.

Dengan demikian, pendidikan adalah katalis utama yang menjembatani semua tujuan SDGs. Tanpa pendidikan, upaya pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan akan stagnan. Sebaliknya, dengan pendidikan bermutu, setiap tujuan SDGs memperoleh landasan yang lebih kokoh. Pendidikan, pada akhirnya, adalah energi moral dan intelektual yang menuntun dunia menuju pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif.

## D. SDGs di Indonesia: Target dan Capaian

Indonesia sebagai negara berkembang dengan populasi besar memiliki tantangan sekaligus peluang besar dalam mewujudkan agenda *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030*. Pemerintah sejak awal berkomitmen kuat dengan mengintegrasikan SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan membentuk *SDGs National Secretariat* di bawah Bappenas. Subbab ini akan membahas target SDGs khususnya di

bidang pendidikan serta capaian Indonesia hingga saat ini, lengkap dengan tantangan yang masih harus dihadapi.

Indonesia menargetkan pencapaian SDGs 2030 sebagai bagian dari visi *Indonesia Emas 2045*. SDG 4 tentang pendidikan bermutu menjadi salah satu prioritas utama. Target nasional mencakup pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah, peningkatan kualitas guru, integrasi pendidikan vokasi dengan industri, serta penguatan literasi, numerasi, dan karakter.

Data BPS (2023) menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan dasar mencapai lebih dari 100%, menandakan akses relatif merata. Namun, untuk pendidikan menengah dan tinggi, APK masih tertinggal: 80% untuk SMA/SMK dan hanya sekitar 36% untuk perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan masih ada pekerjaan besar dalam memperluas akses.

Laporan *Rapor Pendidikan* (Kemendikbudristek, 2023) mengungkapkan adanya kesenjangan capaian literasi dan numerasi antarwilayah. Siswa di perkotaan mencatat capaian lebih tinggi dibandingkan siswa di pedesaan dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Ini memperlihatkan bahwa akses pendidikan belum selalu berbanding lurus dengan kualitas pendidikan.

UNESCO (2022) mencatat bahwa Indonesia berhasil menurunkan angka buta huruf orang dewasa menjadi sekitar 3%, sebuah capaian signifikan dibanding dekade sebelumnya. Namun, masalah literasi fungsional masih menjadi tantangan: banyak siswa yang bisa membaca teks, tetapi kesulitan memahami makna.

Dalam konteks kesetaraan gender, Indonesia mencatat kemajuan. BPS (2023) melaporkan bahwa partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan relatif seimbang di tingkat dasar dan menengah. Namun, ketimpangan muncul di perguruan tinggi, di mana partisipasi laki-laki sedikit lebih tinggi. Faktor ekonomi dan budaya masih menjadi penghalang pendidikan tinggi bagi perempuan di beberapa daerah.

Capaian positif juga terlihat dalam bidang pendidikan vokasi. Program SMK Pusat Keunggulan yang diluncurkan pada 2021 berhasil menjalin lebih dari 3.000 kerja sama dengan industri (Kemendikbudristek, 2023). Hal

ini menunjukkan langkah konkret Indonesia untuk menyesuaikan SDG 4 dengan kebutuhan SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*).

Namun, tantangan besar masih ada dalam literasi digital. Survei Kominfo (2023) menunjukkan skor literasi digital Indonesia baru mencapai 3,54 dari skala 5, kategori “sedang”. Untuk mencapai target SDGs yang menuntut kesiapan menghadapi era *Society 5.0*, literasi digital perlu diperkuat dari pendidikan dasar hingga tinggi.

Isu inklusi pendidikan juga menjadi fokus. UNICEF (2022) memperkirakan masih ada sekitar 1,7 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah, sebagian besar berasal dari keluarga miskin dan daerah terpencil. Program beasiswa KIP (Kartu Indonesia Pintar) membantu, tetapi distribusinya belum sepenuhnya merata.

Dalam konteks global, World Bank (2023) menyebut Indonesia sebagai negara dengan “progres moderat” dalam pencapaian SDG 4. Capaian akses relatif baik, tetapi kualitas dan kesetaraan masih menjadi pekerjaan rumah. Hal ini sejalan dengan hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 yang menempatkan Indonesia di bawah rata-rata OECD untuk literasi dan numerasi.

Pandemi COVID-19 sempat memperlambat capaian SDGs. Laporan Bappenas (2022) menyebut bahwa *learning loss* signifikan terjadi di seluruh jenjang. Namun, upaya pemulihan dilakukan melalui Kurikulum Merdeka yang memberi fleksibilitas lebih pada guru untuk menyesuaikan pembelajaran. Ini adalah bentuk adaptasi sistem pendidikan terhadap krisis global.

Pendidikan juga berhubungan erat dengan SDG lain di Indonesia. Misalnya, penguatan literasi lingkungan dalam kurikulum mendukung SDG 13 (*Climate Action*). Pendidikan vokasi yang terhubung dengan industri mendukung SDG 9 (*Industry, Innovation, and Infrastructure*). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya menargetkan SDG 4 secara terpisah, tetapi juga mengintegrasikannya dengan tujuan lain.

Filosofi lokal juga dapat mendukung pencapaian SDGs. Nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* dapat dijadikan fondasi implementasi pendidikan berkelanjutan: kasih dalam pemerataan akses, asah dalam peningkatan kualitas, dan asuh dalam tanggung jawab sosial. Dengan mengintegrasikan nilai budaya, Indonesia dapat memberi kontribusi unik terhadap wacana global.

Tantangan politis dan birokratis tetap ada. Desentralisasi pendidikan membuat capaian SDGs sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah. OECD (2022) menyoroti bahwa disparitas antarprovinsi menjadi hambatan utama pencapaian target nasional. Oleh karena itu, koordinasi lintas level pemerintahan sangat penting.

Secara keseluruhan, capaian SDGs di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam akses, kesetaraan gender, dan inovasi vokasi. Namun, masalah kualitas, kesenjangan antarwilayah, dan literasi digital masih menjadi tantangan utama. Jika Indonesia mampu memperkuat kepemimpinan pendidikan dan memastikan pemerataan mutu, SDG 4 bukan hanya dapat tercapai, tetapi juga menjadi landasan menuju Indonesia Emas 2045.

## E. Pendidikan Berkelanjutan dan Transformasi Sosial

Pendidikan berkelanjutan (*sustainable education*) tidak hanya dimaknai sebagai kesinambungan sistem pembelajaran, melainkan sebagai strategi jangka panjang untuk membentuk masyarakat yang adil, inklusif, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dalam kerangka SDGs 2030, pendidikan berkelanjutan menjadi fondasi transformasi sosial: ia menyiapkan generasi yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga bijak secara etis dan ekologis. Subbab ini akan membahas bagaimana pendidikan berkelanjutan dapat menjadi motor transformasi sosial di Indonesia, dengan menautkan filosofi global dan kearifan lokal.

Pendidikan berkelanjutan berakar pada konsep *Education for Sustainable Development (ESD)* yang dipromosikan UNESCO sejak awal 2000-an. ESD menekankan integrasi tiga pilar pembangunan berkelanjutan—ekonomi, sosial, dan lingkungan—ke dalam kurikulum dan praktik pembelajaran. Dengan cara ini, pendidikan tidak lagi sekadar menyiapkan tenaga kerja, tetapi juga warga dunia yang peduli terhadap keberlanjutan.

Transformasi sosial melalui pendidikan terlihat dari dampak literasi. Laporan World Bank (2023) menegaskan bahwa peningkatan literasi dasar berbanding lurus dengan partisipasi warga dalam aktivitas sosial-politik. Di Indonesia, data BPS (2023) menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat melek huruf tinggi juga memiliki angka partisipasi pemilu lebih besar.

Artinya, pendidikan berkelanjutan melahirkan masyarakat yang lebih partisipatif dan demokratis.

Pendidikan berkelanjutan juga terkait dengan kesadaran lingkungan. OECD (2022) menyoroti bahwa siswa yang mendapat pendidikan literasi iklim cenderung lebih hemat energi dan peduli pada isu perubahan iklim. Indonesia telah mencoba menerapkan pendekatan ini melalui program Adiwiyata, yang mengintegrasikan pendidikan lingkungan di sekolah. Program ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku sosial dapat dimulai dari kelas.

Dari perspektif sosial, pendidikan berkelanjutan berperan dalam memperkuat kesetaraan gender. UNICEF (2022) mencatat bahwa anak perempuan yang bersekolah lebih lama cenderung menunda pernikahan dini dan berkontribusi pada kesehatan keluarga. Pendidikan di sini bukan hanya proses akademis, tetapi transformasi sosial yang berdampak lintas generasi.

Pendidikan vokasi yang berkelanjutan berkontribusi pada transformasi ekonomi. Program SMK Pusat Keunggulan misalnya, bukan hanya menyiapkan lulusan yang siap kerja, tetapi juga membangun budaya inovasi lokal. Integrasi sekolah dengan dunia usaha dan industri membantu mengurangi *skills gap* yang menjadi masalah klasik di Indonesia.

Transformasi sosial juga terjadi melalui pendidikan karakter. *Profil Pelajar Pancasila* yang menekankan gotong royong, kebinekaan, dan kemandirian adalah bentuk konkret pendidikan berkelanjutan. Nilai-nilai ini bukan hanya mendukung pencapaian SDGs, tetapi juga mengakar pada filosofi lokal seperti *Silih Asih, Asah, Asuh*. Dengan integrasi ini, pendidikan mampu menjadi jembatan antara global dan lokal.

Secara filosofis, Paulo Freire menegaskan bahwa pendidikan sejati adalah *praxis*—perpaduan antara refleksi dan aksi. Pendidikan berkelanjutan berfungsi sebagai *praxis* kolektif yang memungkinkan masyarakat mengkritisi ketidakadilan dan bertindak untuk perubahan sosial. Transformasi ini dapat terlihat dalam gerakan pendidikan komunitas, seperti sekolah adat di Kalimantan dan NTT yang menggabungkan pengetahuan lokal dengan literasi modern.

Isu digitalisasi juga menjadi bagian penting dari pendidikan berkelanjutan. Tanpa literasi digital, transformasi sosial bisa terhambat. Laporan Kominfo (2023) mencatat bahwa literasi digital Indonesia masih di angka 3,54 dari skala 5. Peningkatan literasi digital akan melahirkan warga yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga kritis terhadap etika dan dampak sosialnya.

Transformasi sosial yang lahir dari pendidikan berkelanjutan juga tampak pada inklusivitas. Pendidikan inklusif yang menjangkau anak-anak difabel, minoritas, dan masyarakat adat memperluas partisipasi sosial. UNESCO (2022) menyebut inklusivitas sebagai indikator kuat bahwa pendidikan mampu mengubah struktur sosial menuju keadilan.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan berkelanjutan dapat memperkuat resiliensi masyarakat terhadap krisis. Pandemi COVID-19 membuktikan bahwa sekolah yang memiliki budaya belajar fleksibel lebih cepat pulih dari *learning loss*. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan bukan hanya konsep ideal, tetapi kebutuhan praktis dalam menghadapi era VUCA.

Dari sisi ekonomi, pendidikan berkelanjutan melahirkan *green jobs* dan inovasi ramah lingkungan. OECD (2023) memperkirakan 65% pekerjaan masa depan akan terkait dengan teknologi hijau. Pendidikan yang menekankan keberlanjutan akan menyiapkan generasi muda untuk mengisi peluang ini, sekaligus berkontribusi pada pencapaian SDG 7 (*Affordable and Clean Energy*) dan SDG 13 (*Climate Action*).

Transformasi sosial juga dapat dilihat dari peningkatan modal sosial. Studi Santosa & Widodo (2024) menunjukkan bahwa sekolah yang melibatkan komunitas lokal dalam kurikulum lebih berhasil membangun solidaritas sosial. Dengan demikian, pendidikan berkelanjutan tidak hanya mengubah individu, tetapi juga memperkuat kohesi masyarakat.

Namun, tantangan besar tetap ada. Kesenjangan antarwilayah, minimnya infrastruktur, dan lemahnya koordinasi kebijakan bisa menghambat transformasi sosial melalui pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan berkelanjutan harus didukung dengan tata kelola yang kuat, pendanaan memadai, dan partisipasi lintas sektor.

Secara normatif, pendidikan berkelanjutan adalah upaya menjaga keseimbangan antara generasi kini dan mendatang. Prinsip ini sejalan dengan

QS. Al-Hasyr ayat 18: “*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok.*” Ayat ini menegaskan etika antargenerasi yang menjadi inti dari keberlanjutan.

Dengan demikian, pendidikan berkelanjutan tidak hanya memperluas akses atau meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga mengubah pola pikir, perilaku, dan struktur sosial. Ia menjadi fondasi transformasi menuju masyarakat yang inklusif, demokratis, dan ekologis. Bagi Indonesia, pendidikan berkelanjutan adalah jalan menuju *Indonesia Emas 2045* sekaligus kontribusi nyata pada pembangunan global berkelanjutan.

# BAGIAN II

## KEARIFAN LOKAL: SILIH ASIH, ASAH, ASUH







## BAB 4

### FILOSOFI SUNDA SEBAGAI LANDASAN PENDIDIKAN NUSANTARA

Pendidikan Indonesia tidak lahir dari ruang kosong, melainkan tumbuh dalam rahim peradaban Nusantara yang kaya akan kearifan lokal. Salah satu warisan intelektual dan moral yang paling berpengaruh adalah filosofi Sunda: *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh*. Tiga prinsip ini bukan sekadar adagium budaya, melainkan pilar etis dan pedagogis yang telah mengarahkan perilaku sosial masyarakat Sunda selama berabad-abad.

Di tengah arus globalisasi, modernisasi, dan digitalisasi pendidikan, nilai-nilai lokal kerap terpinggirkan. Padahal, falsafah Nusantara memiliki potensi besar untuk menjadi jangkar moral dalam menghadapi tantangan zaman. *Silih Asih* menekankan kasih sayang dan solidaritas; *Silih Asah* menekankan pentingnya pembelajaran bersama; dan *Silih Asuh* menekankan tanggung jawab dalam membimbing generasi muda. Tiga pilar ini sejalan dengan agenda pendidikan modern: humanisasi, kolaborasi, dan keberlanjutan.

UNESCO (2023) dalam laporan *Futures of Education* menekankan pentingnya mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam pendidikan global agar sistem belajar tidak tercerabut dari akarnya. Filosofi Sunda bisa dibaca sebagai bentuk lokal dari konsep *Learning to Live Together* dan *Learning to Be* dalam empat pilar pendidikan UNESCO. Dengan kata lain, nilai lokal tidak bertentangan dengan standar global, tetapi justru memperkaya dan menyeimbangkannya.

Dalam konteks Indonesia, mengangkat filosofi Sunda sebagai fondasi pendidikan Nusantara memiliki makna strategis. Pertama, ia menegaskan bahwa pendidikan kita berakar pada nilai asli bangsa, bukan sekadar adopsi dari luar. Kedua, ia membuka ruang dialog antara tradisi lokal dengan inovasi global. Ketiga, ia menawarkan model pendidikan yang lebih humanis, kontekstual, dan inklusif.

Bab 4 ini akan membahas akar budaya *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh*, nilai-nilai humanis yang terkandung di dalamnya, relevansinya dengan era global, perbandingannya dengan kearifan lokal Nusantara lain, serta konstruksi teori pendidikan yang dapat dibangun darinya. Dengan demikian, bab ini menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana pendidikan Indonesia dapat bertransformasi tanpa kehilangan identitasnya.

## A. Akar Budaya *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh*

Falsafah *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh* merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Sunda yang hingga kini tetap hidup dalam praktik sosial, budaya, dan pendidikan. Tiga prinsip ini bukan sekadar ungkapan etnografis, tetapi mengandung filsafat mendalam tentang relasi manusia dengan sesamanya. *Silih Asih* menekankan kasih sayang dan kepedulian, *Silih Asah* menekankan proses belajar timbal balik, sedangkan *Silih Asuh* menekankan tanggung jawab membimbing dan melindungi. Subbab ini akan mengurai akar budaya dari ketiga falsafah tersebut, jejaknya dalam sejarah Sunda, serta makna filosofisnya bagi pendidikan Nusantara.

Konsep *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh* lahir dari tradisi sosial masyarakat Sunda yang bercorak komunal. Sejak masa kerajaan Sunda kuno hingga era kolonial, masyarakat hidup dalam ikatan kekerabatan yang erat. Nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan rasa saling memiliki terinternalisasi

dalam keseharian. Dari sanalah prinsip silih (*saling*) tumbuh: manusia tidak hidup untuk dirinya sendiri, melainkan dalam relasi timbal balik dengan orang lain.

*Silih Asih* berarti saling mengasihi. Dalam masyarakat Sunda, kasih sayang tidak dibatasi pada keluarga inti, tetapi meluas pada tetangga, sahabat, bahkan pada alam sekitar. Falsafah ini tercermin dalam pepatah Sunda: “*Hurip kudu ngahirupkeun batur*” (hidup harus menghidupkan orang lain). Dalam pendidikan, prinsip ini berarti menciptakan suasana pembelajaran yang penuh empati dan solidaritas.

*Silih Asah* berarti saling mengasah atau belajar bersama. Dalam budaya Sunda, ilmu tidak dianggap sebagai milik pribadi, tetapi sesuatu yang harus dibagikan. Tradisi *ngajaring kaula muda* (membimbing generasi muda) dan *ngadongeng* (mendongeng) adalah bentuk nyata dari *Silih Asah*. Filosofi ini menegaskan bahwa pendidikan sejati adalah proses kolektif, bukan individualistik.

*Silih Asuh* berarti saling mengasuh dan membimbing. Dalam masyarakat Sunda, orang tua, guru, dan tetua adat memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi dan mengarahkan generasi muda. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan adalah amanah sosial, bukan sekadar aktivitas formal di sekolah. *Asuh* mengandung dimensi etis: membimbing dengan cinta, bukan dengan kekerasan.

Dari perspektif antropologi, falsafah ini mencerminkan struktur sosial masyarakat agraris. Hidup dalam komunitas agraris menuntut kerja sama erat, saling menolong dalam bertani, dan menjaga harmoni dengan lingkungan. Nilai-nilai ini kemudian dilembagakan dalam norma budaya yang menekankan keseimbangan antara individu dan komunitas.

Sejarah Sunda kuno juga mencatat adanya sistem pendidikan berbasis kearifan lokal. Naskah kuno seperti *Sanghyang Siksa Kandang Karesian* (abad ke-16) menekankan pentingnya moralitas, pengendalian diri, dan kebijaksanaan dalam kehidupan. Falsafah *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh* dapat dibaca sebagai kelanjutan dari tradisi etika ini.

Dari perspektif filsafat pendidikan, falsafah ini sejalan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang *ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani*. Keduanya menekankan bahwa pendidikan adalah

proses relasional, di mana guru memberi teladan, membangun semangat, dan memberi ruang kebebasan. Ini menunjukkan bahwa nilai lokal dan nasional sesungguhnya saling melengkapi.

Penelitian modern juga menyoroiti relevansi falsafah ini. Studi Mulyana (2021) tentang pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Sunda menemukan bahwa penerapan *Silih Asih, Asah, Asuh* di sekolah dasar mampu meningkatkan empati siswa dan menurunkan konflik antar teman sebaya. Hal ini membuktikan bahwa nilai tradisional tetap relevan di era modern.

Dalam konteks globalisasi, falsafah ini menjadi benteng identitas. Arus budaya global sering kali menekankan individualisme dan kompetisi. *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh* menawarkan alternatif: pendidikan yang menekankan kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Nilai ini sejalan dengan agenda UNESCO tentang *Learning to Live Together*.

Falsafah ini juga memiliki implikasi ekologis. Masyarakat Sunda tradisional tidak hanya mempraktikkan kasih sayang antar manusia, tetapi juga terhadap alam. *Ngajaga leuweung* (menjaga hutan) dan *ngamumule cai* (merawat air) adalah wujud *Silih Asih* dengan lingkungan. Dalam pendidikan modern, nilai ini bisa diintegrasikan ke dalam literasi lingkungan untuk mendukung SDG 13 (*Climate Action*).

Dari sisi psikologi pendidikan, *Silih Asih* menciptakan rasa aman emosional, *Silih Asah* membangun motivasi belajar, dan *Silih Asuh* menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Ketiga dimensi ini selaras dengan teori kebutuhan dasar Maslow: kasih sayang (*love and belonging*), aktualisasi diri melalui belajar (*self-actualization*), dan rasa aman (*safety*).

Relevansi falsafah ini juga terlihat dalam kebijakan pendidikan Indonesia. Program *Profil Pelajar Pancasila* dengan enam dimensi (beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global) memiliki titik temu dengan *Silih Asih, Asah, Asuh*. Integrasi ini menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat memperkuat kebijakan nasional.

Dalam perspektif politik pendidikan, falsafah ini dapat menjadi dasar dekolonisasi pendidikan. Pendidikan kita sering kali lebih mengacu pada model Barat. Dengan mengangkat *Silih Asih, Asah, Asuh*, Indonesia menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh tercerabut dari akar budaya bangsa. Ini adalah strategi membangun kemandirian epistemologis.

Secara praktis, penerapan falsafah ini bisa diwujudkan dalam manajemen sekolah. Misalnya, *Silih Asih* melalui budaya saling menghargai antar guru dan siswa, *Silih Asah* melalui program belajar kolaboratif, dan *Silih Asuh* melalui pembinaan karakter yang konsisten. Dengan begitu, sekolah menjadi ruang hidup yang humanis, bukan sekadar institusi akademik.

Dengan demikian, akar budaya *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh* adalah warisan yang kaya makna dan relevan untuk pendidikan masa kini. Ia lahir dari konteks sosial-budaya Sunda, tetapi nilai universalnya dapat menjadi landasan pendidikan Nusantara. Integrasi falsafah ini dengan sistem modern akan melahirkan model pendidikan yang kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.

## B. Nilai-nilai Humanis dalam Perspektif Lokal

Pendidikan yang berakar pada kearifan lokal memiliki kekuatan untuk membentuk generasi yang tidak tercerabut dari budayanya sendiri, sekaligus mampu berdialog dengan dunia global. Dalam konteks Sunda, falsafah *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh* tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai humanis. Nilai humanis ini menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, kepedulian terhadap sesama, dan tanggung jawab moral untuk saling menumbuhkan.

Filsafat humanisme Barat sering kali menekankan aspek otonomi individu dan kebebasan berpikir. Namun, perspektif lokal seperti Sunda memperluas konsep humanisme ke arah relasi sosial—*self* tidak bisa dipisahkan dari *other*. Dengan demikian, nilai humanis dalam konteks lokal menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dengan harmoni komunitas.

Nilai humanis dalam budaya Sunda bukanlah konsep asing yang diimpor, melainkan hasil internalisasi panjang pengalaman historis masyarakat. Prinsip kasih sayang (*Silih Asih*), pengembangan diri bersama (*Silih Asah*), dan tanggung jawab sosial (*Silih Asuh*) menunjukkan bahwa humanisme dalam perspektif lokal bersifat dialogis, kolektif, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial.

Melalui kaca mata pendidikan, nilai-nilai humanis lokal ini memiliki implikasi besar. Pertama, ia menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya pencapaian akademik, melainkan juga pembentukan karakter. Kedua, ia menekankan pentingnya relasi empatik antara guru dan murid. Ketiga, ia mengajarkan bahwa pengetahuan bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk kebaikan bersama.

Bab ini akan mengeksplorasi nilai-nilai humanis dalam perspektif lokal Sunda secara lebih mendalam, sekaligus memperlihatkan bagaimana falsafah tersebut dapat menjadi fondasi pendidikan Nusantara yang relevan dengan tantangan global.

Nilai-nilai humanis dalam perspektif lokal Nusantara sesungguhnya bukanlah gagasan baru yang tiba-tiba lahir di era modern, melainkan sudah mengakar sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Dalam setiap tradisi, suku, dan komunitas lokal, terdapat warisan filosofis yang menekankan penghormatan pada martabat manusia, kepedulian terhadap sesama, dan keseimbangan dengan alam. Kearifan lokal Sunda melalui *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh* adalah salah satu representasi yang menunjukkan bahwa humanisme telah lama hadir sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat.

Nilai *Silih Asih* menegaskan bahwa kasih sayang adalah energi sosial yang mengikat manusia. Dalam perspektif lokal, kasih sayang tidak terbatas hanya pada keluarga inti, tetapi meluas hingga ke tetangga, komunitas, bahkan lingkungan alam. Sikap peduli dan empati yang tumbuh dari *Silih Asih* menjadi wujud konkret humanisme: mengakui bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang penuh cinta, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau budaya.

*Silih Asah* mencerminkan dimensi pendidikan dalam humanisme lokal. Belajar bersama, saling mengingatkan, dan mengasah kemampuan bukan hanya aktivitas intelektual, tetapi juga moral. Humanisme dalam perspektif ini menempatkan proses belajar sebagai upaya kolektif, bukan kompetisi semata. Ia mengajarkan bahwa pengetahuan tidak boleh dimonopoli, tetapi dibagikan demi kebaikan bersama. Semangat *Silih Asah* inilah yang bisa menjadi dasar bagi model pendidikan kolaboratif di sekolah modern.

Sementara itu, *Silih Asuh* menekankan pentingnya bimbingan dan pendampingan yang penuh kasih. Perspektif lokal melihat bahwa setiap

manusia, terutama generasi muda, membutuhkan teladan dan arahan agar tidak kehilangan arah. Humanisme dalam *Silih Asuh* bukanlah bentuk kontrol yang mengekang, melainkan tanggung jawab moral untuk mendampingi dengan cinta. Guru, orang tua, dan pemimpin lokal adalah figur utama dalam proses *Silih Asuh*, sehingga nilai ini sangat relevan dengan pendidikan berbasis karakter.

Dalam konteks masyarakat Sunda, nilai-nilai ini bukan sekadar idealisme, melainkan sudah lama dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam tradisi gotong royong, di mana seluruh warga bahu-membahu membangun rumah, membersihkan lingkungan, atau membantu keluarga yang terkena musibah. Tradisi ini menunjukkan bahwa humanisme lokal menekankan kebersamaan dan solidaritas, bukan individualisme.

Perspektif humanis lokal juga menekankan keseimbangan dengan alam. Manusia tidak dipandang sebagai penguasa absolut atas alam, melainkan bagian dari ekosistem yang harus dijaga. Nilai ini sejalan dengan prinsip keberlanjutan dalam SDGs. Di banyak komunitas adat Nusantara, hubungan dengan alam dijaga melalui ritual, aturan adat, dan praktik pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, humanisme lokal mencakup dimensi ekologis yang sangat relevan dengan tantangan global saat ini.

Dalam pendidikan, nilai humanis lokal sering hadir dalam bentuk narasi, cerita rakyat, dan pepatah bijak. Ungkapan Sunda seperti "*Lamun cageur kudu bageur, lamun bageur kudu bener, lamun bener kudu pinter*" (kalau sehat harus baik, kalau baik harus benar, kalau benar harus pintar) adalah contoh pendidikan humanis yang sederhana namun mendalam. Ia mengajarkan keseimbangan antara kesehatan, moral, dan intelektual sebagai fondasi kehidupan manusia.

Nilai-nilai humanis lokal juga memberikan alternatif terhadap pendidikan yang terlalu teknokratis. Di tengah arus globalisasi yang sering menekankan standar internasional, perspektif lokal menghadirkan wajah pendidikan yang lebih manusiawi, kontekstual, dan berakar pada budaya. Hal ini penting agar pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia modern yang kompetitif, tetapi juga manusia yang memiliki identitas budaya dan moral.

Selain itu, perspektif humanis lokal mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Dalam praktik kehidupan sosial, masyarakat

Nusantara mengembangkan budaya egaliter, seperti musyawarah untuk mufakat. Nilai ini sejalan dengan demokrasi modern, tetapi dengan nuansa khas: keputusan diambil dengan mempertimbangkan rasa, bukan hanya logika. Inilah bentuk humanisme yang menekankan pentingnya harmoni sosial.

Pendidikan humanis berbasis lokal juga sangat relevan dalam membangun toleransi. Indonesia adalah negara yang majemuk, dan setiap komunitas lokal memiliki cara tersendiri dalam menjaga kerukunan. Nilai *Silih Asih* misalnya, bisa menjadi dasar bagi pendidikan multikultural, karena menekankan kasih sayang tanpa membedakan latar belakang. Dengan demikian, humanisme lokal dapat menjadi benteng terhadap intoleransi dan polarisasi yang semakin menguat di era digital.

Dalam praktik sekolah, nilai humanis lokal bisa diimplementasikan melalui kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, maupun budaya sekolah. Guru bisa menanamkan semangat *Silih Asah* dengan mendorong kerja kelompok, *peer teaching*, dan tutor sebaya. Nilai *Silih Asih* bisa dihidupkan melalui program peduli lingkungan, donasi sosial, atau kegiatan bakti masyarakat. Sementara *Silih Asuh* bisa diintegrasikan dalam sistem mentoring guru terhadap murid atau antar guru.

Secara filosofis, humanisme lokal tidak meniadakan nilai global, melainkan melengkapinya. Perspektif ini membuktikan bahwa nilai-nilai luhur yang tumbuh dari budaya lokal sejalan dengan pilar-pilar UNESCO. *Learning to Live Together* selaras dengan *Silih Asih*, *Learning to Know* dan *Learning to Do* selaras dengan *Silih Asah*, sementara *Learning to Be* selaras dengan *Silih Asuh*. Integrasi ini menciptakan sintesis yang kaya antara lokal dan global.

Lebih jauh lagi, nilai-nilai humanis lokal dapat memperkuat resiliensi masyarakat dalam menghadapi era VUCA. Kasih sayang, kebersamaan, dan bimbingan moral adalah modal sosial yang membuat komunitas tetap bertahan di tengah krisis. Misalnya, ketika pandemi melanda, solidaritas berbasis kearifan lokal terbukti efektif dalam memberikan dukungan bagi keluarga yang terdampak. Inilah bukti bahwa humanisme lokal bukan hanya idealisme, tetapi praktik nyata yang menyelamatkan.

Dalam horizon jangka panjang, nilai-nilai humanis dalam perspektif lokal dapat menjadi warisan penting bagi generasi mendatang. Pendidikan yang berakar pada budaya lokal tidak hanya memperkuat identitas bangsa, tetapi juga memberi kontribusi unik bagi percakapan global tentang humanisme. Dunia membutuhkan perspektif alternatif untuk menghadapi tantangan dehumanisasi akibat teknologi, dan Nusantara dapat menyumbangkannya melalui nilai *Silih Asih, Asah, Asuh*.

Akhirnya, subbab ini menegaskan bahwa nilai-nilai humanis dalam perspektif lokal adalah kekayaan yang tidak boleh diabaikan. Ia adalah pondasi untuk membangun pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan. Jika nilai-nilai ini terus hidup dalam praktik pendidikan, maka Indonesia tidak hanya akan melahirkan generasi emas yang cerdas, tetapi juga generasi yang penuh kasih, bijaksana, dan siap berkontribusi bagi dunia.

### C. Relevansi Silih Asih–Asah–Asuh di Era Global

Di tengah derasny arus globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial di era VUCA–Society 5.0, falsafah lokal sering dianggap usang atau terbatas pada konteks budaya tertentu. Namun, justru sebaliknya, kearifan lokal seperti *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh* semakin menemukan relevansinya. Nilai kasih, saling belajar, dan saling membimbing menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun pendidikan yang humanis, inklusif, dan berkelanjutan. Subbab ini akan menelaah bagaimana falsafah Sunda ini dapat berperan dalam lanskap global, baik dalam pendidikan maupun transformasi sosial.

Globalisasi menghadirkan tantangan besar: kompetisi ekonomi, mobilitas manusia, migrasi, dan disrupsi teknologi. Dalam situasi ini, solidaritas global menjadi penting. *Silih Asih*—nilai kasih sayang—relevan untuk menumbuhkan empati lintas bangsa. UNESCO (2023) menegaskan bahwa salah satu tujuan pendidikan abad ke-21 adalah *global citizenship*, yaitu kesadaran menjadi warga dunia yang peduli pada kemanusiaan universal.

*Silih Asah* juga menemukan relevansinya dalam era global yang menuntut *lifelong learning*. OECD (2022) menekankan bahwa pembelajaran sepanjang hayat adalah kompetensi utama di abad ini. Falsafah Sunda sudah lama menegaskan hal itu: manusia terus belajar dalam interaksi sosial. Maka, *Silih*

*Asah* dapat menjadi basis pedagogi global yang menekankan kolaborasi, bukan hanya kompetisi.

*Silih Asuh* memiliki relevansi dalam konteks krisis global, seperti pandemi, konflik, dan perubahan iklim. Dunia membutuhkan kepemimpinan yang tidak otoriter, melainkan melindungi dan membimbing. Falsafah ini sejalan dengan gagasan *servant leadership* yang berkembang di Barat. Dengan demikian, *Silih Asuh* dapat memperkaya wacana kepemimpinan global.

Dalam pendidikan internasional, relevansi falsafah Sunda terlihat pada kebutuhan pendidikan multikultural. Globalisasi membawa pertemuan identitas yang beragam. *Silih Asih* dapat memperkuat toleransi; *Silih Asah* mendorong pertukaran pengetahuan antarbudaya; *Silih Asuh* menciptakan rasa aman bagi kelompok minoritas.

Penerapan nilai lokal di ruang global bukan sekadar romantisme budaya. Penelitian Santosa & Widodo (2024) menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di Indonesia yang mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kurikulum justru lebih berhasil membangun karakter toleransi dibanding sekolah yang hanya mengadopsi model Barat. Artinya, nilai lokal dapat berfungsi sebagai energi transformatif di era global.

Dari perspektif ekologi, *Silih Asih* dengan alam memiliki resonansi dengan SDG 13 (*Climate Action*). Krisis iklim adalah isu global, tetapi solusinya sering lahir dari nilai lokal. Falsafah Sunda mengajarkan bahwa mencintai sesama juga berarti menjaga bumi. Dengan pendekatan ini, pendidikan lingkungan dapat lebih membumi dan relevan bagi peserta didik.

Falsafah *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* juga dapat memperkuat agenda UNESCO *Learning to Live Together*. Dalam dunia yang kerap dilanda konflik identitas, nilai ini mengajarkan keterhubungan, bukan perpecahan. Dengan menginternalisasi nilai lokal, siswa tidak hanya belajar toleransi, tetapi juga memiliki basis etis yang kuat untuk hidup harmonis.

Teknologi global yang canggih pun membutuhkan kerangka moral. AI, big data, dan media sosial bisa menjadi pedang bermata dua: memperluas akses pengetahuan, tetapi juga menciptakan disinformasi. *Silih Asah* dapat

menjadi prinsip untuk membangun literasi digital berbasis tanggung jawab sosial, bukan sekadar kecakapan teknis.

Dalam era mobilitas internasional, banyak pelajar Indonesia yang belajar ke luar negeri, dan sebaliknya banyak mahasiswa asing yang datang ke Indonesia. *Silih Asih, Asah, Asuh* dapat dijadikan etos perjumpaan antarbudaya. Kasih sayang, saling belajar, dan saling membimbing menjadi modal penting untuk mengelola perbedaan.

Penerapan falsafah Sunda dalam konteks global juga dapat memperkuat diplomasi budaya Indonesia. Soft power bangsa tidak hanya melalui ekonomi atau politik, tetapi juga nilai pendidikan. Jika Jepang memperkenalkan *Society 5.0*, Indonesia dapat memperkenalkan *Education 5.0 berbasis Silih Asih, Asah, Asuh*. Ini akan memperkaya wacana pendidikan dunia.

Dalam konteks filsafat pendidikan global, falsafah Sunda dapat disejajarkan dengan teori humanisme Barat (Dewey, Rogers) atau teori pembelajaran sosial (Vygotsky). Namun, nilai tambahnya adalah dimensi komunal yang kuat, yang sering kali absen dalam pendekatan individualistik. Dengan demikian, falsafah Sunda dapat mengisi celah dalam diskursus pendidikan global.

Transformasi sosial di era global juga membutuhkan narasi etis. Krisis kepercayaan, meningkatnya polarisasi, dan melemahnya solidaritas menuntut fondasi moral baru. *Silih Asih, Asah, Asuh* dapat dijadikan narasi moral alternatif yang lebih bumi dan bisa diterima lintas budaya, karena prinsip kasih, belajar, dan asuh bersifat universal.

Dalam praktiknya, sekolah-sekolah Indonesia dapat menjadi laboratorium nilai global berbasis lokal. Misalnya, program pertukaran pelajar bisa diperkaya dengan praktik *Silih Asih* (homestay berbasis keluarga asuh), *Silih Asah* (pembelajaran kolaboratif lintas negara), dan *Silih Asuh* (pendampingan siswa internasional). Dengan demikian, nilai lokal tampil dalam ruang global.

Keterhubungan antara nilai lokal dan global juga sejalan dengan gagasan Edgar Morin tentang *pensée complexe* (pemikiran kompleks). Dunia tidak bisa dipahami dengan dikotomi sederhana, tetapi melalui integrasi nilai yang berlapis. Falsafah Sunda dapat menjadi salah satu komponen pemikiran kompleks yang dibutuhkan dunia global.

Dengan demikian, relevansi *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh* di era global tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi sebagai filosofi pendidikan dan sosial yang universal. Nilai ini mampu menyeimbangkan teknologi dengan kemanusiaan, globalisasi dengan identitas lokal, serta kompetisi dengan solidaritas. Dalam konteks pendidikan, falsafah Sunda bukan nostalgia, melainkan visi masa depan.

#### D. Perbandingan dengan Nilai Kearifan Lokal Nusantara Lain

Nusantara adalah mosaik kebudayaan yang kaya dengan kearifan lokal. Setiap daerah memiliki falsafah hidup yang lahir dari pengalaman historis, ekologi, dan spiritualitas masyarakatnya. *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh* dari Sunda hanyalah salah satu mozaik, yang jika disandingkan dengan kearifan lokal lain, memperlihatkan benang merah humanisme Nusantara. Subbab ini membandingkan falsafah Sunda dengan nilai-nilai kearifan lokal dari Jawa, Bali, Minangkabau, Bugis, dan Papua untuk menunjukkan kesatuan sekaligus keragaman etika pendidikan Nusantara.

Di Jawa, falsafah *Hamemayu Hayuning Bawana* menekankan pentingnya menjaga harmoni dunia. Prinsip ini mirip dengan *Silih Asih*, karena keduanya menekankan kasih sayang bukan hanya pada sesama manusia, tetapi juga pada alam. Dalam pendidikan, keduanya mendorong siswa memahami bahwa belajar bukan hanya demi dirinya sendiri, melainkan demi menjaga keseimbangan kehidupan.

Di Bali, konsep *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kebahagiaan) menekankan harmoni antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Nilai ini sejalan dengan *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* yang menekankan kasih, pembelajaran kolektif, dan asuhan sosial. Bedanya, *Tri Hita Karana* lebih eksplisit memasukkan dimensi spiritual sebagai pilar pendidikan.

Minangkabau memiliki pepatah *Alam Takambang Jadi Guru* (alam terbentang jadi guru). Prinsip ini dekat dengan *Silih Asah*, karena sama-sama menekankan belajar dari interaksi, baik dengan sesama maupun dengan alam. Falsafah ini mendorong pendidikan berbasis pengalaman

nyata (*experiential learning*), yang kini menjadi salah satu tren pedagogi global.

Di Bugis-Makassar dikenal konsep *Siri' na Pacce* (harga diri dan solidaritas). Nilai *Siri'* menekankan kehormatan diri, sedangkan *Pacce* menekankan empati terhadap penderitaan orang lain. Konsep ini selaras dengan *Silih Asih* yang mengajarkan empati, serta *Silih Asuh* yang menuntut tanggung jawab sosial. Dalam pendidikan, nilai ini memperkuat karakter integritas dan kepedulian.

Papua memiliki falsafah *One Isolom* (hidup rukun dan berbagi). Nilai ini paralel dengan *Silih Asih* dan *Silih Asuh*. Dalam praktik pendidikan komunitas, anak-anak Papua dididik bersama-sama oleh keluarga besar dan tetua adat, mencerminkan model pendidikan kolektif. Konsep ini menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab sosial, bukan hanya keluarga inti.

Jika dibandingkan, terlihat adanya benang merah: semua kearifan lokal Nusantara menekankan kasih sayang, solidaritas, pembelajaran kolektif, dan tanggung jawab sosial. Perbedaannya terletak pada aksentuasi filosofis. Sunda lebih menekankan aspek kasih dan asuhan, Jawa menekankan harmoni kosmos, Bali menekankan spiritualitas, Minangkabau menekankan pembelajaran dari alam, Bugis menekankan kehormatan dan empati, sedangkan Papua menekankan kebersamaan.

Penelitian Koentjaraningrat (1993) tentang sistem nilai budaya Indonesia menegaskan bahwa nilai utama Nusantara adalah *gotong royong*. Semua falsafah lokal, termasuk *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh*, adalah variasi dari etos gotong royong ini. Dalam pendidikan, gotong royong menjadi basis pedagogi kolaboratif yang kini juga dikembangkan dalam *21st Century Skills* (4C: critical thinking, creativity, collaboration, communication).

Dalam konteks globalisasi, perbandingan kearifan lokal ini penting untuk membangun *local wisdom-based education*. UNESCO (2021) mendorong negara-negara untuk mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kurikulum agar pendidikan relevan dengan konteks budaya. Dengan menampilkannya kesamaan dan keunikan antar daerah, Indonesia dapat menawarkan model pendidikan multikultural yang kokoh.

Integrasi kearifan lokal juga memperkuat identitas nasional. Jika pendidikan hanya mengacu pada model Barat, ada risiko alienasi budaya. Namun, jika nilai lokal disandingkan dengan nilai global, maka tercipta dialog produktif. *Silih Asih, Asah, Asuh* bisa bersinergi dengan *Tri Hita Karana* dan *Hamemayu Hayuning Bawana* untuk memperkaya kurikulum nasional.

Dalam praktik sekolah, perbandingan nilai ini bisa diwujudkan dalam pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Misalnya, sekolah di Jawa bisa mengintegrasikan *Hamemayu Hayuning Bawana*, di Bali *Tri Hita Karana*, di Sumatra *Alam Takambang Jadi Guru*, dan semuanya bisa dipayungi dalam kerangka besar *Profil Pelajar Pancasila*. Dengan demikian, keberagaman menjadi kekuatan.

Dari perspektif filsafat pendidikan, perbandingan ini menunjukkan bahwa humanisme Nusantara bersifat relasional dan ekologis. Jika humanisme Barat sering menekankan individualitas, humanisme Nusantara menekankan kebersamaan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini bisa menjadi kontribusi besar Indonesia dalam diskursus pendidikan global.

Kearifan lokal juga memperkaya metode pedagogi. Misalnya, *ngadongeng* (Sunda) atau *bakaba* (Minangkabau) adalah metode belajar berbasis cerita. *Menyama braya* (Bali) adalah praktik pembelajaran berbasis komunitas. Metode-metode ini bisa diintegrasikan dengan teknologi digital sehingga relevan dengan era *Society 5.0*.

Falsafah-falsafah lokal juga bisa dijadikan landasan penelitian pendidikan. Studi perbandingan nilai lokal memungkinkan lahirnya teori pendidikan Nusantara yang khas. Teori ini tidak hanya berguna bagi Indonesia, tetapi juga bisa menjadi kontribusi akademik global—sebuah *indigenous theory of education*.

Dengan demikian, perbandingan *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh* dengan kearifan lokal Nusantara lainnya memperlihatkan keragaman sekaligus kesatuan. Nilai-nilai ini dapat menjadi basis untuk merumuskan model pendidikan nasional yang plural, kontekstual, dan berakar pada budaya bangsa. Pendidikan Indonesia tidak lagi sekadar mengimpor teori luar, tetapi menawarkan paradigma baru yang lahir dari tanahnya sendiri.

## E. Konstruksi Teori Pendidikan dari Falsafah Sunda

Falsafah *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh* tidak hanya relevan sebagai pedoman moral, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi kerangka konseptual atau bahkan teori pendidikan yang khas Nusantara. Teori ini berangkat dari akar budaya lokal, namun memiliki signifikansi universal. Dengan mengkonstruksi falsafah Sunda dalam bentuk teori pendidikan, kita tidak hanya melestarikan warisan leluhur, tetapi juga memberi kontribusi akademik bagi wacana pendidikan global.

Konstruksi teori pendidikan dari falsafah Sunda dimulai dengan memetakan tiga pilar utamanya. *Silih Asih* dapat dipandang sebagai dimensi afektif, *Silih Asah* sebagai dimensi kognitif, dan *Silih Asuh* sebagai dimensi sosial-moral. Ketiganya membentuk kerangka pendidikan holistik yang sejalan dengan taksonomi Bloom (kognitif, afektif, psikomotorik), tetapi dengan akar filosofis lokal.

Dalam teori pendidikan modern, dimensi afektif sering terpinggirkan. Padahal, penelitian OECD (2021) menunjukkan bahwa empati dan *social-emotional learning* adalah prediktor kuat keberhasilan siswa di abad ke-21. *Silih Asih* menawarkan basis etis untuk memperkuat pendidikan afektif. Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga figur kasih yang membangun rasa aman dan kepercayaan murid.

Dimensi kognitif (*Silih Asah*) menekankan pembelajaran kolaboratif. Teori *socio-constructivism* Vygotsky menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial. Prinsip ini sudah lama dipraktikkan dalam budaya Sunda: belajar melalui dialog, diskusi, dan gotong royong. Dengan demikian, *Silih Asah* dapat diposisikan sebagai bentuk lokal dari konstruktivisme sosial.

Dimensi sosial-moral (*Silih Asuh*) menekankan tanggung jawab komunitas dalam pendidikan. Paulo Freire melalui *critical pedagogy* menegaskan pentingnya pendidikan sebagai pembebasan. *Silih Asuh* menambahkan dimensi etis: membimbing dengan kasih sayang. Hal ini sejalan dengan konsep *servant leadership* dalam pendidikan, di mana pemimpin mendidik bukan dengan kekuasaan, melainkan pelayanan.

Dengan memadukan ketiga dimensi, kita dapat membangun teori pendidikan Sunda yang berpusat pada relasi. Relasi guru-murid,

murid-murid, dan murid-masyarakat menjadi inti proses pembelajaran. Teori ini menolak pandangan pendidikan sebagai proses individualistik, dan lebih menekankan pada dimensi kolektif dan komunal.

Penelitian empiris mendukung relevansi teori ini. Studi Mulyana (2021) menunjukkan bahwa penerapan nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* di sekolah dasar meningkatkan motivasi belajar dan menurunkan perilaku bullying. Hal ini membuktikan bahwa falsafah lokal dapat memberi solusi nyata bagi masalah pendidikan kontemporer.

Konstruksi teori ini juga dapat diperluas ke ranah kurikulum. Kurikulum berbasis *Silih Asih, Asah, Asuh* menekankan integrasi nilai (asih), pengetahuan (asah), dan keterampilan hidup (asuh). Dengan demikian, kurikulum tidak sekadar berisi konten akademik, tetapi juga relasi dan pengalaman hidup yang bermakna.

Dalam manajemen pendidikan, teori ini dapat menjadi dasar model kepemimpinan Nusantara. Kepala sekolah yang menerapkan *Silih Asih* membangun iklim kasih sayang, *Silih Asah* mendorong pengembangan kapasitas guru, dan *Silih Asuh* memberi bimbingan moral dan sosial. Model ini bisa menjadi alternatif dari kepemimpinan otoriter yang masih sering terjadi di sekolah-sekolah.

Secara filosofis, konstruksi teori ini sejalan dengan prinsip *holistic education* yang berkembang di dunia internasional. Namun, perbedaannya terletak pada akar budaya lokal. Jika *holistic education* Barat cenderung universalistik, teori Sunda memberi warna partikularistik yang membumi. Ini menunjukkan bahwa teori pendidikan dapat bersifat plural sesuai konteks budaya.

Dalam kerangka Society 5.0, teori pendidikan Sunda dapat menjawab kebutuhan pendidikan humanis berbasis teknologi. *Silih Asih* menuntut agar teknologi tidak meniadakan empati, *Silih Asah* menekankan kolaborasi digital, dan *Silih Asuh* memastikan bahwa penggunaan teknologi tetap dalam kerangka etis dan tanggung jawab sosial.

Teori ini juga dapat dijadikan dasar penelitian pendidikan lebih lanjut. Misalnya, pengembangan instrumen untuk mengukur implementasi *Silih Asih, Asah, Asuh* di sekolah, atau studi komparatif antar daerah untuk melihat resonansi falsafah lokal dengan teori pendidikan global.

Penerapan teori ini di perguruan tinggi juga strategis. Mahasiswa dapat dilatih menjadi agen perubahan sosial dengan menginternalisasi nilai kasih, kolaborasi, dan tanggung jawab. Hal ini akan melahirkan lulusan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkarakter humanis.

Konstruksi teori Sunda ini juga membuka peluang kontribusi Indonesia dalam diskursus pendidikan global. Jika Jepang punya *Society 5.0*, Indonesia dapat memperkenalkan *Education 5.0* berbasis *Silih Asih, Asah, Asuh*. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi penerima teori dari luar, tetapi juga produsen teori pendidikan.

Pada akhirnya, konstruksi teori pendidikan dari falsafah Sunda menegaskan bahwa pendidikan adalah proses relasional, humanis, dan berakar pada budaya. Teori ini relevan untuk menghadapi tantangan global, tetapi tetap menjaga identitas lokal. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kerangka akademik, Indonesia dapat membangun paradigma pendidikan yang khas, inklusif, dan berdaya saing global.





## BAB 5

### AKTUALISASI SILIH ASIH, ASAH, ASUH DALAM PENDIDIKAN

Setelah kita menelusuri akar budaya dan nilai filosofis *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh* dalam konteks Sunda dan Nusantara, pertanyaan mendasar selanjutnya adalah: bagaimana falsafah ini dapat diaktualisasikan secara nyata dalam pendidikan modern? Tantangan pendidikan abad ke-21 adalah menemukan keseimbangan antara nilai lokal yang humanis dengan tuntutan global yang menekankan literasi digital, inovasi, dan daya saing.

Aktualisasi berarti penerjemahan nilai ke dalam praktik. *Silih Asih* dalam pendidikan dapat diwujudkan melalui budaya kasih sayang, kepedulian, dan empati di ruang kelas. *Silih Asah* dapat diwujudkan dalam pedagogi kolaboratif, *project-based learning*, dan pembelajaran sepanjang hayat. Sementara *Silih Asuh* dapat diterapkan dalam kepemimpinan guru yang membimbing dengan hati, bukan sekadar memberi instruksi.

UNESCO (2023) menekankan bahwa pendidikan abad ke-21 harus mengintegrasikan empat pilar: *learning to know*, *learning to do*, *learning to be*, dan *learning to live together*. Falsafah Sunda ini sebenarnya sudah memuat

keempat pilar tersebut dalam versi lokal. Dengan demikian, aktualisasi *Silih Asih, Asah, Asuh* bukan sekadar pelestarian budaya, melainkan strategi relevan untuk menghadapi era *VUCA* dan *Society 5.0*.

Bab ini akan membahas bagaimana *Silih Asih, Asah, Asuh* dapat diterapkan dalam hubungan guru–murid, pendidikan karakter, kurikulum, komunitas belajar, dan praktik sekolah maupun pesantren. Studi kasus dari sekolah dan lembaga pendidikan berbasis kearifan lokal akan ditampilkan untuk memberi gambaran nyata bagaimana nilai ini bisa hidup kembali dalam praktik pendidikan sehari-hari.

## A. Penerapan dalam Hubungan Guru–Murid

Hubungan guru–murid adalah inti dari proses pendidikan. Lebih dari sekadar transfer pengetahuan, relasi ini merupakan ruang dialog, kasih sayang, bimbingan, dan pengasuhan. Falsafah Sunda *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh* menawarkan paradigma baru untuk menata hubungan tersebut: guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, melainkan sebagai figur kasih (*asih*), mitra belajar (*asah*), dan pembimbing (*asuh*). Subbab ini akan membahas bagaimana nilai-nilai ini dapat diimplementasikan dalam praktik hubungan guru–murid di sekolah maupun pesantren, sekaligus diperkuat dengan teori pendidikan modern dan data empiris.

Pertama, *Silih Asih* dalam hubungan guru–murid menekankan pentingnya empati dan kasih sayang. Guru yang mendidik dengan penuh cinta akan menciptakan suasana kelas yang aman secara psikologis. Penelitian American Psychological Association (2022) menunjukkan bahwa siswa yang merasakan kepedulian dari gurunya memiliki motivasi belajar lebih tinggi dan tingkat stres lebih rendah.

Kedua, *Silih Asah* menegaskan bahwa guru bukan satu-satunya sumber ilmu, melainkan fasilitator proses saling belajar. Hal ini sejalan dengan teori *socio-constructivism* Vygotsky yang menekankan *zone of proximal development*. Dengan prinsip ini, guru membantu murid mengembangkan potensinya melalui dialog dan kolaborasi, bukan indoktrinasi satu arah.

Ketiga, *Silih Asuh* memperlihatkan dimensi pengasuhan dalam pendidikan. Guru memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi,

membimbing, dan menuntun murid menuju kedewasaan. Prinsip ini dekat dengan konsep *tut wuri handayani* Ki Hajar Dewantara, di mana guru mendampingi murid dengan teladan, bukan sekadar instruksi.

Dalam praktiknya, *Silih Asih* dapat diwujudkan melalui pendekatan pedagogi empatik. Misalnya, guru membuka ruang mendengar perasaan murid sebelum memulai pelajaran. Studi di Bandung (Santosa, 2023) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan pendekatan empatik mengalami penurunan kasus perundungan hingga 40%.

Sementara itu, *Silih Asuh* dapat diimplementasikan dalam pembelajaran kolaboratif dan *project-based learning*. Guru memposisikan diri sebagai pembimbing proyek, sementara murid belajar dari pengalaman langsung. Data OECD (2022) mencatat bahwa siswa yang belajar dengan pendekatan kolaboratif menunjukkan peningkatan keterampilan problem solving hingga 25%.

*Silih Asuh* bisa diwujudkan dalam praktik mentoring. Di pesantren, misalnya, kiai tidak hanya mengajar kitab, tetapi juga mengasuh santri dalam kehidupan sehari-hari. Pola ini relevan diterapkan di sekolah modern melalui program *guru pembimbing* atau *counseling teacher*. Murid merasa tidak hanya diajari, tetapi juga diarahkan dalam hidupnya.

Dimensi *Silih Asih, Asah, Asuh* juga memperkuat pendidikan karakter. Kurikulum Merdeka dengan *Profil Pelajar Pancasila* dapat lebih membumi bila guru menanamkan kasih, kolaborasi, dan tanggung jawab melalui interaksi harian. Karakter tidak lahir dari buku teks, melainkan dari relasi nyata antara guru dan murid.

Hubungan ini juga dapat diperkuat dengan teknologi. Platform digital tidak boleh mereduksi interaksi guru–murid menjadi sekadar administrasi daring. Justru, teknologi harus digunakan untuk memperkaya *Silih Asah* melalui diskusi virtual, *Silih Asih* melalui komunikasi personal, dan *Silih Asuh* melalui pendampingan daring.

Penelitian UNESCO (2023) menekankan bahwa kualitas relasi guru–murid adalah faktor penentu utama *student well-being*. Pendidikan humanis yang menekankan kasih dan bimbingan berbanding lurus dengan kebahagiaan murid. Maka, falsafah Sunda ini bukan sekadar tradisi lokal, melainkan jawaban global atas kebutuhan pendidikan yang lebih manusiawi.

Dalam perspektif psikologi pendidikan, *Silih Asih* terkait dengan teori kebutuhan Maslow (kebutuhan akan kasih sayang dan rasa memiliki), *Silih Asah* terkait dengan *cognitive development* Piaget, dan *Silih Asuh* terkait dengan *moral development* Kohlberg. Ini menunjukkan bahwa falsafah Sunda memiliki resonansi dengan teori pendidikan internasional.

Praktik sekolah di Jawa Barat menunjukkan relevansi nilai ini. Studi kasus (Mulyana, 2022) menemukan bahwa sekolah yang mengintegrasikan nilai *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* dalam manajemen kelas melaporkan peningkatan kedisiplinan siswa, bukan karena hukuman, tetapi karena kesadaran. Murid merasa dihargai, dilibatkan, dan dibimbing.

Hubungan guru–murid berbasis falsafah ini juga membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi pendidikan di era VUCA. Tanpa kepercayaan, transformasi pendidikan akan sulit berjalan. *Silih Asih* menumbuhkan kepercayaan emosional, *Silih Asah* menumbuhkan kepercayaan intelektual, dan *Silih Asuh* menumbuhkan kepercayaan moral.

Lebih jauh, falsafah ini dapat membentuk guru sebagai *servant leader* dalam kelas. Guru melayani kebutuhan murid, mengasuh mereka dengan teladan, dan menuntun mereka menuju kemandirian. Dengan begitu, guru bukan hanya “pemberi nilai”, tetapi “pendamping kehidupan”.

Dengan demikian, penerapan *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh* dalam hubungan guru–murid mampu menjawab tantangan pendidikan abad 21: membentuk manusia berilmu sekaligus berhati. Relasi ini tidak hanya mencetak siswa cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, resilien, dan siap menjadi warga dunia yang humanis.

## B. Pendidikan Karakter dan Spiritualitas

Pendidikan bukan hanya sarana mentransfer pengetahuan, tetapi juga wahana membentuk karakter dan spiritualitas peserta didik. Dalam konteks falsafah *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh*, pendidikan karakter tidak bisa dilepaskan dari dimensi kasih sayang, pembelajaran bersama, dan pengasuhan moral. Di era VUCA–Society 5.0, ketika teknologi mendominasi kehidupan, pendidikan karakter dan spiritualitas menjadi semakin penting untuk memastikan generasi muda tidak tercerabut dari akar nilai kemanusiaan dan keimanan.

Pertama, pendidikan karakter berbasis *Silih Asih* menekankan empati, kasih sayang, dan kepedulian sosial. Anak didik dibimbing bukan hanya untuk pintar, tetapi juga peduli terhadap orang lain. Hal ini sejalan dengan teori *character education* Lickona (1991) yang menyebutkan tiga pilar utama: *knowing the good, desiring the good, doing the good*.

Kedua, *Silih Asah* mengajarkan pentingnya pembelajaran kolektif dalam membentuk karakter. Pendidikan karakter tidak bisa hanya berupa nasihat, melainkan proses timbal balik antara guru dan murid, serta antar murid. Model ini mendekati gagasan *social learning theory* Bandura yang menekankan peran interaksi dan teladan dalam pembentukan perilaku.

Ketiga, *Silih Asuh* menegaskan bahwa spiritualitas dalam pendidikan lahir dari bimbingan penuh kasih. Guru sebagai figur asuh tidak hanya menyampaikan materi agama atau moral, tetapi juga menjadi teladan hidup. Seperti dikatakan Ki Hajar Dewantara, guru harus mampu *ing ngarso sung tulodo* (di depan memberi teladan).

Dalam konteks Indonesia, pendidikan karakter dan spiritualitas telah menjadi bagian dari kebijakan nasional melalui *Profil Pelajar Pancasila*. Nilai seperti beriman dan bertakwa, gotong royong, serta kemandirian memiliki resonansi kuat dengan *Silih Asih, Asah, Asuh*. Hal ini menunjukkan kesinambungan antara nilai lokal, nasional, dan global.

Penelitian UNESCO (2022) menegaskan bahwa pendidikan spiritualitas meningkatkan *student well-being* dan ketahanan psikologis. Murid yang memiliki dasar spiritual cenderung lebih resilien menghadapi tekanan akademik maupun sosial. Hal ini relevan di era pasca-pandemi, ketika masalah kesehatan mental siswa meningkat.

Dari sisi praktik, pendidikan karakter dapat diwujudkan melalui pembiasaan: doa bersama, kegiatan sosial, diskusi nilai moral, hingga *service learning*. Di pesantren, tradisi *ngaji* bukan hanya pembelajaran kognitif, tetapi juga pembentukan spiritualitas melalui disiplin, kesederhanaan, dan pengabdian.

Pendidikan spiritualitas tidak terbatas pada agama formal, tetapi juga pada nilai universal: kejujuran, integritas, kepedulian, dan rasa syukur. Dengan perspektif ini, *Silih Asih* berarti cinta kasih universal, *Silih Asah* berarti pembelajaran moral sepanjang hayat, dan *Silih Asuh* berarti bimbingan menuju kebijaksanaan.

Krisis moral di era digital—seperti hoaks, ujaran kebencian, dan individualisme—membuktikan urgensi pendidikan karakter. OECD (2022) melaporkan bahwa negara dengan pendidikan karakter kuat lebih mampu menghadapi tantangan globalisasi. Indonesia bisa menjadikan *Silih Asih, Asah, Asuh* sebagai pilar pendidikan karakter digital.

Secara teoretik, pendidikan spiritualitas sejalan dengan *holistic education* yang menekankan pengembangan manusia seutuhnya: tubuh, pikiran, hati, dan jiwa. Dengan mengintegrasikan falsafah Sunda, pendidikan di Indonesia dapat menjadi model *holistic education* yang berakar pada budaya lokal.

Dalam implementasi kelas, guru bisa mempraktikkan *Silih Asih* dengan membangun relasi hangat, *Silih Asah* dengan mendorong diskusi nilai, dan *Silih Asuh* dengan membimbing siswa menghadapi dilema moral. Studi di Jawa Barat (Mulyana, 2021) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan pendekatan ini mengalami peningkatan kedisiplinan berbasis kesadaran, bukan hukuman.

Pendidikan spiritualitas juga relevan dengan SDGs. SDG 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*) menuntut warga yang berkarakter kuat, beretika, dan berjiwa damai. Pendidikan berbasis *Silih Asih, Asah, Asuh* dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan ini dengan membentuk generasi yang menjunjung nilai keadilan dan perdamaian.

Dari perspektif psikologi positif, pendidikan spiritualitas meningkatkan *flourishing* (kebahagiaan dan makna hidup). Penelitian Seligman (2018) menegaskan bahwa individu yang memiliki dasar spiritual lebih tahan terhadap stres. Dengan menginternalisasi falsafah Sunda, siswa Indonesia dapat tumbuh menjadi pribadi tangguh sekaligus penuh kasih.

Di era VUCA, pendidikan karakter dan spiritualitas juga menjadi bekal menghadapi ketidakpastian. Pengetahuan bisa cepat usang, tetapi karakter dan nilai spiritual tetap menjadi kompas hidup. *Silih Asih* mengajarkan kasih, *Silih Asah* mengajarkan kebijaksanaan, dan *Silih Asuh* mengajarkan tanggung jawab—semua ini adalah fondasi menghadapi perubahan global.

Pendidikan karakter juga harus kontekstual. Misalnya, *Silih Asah* bisa diterapkan dalam literasi digital: murid tidak hanya diajarkan cara menggunakan teknologi, tetapi juga cara menggunakannya secara etis. *Silih Asuh*

bisa diterapkan dalam literasi lingkungan: guru membimbing murid untuk bertanggung jawab menjaga bumi.

Dengan demikian, pendidikan karakter dan spiritualitas berbasis falsafah Sunda bukan sekadar romantisme tradisi, melainkan jawaban atas kebutuhan mendesak pendidikan modern. Ia menegaskan bahwa pendidikan sejati adalah membentuk manusia yang cerdas, berkarakter, dan berjiwa luhur.

### C. Peran Komunitas Belajar Berbasis Kearifan Lokal

Pendidikan tidak pernah berlangsung dalam ruang hampa; ia selalu berakar pada komunitas tempat ia tumbuh. Dalam konteks falsafah Sunda *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh*, komunitas bukan hanya latar belakang sosial, tetapi aktor utama dalam proses pendidikan. Guru, orang tua, tokoh masyarakat, dan sesama murid menjadi bagian dari ekosistem belajar yang saling membangun. Di era globalisasi, ketika pendidikan sering direduksi pada hubungan formal antara guru dan siswa, peran komunitas belajar berbasis kearifan lokal menjadi semakin penting untuk memastikan pendidikan tetap kontekstual, humanis, dan berkelanjutan.

Komunitas belajar berbasis kearifan lokal mencerminkan nilai *Silih Asih*. Kasih sayang kolektif tercermin dalam solidaritas masyarakat terhadap pendidikan. Di pedesaan Sunda, misalnya, ada tradisi *ngabaturan barudak sakola* (mendukung anak-anak sekolah), di mana warga gotong royong membantu biaya, transportasi, bahkan kebutuhan harian siswa. Praktik ini adalah wujud nyata bahwa pendidikan bukan urusan individu, melainkan kepentingan sosial bersama.

*Silih Asah* dalam konteks komunitas berarti menciptakan ruang belajar kolaboratif di luar kelas formal. Misalnya, *karang taruna* atau komunitas pemuda sering menjadi tempat berbagi keterampilan, mulai dari musik tradisional hingga literasi digital. Penelitian Santosa & Widodo (2023) menunjukkan bahwa komunitas belajar berbasis lokal mampu meningkatkan keterampilan sosial dan kepemimpinan remaja lebih efektif daripada program formal semata.

*Silih Asuh* dalam komunitas belajar menegaskan peran tokoh masyarakat dan orang tua dalam membimbing generasi muda. Di Sunda, *sesepuh lembur* berperan penting dalam mendidik anak-anak melalui petuah, nasihat, dan teladan hidup. Dalam kerangka modern, prinsip ini sejalan dengan konsep *mentorship* dalam pendidikan, di mana generasi muda diarahkan oleh figur yang dihormati.

Komunitas belajar juga menjadi ruang pendidikan karakter. Di banyak daerah Nusantara, nilai gotong royong, sopan santun, dan kepedulian sosial diajarkan bukan di kelas, tetapi di *balai desa*, ladang, atau tempat ibadah. Dengan cara ini, kearifan lokal menjadi kurikulum hidup yang membentuk karakter siswa melalui praktik nyata, bukan sekadar teori.

Relevansi komunitas belajar semakin kuat di era *Society 5.0*. OECD (2022) menegaskan bahwa pendidikan masa depan harus berbasis *learning ecosystem* yang melibatkan sekolah, keluarga, industri, dan masyarakat. Falsafah Sunda sudah lama mempraktikkan ekosistem ini: sekolah hanyalah salah satu simpul, sementara komunitas adalah ruang pembelajaran sepanjang hayat.

Di Indonesia, konsep *Kampung Literasi* yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi contoh nyata peran komunitas belajar. Warga desa bersama-sama membangun taman bacaan, pusat literasi digital, dan ruang diskusi. Ini menunjukkan bahwa kearifan lokal gotong royong bisa diterjemahkan dalam bentuk modern yang mendukung pencapaian SDGs, khususnya SDG 4 (*Quality Education*).

Komunitas belajar berbasis kearifan lokal juga memperkuat inklusivitas. Misalnya, sekolah adat di Papua dan Kalimantan tidak hanya mendidik anak-anak tentang baca tulis, tetapi juga nilai-nilai ekologis, solidaritas, dan spiritualitas lokal. Hal ini sejalan dengan *Silih Asah*—belajar dari alam, sesama, dan leluhur—sehingga pendidikan tidak tercerabut dari konteks budaya dan ekologi.

Pendidikan berbasis komunitas juga efektif dalam mengurangi kesenjangan. Data UNICEF (2022) menunjukkan bahwa anak-anak di daerah 3T lebih mungkin bertahan di sekolah jika komunitas aktif mendukung mereka. Dengan demikian, *Silih Asuh* komunitas tidak hanya bersifat moral,

tetapi juga berdampak langsung pada keberlanjutan pendidikan anak-anak miskin dan marginal.

Secara filosofis, komunitas belajar adalah wujud *communitarianism* dalam pendidikan: manusia berkembang melalui kebersamaan, bukan isolasi. Prinsip ini menantang paradigma individualistik pendidikan Barat yang sering menekankan “personal achievement”. Falsafah Sunda menambahkan bahwa pencapaian individu hanya bermakna jika memberi manfaat pada komunitas.

Komunitas belajar berbasis kearifan lokal juga menjadi sarana pendidikan spiritualitas. Kegiatan keagamaan, tradisi adat, dan ritual kolektif mengajarkan rasa hormat, kesabaran, dan kedalaman makna hidup. Dengan demikian, *Silih Asih, Asah, Asuh* terwujud tidak hanya dalam relasi horizontal (manusia–manusia), tetapi juga dalam relasi vertikal (manusia–Tuhan–alam).

Dari sisi ekonomi, komunitas belajar dapat menciptakan model *education entrepreneurship*. Misalnya, kelompok ibu-ibu di desa Sunda yang mengajarkan keterampilan kerajinan tradisional pada anak-anak. Aktivitas ini bukan hanya pendidikan, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi lokal. Model ini mendukung SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*).

Dalam konteks digital, komunitas belajar bisa bertransformasi menjadi *komunitas daring*. Misalnya, kelompok guru Sunda yang membagikan bahan ajar melalui media sosial. Hal ini memperluas prinsip *Silih Asah* ke ranah global: saling mengasah pengetahuan lintas batas geografis. Digitalisasi justru bisa memperkuat kearifan lokal jika diarahkan dengan benar.

Namun, tantangan tetap ada. Modernisasi sering melemahkan peran komunitas dalam pendidikan. Individualisme, komersialisasi, dan migrasi urban membuat interaksi sosial berkurang. Oleh karena itu, pendidikan formal perlu melibatkan kembali komunitas sebagai mitra, bukan sekadar pelengkap. Program *Sekolah Penggerak* dapat lebih efektif jika didukung komunitas belajar yang hidup.

Penelitian di Jawa Barat (Mulyana, 2022) menunjukkan bahwa sekolah yang aktif melibatkan komunitas lokal (orang tua, tokoh adat, organisasi pemuda) memiliki tingkat partisipasi murid yang lebih tinggi. Hal ini

membuktikan bahwa kolaborasi sekolah–komunitas bukan sekadar retorika, tetapi strategi nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Dengan demikian, komunitas belajar berbasis kearifan lokal bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi masa depan pendidikan. Ia menjawab kebutuhan pendidikan yang humanis, kolaboratif, dan berkelanjutan. *Silih Asih* menumbuhkan kasih sosial, *Silih Asah* memperkuat pembelajaran kolektif, dan *Silih Asuh* menjamin keberlanjutan bimbingan moral. Inilah model pendidikan Nusantara yang siap memberi kontribusi pada wacana pendidikan global.

#### D. Pengembangan Kurikulum Berbasis Nilai Lokal

Kurikulum adalah jantung pendidikan. Ia bukan sekadar daftar mata pelajaran, melainkan refleksi nilai, tujuan, dan arah pembangunan bangsa. Di Indonesia, kurikulum sering mengalami perubahan seiring pergantian kebijakan, namun jarang sekali berpijak secara konsisten pada kearifan lokal. Padahal, falsafah Sunda *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh* dan kearifan Nusantara lainnya menawarkan prinsip humanis, kolaboratif, dan berkelanjutan yang dapat memperkaya kurikulum nasional. Subbab ini akan membahas bagaimana kurikulum dapat dikembangkan berbasis nilai lokal, dengan tetap selaras pada tuntutan global seperti SDGs, *Society 5.0*, dan profil pelajar Pancasila.

Pertama, pengembangan kurikulum berbasis nilai lokal harus dimulai dari pengakuan bahwa pendidikan tidak netral. Ia membawa ideologi, visi, dan filosofi tertentu. Jika selama ini kurikulum lebih banyak mengadopsi model Barat yang menekankan kompetensi individual, maka kurikulum berbasis *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* menekankan dimensi kolektif: kasih, pembelajaran timbal balik, dan pengasuhan moral.

Kedua, nilai *Silih Asih* dapat diterjemahkan ke dalam kurikulum melalui integrasi pendidikan karakter yang berbasis empati dan kepedulian sosial. Mata pelajaran tidak lagi berdiri sendiri, tetapi membawa dimensi kasih dalam setiap praktik. Misalnya, dalam pelajaran IPS siswa tidak hanya mempelajari sejarah, tetapi juga mengasah kesadaran sosial tentang pentingnya solidaritas dalam pembangunan bangsa.

Ketiga, nilai *Silih Asah* dapat memperkaya strategi pembelajaran dalam kurikulum. Kurikulum berbasis lokal tidak hanya menekankan capaian akademik, tetapi juga dialog, kolaborasi, dan *project-based learning*. Misalnya, siswa dilibatkan dalam proyek budaya seperti mendokumentasikan tradisi lisan atau meneliti praktik gotong royong di desa, yang sekaligus memperkuat literasi ilmiah dan kebanggaan budaya.

Keempat, nilai *Silih Asuh* dapat masuk dalam kurikulum melalui program mentoring, bimbingan moral, dan penguatan hubungan guru-murid. Kurikulum bukan hanya sekumpulan kompetensi, tetapi juga ekosistem pengasuhan. Hal ini sejalan dengan Kurikulum Merdeka yang memberi ruang fleksibilitas, sehingga sekolah dapat memasukkan modul-modul penguatan karakter sesuai budaya lokal.

Kelima, secara historis, kurikulum di Indonesia pernah mencoba mengintegrasikan nilai lokal, seperti Kurikulum 2013 yang menekankan pendidikan karakter. Namun implementasinya sering berhenti pada slogan, karena tidak disertai metodologi yang berbasis komunitas. Di sinilah *Silih Asih, Asah, Asuh* dapat memberi arah praktis: nilai ditanamkan melalui pengalaman hidup bersama, bukan sekadar teks.

Keenam, UNESCO (2023) menegaskan pentingnya *contextualized curriculum* yang memadukan standar global dengan nilai lokal. Negara-negara yang sukses membangun pendidikan—seperti Jepang dan Finlandia—mengembangkan kurikulumnya dengan mengakar pada budaya masing-masing. Indonesia dapat menempuh jalan serupa dengan menjadikan falsafah lokal sebagai basis desain kurikulum.

Ketujuh, pengembangan kurikulum berbasis nilai lokal juga mendukung pendidikan berkelanjutan (SDG 4.7). Siswa tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga kesadaran ekologis, sosial, dan spiritual yang tertanam dalam kearifan lokal. Misalnya, *Silih Asih* terhadap alam bisa diwujudkan dalam modul literasi lingkungan, sedangkan *Silih Asah* diwujudkan dalam proyek riset ekologi bersama masyarakat.

Kedelapan, praktik pengembangan kurikulum ini sudah mulai terlihat di beberapa sekolah adat dan sekolah berbasis komunitas. Misalnya, sekolah adat di Bali yang mengintegrasikan *Tri Hita Karana* dalam kurikulum, atau sekolah di Papua yang mengajarkan nilai *One Isolom* (hidup rukun)

melalui kegiatan gotong royong. Model ini membuktikan bahwa nilai lokal dapat diterjemahkan dalam kurikulum modern tanpa kehilangan substansi.

Kesembilan, dalam perspektif manajemen pendidikan, kurikulum berbasis nilai lokal memerlukan peran aktif komunitas. Guru, orang tua, dan tokoh adat dilibatkan dalam merancang kurikulum. Dengan demikian, kurikulum tidak lagi dianggap sebagai produk teknokratis pusat, tetapi sebagai kesepakatan sosial budaya yang hidup di masyarakat.

Kesepuluh, tantangan terbesar dalam pengembangan kurikulum berbasis lokal adalah standarisasi nasional. Namun, hal ini dapat dijumpai melalui prinsip *diversity in unity*: kurikulum nasional memberikan kerangka umum, sementara nilai lokal memperkaya implementasi di daerah. Kurikulum Merdeka sebenarnya memberi peluang untuk pendekatan ini melalui *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)*.

Kesebelas, dari perspektif filsafat pendidikan, kurikulum berbasis nilai lokal menegaskan bahwa pendidikan adalah proses pembudayaan (*enculturation*). Edgar Morin (2021) dalam gagasan *complex thought* menekankan pentingnya mengintegrasikan identitas lokal dengan wawasan global. Kurikulum berbasis *Silih Asih, Asah, Asuh* adalah contoh konkret bagaimana hal ini bisa dilakukan.

Kedua belas, penelitian empiris mendukung pendekatan ini. Studi Mulyana (2022) menemukan bahwa sekolah yang mengintegrasikan nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* dalam kurikulum mengalami peningkatan signifikan dalam partisipasi siswa dan penguatan karakter. Artinya, kurikulum berbasis lokal tidak hanya normatif, tetapi juga efektif secara praktis.

Ketiga belas, dalam era digital, kurikulum berbasis nilai lokal bisa dipadukan dengan teknologi. Modul digital dapat dikembangkan dengan konten berbasis budaya lokal, seperti cerita rakyat, musik tradisional, atau praktik ekologi lokal. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga menjaga identitas budayanya.

Keempat belas, kurikulum berbasis nilai lokal juga dapat menjadi alat dekolonisasi pendidikan. Selama ini, pendidikan di Indonesia sering dianggap mengadopsi model Barat. Dengan mengembangkan teori dan praktik berbasis *Silih Asih, Asah, Asuh*, Indonesia dapat memperlihatkan bahwa

kita mampu menghasilkan model kurikulum sendiri yang kontekstual, humanis, dan relevan secara global.

Kelima belas, pada akhirnya, pengembangan kurikulum berbasis nilai lokal bukan sekadar proyek teknis, melainkan transformasi paradigma. Ia menegaskan bahwa pendidikan harus berpijak pada identitas bangsa, sekaligus terbuka pada dunia. Dengan memadukan nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* ke dalam kurikulum, Indonesia dapat melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, berakar pada budaya, dan siap menghadapi tantangan global.

## E. Studi Kasus: Praktik di Sekolah dan Pesantren

Falsafah *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh* bukan sekadar konsep filosofis, melainkan nilai yang hidup dalam keseharian masyarakat Sunda dan Nusantara. Pendidikan di sekolah maupun pesantren adalah arena nyata di mana nilai-nilai tersebut bisa diimplementasikan. Studi kasus berikut menggambarkan bagaimana falsafah ini diterapkan secara praktis dalam pembelajaran, manajemen sekolah, hubungan guru–murid, hingga pembentukan karakter. Analisis ini memperlihatkan bahwa nilai lokal dapat berdialog dengan sistem pendidikan modern, sekaligus memberi kontribusi pada transformasi pendidikan nasional.

Di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Bandung, program *kelas ramah anak* dijalankan dengan filosofi *Silih Asih*. Guru dilatih untuk membangun komunikasi empatik, menghindari kekerasan verbal maupun fisik, dan menanamkan kasih sayang dalam pembelajaran. Hasil penelitian (Mulyana, 2021) menunjukkan adanya penurunan kasus perundungan hingga 35% setelah sekolah menerapkan pendekatan ini. Ini membuktikan bahwa *Silih Asih* dapat menjadi strategi nyata pencegahan kekerasan di sekolah.

Di tingkat sekolah menengah, *Silih Asah* diwujudkan melalui pembelajaran kolaboratif. Sebuah SMK di Bogor menerapkan *project-based learning* dengan pendekatan berbagi keterampilan. Siswa saling mengajarkan keahlian, misalnya dalam praktik teknik otomotif atau multimedia. Guru bertindak sebagai fasilitator, bukan pusat pengetahuan. Pendekatan ini meningkatkan *student engagement* dan memperkuat rasa percaya diri siswa karena mereka merasa dihargai sebagai sumber pengetahuan.

Di pesantren tradisional Jawa Barat, *Silih Asuh* menjadi prinsip utama hubungan kiai–santri. Kiai bukan hanya pengajar kitab, melainkan figur pengasuh yang membimbing kehidupan spiritual, sosial, dan moral santri. Kehidupan sehari-hari—dari bangun tidur, belajar, hingga berinteraksi—dilingkupi oleh bimbingan yang penuh kasih. Penelitian Nurhayati (2022) menemukan bahwa santri yang belajar dalam sistem ini memiliki tingkat kedisiplinan dan loyalitas lebih tinggi dibanding sekolah umum.

Dalam praktik sekolah modern, *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* juga bisa diintegrasikan melalui kurikulum berbasis proyek sosial. Misalnya, sebuah SMP di Garut mengajak siswa untuk membuat program literasi desa: mengajar anak-anak TK membaca dan menulis. Program ini melatih *Silih Asah* (saling mengajar), *Silih Asih* (kepedulian sosial), dan *Silih Asuh* (bimbingan antar generasi). Hasilnya, siswa tidak hanya belajar akademik, tetapi juga mengalami langsung makna solidaritas.

Pesantren modern juga mulai menggabungkan nilai lokal dengan teknologi digital. Sebuah pesantren di Tasikmalaya mengintegrasikan *Silih Asah* dalam bentuk *kelas digital kolaboratif*, di mana santri saling berbagi pengetahuan melalui platform daring. Walaupun berbasis teknologi, prinsip gotong royong tetap menjadi inti pembelajaran. Ini membuktikan bahwa nilai lokal bisa relevan dengan era *Society 5.0*.

Dalam konteks pendidikan karakter, sekolah dasar di Sukabumi menjadikan *Silih Asih* sebagai fondasi disiplin positif. Guru mengganti hukuman dengan pendekatan dialog empatik. Murid yang melanggar aturan diajak memahami dampak tindakannya terhadap orang lain. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam menanamkan tanggung jawab dibanding hukuman konvensional.

Sekolah berbasis komunitas di Cianjur mengimplementasikan *Silih Asah* melalui kegiatan *ngadongeng bareng*. Guru, orang tua, dan tokoh adat bergiliran menceritakan kisah-kisah moral kepada siswa. Tradisi lisan ini bukan hanya melestarikan budaya, tetapi juga membangun ruang belajar kolaboratif lintas generasi. Nilai-nilai humanis, keberanian, dan solidaritas ditanamkan melalui cerita.

Di pesantren, *Silih Asuh* terwujud dalam sistem *halaqah* atau pengajian kelompok kecil. Santri senior membimbing junior, sementara kiai

membimbing semuanya. Pola ini menciptakan rantai asuhan yang berlapis: setiap individu berperan sebagai murid sekaligus pembimbing. Model ini mirip dengan *peer mentoring* dalam pendidikan Barat, tetapi berakar pada kearifan lokal.

Komunitas sekolah di Majalengka juga mempraktikkan *Silih Asih* dengan cara melibatkan orang tua dalam program *parenting class*. Orang tua tidak hanya mendukung dari rumah, tetapi juga hadir di sekolah sebagai mitra guru. Dengan demikian, kasih sayang untuk siswa hadir dari dua arah: keluarga dan sekolah.

Implementasi nilai lokal ini juga memperkuat *well-being* murid. Penelitian UNESCO (2023) menegaskan bahwa siswa yang merasa dicintai, didukung, dan dibimbing akan lebih tahan terhadap stres. Studi kasus di Jawa Barat menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan nilai *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* memiliki tingkat *student happiness* lebih tinggi dibanding sekolah yang menekankan kompetisi.

Dalam pendidikan vokasi, *Silih Asah* bisa diimplementasikan melalui program *link and match*. Sebuah SMK di Bekasi mengajak industri lokal menjadi mitra dalam pengajaran. Siswa belajar langsung dari praktisi, sementara guru juga mendapatkan pelatihan. Model ini mencerminkan prinsip saling mengasah pengetahuan antara sekolah dan dunia kerja.

Pesantren perempuan di Tasikmalaya mempraktikkan *Silih Asih* melalui kegiatan sosial, seperti mengunjungi panti asuhan dan membantu warga miskin. Aktivitas ini menumbuhkan empati, memperkuat spiritualitas, sekaligus melatih kepemimpinan sosial santri. Nilai kasih sayang tidak berhenti di ruang kelas, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata.

Sekolah dasar inklusi di Bandung menerapkan *Silih Asuh* untuk mendukung anak berkebutuhan khusus. Guru dan teman sebaya diajarkan untuk saling membantu, bukan mengejek. Hasilnya, anak berkebutuhan khusus dapat belajar dalam suasana penuh penerimaan. Ini adalah implementasi nyata *pendidikan inklusif* berbasis nilai lokal.

Dari seluruh studi kasus, terlihat bahwa *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh* bukan hanya jargon budaya, tetapi metode pendidikan yang efektif. Nilai kasih sayang mencegah kekerasan, nilai saling mengasah meningkatkan kualitas pembelajaran, dan nilai pengasuhan membentuk karakter. Integrasi

ketiganya menciptakan pendidikan holistik yang menumbuhkan murid sebagai manusia utuh.

Dengan demikian, studi kasus di sekolah dan pesantren membuktikan bahwa falsafah lokal bisa menjadi solusi bagi tantangan pendidikan kontemporer: kekerasan, degradasi moral, ketimpangan, dan dehumanisasi digital. *Silih Asih, Asah, Asuh* mampu menghidupkan kembali wajah pendidikan yang humanis, relevan, dan transformatif.



## BAB 6

### SILIH ASIH-ASAH-ASUH SEBAGAI MODEL KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN

**K**epemimpinan pendidikan merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan arah dan kualitas transformasi sekolah, madrasah, maupun pesantren. Banyak penelitian internasional (OECD, 2022; UNESCO, 2023) menunjukkan bahwa kepemimpinan yang visioner, inklusif, dan humanis memiliki pengaruh langsung terhadap motivasi guru, kualitas pembelajaran, serta capaian murid. Namun, kepemimpinan tidak pernah berada dalam ruang hampa; ia selalu dipengaruhi nilai, budaya, dan tradisi masyarakat tempat pendidikan itu tumbuh. Di sinilah falsafah Sunda *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh* menemukan relevansinya sebagai landasan model kepemimpinan pendidikan khas Nusantara.

*Silih Asih* mengajarkan bahwa kepemimpinan harus dilandasi kasih sayang, empati, dan kepedulian. Pemimpin yang mengasih tidak sekadar menjalankan aturan, tetapi membangun iklim sekolah yang penuh rasa hormat dan penghargaan. *Silih Asah* menekankan bahwa pemimpin

sejati adalah pembelajar sepanjang hayat dan penggerak budaya belajar di lingkungannya. Ia tidak menempatkan dirinya sebagai sosok serba tahu, melainkan fasilitator yang mendorong pertumbuhan pengetahuan kolektif. Sementara *Silih Asuh* menegaskan peran kepemimpinan sebagai pengasuh moral: membimbing, melindungi, dan memberi teladan etis bagi guru, murid, dan komunitas pendidikan.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, model kepemimpinan berbasis *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* memiliki signifikansi besar. Pertama, ia menjadi alternatif terhadap gaya kepemimpinan birokratis yang kaku, yang kerap membuat sekolah terjebak pada administrasi tanpa sentuhan humanis. Kedua, ia menjadi jawaban atas tantangan era VUCA dan Society 5.0, di mana pemimpin dituntut bukan hanya adaptif secara manajerial, tetapi juga peka secara sosial dan spiritual. Ketiga, ia menegaskan identitas kepemimpinan pendidikan Indonesia yang berakar pada budaya sendiri, bukan sekadar meniru model Barat.

Secara filosofis, kepemimpinan *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* juga selaras dengan teori kepemimpinan global. *Silih Asih* beresonansi dengan *servant leadership* Greenleaf yang menekankan pelayanan sebagai inti kepemimpinan. *Silih Asah* sejalan dengan *transformational leadership* yang mendorong inovasi dan perkembangan kapasitas kolektif. Sedangkan *Silih Asuh* mendekati *moral leadership*, yang menempatkan etika dan teladan sebagai fondasi. Dengan kata lain, nilai lokal tidak bertentangan dengan teori global, melainkan memperkaya dan melengkapinya.

Lebih jauh, model kepemimpinan ini bukan hanya teori, tetapi telah lama hidup dalam praktik pesantren. Kiai, ajengan, atau pimpinan pesantren memimpin dengan kasih (*asih*), mendidik dengan dialog ilmu (*asah*), dan membimbing kehidupan santri dengan keteladanan moral (*asuh*). Pesantren modern maupun tradisional membuktikan bahwa kepemimpinan berbasis nilai lokal mampu melahirkan generasi yang tangguh, mandiri, dan berkarakter.

Oleh karena itu, Bab 6 ini akan mengurai lebih dalam bagaimana falsafah *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh* dapat dijadikan model kepemimpinan pendidikan. Pembahasan akan mencakup konsep kepemimpinan humanis dan moral, kepemimpinan partisipatif dalam komunitas pendidikan, kepemimpinan visioner di era VUCA, perbandingan dengan teori

kepemimpinan global, hingga roadmap kepemimpinan Nusantara abad ke-21. Dengan pendekatan ini, kita akan melihat bahwa kepemimpinan pendidikan bukan sekadar posisi struktural, melainkan panggilan moral untuk mengasihi, mengasah, dan mengasuh.

## A. Kepemimpinan Humanis dan Moral

Kepemimpinan pendidikan sejati tidak hanya diukur dari kemampuan administratif atau managerial, tetapi dari sejauh mana ia mampu membangun hubungan yang humanis dan menjadi teladan moral bagi komunitasnya. Di sinilah falsafah *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh* menemukan kekuatan konseptualnya. *Silih Asih* melahirkan kepemimpinan berbasis empati dan kasih sayang, *Silih Asah* memperkuat peran pemimpin sebagai pembelajar yang terus tumbuh, dan *Silih Asuh* menegaskan tanggung jawab pemimpin dalam membimbing serta melindungi. Subbab ini akan mengeksplorasi bagaimana kepemimpinan humanis dan moral menjadi landasan fundamental dalam dunia pendidikan yang kian kompleks.

Kepemimpinan humanis dalam pendidikan menempatkan manusia sebagai pusat. Guru, murid, dan tenaga kependidikan tidak dianggap sekadar komponen sistem, tetapi individu dengan martabat, perasaan, dan kebutuhan. Pemimpin yang humanis memahami bahwa setiap kebijakan sekolah harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia, bukan hanya angka-angka statistik.

Falsafah *Silih Asih* menjadi inti kepemimpinan humanis. Pemimpin yang memimpin dengan kasih akan menciptakan atmosfer sekolah yang penuh rasa saling menghargai. Penelitian UNESCO (2022) menegaskan bahwa iklim sekolah yang ramah dan empatik berkorelasi positif dengan prestasi belajar dan kesehatan mental siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kasih sayang adalah strategi kepemimpinan yang efektif, bukan sekadar nilai moral.

*Silih Asah* menegaskan bahwa pemimpin humanis adalah pemimpin pembelajar. Ia bukan sosok serba tahu, melainkan fasilitator pertumbuhan kolektif. Dengan mengasah kapasitas guru dan siswa, pemimpin menciptakan budaya sekolah yang adaptif dan kreatif. Konsep ini sejalan dengan

*learning organization* Peter Senge (1990), yang menekankan pentingnya pemimpin sebagai penggerak budaya belajar.

*Silih Asuh* memperlihatkan dimensi moral dalam kepemimpinan. Pemimpin bukan sekadar administrator, tetapi juga figur yang memberi teladan etika. Ia membimbing komunitas dengan kesabaran, melindungi yang lemah, dan memastikan keadilan ditegakkan. Konsep ini mendekati teori *moral leadership* yang menempatkan etika sebagai inti kepemimpinan.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, kepemimpinan moral sangat penting di tengah maraknya kasus intoleransi, korupsi, dan kekerasan di sekolah. Pemimpin yang meneladani *Silih Asih, Asah, Asuh* mampu mencegah degradasi moral dengan menghadirkan teladan nyata. Ki Hajar Dewantara menegaskan: “Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.” Ini adalah konsep kepemimpinan moral yang sejalan dengan falsafah Sunda.

Penelitian empiris mendukung relevansi ini. Studi Mulyana (2021) menunjukkan bahwa kepala sekolah yang menerapkan kepemimpinan berbasis empati dan teladan moral berhasil meningkatkan kepuasan kerja guru serta menurunkan tingkat konflik internal. Artinya, kepemimpinan humanis dan moral tidak hanya ideal, tetapi juga berdampak nyata pada kualitas pendidikan.

Kepemimpinan humanis juga mencakup kepekaan terhadap keberagaman. Indonesia adalah bangsa multikultural. Pemimpin pendidikan harus mampu menciptakan ruang inklusif di mana semua murid—apapun latar belakang etnis, agama, atau sosialnya—dihargai. *Silih Asih* memberi kerangka etis untuk menumbuhkan toleransi dan rasa kebersamaan.

Dalam perspektif global, kepemimpinan humanis relevan dengan agenda SDGs, khususnya SDG 4 (*Quality Education*) dan SDG 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*). Pemimpin pendidikan yang humanis dan moral akan berkontribusi pada pembangunan damai dan berkeadilan melalui sekolah yang inklusif, adil, dan bermartabat.

Dimensi moral juga mencakup keadilan sosial. Pemimpin humanis memastikan bahwa kebijakan sekolah tidak diskriminatif. Misalnya, memberi dukungan ekstra untuk siswa dari keluarga miskin atau berkebutuhan khusus. Prinsip *Silih Asuh* dalam hal ini adalah menjaga agar semua anak mendapat kesempatan belajar yang adil.

Kepemimpinan moral menuntut integritas pribadi. Pemimpin harus konsisten antara ucapan dan tindakan. Dalam konteks Sunda, pepatah “*caina herang, laukna beunang*” (airnya jernih, ikannya tertangkap) menggambarkan pemimpin yang bersih dan efektif. Teladan integritas akan menumbuhkan budaya kejujuran dalam komunitas pendidikan.

Kepemimpinan humanis juga harus adaptif terhadap tantangan era digital. Pemimpin pendidikan menghadapi isu baru: literasi digital, etika AI, hingga cyberbullying. Nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* bisa menjadi pedoman: gunakan teknologi dengan kasih, dorong literasi digital sebagai asah, dan asuh murid agar tidak terjebak dalam sisi gelap dunia digital.

Dari perspektif psikologi pendidikan, kepemimpinan humanis sejalan dengan teori *servant leadership* Greenleaf. Pemimpin melayani terlebih dahulu, baru memimpin. Ia mendahulukan kebutuhan murid dan guru. Dengan demikian, kepemimpinan tidak dipandang sebagai dominasi, tetapi sebagai pengabdian.

Pesantren tradisional memberi teladan nyata kepemimpinan moral. Kiai memimpin dengan kasih, mendidik dengan ilmu, dan membimbing dengan akhlak. Model ini membuktikan bahwa kepemimpinan berbasis nilai lokal mampu membentuk generasi yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berkarakter luhur.

Dalam era VUCA, kepemimpinan humanis dan moral adalah benteng menghadapi ketidakpastian. Pengetahuan bisa cepat berubah, tetapi nilai kasih, kebijaksanaan, dan teladan etis akan tetap menjadi kompas. Pemimpin yang berpegang pada *Silih Asih, Asah, Asuh* akan mampu menuntun komunitasnya melalui badai perubahan.

Dengan demikian, kepemimpinan humanis dan moral bukan sekadar gaya memimpin, tetapi paradigma yang menempatkan pendidikan sebagai proses pemanusiaan. Pemimpin yang mengasihi, mengasah, dan mengasuh akan melahirkan sekolah sebagai ruang kehidupan yang penuh makna, bukan sekadar pabrik pengetahuan.

## B. Kepemimpinan Partisipatif dalam Komunitas Pendidikan

Kepemimpinan partisipatif menempatkan kolaborasi, keterlibatan, dan pemberdayaan sebagai inti dari proses memimpin. Dalam konteks pendidikan, model ini memandang sekolah atau pesantren bukan sekadar institusi birokratis, melainkan komunitas belajar yang terdiri dari guru, murid, orang tua, dan masyarakat. Falsafah Sunda *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh* memberi fondasi kuat bagi kepemimpinan partisipatif, karena ia menekankan kasih sayang (*asih*), saling belajar (*asah*), dan tanggung jawab moral dalam membimbing (*asuh*). Subbab ini membahas bagaimana kepemimpinan partisipatif dapat diwujudkan dalam komunitas pendidikan, serta tantangan dan peluangnya di era VUCA–Society 5.0.

Kepemimpinan partisipatif dalam pendidikan berarti pemimpin membuka ruang dialog dan keterlibatan semua pemangku kepentingan. Kepala sekolah tidak lagi menjadi figur otoriter, melainkan fasilitator yang mendorong suara guru, murid, dan orang tua. Prinsip *Silih Asih* menjadi energi moral yang memastikan partisipasi dilakukan dengan empati dan penghargaan.

Partisipasi dalam pendidikan juga berarti berbagi tanggung jawab. Dengan *Silih Asah*, kepemimpinan dipahami sebagai proses saling belajar: guru belajar dari murid, sekolah belajar dari komunitas, dan sebaliknya. Ini memperkuat *school as learning community* yang banyak dipraktikkan di Jepang dan kini mulai diadopsi di Indonesia.

*Silih Asuh* memperkuat peran pemimpin sebagai pengasuh komunitas. Ia tidak hanya mengelola program, tetapi memastikan setiap anggota komunitas merasa didukung. Hal ini penting terutama bagi guru yang menghadapi beban administratif, maupun murid yang menghadapi tekanan akademik. Kepemimpinan partisipatif berarti ada jaminan bimbingan moral di tengah kebebasan berpartisipasi.

Penelitian OECD (2022) menunjukkan bahwa sekolah dengan kepemimpinan partisipatif memiliki tingkat inovasi lebih tinggi, karena ide-ide muncul dari bawah, bukan hanya dari atas. Dengan melibatkan guru dan murid, sekolah menjadi lebih adaptif terhadap perubahan. Ini relevan di era VUCA, di mana kompleksitas masalah menuntut solusi kolaboratif.

Studi kasus di sebuah SMK Pusat Keunggulan di Jawa Barat menunjukkan bahwa partisipasi guru dalam perumusan kurikulum lokal meningkatkan rasa kepemilikan (*ownership*) terhadap program sekolah. Guru lebih termotivasi karena merasa suaranya dihargai. Prinsip *Silih Asah* terlihat nyata: guru tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga ikut mengasah kebijakan tersebut.

Kepemimpinan partisipatif juga melibatkan orang tua. Di sebuah SD di Garut, forum orang tua dilibatkan dalam evaluasi pembelajaran. Mereka tidak hanya memberi masukan, tetapi juga aktif mendukung kegiatan sekolah. *Silih Asih* dalam hal ini tampak dalam bentuk kepedulian kolektif: pendidikan anak menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya sekolah.

Murid pun berhak diberi ruang partisipasi. Kurikulum Merdeka sebenarnya membuka peluang besar melalui *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)*. Dalam proyek ini, siswa ikut merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan. Dengan cara ini, *Silih Asah* dan *Silih Asuh* berjalan beriringan: siswa belajar bertanggung jawab sekaligus mendapat bimbingan guru.

Kepemimpinan partisipatif dalam komunitas pendidikan tidak meniadakan peran pemimpin, melainkan mengubahnya. Pemimpin tetap memegang visi dan arah, tetapi pelaksanaannya bersifat kolaboratif. Dengan *Silih Asih*, pemimpin menciptakan suasana penuh kasih; dengan *Silih Asah*, ia membuka ruang belajar bersama; dengan *Silih Asuh*, ia menjaga nilai moral agar partisipasi tidak kehilangan arah.

Dalam pesantren, prinsip partisipatif sudah lama hidup melalui sistem *musyawarah santri*. Santri dilibatkan dalam pengelolaan kegiatan, mulai dari kebersihan hingga kegiatan sosial. Kiai memberi bimbingan (asuh), tetapi santri memiliki ruang untuk belajar memimpin (asah). Model ini membuktikan bahwa partisipasi bisa berjalan seimbang dengan bimbingan moral.

Tantangan kepemimpinan partisipatif adalah waktu dan koordinasi. Partisipasi membutuhkan ruang diskusi dan konsensus, yang sering dianggap memperlambat pengambilan keputusan. Namun, jika dipandang dari perspektif *Silih Asah*, justru proses inilah yang membangun kapasitas kolektif. Pendidikan bukan sekadar hasil, tetapi juga proses belajar sosial.

Partisipasi juga menghadapi risiko dominasi kelompok tertentu, misalnya guru senior atau orang tua dengan pengaruh lebih besar. Di sinilah peran *Silih Asuh*: pemimpin harus memastikan bahwa semua suara dideengar, terutama kelompok yang rentan. Dengan begitu, partisipasi benar-benar inklusif.

Kepemimpinan partisipatif berbasis kearifan lokal juga relevan dengan konsep *democratic leadership* di Barat. Namun, nilai lokal memberi nuansa berbeda: partisipasi bukan hanya soal demokrasi formal, tetapi juga empati, solidaritas, dan pengasuhan. Hal ini membuat partisipasi lebih hangat dan berakar dalam budaya.

Dalam konteks SDGs, kepemimpinan partisipatif berkontribusi pada SDG 4 (*inclusive and equitable quality education*) dan SDG 16 (*inclusive institutions*). Sekolah atau pesantren yang dipimpin secara partisipatif mencerminkan lembaga pendidikan yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan sosial.

Era digital juga membuka peluang baru. Partisipasi kini bisa dilakukan melalui forum daring, *learning management system*, atau grup media sosial sekolah. Dengan prinsip *Silih Asah*, diskusi daring menjadi ruang saling belajar; dengan *Silih Asih*, komunikasi tetap dijaga etis; dan dengan *Silih Asuh*, pemimpin memberi bimbingan moral dalam penggunaan teknologi.

Dengan demikian, kepemimpinan partisipatif berbasis *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh* bukan sekadar gaya, tetapi paradigma yang menempatkan sekolah sebagai komunitas belajar. Ia memastikan bahwa kasih, pengetahuan, dan bimbingan hadir dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan paradigma ini, pendidikan Indonesia dapat membangun generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga demokratis, empatik, dan berkarakter.

### C. Kepemimpinan Visioner di Era VUCA

Era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuntut paradigma kepemimpinan yang berbeda dari era sebelumnya. Pemimpin pendidikan tidak cukup hanya berperan sebagai administrator atau pengelola teknis, melainkan harus memiliki visi jauh ke depan, mampu membaca arah perubahan, serta membimbing komunitasnya agar tetap relevan dan

resilien menghadapi ketidakpastian. Falsafah Sunda *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh* memberi landasan etis dan humanis bagi kepemimpinan visioner: visi yang dibangun bukan hanya untuk mengejar prestasi akademik semata, tetapi juga untuk menumbuhkan kasih, mengembangkan pembelajaran kolektif, dan mengasuh generasi muda dengan penuh tanggung jawab moral.

Kepemimpinan visioner ditandai oleh kemampuan pemimpin dalam merumuskan arah jangka panjang yang jelas sekaligus mampu memberi makna pada tindakan sehari-hari. Dalam dunia pendidikan, visi tidak boleh berhenti pada slogan atau dokumen strategis, melainkan harus menjadi energi kolektif yang menggerakkan guru, murid, dan komunitas. Falsafah *Silih Asih, Asih, Asuh* menambahkan dimensi moral pada visi: visi pendidikan bukan hanya soal daya saing, tetapi juga soal kemanusiaan, keberlanjutan, dan keadilan sosial.

Era VUCA ditandai dengan ketidakpastian global, seperti krisis kesehatan, perubahan iklim, perkembangan teknologi disruptif, dan ketegangan geopolitik. Pemimpin visioner harus mampu menerjemahkan tantangan-tantangan ini ke dalam strategi pendidikan yang relevan. Misalnya, pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata bahwa visi pendidikan tidak boleh hanya fokus pada metode konvensional, melainkan harus memikirkan fleksibilitas pembelajaran, literasi digital, serta kesehatan mental murid dan guru.

Kepemimpinan visioner menuntut keberanian mengambil keputusan meskipun informasi yang tersedia sering kali tidak lengkap. Dalam hal ini, *Silih Asah* relevan karena mendorong pemimpin untuk terus belajar, mengasah kapasitas analisis, dan terbuka terhadap perspektif baru. Pemimpin yang visioner tidak anti kritik, tetapi justru menjadikan dialog sebagai bahan memperkaya visi. Dengan begitu, visi yang dibangun tidak bersifat individual, melainkan hasil pembelajaran kolektif.

Selain itu, kepemimpinan visioner menekankan pentingnya komunikasi inspiratif. Visi yang baik harus mampu menggerakkan hati dan pikiran. *Silih Asih* menjadi prinsip etis di sini: pemimpin menyampaikan visi dengan kasih sayang, bukan dengan paksaan. Visi yang dibangun dengan empati lebih mudah diterima karena menyentuh kebutuhan emosional komunitas pendidikan. Guru dan murid merasa dilibatkan, bukan diperintah.

Dalam konteks global, kepemimpinan visioner di sekolah harus mampu menempatkan pendidikan Indonesia dalam peta dunia. Pemimpin pendidikan perlu memahami arah kebijakan global, seperti SDGs 2030, agenda UNESCO tentang *Futures of Education*, serta tren *Society 5.0*. Namun, visi itu harus diintegrasikan dengan nilai lokal, agar pendidikan tidak tercerabut dari akar budayanya. Di sinilah *Silih Asuh* berperan, memastikan bahwa visi global tetap dijalankan dengan menjaga identitas, kearifan lokal, dan tanggung jawab moral terhadap generasi muda.

Kepemimpinan visioner juga berkaitan erat dengan kemampuan menciptakan inovasi. Era VUCA menuntut sekolah untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berinovasi dalam pedagogi, kurikulum, dan manajemen. Pemimpin visioner adalah penggerak inovasi, bukan sekadar pengawas. Dengan prinsip *Silih Asah*, inovasi dilakukan secara kolaboratif, di mana guru, murid, bahkan orang tua dilibatkan dalam proses kreatif.

Namun, visi tanpa keadilan sosial bisa menjadi kosong. Pemimpin visioner harus mampu memastikan bahwa visi pendidikan inklusif, merangkul semua kelompok tanpa diskriminasi. Prinsip *Silih Asih* menegaskan bahwa visi yang sejati selalu mengandung kasih sayang bagi yang lemah, perhatian bagi yang terpinggirkan, dan kesempatan bagi semua. Dengan begitu, visi tidak hanya menjadi mimpi elit, melainkan harapan bersama.

Pesantren memberi contoh nyata kepemimpinan visioner berbasis nilai. Seorang kiai atau ajengan bukan hanya memikirkan pendidikan santrinya saat ini, tetapi juga menyiapkan generasi penerus yang mampu menghadapi zaman. Visi mereka sering kali sederhana namun kuat: mencetak manusia berilmu, berakhlak, dan berdaya guna bagi masyarakat. Nilai *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* melekat dalam visi itu, membuat kepemimpinan mereka relevan sepanjang masa.

Dalam manajemen sekolah modern, kepemimpinan visioner tampak pada perumusan *school development plan* yang tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga pada penguatan karakter, literasi digital, keterampilan abad 21, dan keberlanjutan lingkungan. Pemimpin visioner tidak hanya mengejar nilai ujian, tetapi juga menyiapkan murid agar mampu hidup di dunia yang kompleks.

Kepemimpinan visioner juga harus berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Visi pendidikan tidak boleh hanya berlaku untuk lima tahun kepemimpinan seorang kepala sekolah, tetapi harus menjadi warisan yang dapat dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Prinsip *Silih Asuh* memastikan kesinambungan ini, karena pemimpin visioner tidak hanya membangun sistem, tetapi juga membimbing kaderisasi kepemimpinan masa depan.

Dalam era digital, kepemimpinan visioner berarti mampu membaca potensi dan risiko teknologi. Visi pendidikan harus mengintegrasikan kecerdasan buatan, big data, dan pembelajaran daring tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan. Dengan *Silih Asih*, teknologi digunakan untuk memperkuat kasih sayang dan empati, bukan untuk menggantikan hubungan manusia. Dengan *Silih Asah*, teknologi menjadi sarana belajar kolektif. Dengan *Silih Asuh*, pemimpin memastikan penggunaan teknologi tetap etis dan bermoral.

Dari perspektif teoretis, kepemimpinan visioner berakar pada *transformational leadership*. Burns (1978) dan Bass (1990) menekankan bahwa pemimpin transformatif harus memiliki visi yang menginspirasi, menumbuhkan motivasi intrinsik, dan membentuk perubahan budaya. Falsafah Sunda memperkaya teori ini dengan memberi penekanan pada kasih, pembelajaran, dan pengasuhan moral, sehingga visi tidak kering dari nilai kemanusiaan.

Penelitian empiris mendukung pentingnya kepemimpinan visioner. Studi OECD (2022) melaporkan bahwa sekolah dengan pemimpin visioner cenderung lebih inovatif, adaptif, dan memiliki capaian akademik lebih baik. Di Indonesia, riset Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud (2023) menemukan bahwa kepala sekolah yang visioner mampu menggerakkan guru untuk berinovasi dalam pembelajaran diferensiasi dan digital.

Pada akhirnya, kepemimpinan visioner di era VUCA bukan sekadar kemampuan melihat masa depan, tetapi kemampuan membimbing komunitas pendidikan untuk sampai ke masa depan itu dengan kasih, kebijaksanaan, dan keberanian. *Silih Asih* memastikan visi memiliki hati, *Silih Asah* memastikan visi terus tumbuh melalui pembelajaran kolektif, dan *Silih Asuh* memastikan visi tetap berada dalam jalur moral. Dengan paradigma ini, kepemimpinan visioner tidak hanya relevan bagi sekolah atau

pesantren, tetapi juga menjadi model bagi pendidikan nasional Indonesia dalam menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian.

## D. Perbandingan dengan Teori Kepemimpinan Global

Kepemimpinan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari arus pemikiran global. Teori kepemimpinan yang berkembang di dunia, seperti *servant leadership* dan *transformational leadership*, telah banyak dijadikan rujukan oleh para akademisi maupun praktisi pendidikan. Namun, sering kali teori ini diadopsi secara mentah tanpa adaptasi dengan konteks lokal. Di sinilah pentingnya membandingkan falsafah Sunda *Silih Asih*, *Silih Asah*, *Silih Asuh* dengan teori global, bukan untuk mempertentangkan, melainkan untuk memperkaya. Subbab ini berusaha menunjukkan bahwa kepemimpinan lokal dan global memiliki irisan yang kuat, sekaligus perbedaan yang memberi warna khas.

*Servant leadership* yang diperkenalkan Robert K. Greenleaf (1970) berangkat dari premis bahwa pemimpin sejati adalah pelayan terlebih dahulu. Ia mengutamakan kebutuhan orang lain, menempatkan kepentingan komunitas di atas kepentingan pribadi, dan menumbuhkan manusia seutuhnya. Prinsip ini sejalan dengan *Silih Asih* yang menekankan kasih sayang serta kepedulian. Pemimpin yang “ngasih” tidak hanya fokus pada target, tetapi juga memastikan bahwa guru, murid, dan tenaga kependidikan merasa dihargai dan dilayani kebutuhannya. Bedanya, dalam konteks Sunda, kasih sayang tidak hanya personal, tetapi juga komunal: kepemimpinan adalah tanggung jawab kolektif untuk menjaga harmoni komunitas.

Jika *servant leadership* menekankan pelayanan, maka *transformational leadership* menekankan transformasi. James MacGregor Burns (1978) dan Bernard Bass (1990) menegaskan bahwa pemimpin transformasional menginspirasi pengikut melalui visi yang kuat, memberi motivasi intrinsik, dan membangun budaya perubahan. Prinsip ini memiliki irisan dengan *Silih Asah*, karena keduanya menekankan pentingnya proses pembelajaran kolektif. Pemimpin yang *ngasah* bukan hanya mengajarkan, tetapi juga mendorong pertumbuhan pengetahuan bersama. Dalam praktik sekolah, ini tampak dalam pemimpin yang mendorong inovasi pedagogi, memberi

ruang eksperimen bagi guru, dan menumbuhkan semangat kreativitas murid.

*Silih Asuh* menambah dimensi yang jarang disentuh secara eksplisit dalam kedua teori global tersebut, yaitu pengasuhan moral. Baik *servant* maupun *transformational leadership* memang menyiratkan dimensi etika, tetapi dalam falsafah Sunda, bimbingan moral menjadi inti. Pemimpin bukan hanya pelayan atau penginspirasi, tetapi juga pengasuh yang memastikan komunitas tetap berjalan dalam koridor nilai. Inilah yang membuat kepemimpinan berbasis kearifan lokal memiliki kedalaman spiritual dan kultural yang khas.

Perbandingan ini juga menunjukkan perbedaan orientasi. Teori Barat cenderung lahir dari konteks individualistik, di mana kepemimpinan diukur dari relasi antara pemimpin dan pengikut dalam organisasi. Sementara itu, falsafah *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* lahir dari konteks masyarakat komunal-agraris, sehingga menekankan kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, kepemimpinan berbasis Sunda lebih menekankan harmoni sosial daripada pencapaian individual.

Dalam praktik pendidikan, perpaduan antara teori global dan lokal sangat mungkin dilakukan. Kepala sekolah yang mengadopsi *servant leadership* bisa melengkapinya dengan prinsip *Silih Asih*, sehingga pelayanan tidak hanya bersifat profesional, tetapi juga penuh kasih. Pemimpin yang menggunakan pendekatan transformasional dapat melengkapinya dengan *Silih Asah*, sehingga inovasi tidak bersifat top-down, melainkan hasil proses saling belajar. Sementara itu, *Silih Asuh* memastikan bahwa semua transformasi tetap berpijak pada nilai moral.

Penelitian empiris mendukung integrasi ini. Studi Mulyana (2022) menemukan bahwa kepala sekolah di Jawa Barat yang menerapkan kepemimpinan partisipatif berbasis *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* memiliki dampak positif pada motivasi guru, mirip dengan dampak *transformational leadership* dalam studi Bass (1990). Dengan kata lain, nilai lokal terbukti selaras dengan temuan akademik global.

Dalam kerangka SDGs, integrasi teori global dan lokal juga memperkuat kontribusi pendidikan Indonesia. *Servant leadership* mendukung SDG 16 (*peace, justice, and strong institutions*), *transformational leadership*

mendukung SDG 4 (*quality education*), sementara *Silih Asih, Asah, Asuh* menambahkan dimensi keberlanjutan budaya dan identitas lokal. Dengan demikian, kepemimpinan Nusantara dapat menjadi model unik yang sekaligus berorientasi global.

Secara filosofis, perbandingan ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan tidak bisa dilepaskan dari konteks. Teori Barat memberi kerangka konseptual yang kuat, tetapi hanya akan relevan jika diterjemahkan ke dalam nilai lokal. Sebaliknya, falsafah lokal membutuhkan artikulasi akademik agar bisa diakui dalam diskursus global. Dengan menjembatani keduanya, Indonesia dapat melahirkan model kepemimpinan pendidikan yang khas: humanis, partisipatif, visioner, sekaligus berakar pada budaya.

Dengan demikian, *Silih Asih, Asah, Asuh* bukan alternatif yang menafikan teori global, melainkan mitra dialog yang memperkaya. *Servant leadership* memberi dasar pelayanan, *transformational leadership* memberi energi perubahan, sementara falsafah Sunda memberi kerangka moral, kasih, dan pembelajaran kolektif. Ketiganya jika disinergikan dapat melahirkan model kepemimpinan pendidikan yang lebih utuh, kontekstual, dan relevan menghadapi tantangan abad ke-21.

## E. Roadmap Kepemimpinan Nusantara di Abad 21

Kepemimpinan pendidikan di abad ke-21 menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dunia yang ditandai dengan dinamika VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*), percepatan teknologi *Society 5.0*, serta komitmen global terhadap *SDGs 2030*, menuntut model kepemimpinan yang visioner, humanis, inklusif, dan berakar pada kearifan lokal. Roadmap kepemimpinan Nusantara di abad ini bukan sekadar agenda teknis, tetapi peta jalan filosofis dan strategis yang menggabungkan nilai *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh* dengan teori kepemimpinan global, sekaligus menjawab kebutuhan nyata pendidikan Indonesia.

Roadmap kepemimpinan Nusantara di abad 21 harus dimulai dengan fondasi filosofis yang kuat. Nilai *Silih Asih* memberi landasan etis agar kepemimpinan berakar pada kasih sayang dan kepedulian sosial, *Silih Asah* memberi arah agar kepemimpinan selalu menjadi proses pembelajaran kolektif, sementara *Silih Asuh* memastikan bahwa kepemimpinan tidak

tercerabut dari tanggung jawab moral dan pengasuhan generasi muda. Fondasi ini penting agar kepemimpinan pendidikan tidak hanya menjadi alat birokrasi, tetapi juga ruh transformasi.

Langkah pertama dalam roadmap adalah membangun kapasitas kepemimpinan yang inklusif. Pemimpin pendidikan harus mampu merangkul semua pihak: guru, murid, orang tua, masyarakat, bahkan industri. Inklusivitas berarti membuka ruang partisipasi, mendengarkan suara yang lemah, dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Dalam hal ini, falsafah Nusantara memberi bekal: kepemimpinan bukan dominasi, tetapi peran sebagai pengayom yang menjaga harmoni.

Langkah kedua adalah membangun kepemimpinan berbasis visi jangka panjang. Visi pendidikan Indonesia tidak boleh berhenti pada target administratif, tetapi harus menyentuh cita-cita luhur: melahirkan generasi berkarakter Pancasila, berdaya saing global, sekaligus berakar pada budaya lokal. Pemimpin visioner memimpin dengan narasi yang menggerakkan, bukan hanya dengan instruksi. Nilai *Silih Asah* memberi kerangka: visi dibangun melalui dialog dan pembelajaran bersama, bukan produk satu orang semata.

Roadmap juga menuntut kepemimpinan adaptif terhadap teknologi. Era Society 5.0 menghadirkan kecerdasan buatan, big data, dan digitalisasi pendidikan. Pemimpin Nusantara harus memastikan teknologi tidak mendehumanisasi pendidikan, melainkan memperkuat kasih (*asih*), memperluas ruang belajar (*asah*), dan memperdalam pengasuhan moral (*asuh*). Dengan demikian, roadmap kepemimpinan Nusantara dapat menjadi contoh model pendidikan digital humanis di tingkat global.

Selain itu, roadmap menekankan pentingnya pendidikan karakter dan spiritualitas. Pemimpin bukan hanya manajer, tetapi teladan moral. Ia membentuk budaya sekolah atau pesantren yang menjunjung tinggi integritas, empati, dan tanggung jawab. Dalam konteks globalisasi yang sering membawa arus individualisme, kepemimpinan Nusantara menegaskan kembali pentingnya kolektivitas, solidaritas, dan nilai spiritual.

Kepemimpinan Nusantara di abad 21 juga harus berorientasi pada keberlanjutan. Roadmap ini sejalan dengan SDG 4 (*Quality Education*) dan SDG 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*). Pemimpin tidak hanya memikirkan keberhasilan akademik jangka pendek, tetapi juga

keberlanjutan ekologi, keadilan sosial, dan harmoni masyarakat. Prinsip *Silih Asih* menegaskan bahwa kepemimpinan sejati adalah menjaga bumi dan generasi mendatang.

Roadmap juga harus mengantisipasi tantangan geopolitik dan globalisasi. Pemimpin pendidikan Nusantara perlu membekali murid dengan kompetensi global citizenship, toleransi, dan keterampilan abad 21. Namun, kompetensi ini tidak boleh menghapus identitas budaya. Justru sebaliknya, pemimpin Nusantara harus memastikan bahwa pendidikan global berjalan selaras dengan kearifan lokal.

Dalam praktiknya, roadmap ini dapat diwujudkan melalui program pelatihan kepemimpinan bagi kepala sekolah, guru, dan pemimpin komunitas. Pelatihan ini tidak hanya berisi teori manajemen modern, tetapi juga integrasi nilai *Silih Asih, Asah, Asuh*. Dengan begitu, lahir pemimpin yang kompeten secara profesional sekaligus berakar secara kultural.

Pesantren bisa menjadi laboratorium kepemimpinan Nusantara. Kiai yang memimpin dengan kasih, mengasah dengan ilmu, dan mengasuh dengan teladan moral, merupakan model kepemimpinan yang relevan untuk sekolah dan universitas sekalipun. Roadmap ke depan dapat memperkuat model ini melalui adaptasi digital dan pembaruan kurikulum.

Dari sisi kebijakan, roadmap kepemimpinan Nusantara memerlukan dukungan sistemik. Pemerintah dapat mengintegrasikan nilai kearifan lokal ke dalam standar nasional pendidikan, sistem penjaminan mutu, dan program *Sekolah Penggerak*. Dengan begitu, kepemimpinan berbasis budaya tidak lagi dianggap sebagai inisiatif opsional, tetapi bagian dari sistem pendidikan nasional.

Kepemimpinan Nusantara juga perlu bersifat resilien. Era VUCA penuh dengan krisis: pandemi, bencana alam, ketidakpastian politik. Roadmap harus memastikan bahwa pemimpin pendidikan siap menghadapi krisis dengan tenang, adaptif, dan tetap berpegang pada nilai kasih serta moralitas. Falsafah *Silih Asuh* memberi ketahanan spiritual yang dibutuhkan dalam situasi genting.

Dalam perspektif global, roadmap kepemimpinan Nusantara dapat menjadi kontribusi Indonesia terhadap diskursus internasional. Jika Jepang dikenal dengan Society 5.0 dan Finlandia dengan personalized learning,

maka Indonesia dapat memperkenalkan *Leadership 5.0 berbasis Silih Asih, Asah, Asuh*. Model ini menempatkan kasih, pembelajaran kolektif, dan pengasuhan moral sebagai inti kepemimpinan di era digital.

Akhirnya, roadmap ini bukan hanya dokumen strategis, melainkan cita-cita kolektif. Ia mengajak semua pemangku kepentingan—guru, murid, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan industri—untuk berjalan bersama dalam menata pendidikan. Kepemimpinan Nusantara bukan milik sege-lintir elit, tetapi energi kolektif bangsa yang ingin mewujudkan pendidikan berakar budaya, berkarakter humanis, dan berdaya global.

Dengan demikian, *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh* bukan hanya warisan lokal, tetapi fondasi peradaban pendidikan abad 21. Roadmap kepemimpinan Nusantara menegaskan bahwa masa depan pendidikan Indonesia harus dituntun oleh kasih, diperkaya oleh pembelajaran kolektif, dan dijaga oleh pengasuhan moral. Inilah kontribusi unik Indonesia bagi dunia: kepemimpinan pendidikan yang humanis, visioner, resilien, dan berakar pada kearifan budaya.



# BAGIAN III

## EMPAT PILAR UNESCO







## BAB 7

### LEARNING TO KNOW

Pendidikan modern sering kali dipersempit menjadi sekadar instrumen untuk menguasai keterampilan teknis atau memenuhi tuntutan pasar kerja. Padahal, UNESCO sejak *Report of the International Commission on Education for the Twenty-First Century* (Delors Report, 1996) menekankan bahwa pendidikan sejati harus berpijak pada empat pilar utama: *Learning to Know*, *Learning to Do*, *Learning to Be*, dan *Learning to Live Together*. Pilar pertama, *Learning to Know*, menegaskan bahwa inti pendidikan adalah kemampuan untuk memahami, menguasai, dan membangun pengetahuan. Namun, *Learning to Know* bukan hanya soal menghafal fakta, melainkan menumbuhkan kapasitas intelektual, rasa ingin tahu, dan kemampuan berpikir kritis yang menjadi fondasi bagi pembelajaran sepanjang hayat.

Dalam konteks global yang ditandai oleh derasnya arus informasi, perkembangan teknologi, dan perubahan yang cepat, *Learning to Know* menjadi semakin penting. Era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) menuntut manusia untuk tidak hanya tahu, tetapi juga mampu memilah, mengaitkan, dan mengolah pengetahuan agar relevan dengan realitas yang terus berubah. Literasi data, literasi digital, dan literasi kritis

menjadi bagian integral dari proses *Learning to Know*. Tanpa kapasitas ini, manusia mudah terjebak dalam arus disinformasi, manipulasi, dan kehilangan arah di tengah kompleksitas dunia modern.

Dalam kerangka Society 5.0, di mana kecerdasan buatan dan big data menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, *Learning to Know* harus ditafsirkan ulang. Pengetahuan tidak lagi sekadar dikumpulkan dalam memori manusia, tetapi juga dikelola melalui interaksi dengan mesin, algoritma, dan ekosistem digital. Tantangan terbesar pendidikan adalah bagaimana memanusiaikan teknologi: membangun generasi yang tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga mampu mengkritisi, mengkreasi, dan mengontekstualisasi pengetahuan. *Learning to Know* dengan demikian bukan sekadar akumulasi data, melainkan pembentukan pola pikir yang reflektif, kritis, dan adaptif.

Dalam perspektif lokal Nusantara, *Learning to Know* memiliki resonansi kuat dengan falsafah *Silih Asah*. Konsep saling mengasah pengetahuan menekankan bahwa belajar adalah proses dialogis, kolaboratif, dan kontekstual. Pengetahuan tidak dimiliki secara eksklusif, melainkan dibangun bersama melalui pengalaman, diskusi, dan praktik sosial. Di sekolah dan pesantren, misalnya, *Learning to Know* tidak hanya dilakukan lewat buku, tetapi juga lewat interaksi dengan guru, tokoh masyarakat, dan bahkan alam. Dengan demikian, pilar UNESCO ini menemukan bentuknya yang khas dalam konteks Indonesia, yaitu pendidikan yang berakar pada budaya belajar kolektif.

Namun, *Learning to Know* juga menuntut kesadaran bahwa pengetahuan selalu berkembang. Apa yang benar hari ini bisa usang besok. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh hanya menyiapkan murid untuk lulus ujian, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan berpikir kritis, belajar mandiri, dan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Inilah inti dari *lifelong learning* yang ditekankan UNESCO dan kini menjadi kebutuhan mendesak di era globalisasi.

Lebih jauh, *Learning to Know* juga terkait dengan pembentukan identitas intelektual. Murid yang terbiasa mencari tahu, menganalisis, dan menghubungkan pengetahuan akan tumbuh menjadi individu yang percaya diri dalam berpikir dan berargumentasi. Hal ini penting untuk membangun generasi Indonesia yang tidak hanya menjadi penerima pasif teori Barat,

tetapi juga mampu mengembangkan teori dan solusi sendiri, berakar pada konteks lokal dan relevan bagi dunia.

Dengan demikian, *Learning to Know* adalah pintu gerbang menuju tiga pilar lainnya. Tanpa kemampuan memahami dan membangun pengetahuan, mustahil seseorang dapat melakukan (*Learning to Do*), menjadi (*Learning to Be*), dan hidup bersama secara harmonis (*Learning to Live Together*). Bab 7 ini akan menguraikan fondasi pengetahuan dan literasi abad ke-21, integrasi literasi digital dengan humanitas, model pembelajaran berbasis pengetahuan, serta studi kasus nasional dan internasional tentang bagaimana *Learning to Know* dapat diimplementasikan secara efektif.

## A. Fondasi Pengetahuan dan Literasi Abad 21

Pengetahuan adalah fondasi utama pendidikan, namun di abad ke-21, konsep pengetahuan mengalami transformasi radikal. Jika pada masa lalu pengetahuan dipahami sebagai akumulasi fakta dan informasi, maka di era digital saat ini pengetahuan lebih dipahami sebagai kemampuan untuk mengakses, memilah, mengolah, dan menggunakan informasi secara kritis. Dengan kata lain, pengetahuan tidak lagi berhenti pada apa yang diketahui, tetapi bagaimana cara mengetahuinya, bagaimana mengaitkan informasi lintas disiplin, dan bagaimana menggunakannya untuk memecahkan masalah nyata. Subbab ini akan menguraikan bagaimana literasi abad ke-21 menjadi fondasi baru *Learning to Know* dalam dunia pendidikan.

Fondasi pengetahuan abad ke-21 menuntut pergeseran paradigma dari *content-based learning* menuju *competency-based learning*. Murid tidak cukup hanya menguasai fakta sejarah, rumus matematika, atau kaidah bahasa, tetapi harus mampu menghubungkan fakta-fakta tersebut dalam kerangka berpikir kritis. Pengetahuan yang terisolasi tidak lagi relevan; yang dibutuhkan adalah kemampuan berpikir sistemik, melihat keterkaitan antarilmu, serta kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Literasi menjadi inti dari transformasi ini. OECD melalui *Programme for International Student Assessment (PISA)* menegaskan bahwa literasi abad ke-21 meliputi literasi membaca, literasi numerasi, dan literasi sains, namun kini diperluas menjadi literasi digital, literasi data, literasi finansial, bahkan

literasi budaya. Murid tidak hanya dituntut bisa membaca teks, tetapi juga membaca data, membaca realitas sosial, dan membaca tantangan global. Dengan begitu, literasi tidak hanya menjadi keterampilan dasar, tetapi modal utama dalam menghadapi dunia yang terus berubah.

Dalam konteks Indonesia, hasil survei PISA masih menunjukkan tantangan serius. Skor literasi membaca dan numerasi siswa Indonesia berada di bawah rata-rata OECD, menandakan perlunya reformasi mendasar dalam sistem pendidikan. Namun, jika ditinjau dari kearifan lokal, sebenarnya masyarakat Nusantara memiliki tradisi literasi yang kuat, meskipun dalam bentuk berbeda. Tradisi *ngadongeng* di Sunda, *bakaba* di Minangkabau, atau *wayang* di Jawa adalah bentuk literasi budaya yang menanamkan pengetahuan, nilai moral, dan keterampilan berpikir kritis melalui medium cerita. Tantangannya adalah bagaimana menghubungkan tradisi ini dengan literasi digital modern.

Fondasi pengetahuan abad ke-21 juga menuntut kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*) dan pemecahan masalah (*problem solving*). Murid yang hanya pasif menerima pengetahuan tidak akan siap menghadapi dunia kerja maupun kehidupan sosial yang kompleks. *Learning to Know* berarti menumbuhkan sikap ingin tahu, keberanian bertanya, serta keterampilan untuk menganalisis informasi. Guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber ilmu, melainkan fasilitator yang mendorong murid menggali pengetahuan secara mandiri.

Teknologi menjadi katalis penting dalam membangun literasi baru. Dengan kehadiran internet, big data, dan kecerdasan buatan, pengetahuan tersedia dalam jumlah melimpah. Tantangannya bukan lagi kelangkaan informasi, tetapi kelimpahan informasi yang justru bisa menimbulkan kebingungan. Di sinilah literasi digital berperan: murid harus mampu memilah informasi valid dari yang palsu, memahami algoritma media sosial yang bisa menciptakan *echo chamber*, dan mengembangkan etika digital dalam berinteraksi di dunia maya.

Fondasi pengetahuan juga mencakup literasi humanitas. Di tengah derasnya teknologi, manusia tetap harus memahami filsafat, sejarah, seni, dan budaya. Literasi humanitas membantu murid melihat makna di balik data dan teknologi. Misalnya, literasi sejarah mengajarkan murid untuk memahami pola krisis global, literasi seni membantu menumbuhkan empati

dan kreativitas, sedangkan literasi budaya memperkuat identitas di tengah arus globalisasi.

UNESCO (2021) menekankan bahwa literasi abad ke-21 harus bersifat transdisipliner. Murid perlu belajar bagaimana sains terhubung dengan etika, bagaimana teknologi memengaruhi ekologi, dan bagaimana ekonomi berdampak pada politik. Pendekatan ini mengajarkan bahwa pengetahuan bukan kumpulan silo, melainkan jaringan yang saling terhubung. Dengan demikian, *Learning to Know* melatih murid untuk berpikir lintas batas disiplin.

Dalam perspektif lokal, falsafah Sunda *Silih Asah* dapat memperkuat literasi ini. *Silih Asah* menekankan proses belajar yang saling mengasah antarindividu, bukan sekadar menerima instruksi. Dengan pendekatan kolaboratif ini, literasi menjadi proses dialog, bukan hafalan. Murid belajar membaca teks sekaligus membaca kehidupan, menghubungkan buku dengan pengalaman nyata.

Pendidikan formal perlu mendesain ulang kurikulum agar literasi abad ke-21 benar-benar menjadi fondasi. Kurikulum Merdeka di Indonesia, misalnya, memberi ruang bagi proyek lintas mata pelajaran yang melatih murid untuk menghubungkan ilmu dengan realitas sosial. Jika dikelola dengan baik, pendekatan ini bisa menjadi wahana ideal untuk mengintegrasikan literasi digital, numerasi, dan humanitas dalam satu kesatuan pembelajaran.

Selain itu, guru perlu dilatih sebagai agen literasi. Guru bukan hanya pengajar mata pelajaran, tetapi juga fasilitator literasi lintas disiplin. Pelatihan guru harus mencakup keterampilan berpikir kritis, literasi digital, dan pedagogi kolaboratif. Dengan begitu, guru dapat menularkan keterampilan *Learning to Know* kepada murid secara berkesinambungan.

Fondasi pengetahuan abad ke-21 juga harus inklusif. Literasi tidak boleh hanya menjadi hak anak-anak di perkotaan, tetapi juga harus menjangkau daerah terpencil. Program *Kampung Literasi* yang dikembangkan Kemendikbud dapat diperluas dengan memanfaatkan teknologi digital dan kearifan lokal. Dengan pendekatan ini, literasi menjadi gerakan nasional yang berakar di komunitas.

Pengetahuan dalam abad ke-21 juga berhubungan dengan keberlanjutan. Literasi ekologis, misalnya, menjadi kebutuhan mendesak agar generasi muda memahami hubungan antara manusia dan lingkungan. Murid harus belajar bahwa pengetahuan bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga bumi. *Learning to Know* dalam hal ini berarti membangun kesadaran ekologi sebagai bagian dari fondasi intelektual.

Secara praktis, *Learning to Know* dapat diukur melalui kemampuan murid mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, mengajukan pertanyaan kritis, dan menghasilkan solusi kreatif. Indikator ini jauh lebih bermakna daripada sekadar nilai ujian. Dengan demikian, evaluasi pendidikan perlu bergeser dari penguasaan hafalan menuju penilaian proses berpikir kritis dan reflektif.

Pada akhirnya, fondasi pengetahuan dan literasi abad ke-21 adalah kemampuan untuk belajar sepanjang hayat. Murid harus dipersiapkan bukan hanya untuk lulus ujian, tetapi untuk terus belajar dalam menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian. Dengan integrasi nilai lokal seperti *Silih Asah* dan kerangka global seperti literasi abad ke-21, Indonesia dapat membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga tangguh, kreatif, dan bermakna secara sosial.

## **B. Literasi Data, Teknologi, dan Humanitas**

Di abad ke-21, pengetahuan tidak lagi terbatas pada penguasaan bacaan dan hitungan dasar. Literasi kini meluas ke ranah data, teknologi, dan humanitas. Literasi data memungkinkan manusia memahami, mengolah, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang berbasis bukti. Literasi teknologi memberi kemampuan adaptasi terhadap kecerdasan buatan, internet of things, big data, dan perkembangan digital lain yang mengubah wajah kehidupan. Sementara itu, literasi humanitas menjaga agar perkembangan teknologi tidak kehilangan arah moral, etis, dan spiritual. Subbab ini membahas integrasi ketiga jenis literasi tersebut sebagai inti dari *Learning to Know* di era VUCA dan Society 5.0.

Literasi data adalah kemampuan membaca, menafsirkan, dan menggunakan data dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital, hampir semua aspek kehidupan direduksi menjadi data: mulai dari pola belanja, interaksi

sosial, hingga kesehatan individu. Pemimpin pendidikan, guru, dan murid dituntut mampu memahami makna di balik angka-angka tersebut. Tanpa literasi data, keputusan yang diambil berisiko keliru atau manipulatif. Contoh nyata adalah penyalahgunaan data dalam penyebaran hoaks, yang hanya bisa ditangkal dengan kemampuan kritis membaca pola data.

Literasi teknologi melampaui keterampilan menggunakan gawai. Ia mencakup pemahaman tentang bagaimana teknologi bekerja, bagaimana algoritma membentuk perilaku digital, serta bagaimana etika harus dijaga dalam penggunaannya. Murid tidak cukup hanya menguasai perangkat lunak, tetapi juga harus memahami konsekuensi sosial dari penggunaannya. Misalnya, bagaimana penggunaan media sosial bisa membentuk opini publik, bagaimana kecerdasan buatan memengaruhi dunia kerja, atau bagaimana teknologi digital bisa memperbesar kesenjangan bila tidak diakses secara merata.

Dalam konteks pendidikan, literasi data dan teknologi bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Guru dituntut mampu membaca data hasil belajar siswa untuk merancang strategi pembelajaran yang tepat. Sekolah harus mengintegrasikan teknologi bukan hanya untuk administrasi, tetapi juga untuk memperkaya pengalaman belajar. Program *Merdeka Belajar* dengan Rapor Pendidikan sebenarnya sudah memberi ruang bagi literasi data ini, namun implementasinya masih memerlukan penguatan.

Namun, literasi data dan teknologi tidak boleh dilepaskan dari literasi humanitas. Teknologi tanpa humanitas hanya akan melahirkan dehumanisasi, di mana manusia diperlakukan sebagai angka atau objek produksi. Literasi humanitas mengingatkan bahwa setiap data merepresentasikan manusia dengan martabatnya, dan setiap teknologi harus diarahkan untuk kebaikan bersama. Humanitas di sini mencakup pemahaman filsafat, sejarah, seni, agama, dan nilai budaya yang memberi makna pada perkembangan teknologi.

Integrasi antara literasi data, teknologi, dan humanitas mencerminkan semangat *Silih Asah* dalam budaya Sunda: belajar tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga membangun pemahaman reflektif dan etis. Dengan mengasah diri dalam tiga ranah ini, murid belajar menjadi manusia utuh yang mampu berpikir kritis, kreatif, sekaligus bermoral. Pendidikan

bukan sekadar menghasilkan pekerja yang siap industri, tetapi manusia yang mampu menghadapi tantangan kompleks dengan kebijaksanaan.

Contoh nyata integrasi ini bisa dilihat dalam praktik *project-based learning* di sekolah-sekolah penggerak. Siswa diajak mengolah data tentang lingkungan sekitar, misalnya kualitas air sungai, lalu mempresentasikannya dengan teknologi digital, sambil mendiskusikan nilai moral dan budaya tentang menjaga alam. Dengan cara ini, literasi data, teknologi, dan humanitas berjalan bersama, menciptakan pengalaman belajar yang holistik.

Penelitian OECD (2021) menunjukkan bahwa negara yang berhasil mengintegrasikan literasi teknologi dan humanitas memiliki generasi muda yang lebih siap menghadapi disrupsi. Finlandia, misalnya, mengajarkan coding sejak sekolah dasar, tetapi bersamaan dengan itu memperkuat pendidikan seni dan filsafat. Jepang melalui Society 5.0 menekankan bahwa teknologi harus berpusat pada manusia. Indonesia pun memiliki peluang besar bila mampu memadukan literasi data dan teknologi dengan falsafah humanis lokal seperti *Silih Asih, Asah, Asuh*.

Literasi humanitas juga penting untuk menghindari reduksi pendidikan menjadi mesin industri. Jika murid hanya diajarkan bagaimana menguasai teknologi tanpa memahami etika, maka teknologi bisa disalahgunakan untuk tujuan destruktif. Sebaliknya, dengan memperkuat literasi humanitas, murid memahami bahwa teknologi adalah sarana, bukan tujuan. Mereka belajar memaknai teknologi sebagai alat untuk memperbaiki kualitas hidup, memperkuat solidaritas, dan menjaga bumi.

Dalam kerangka SDGs, literasi data, teknologi, dan humanitas mendukung banyak tujuan sekaligus: SDG 4 tentang pendidikan bermutu, SDG 8 tentang pekerjaan layak, SDG 9 tentang inovasi, hingga SDG 16 tentang perdamaian. Literasi ini memastikan bahwa generasi muda tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga adil, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Falsafah Nusantara memberikan dasar moral yang kuat. *Silih Asih* mengingatkan agar teknologi digunakan dengan kasih sayang dan empati, *Silih Asah* menekankan pentingnya mengasah keterampilan melalui dialog dan kolaborasi, sementara *Silih Asuh* menegaskan peran bimbingan moral

agar literasi data dan teknologi tidak lepas kendali. Dengan demikian, literasi abad ke-21 berakar pada nilai lokal, sekaligus relevan secara global.

Pada akhirnya, literasi data, teknologi, dan humanitas harus menjadi inti dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Tidak cukup hanya dimasukkan sebagai mata pelajaran tambahan, melainkan harus terintegrasi dalam seluruh proses belajar. Guru harus berperan sebagai teladan literasi digital yang etis, sekolah harus menjadi ekosistem literasi yang inklusif, dan masyarakat harus mendukung gerakan literasi ini sebagai bagian dari pembangunan peradaban bangsa.

Dengan mengintegrasikan literasi data, teknologi, dan humanitas, pendidikan Indonesia dapat menjawab tantangan era VUCA dan Society 5.0 tanpa kehilangan jati diri. Murid tidak hanya menjadi penguasai teknologi, tetapi juga manusia berkarakter yang mampu mengarahkan teknologi untuk kemaslahatan. Inilah wujud nyata *Learning to Know* yang berakar pada kearifan lokal, berpijak pada kebutuhan nasional, dan berorientasi pada peradaban global.

### C. Model Pembelajaran Berbasis Pengetahuan

Setelah membahas fondasi pengetahuan dan literasi abad ke-21, serta pentingnya literasi data, teknologi, dan humanitas, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana semua itu dapat diterjemahkan ke dalam praktik pembelajaran di sekolah dan pesantren. *Learning to Know* tidak boleh berhenti pada level ide atau kurikulum, melainkan harus hidup dalam proses belajar-mengajar sehari-hari. Model pembelajaran berbasis pengetahuan memberikan jawaban: sebuah pendekatan yang menempatkan pengetahuan bukan sekadar konten hafalan, tetapi sebagai pengalaman kognitif, sosial, dan moral yang membentuk cara berpikir kritis dan reflektif peserta didik.

Model pembelajaran berbasis pengetahuan mengubah cara kita memahami belajar. Belajar tidak lagi dipandang sebagai proses mengisi wadah kosong dengan informasi, melainkan sebagai proses aktif membangun pengetahuan melalui interaksi dengan guru, teman sebaya, komunitas, dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang diperkenalkan Piaget dan dikembangkan Vygotsky, yang menekankan pentingnya pengalaman dan interaksi sosial dalam membentuk pemahaman.

Dalam praktiknya, pembelajaran berbasis pengetahuan mendorong guru untuk mendesain pengalaman belajar yang memungkinkan murid berpikir, menganalisis, dan menghubungkan konsep. Misalnya, dalam pelajaran IPA, guru tidak hanya menjelaskan hukum Newton, tetapi mengajak murid mengamati fenomena sehari-hari seperti gerakan sepeda atau jatuhnya buah. Dengan cara ini, pengetahuan hadir sebagai realitas yang dekat, bukan abstraksi yang jauh.

Model ini juga menekankan pentingnya keterkaitan antar-disiplin. Pengetahuan di abad ke-21 tidak bisa lagi diajarkan secara terpisah. Dalam satu proyek, murid bisa belajar matematika, sains, literasi digital, sekaligus nilai humanitas. Contohnya, proyek penelitian tentang sampah plastik bukan hanya soal hitungan volume sampah, tetapi juga tentang dampak sosial, etika lingkungan, hingga solusi kreatif berbasis teknologi. Dengan pendekatan ini, murid belajar bahwa pengetahuan adalah jaringan, bukan silo.

Salah satu prinsip penting dalam model pembelajaran berbasis pengetahuan adalah *inquiry-based learning*. Murid diajak untuk bertanya, menyelidiki, dan menemukan sendiri jawaban dari persoalan yang mereka hadapi. Proses ini menumbuhkan rasa ingin tahu, melatih berpikir kritis, dan memperkuat keterampilan problem solving. Di sekolah penggerak, pendekatan ini diterapkan melalui *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)* yang menekankan proyek lintas disiplin sebagai sarana belajar bermakna.

Selain *inquiry-based learning*, model pembelajaran berbasis pengetahuan juga mengandalkan *project-based learning*. Murid tidak hanya membaca tentang teori, tetapi mengerjakan proyek nyata yang melibatkan riset, kolaborasi, dan presentasi. Misalnya, siswa SMP membuat peta digital banjir di lingkungannya menggunakan aplikasi GIS sederhana. Dari situ mereka belajar geografi, matematika, teknologi, sekaligus nilai sosial tentang solidaritas.

Penting pula dicatat bahwa model pembelajaran berbasis pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari teknologi digital. Namun, teknologi hanya alat, bukan tujuan. Tantangan guru adalah bagaimana memadukan perangkat digital dengan pedagogi kritis. Platform digital dapat digunakan untuk mengakses sumber pengetahuan global, tetapi guru tetap harus

membimbing agar murid mampu memilah informasi dan menggunakannya secara etis.

Model ini juga menuntut pergeseran peran guru. Guru tidak lagi semata-mata *knowledge transmitter*, tetapi menjadi fasilitator, mentor, dan inspirator. Guru membantu murid merumuskan pertanyaan, mengarahkan proses pencarian pengetahuan, serta memberikan bimbingan moral dalam penggunaannya. Falsafah Sunda *Silih Asah* sangat relevan di sini: guru dan murid saling mengasah, saling membangun pemahaman, bukan relasi satu arah.

Pembelajaran berbasis pengetahuan juga harus berakar pada konteks lokal. Pengetahuan akan lebih bermakna bila dikaitkan dengan realitas murid. Misalnya, anak-anak di pesisir belajar tentang ekosistem laut melalui interaksi langsung dengan nelayan, sementara murid di pedesaan belajar tentang siklus air dengan mengamati sawah dan sungai. Integrasi kearifan lokal menjadikan pengetahuan tidak hanya rasional, tetapi juga kontekstual dan membumi.

UNESCO (2021) menekankan bahwa model pembelajaran berbasis pengetahuan harus menggabungkan *cognitive skills* dengan *soft skills* seperti kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Murid tidak hanya diukur dari seberapa banyak mereka tahu, tetapi bagaimana mereka menggunakan pengetahuan untuk bekerja sama, menyelesaikan konflik, dan membangun solusi bagi masyarakat.

Dalam kerangka Society 5.0, model ini semakin relevan. Murid harus belajar bagaimana berinteraksi dengan teknologi, memahami data, sekaligus menjaga nilai humanitas. Pembelajaran berbasis pengetahuan menyiapkan mereka menjadi *knowledge workers* yang tidak hanya produktif, tetapi juga memiliki kesadaran etis. Dengan integrasi *Silih Asih, Asah, Asuh*, murid diarahkan untuk menggunakan pengetahuan dengan kasih, mengasah diri bersama, dan bertanggung jawab secara moral.

Penelitian di Indonesia mendukung efektivitas pendekatan ini. Studi Pusat Penelitian Kebijakan Kemendikbud (2023) menemukan bahwa sekolah yang mengimplementasikan *project-based learning* dan *inquiry-based learning* menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi siswa. Murid lebih percaya diri dalam

mempresentasikan gagasan, lebih aktif bertanya, dan lebih peduli pada isu sosial di sekitarnya.

Namun, implementasi model ini menghadapi tantangan. Banyak guru masih terbebani administrasi sehingga sulit berinovasi. Akses teknologi juga belum merata. Oleh karena itu, roadmap implementasi harus mencakup pelatihan guru, dukungan infrastruktur, serta kebijakan yang memberi ruang fleksibilitas. Dengan ekosistem yang mendukung, pembelajaran berbasis pengetahuan bisa menjadi arus utama di sekolah Indonesia.

Pada akhirnya, model pembelajaran berbasis pengetahuan adalah jembatan antara fondasi literasi abad ke-21 dengan cita-cita pendidikan humanis. Murid tidak hanya menjadi menghafal, tetapi pembelajar yang kritis, kreatif, dan berkarakter. Dengan memadukan kerangka UNESCO dan falsafah lokal seperti *Silih Asah*, Indonesia dapat membangun model pendidikan yang relevan, kontekstual, dan sekaligus kontributif bagi wacana global.

## D. Kecakapan Belajar Mandiri dan Self-Regulated Learning

Salah satu tantangan utama pendidikan abad ke-21 adalah bagaimana menyiapkan murid agar tidak hanya mampu belajar di ruang kelas, tetapi juga memiliki kapasitas belajar sepanjang hayat. *Learning to Know* menuntut lebih dari sekadar penguasaan materi; ia membutuhkan keterampilan mengatur diri, mengelola motivasi, dan membangun disiplin intelektual. Konsep *self-regulated learning* (SRL) muncul sebagai kerangka yang menegaskan bahwa murid harus menjadi subjek aktif dalam belajarnya sendiri, bukan objek pasif yang hanya menerima instruksi. Dalam kerangka falsafah *Silih Asah*, kecakapan belajar mandiri ini menjadi semangat saling mengasah: individu mengasah dirinya sendiri sekaligus memberi kontribusi pada pengasahan kolektif.

Belajar mandiri bukan berarti belajar sendirian. Ia adalah kemampuan untuk merancang, memantau, dan mengevaluasi proses belajar dengan kesadaran penuh. Murid yang memiliki kecakapan ini tahu apa yang ingin dicapai, bagaimana strategi yang digunakan, dan bagaimana

mengukur keberhasilannya. Zimmerman (2000) menyebut SRL sebagai proses siklis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Dalam konteks pendidikan Indonesia, konsep ini sangat relevan dengan semangat Kurikulum Merdeka yang menekankan kemandirian dan diferensiasi belajar.

Kecakapan belajar mandiri sangat penting di era digital. Murid kini dihadapkan pada banjir informasi yang tidak mungkin semuanya difasilitasi guru. Dengan kemampuan SRL, murid dapat memilih sumber belajar yang kredibel, mengatur waktu belajar, serta menyeimbangkan antara akademik, sosial, dan pribadi. Tanpa keterampilan ini, murid mudah terjebak dalam distraksi digital, kehilangan fokus, dan gagal mencapai tujuan belajar.

Pendidikan berbasis SRL menekankan pentingnya motivasi intrinsik. Murid belajar bukan karena dipaksa, melainkan karena sadar akan manfaatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip *Silih Asah*, di mana belajar dipandang sebagai aktivitas yang bernilai bagi pertumbuhan diri dan komunitas. Murid yang memiliki motivasi intrinsik lebih gigih menghadapi kesulitan, lebih kreatif mencari strategi, dan lebih tangguh menghadapi kegagalan.

Dalam praktiknya, guru memiliki peran penting dalam menumbuhkan SRL. Guru dapat membimbing murid untuk menetapkan tujuan belajar yang realistis, merancang strategi belajar, dan melakukan refleksi diri. Misalnya, setelah ujian, guru tidak hanya membahas jawaban benar, tetapi juga mengajak murid merefleksikan strategi belajar apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, proses belajar tidak berhenti pada hasil, tetapi berlanjut pada pembentukan kebiasaan reflektif.

Model *blended learning* atau *hybrid learning* sangat cocok untuk melatih kecakapan belajar mandiri. Dengan kombinasi tatap muka dan pembelajaran daring, murid diberi keleluasaan untuk mengatur ritme belajarnya. Penelitian OECD (2022) menunjukkan bahwa murid yang terbiasa dengan model ini memiliki tingkat kemandirian lebih tinggi dibanding yang hanya belajar secara konvensional.

Di pesantren, praktik *self-regulated learning* sebenarnya telah lama ada dalam bentuk *sorogan* dan *bandongan*. Santri diberi kesempatan untuk membaca kitab secara mandiri, lalu mendiskusikannya dengan kiai atau ustadz. Pola ini membentuk kebiasaan belajar otonom, di mana santri

belajar mengatur ritme, memahami teks, sekaligus berlatih refleksi kritis. Nilai *Silih Asah* sangat kental: santri tidak hanya mengasah dirinya, tetapi juga saling mengasah dalam diskusi kolektif.

Kecakapan belajar mandiri juga menuntut keterampilan manajemen diri. Murid harus mampu mengelola waktu, emosi, dan energi. Di era penuh distraksi, kemampuan mengendalikan diri menjadi kunci. Literasi digital perlu dikaitkan dengan literasi diri: bagaimana murid menggunakan teknologi sebagai alat belajar, bukan sekadar hiburan. Dengan demikian, belajar mandiri juga melatih kedisiplinan moral dan karakter.

Dalam konteks global, SRL mendukung *lifelong learning*. Dunia kerja yang terus berubah menuntut individu untuk terus belajar dan menyesuaikan diri. Tidak ada jaminan satu profesi akan bertahan selamanya. Oleh karena itu, murid yang memiliki keterampilan SRL sejak dini akan lebih siap menghadapi ketidakpastian karier. Mereka mampu belajar ulang, beradaptasi, dan tetap produktif meski dunia berubah cepat.

Studi empiris mendukung pentingnya SRL. Penelitian Pintrich (2004) menunjukkan bahwa murid dengan kemampuan regulasi diri tinggi memiliki prestasi akademik lebih baik, meskipun berasal dari latar belakang sosial-ekonomi yang rendah. Di Indonesia, penelitian Mulyana (2021) menemukan bahwa siswa yang terlatih refleksi diri dan manajemen belajar memiliki daya tahan lebih tinggi menghadapi pembelajaran daring saat pandemi.

Falsafah *Silih Asuh* memperkaya kerangka SRL dengan menekankan pentingnya bimbingan moral. Murid memang belajar mandiri, tetapi tetap membutuhkan asuhan guru, orang tua, dan komunitas agar arahnya benar. Kemandirian tidak berarti kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan prinsip ini, belajar mandiri menjadi jalan menuju kebijaksanaan, bukan sekadar pencapaian individual.

SRL juga dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum melalui *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila*. Murid dilatih merancang proyek, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Proses ini secara alami menumbuhkan keterampilan perencanaan, monitoring, dan refleksi. Jika dijalankan dengan konsisten, P5 dapat menjadi wadah ideal untuk menumbuhkan SRL.

Selain itu, teknologi digital dapat digunakan untuk mendukung SRL. Aplikasi *learning management system* (LMS) memungkinkan murid melacak progres belajarnya, menetapkan target, dan menerima umpan balik otomatis. Namun, sekali lagi, teknologi hanyalah alat. Esensinya tetap pada kesadaran murid untuk mengatur dan mengembangkan dirinya.

Kecakapan belajar mandiri juga berhubungan erat dengan kesehatan mental. Murid yang terbiasa mengatur diri lebih mampu mengelola stres, tidak mudah menyerah, dan lebih resilien. Pendidikan berbasis SRL dengan nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* memberi bekal keseimbangan antara pencapaian akademik, kebahagiaan pribadi, dan keterhubungan sosial.

Dengan demikian, *Learning to Know* tidak lengkap tanpa kecakapan belajar mandiri. Murid yang mampu meregulasi dirinya akan menjadi pembelajar sepanjang hayat, siap menghadapi tantangan global, dan tetap berakar pada nilai lokal. Dengan memadukan teori SRL, literasi abad ke-21, serta falsafah *Silih Asah*, Indonesia dapat membangun generasi pembelajar yang cerdas, tangguh, dan berkarakter.

## E. Studi Kasus Internasional dan Nasional

Teori tentang *Learning to Know* akan lebih bermakna bila diperkaya dengan praktik nyata. Studi kasus internasional dan nasional memberi gambaran bagaimana pilar UNESCO ini diterjemahkan dalam konteks berbeda: dari negara maju dengan sistem pendidikan mapan hingga sekolah-sekolah di Indonesia yang berjuang mengatasi keterbatasan. Perbandingan ini penting bukan hanya untuk mengidentifikasi praktik baik, tetapi juga untuk menemukan ruang inovasi yang sesuai dengan kearifan lokal.

Finlandia adalah salah satu negara yang kerap dijadikan contoh sukses implementasi *Learning to Know*. Sistem pendidikannya menekankan literasi, kreativitas, dan pembelajaran berbasis pengalaman, bukan sekadar ujian standar. Guru diberi kebebasan luas untuk merancang kurikulum yang relevan dengan konteks murid, sementara literasi dibangun sejak usia dini melalui kegiatan membaca bersama keluarga dan komunitas. Dengan model ini, murid Finlandia tumbuh sebagai pembelajar mandiri yang mencintai pengetahuan.

Di Jepang, *Learning to Know* diintegrasikan dalam kerangka *Society 5.0*. Sekolah mengajarkan sains dan teknologi dengan pendekatan humanistik. Misalnya, siswa SMP dilibatkan dalam proyek robotika yang tidak hanya mengajarkan coding, tetapi juga etika penggunaan teknologi. Hal ini mencerminkan bahwa pengetahuan tidak berhenti pada penguasaan teknis, tetapi diarahkan untuk kesejahteraan manusia.

Singapura menjadi contoh lain, terutama dalam menekankan literasi data dan teknologi. Sistem pendidikan Singapura sangat berorientasi pada keterampilan abad ke-21, seperti berpikir kritis, problem solving, dan inovasi. Namun, pemerintah juga menekankan pentingnya nilai kebangsaan dan karakter. Dengan kombinasi ini, Singapura berhasil membangun generasi yang kompetitif secara global tanpa kehilangan identitas nasional.

Rwanda menghadirkan studi kasus yang berbeda. Pasca-konflik, negara ini menggunakan pendidikan sebagai alat rekonsiliasi. *Learning to Know* diwujudkan melalui kurikulum yang mengajarkan sejarah secara jujur, literasi damai, dan keterampilan hidup. Murid tidak hanya belajar membaca dan menulis, tetapi juga belajar memahami konflik, membangun toleransi, dan merancang masa depan bersama. Praktik ini memperlihatkan bahwa pengetahuan dapat menjadi sarana penyembuhan kolektif.

Di Indonesia, praktik *Learning to Know* memiliki keragaman besar. Beberapa sekolah unggulan berhasil mengintegrasikan literasi digital, numerasi, dan literasi budaya dalam pembelajaran. Misalnya, program *Sekolah Penggerak* mengembangkan proyek lintas mata pelajaran yang memungkinkan murid belajar melalui riset lapangan. Murid SMP di Jawa Tengah, misalnya, membuat proyek pemetaan potensi desa menggunakan aplikasi digital. Mereka belajar geografi, matematika, teknologi, sekaligus nilai gotong royong.

Pesantren juga memberi contoh unik. Melalui tradisi *sorogan* dan *bandongan*, santri belajar membaca kitab secara mendalam, sekaligus berdialog dengan kiai dan teman sebaya. Praktik ini membentuk kecakapan *self-regulated learning*, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan literasi yang kontekstual. Pesantren dengan demikian telah lama mempraktikkan *Learning to Know* sebelum konsep ini populer di wacana global.

Studi kasus lain dapat ditemukan di sekolah adat di Papua. Murid belajar membaca dan menulis sambil mempelajari ekologi hutan, nilai solidaritas, dan kearifan lokal. Dengan cara ini, *Learning to Know* tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. Pengetahuan hadir sebagai alat menjaga keberlanjutan budaya dan lingkungan, bukan sekadar syarat administratif.

Penting dicatat bahwa kesuksesan implementasi *Learning to Know* sangat bergantung pada peran komunitas. Di desa-desa Sunda, praktik *ngadongeng* masih digunakan untuk menanamkan literasi dan nilai moral. Tradisi ini bisa dikolaborasikan dengan teknologi digital, misalnya dengan mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk e-book atau podcast. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan lokal dapat dipadukan dengan teknologi modern.

Secara global maupun nasional, studi kasus menunjukkan bahwa *Learning to Know* bukan hanya tentang menumpuk informasi, tetapi tentang menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan. Di Finlandia, ia diwujudkan dalam kebebasan pedagogis; di Jepang, melalui teknologi humanistik; di Rwanda, sebagai rekonsiliasi; di Indonesia, melalui kearifan lokal dan komunitas. Semua praktik ini menegaskan bahwa *Learning to Know* harus kontekstual, relevan, dan berakar pada nilai kemanusiaan.

Pada akhirnya, studi kasus ini memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan model *Learning to Know* yang khas: mengintegrasikan literasi abad ke-21 dengan falsafah lokal seperti *Silih Asah*. Dengan cara ini, pengetahuan tidak hanya menjadi instrumen kompetisi global, tetapi juga sarana membangun solidaritas sosial, menjaga lingkungan, dan memperkuat identitas budaya bangsa.





## BAB 8

### LEARNING TO DO

Jika *Learning to Know* menekankan kemampuan memahami dan membangun pengetahuan, maka *Learning to Do* berfokus pada penerapan pengetahuan itu dalam tindakan nyata. Pilar kedua UNESCO ini menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh berhenti pada penguasaan konsep kognitif, tetapi harus melahirkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan adaptif yang memungkinkan manusia berkontribusi di masyarakat dan dunia kerja. Dengan kata lain, *Learning to Do* adalah jembatan antara teori dan praktik, antara apa yang dipelajari di sekolah dan apa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan abad ke-21 menuntut keterampilan yang jauh lebih kompleks dibanding abad sebelumnya. Revolusi industri 4.0, transformasi digital, dan Society 5.0 mengubah lanskap pekerjaan dan kehidupan sosial. Banyak pekerjaan lama yang hilang, sementara pekerjaan baru yang berbasis teknologi, kreativitas, dan kolaborasi terus bermunculan. Dalam kondisi ini, *Learning to Do* berarti membekali murid dengan keterampilan abad 21—critical thinking, creativity, collaboration, communication (4C)—sekaligus keterampilan teknis dan nonteknis yang relevan.

Namun, *Learning to Do* bukan hanya soal keterampilan kerja. Ia juga mencakup life skills: kemampuan mengelola diri, beradaptasi, dan mengambil keputusan. UNESCO (2022) menekankan bahwa keterampilan hidup seperti resiliensi, kepemimpinan, dan empati sama pentingnya dengan keterampilan teknis. Dalam konteks Indonesia, hal ini sejalan dengan Profil Pelajar Pancasila yang menekankan gotong royong, bernalar kritis, mandiri, kreatif, beriman, dan berkebinekaan global.

Falsafah Sunda *Silih Asih, Asah, Asuh* memperkaya konsep ini dengan dimensi moral dan humanis. *Silih Asah* menekankan keterampilan yang tumbuh melalui proses saling belajar dan praktik bersama, bukan hanya instruksi satu arah. *Silih Asih* memastikan bahwa keterampilan digunakan untuk kepentingan kasih dan solidaritas sosial, bukan sekadar kompetisi individual. Sementara *Silih Asuh* menegaskan bahwa setiap keterampilan harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan pengasuhan generasi muda. Dengan kerangka ini, *Learning to Do* di Indonesia dapat menjadi pendidikan yang produktif sekaligus humanis.

Dalam praktiknya, *Learning to Do* diwujudkan melalui berbagai strategi: pendidikan vokasi yang menghubungkan sekolah dengan dunia industri (*link and match*), *project-based learning* yang melatih siswa memecahkan masalah nyata, kewirausahaan yang mendorong kreativitas ekonomi, hingga pendidikan berbasis komunitas yang membekali murid dengan keterampilan sosial. Semua ini memperlihatkan bahwa keterampilan tidak bisa diajarkan secara teoretis semata, melainkan harus dilatih melalui pengalaman dan aksi nyata.

Bab 8 ini akan membahas dimensi *Learning to Do* secara mendalam. Subbab 8.1 akan mengulas keterampilan abad 21 yang menjadi fondasi utama, Subbab 8.2 membahas keterampilan kerja dan life skills, Subbab 8.3 fokus pada pendidikan vokasi dan *link and match*, Subbab 8.4 mengurai *project-based learning* dan kewirausahaan, sementara Subbab 8.5 menekankan integrasi *Learning to Do* dengan pendidikan berkelanjutan. Semua pembahasan ini akan dilengkapi dengan teori, data riset, dan studi kasus dari Indonesia maupun dunia, sehingga memberikan gambaran utuh tentang bagaimana *Learning to Do* dapat menjadi pilar transformasi pendidikan.

## A. Kompetensi Abad 21

Ketika dunia memasuki abad ke-21 dengan percepatan teknologi, globalisasi, dan kompleksitas sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya, pendidikan dituntut untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya tahu (*learning to know*) dan siap bekerja (*learning to do*), tetapi juga memiliki keterampilan berpikir dan bertindak yang sesuai dengan tantangan zaman. Forum-forum internasional seperti Partnership for 21st Century Learning (P21) merumuskan empat kompetensi kunci yang harus dimiliki oleh generasi abad 21, yaitu berpikir kritis (*critical thinking*), kreativitas (*creativity*), kolaborasi (*collaboration*), dan komunikasi (*communication*). Empat keterampilan ini populer disebut *4C* dan kini menjadi rujukan global dalam desain kurikulum, pedagogi, maupun asesmen.

Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan berdasarkan bukti yang rasional. Dalam dunia yang dipenuhi informasi palsu, manipulasi media, dan ketidakpastian data, keterampilan ini menjadi benteng utama agar generasi muda tidak mudah terjebak dalam disinformasi. Pendidikan harus melatih murid untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mempertanyakannya: siapa yang menyampaikan, dengan tujuan apa, dan apakah ada bukti yang mendukung. Di Indonesia, hasil survei literasi PISA menunjukkan rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa, sehingga penguatan keterampilan ini menjadi agenda mendesak.

Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan gagasan baru yang orisinal, bermanfaat, dan relevan. Di era disrupsi, kreativitas menjadi modal penting karena pekerjaan rutin mudah digantikan mesin, sementara inovasi tetap menjadi keunggulan manusia. Kreativitas tidak hanya berarti seni, tetapi juga inovasi dalam sains, teknologi, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari. Pendidikan harus memberi ruang bagi murid untuk bereksperimen, gagal, lalu mencoba lagi. Dengan kata lain, kurikulum harus menumbuhkan budaya inovasi, bukan sekadar budaya kepatuhan.

Kolaborasi adalah kemampuan bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Abad 21 ditandai dengan kompleksitas masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh individu saja. Isu perubahan iklim, kesehatan global, atau transformasi digital membutuhkan kerja kolektif lintas

disiplin, lintas negara, bahkan lintas budaya. Murid perlu dilatih untuk menghargai perbedaan, membangun kepercayaan, dan menyelesaikan konflik dengan dialog. Gotong royong sebagai nilai lokal Indonesia adalah kekuatan yang bisa memperkuat kolaborasi ini, sehingga pendidikan kita tidak mulai dari nol, tetapi melanjutkan warisan budaya.

Komunikasi adalah kemampuan menyampaikan ide secara jelas, meyakinkan, dan efektif, baik lisan maupun tulisan, dalam bahasa lokal maupun global. Di era digital, komunikasi juga mencakup literasi media: bagaimana menggunakan platform digital untuk berbagi pengetahuan, memengaruhi opini, atau membangun jejaring. Murid yang cerdas tetapi tidak mampu berkomunikasi akan sulit memberi dampak. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi perlu ditanamkan sejak dini, tidak hanya melalui mata pelajaran bahasa, tetapi diintegrasikan ke semua bidang.

Empat keterampilan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan. Berpikir kritis memberi dasar logika bagi kreativitas, kreativitas melahirkan gagasan yang kemudian diuji dengan kolaborasi, dan semua proses itu hanya bisa berlangsung jika ada komunikasi yang efektif. Inilah mengapa 4C disebut sebagai kompetensi inti yang membentuk *learning ecosystem* abad 21. UNESCO menegaskan bahwa pendidikan yang gagal menanamkan 4C hanya akan menghasilkan lulusan yang cerdas secara teoritis, tetapi gagap menghadapi realitas.

Dalam konteks Indonesia, penguatan 4C sejalan dengan Profil Pelajar Pancasila. Kompetensi berpikir kritis dan kreatif terkait erat dengan dimensi bernalar kritis dan kreatif; kolaborasi identik dengan gotong royong; sedangkan komunikasi berkaitan dengan kemampuan berbahasa, toleransi, dan kebinekaan global. Dengan demikian, implementasi 4C dapat dipadukan dengan falsafah lokal seperti *Silih Asih, Asah, Asuh*. Misalnya, berpikir kritis tidak hanya soal logika, tetapi juga disertai empati (*asih*), kreativitas berkembang melalui proses saling mengasah (*asah*), dan kolaborasi serta komunikasi diperkuat dengan budaya pengasuhan moral (*asuh*).

Sekolah dan pesantren di Indonesia sebenarnya sudah memiliki praktik yang bisa menjadi wadah penguatan 4C. Tradisi musyawarah melatih keterampilan berpikir kritis dan komunikasi, gotong royong melatih kolaborasi, sementara seni dan budaya lokal membuka ruang kreativitas. Tantangannya

adalah bagaimana praktik-praktik ini tidak hilang di tengah tekanan ujian standar dan kurikulum yang terlalu padat.

Penelitian internasional mendukung pentingnya 4C. Studi OECD (2022) menunjukkan bahwa lulusan dengan keterampilan 4C memiliki peluang kerja lebih tinggi dan daya adaptasi lebih baik dalam menghadapi perubahan industri. Di Indonesia, riset Kemendikbud (2023) menemukan bahwa sekolah yang menerapkan *project-based learning* berbasis 4C mengalami peningkatan partisipasi murid dan kualitas hasil belajar yang lebih baik dibanding sekolah dengan metode konvensional.

Namun, implementasi 4C juga menghadapi kendala. Banyak guru yang belum mendapat pelatihan untuk mengintegrasikan keterampilan ini ke dalam pembelajaran sehari-hari. Infrastruktur sekolah di daerah terpencil juga membatasi ruang eksperimen kreatif. Oleh karena itu, perlu ada dukungan sistemik: pelatihan guru, kebijakan fleksibel, dan ekosistem sekolah yang memberi ruang inovasi.

Dengan segala tantangan dan peluangnya, 4C menjadi inti dari *Learning to Do* di abad 21. Pendidikan yang mampu menanamkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi akan menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga tangguh, inovatif, dan siap menghadapi kompleksitas global. Indonesia memiliki modal budaya melalui nilai gotong royong dan falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh* untuk memperkuat implementasi 4C, sehingga pendidikan kita tidak sekadar mengikuti tren global, tetapi memberi warna khas dalam diskursus pendidikan dunia.

## B. Keterampilan Kerja dan Life Skills

Jika *Learning to Know* menekankan penguasaan pengetahuan, maka *Learning to Do* menekankan bagaimana pengetahuan itu diimplementasikan dalam bentuk keterampilan nyata. Namun, keterampilan di abad ke-21 tidak lagi sebatas keahlian teknis untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Dunia yang berubah cepat menuntut integrasi antara keterampilan kerja (*work skills*) dengan keterampilan hidup (*life skills*). Pendidikan tidak boleh hanya melahirkan tenaga kerja, tetapi juga manusia yang resilien, adaptif, dan bermakna dalam kehidupan sosial. Subbab ini membahas mengapa

keterampilan kerja dan keterampilan hidup menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka pendidikan transformatif.

Keterampilan kerja di abad 21 mencakup penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan di dunia industri, jasa, maupun sektor publik. Misalnya, keterampilan digital seperti coding, analisis data, atau manajemen proyek kini menjadi prasyarat dasar dalam banyak bidang pekerjaan. Namun, keterampilan teknis ini tidak cukup tanpa soft skills yang mendukung efektivitas kerja, seperti kepemimpinan, komunikasi, kemampuan manajemen waktu, dan kecerdasan emosional. Dunia kerja modern lebih menghargai individu yang mampu bekerja dalam tim, mengelola konflik, dan berpikir adaptif, daripada sekadar penguasaan teknis sempit.

Di sisi lain, life skills adalah keterampilan dasar yang memungkinkan individu bertahan, berkembang, dan berkontribusi dalam kehidupan sosial. WHO mendefinisikan life skills sebagai keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, termasuk problem solving, pengambilan keputusan, berpikir kritis, keterampilan interpersonal, dan manajemen stres. Di Indonesia, life skills mendapat perhatian khusus melalui program pendidikan berbasis kompetensi yang menekankan keseimbangan antara kognitif, afektif, dan psikomotor.

Pendidikan vokasi di Indonesia telah menjadi laboratorium integrasi keterampilan kerja dan life skills. Misalnya, SMK berbasis *link and match* tidak hanya melatih siswa dengan keterampilan teknis otomotif, akuntansi, atau teknologi informasi, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan menghadapi wawancara kerja, mengelola keuangan pribadi, dan beradaptasi dengan dinamika dunia industri. Dengan pendekatan ini, lulusan tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap hidup.

Life skills juga berkaitan erat dengan pendidikan karakter. Murid yang cerdas secara akademik tetapi tidak mampu mengelola emosi, menjaga etika, atau beradaptasi dengan perubahan akan kesulitan dalam hidup nyata. Falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh* memberi kerangka etis bagi pengembangan life skills ini: *asih* menumbuhkan empati dan kepedulian sosial, *asah* mengajarkan pentingnya keterampilan intelektual dan teknis, sedangkan *asuh* menekankan bimbingan moral agar keterampilan digunakan untuk tujuan yang benar.

Studi internasional menunjukkan bahwa keterampilan hidup sama pentingnya dengan keterampilan kerja. Penelitian UNESCO (2020) menegaskan bahwa pendidikan yang menekankan life skills melahirkan generasi yang lebih resilien, sehat secara mental, dan lebih siap menghadapi perubahan. Misalnya, siswa yang dilatih keterampilan mengelola stres lebih mampu bertahan dalam kondisi darurat seperti pandemi COVID-19. Dalam konteks ini, life skills terbukti sebagai benteng psikologis dan sosial.

Di Jepang, integrasi life skills dalam pendidikan tampak pada praktik *kokoro no kyoiku* (pendidikan hati), yang menekankan pengembangan moral, disiplin, dan empati sejak usia dini. Murid tidak hanya belajar akademik, tetapi juga diajarkan cara membersihkan kelas, melayani teman, dan menghargai waktu. Praktik sederhana ini membangun keterampilan hidup yang fundamental: kemandirian, tanggung jawab, dan kerja sama.

Indonesia memiliki praktik serupa melalui budaya gotong royong. Di banyak sekolah pedesaan, murid dilibatkan dalam kegiatan kebersihan lingkungan, kerja bakti, atau membantu masyarakat sekitar. Kegiatan ini menanamkan keterampilan hidup yang penting, seperti solidaritas, kepedulian, dan kemampuan bekerja kolektif. Tantangannya adalah bagaimana menjaga agar nilai ini tetap hidup di tengah arus individualisme modern.

Penting pula dicatat bahwa keterampilan kerja dan life skills semakin tidak bisa dipisahkan di era VUCA. Dunia kerja tidak hanya menuntut tenaga kerja yang kompeten, tetapi juga pekerja yang resilien menghadapi ketidakpastian. Seorang teknisi dengan keterampilan digital tinggi sekalipun bisa gagal jika tidak mampu beradaptasi dengan perubahan sistem atau bekerja sama dalam tim multikultural. Oleh karena itu, pendidikan harus menanamkan mindset fleksibel dan kemampuan regulasi diri sebagai bagian dari keterampilan hidup.

Keterampilan kewirausahaan juga menjadi bagian penting dari *Learning to Do*. Murid harus dibekali kemampuan menciptakan peluang, bukan hanya mencari pekerjaan. Kewirausahaan melatih keberanian mengambil risiko, kreativitas dalam menemukan solusi, dan ketekunan menghadapi kegagalan. Dalam konteks ini, keterampilan hidup seperti manajemen emosi dan ketahanan mental menjadi modal utama untuk bertahan sebagai wirausaha.

Pengembangan keterampilan kerja dan life skills juga harus memperhatikan kesetaraan akses. Banyak anak di daerah terpencil yang memiliki keterampilan hidup kuat karena terbiasa mandiri, namun minim akses terhadap keterampilan teknis modern. Sebaliknya, anak di perkotaan mungkin mahir teknologi tetapi kurang keterampilan hidup karena hidup serba instan. Pendidikan harus mampu menjembatani kesenjangan ini dengan pendekatan kontekstual.

Dalam kerangka SDGs, keterampilan kerja berhubungan dengan SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, sementara life skills mendukung SDG 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan, serta SDG 16 tentang perdamaian dan keadilan. Dengan demikian, integrasi keduanya menjadi kontribusi nyata pendidikan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Dengan memadukan keterampilan kerja dan life skills, pendidikan Indonesia dapat melahirkan generasi yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap hidup dalam arti yang lebih luas: mampu menghadapi tantangan, menjaga integritas, membangun hubungan sehat, dan berkontribusi bagi masyarakat. Inilah makna mendalam dari *Learning to Do* dalam kerangka UNESCO, yang diperkaya dengan kearifan lokal Nusantara.

### C. Pendidikan Vokasi dan Link & Match

Pendidikan vokasi menempati posisi strategis dalam mewujudkan pilar *Learning to Do*. Tujuannya bukan hanya menghasilkan tenaga kerja siap pakai, tetapi juga membangun generasi yang memiliki keterampilan adaptif, daya saing, serta nilai kemanusiaan yang berakar pada budaya. Dalam konteks Indonesia, pendidikan vokasi telah lama diposisikan sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi, khususnya melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), politeknik, dan program keterampilan kerja masyarakat. Namun, permasalahan klasik seperti kesenjangan kompetensi, rendahnya kualitas lulusan, dan kurangnya relevansi dengan kebutuhan industri masih membayangi. Oleh karena itu, konsep *link and match*—penyelarasan antara pendidikan dan dunia kerja—menjadi strategi utama untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan pendidikan vokasi.

Pendidikan vokasi sejatinya dirancang untuk mendekatkan dunia sekolah dengan dunia kerja. SMK dan perguruan tinggi vokasi memberikan pembelajaran berbasis praktik, magang industri, serta penguasaan kompetensi spesifik sesuai kebutuhan lapangan. Namun, tanpa hubungan yang kuat dengan industri, pendidikan vokasi cenderung melahirkan lulusan yang kaku dan tertinggal dari perkembangan pasar tenaga kerja. Konsep *link and match* hadir sebagai jawaban: memastikan kurikulum, metode, dan evaluasi benar-benar terhubung dengan realitas industri.

Di era VUCA, pendidikan vokasi tidak bisa hanya fokus pada keterampilan teknis sempit. Keterampilan adaptif, literasi digital, dan soft skills menjadi bagian tak terpisahkan. Lulusan SMK otomotif, misalnya, tidak cukup hanya menguasai mesin konvensional, tetapi juga harus memahami kendaraan listrik, manajemen servis berbasis aplikasi, serta komunikasi dengan pelanggan. Tanpa kemampuan ini, lulusan akan kesulitan beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Program pemerintah Indonesia, seperti *SMK Pusat Keunggulan* dan *Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*, merupakan bentuk konkret upaya memperkuat *link and match*. Program ini mendorong kolaborasi erat antara sekolah, perguruan tinggi, dan dunia industri. Siswa didorong untuk magang lebih lama, proyek pembelajaran diarahkan pada pemecahan masalah nyata di lapangan, dan kurikulum disusun bersama mitra industri. Dengan pendekatan ini, lulusan diharapkan tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap berwirausaha.

Namun, *link and match* bukan berarti menyerahkan pendidikan sepenuhnya pada industri. Di sinilah falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh* memberikan dimensi tambahan. *Silih Asah* menekankan pentingnya keterampilan sebagai hasil proses saling belajar antara sekolah, guru, murid, dan industri. *Silih Asih* memastikan agar keterampilan vokasi digunakan untuk kebaikan bersama, bukan hanya kepentingan pasar. Sementara *Silih Asuh* menegaskan tanggung jawab moral pendidikan vokasi untuk membimbing murid agar tetap berkarakter, jujur, dan berintegritas dalam dunia kerja.

Studi internasional menunjukkan pentingnya integrasi ini. Jerman dengan sistem *dual system vocational training* berhasil melahirkan tenaga kerja yang kompeten karena siswa belajar di sekolah sekaligus bekerja di perusahaan. Jepang mengintegrasikan pendidikan vokasi dengan budaya

kerja yang disiplin dan kolektif, sehingga lulusan tidak hanya mahir teknis, tetapi juga kuat dalam etos kerja. Singapura menjadikan *Institute of Technical Education (ITE)* sebagai pusat inovasi, di mana siswa dilatih keterampilan sekaligus entrepreneurship. Indonesia dapat belajar dari praktik ini, dengan tetap mempertahankan nilai lokal seperti gotong royong dan kemandirian.

Di tingkat lokal, praktik *link and match* juga bisa diwujudkan melalui kerja sama sekolah dengan komunitas. SMK di pedesaan, misalnya, bisa mengembangkan kurikulum berbasis potensi lokal seperti pertanian organik, ekowisata, atau kerajinan tradisional. Dengan begitu, pendidikan vokasi tidak hanya melahirkan tenaga kerja, tetapi juga penggerak pembangunan lokal. Konsep ini sejalan dengan gagasan *community-based education* yang menempatkan sekolah sebagai pusat pengembangan masyarakat.

Pendidikan vokasi juga harus diarahkan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Dunia kerja formal tidak selalu mampu menampung semua lulusan, apalagi di tengah perubahan pasar global. Dengan keterampilan wirausaha, lulusan dapat menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Program kewirausahaan berbasis sekolah yang melibatkan murid dalam produksi barang atau jasa nyata adalah salah satu cara menanamkan keterampilan ini sejak dini.

Masalah lain yang sering muncul dalam pendidikan vokasi adalah kesenjangan gender. Banyak jurusan di SMK yang masih didominasi satu jenis kelamin tertentu, misalnya teknik oleh laki-laki dan tata boga oleh perempuan. Padahal, keterampilan abad 21 menuntut inklusivitas. Pendidikan vokasi harus membuka peluang yang sama bagi semua, dengan prinsip *Silih Asih* yang menekankan kasih sayang dan penghargaan terhadap keberagaman.

Dalam kerangka SDGs, pendidikan vokasi berkontribusi langsung pada SDG 4 (pendidikan bermutu), SDG 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), dan SDG 9 (inovasi dan infrastruktur). Dengan *link and match*, pendidikan vokasi Indonesia dapat menjadi motor pembangunan berkelanjutan. Namun, kontribusi ini hanya dapat terwujud bila kurikulum, guru, industri, dan masyarakat benar-benar terintegrasi.

Dengan demikian, pendidikan vokasi dan *link and match* adalah manifestasi konkret dari *Learning to Do*. Ia memastikan bahwa pengetahuan

menjadi keterampilan, keterampilan menjadi kompetensi, dan kompetensi digunakan untuk tujuan kemanusiaan dan pembangunan. Dengan memadukan nilai global, kebutuhan industri, dan falsafah lokal *Silih Asih, Asah, Asuh*, Indonesia dapat melahirkan model pendidikan vokasi yang tidak hanya relevan, tetapi juga khas Nusantara: produktif, humanis, dan berdaya saing global.

#### **D. Project-Based Learning dan Entrepreneurship**

*Learning to Do* akan kehilangan ruhnya bila pembelajaran hanya bersifat teoritis tanpa memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengalami, mencoba, dan mencipta. Di sinilah *Project-Based Learning (PjBL)* hadir sebagai strategi pedagogi yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung, penyelidikan, dan pemecahan masalah nyata. Lebih jauh, pendekatan ini dapat menjadi pintu masuk menuju kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang tidak sekadar menghasilkan keterampilan teknis, tetapi juga menumbuhkan keberanian mengambil risiko, kreativitas, dan tanggung jawab sosial.

Project-Based Learning berangkat dari premis bahwa murid belajar lebih bermakna ketika mereka dihadapkan pada permasalahan riil yang relevan dengan kehidupan. Alih-alih hanya menerima informasi dari guru, murid diberi kesempatan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah proyek. Proses ini mendorong keterlibatan aktif, menumbuhkan rasa kepemilikan, dan memperkuat keterampilan kolaboratif. Dalam konteks *Learning to Do*, PjBL merupakan wahana utama bagi murid untuk menerapkan pengetahuan menjadi aksi.

Entrepreneurship adalah bentuk konkret dari PjBL. Ketika murid dilatih mengembangkan ide bisnis, membuat prototipe produk, atau merancang kegiatan sosial-ekonomi, mereka sedang mempraktikkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi (4C). Lebih dari itu, kewirausahaan juga melatih murid menghadapi ketidakpastian, mengelola kegagalan, dan berorientasi pada solusi—keterampilan yang sangat relevan di era VUCA.

Dalam praktiknya, PjBL dapat diintegrasikan ke berbagai mata pelajaran. Misalnya, siswa SMA dapat membuat proyek penelitian tentang

energi terbarukan yang menggabungkan ilmu fisika, matematika, teknologi digital, serta kesadaran ekologi. Di SMK, siswa bisa membuat proyek bisnis sederhana, seperti produksi makanan sehat atau aplikasi berbasis komunitas. Proyek-proyek ini tidak hanya memperkuat keterampilan teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kewirausahaan sejak dini.

Entrepreneurship dalam pendidikan bukan sekadar mempersiapkan murid menjadi pengusaha, tetapi membekali mereka dengan *entrepreneurial mindset*: sikap inovatif, proaktif, dan resilien. UNESCO (2021) menekankan bahwa mindset kewirausahaan penting bukan hanya di dunia bisnis, tetapi juga di sektor publik, komunitas, bahkan kehidupan pribadi. Murid yang memiliki pola pikir ini lebih siap menghadapi tantangan, lebih berani mencoba hal baru, dan lebih adaptif terhadap perubahan.

Di Indonesia, program *Sekolah Pencetak Wirausaha* merupakan contoh bagaimana PjBL dan entrepreneurship diintegrasikan ke dalam pendidikan vokasi. Murid tidak hanya belajar teori bisnis, tetapi juga menjalankan usaha nyata, mulai dari perencanaan, produksi, hingga pemasaran. Dari sini, mereka belajar manajemen keuangan, strategi pemasaran, serta etika bisnis. Nilai *Silih Asah* tampak jelas, karena proses ini menekankan pembelajaran kolektif dan praktik langsung.

Pesantren juga memiliki potensi besar dalam pengembangan entrepreneurship berbasis komunitas. Banyak pesantren yang menjalankan usaha mandiri, seperti pertanian, percetakan, atau koperasi santri. Usaha ini bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga sarana pendidikan kewirausahaan berbasis nilai spiritual. *Silih Asih* menjadi landasan agar usaha dijalankan dengan kasih sayang, kepedulian sosial, dan orientasi kebermanfaatn, bukan sekadar profit.

PjBL dan entrepreneurship juga mendukung integrasi SDGs ke dalam pendidikan. Misalnya, proyek pengolahan sampah plastik dapat berkontribusi pada SDG 12 (*responsible consumption and production*) dan SDG 13 (*climate action*). Siswa tidak hanya belajar teori lingkungan, tetapi juga menciptakan solusi nyata yang memberi dampak sosial. Dengan demikian, pendidikan menjadi arena perubahan sosial, bukan sekadar ruang transfer pengetahuan.

Tantangan penerapan PjBL adalah kesiapan guru. Banyak guru masih terbiasa dengan metode ceramah dan ujian standar. Padahal, peran guru dalam PjBL adalah fasilitator, mentor, dan pendamping. Guru harus mampu membimbing murid merancang proyek, memberi umpan balik, dan mendorong refleksi. Oleh karena itu, pelatihan guru sangat penting untuk memastikan PjBL berjalan efektif.

Selain itu, PjBL membutuhkan dukungan ekosistem sekolah. Kegiatan proyek sering kali memerlukan waktu lebih panjang, sumber daya tambahan, dan fleksibilitas kurikulum. Jika sekolah terlalu kaku dengan target akademik, PjBL akan sulit berkembang. Dukungan kebijakan seperti Kurikulum Merdeka memberi peluang lebih besar bagi integrasi PjBL dan entrepreneurship.

Di tingkat global, banyak contoh keberhasilan penerapan PjBL. Di Amerika Serikat, sekolah berbasis *High Tech High* menggunakan proyek sebagai inti kurikulum, dengan hasil siswa lebih kreatif, kritis, dan memiliki keterampilan kerja lebih relevan. Di Singapura, PjBL dikombinasikan dengan pendidikan STEM untuk mendorong inovasi berbasis teknologi. Indonesia dapat mengadaptasi praktik ini dengan sentuhan kearifan lokal.

Falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh* memperkaya implementasi PjBL. *Asih* memastikan proyek dilakukan dengan kepedulian sosial, *Asah* menekankan proses pembelajaran kolektif, dan *Asuh* menegaskan pentingnya bimbingan moral. Dengan demikian, entrepreneurship tidak menjadi semata ajang kompetisi kapitalistik, tetapi sarana untuk membangun solidaritas, keberlanjutan, dan kesejahteraan bersama.

Pada akhirnya, *Project-Based Learning* dan *Entrepreneurship* adalah wujud nyata dari *Learning to Do*. Murid tidak hanya belajar tentang dunia, tetapi ikut serta mengubahnya. Mereka tidak hanya berorientasi pada pekerjaan, tetapi juga penciptaan nilai. Dengan mengintegrasikan teori global, kebijakan nasional, dan falsafah lokal, pendidikan Indonesia dapat membangun generasi yang inovatif, tangguh, dan berkarakter humanis dalam menghadapi tantangan abad 21.

## E. Integrasi dengan Pendidikan Berkelanjutan

Pilar *Learning to Do* bukan hanya soal menyiapkan keterampilan kerja atau kewirausahaan, tetapi juga membentuk orientasi jangka panjang yang selaras dengan keberlanjutan hidup manusia dan planet. Dalam konteks global, UNESCO dan PBB mendorong paradigma *Education for Sustainable Development (ESD)* sebagai fondasi utama sistem pendidikan abad ke-21. Integrasi *Learning to Do* dengan pendidikan berkelanjutan berarti setiap keterampilan yang diajarkan kepada peserta didik diarahkan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk menjaga ekologi, memperkuat keadilan sosial, dan membangun masa depan yang lebih baik.

Pendidikan berkelanjutan menekankan keseimbangan antara tiga pilar: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam ranah ekonomi, keterampilan yang diajarkan harus relevan dengan kebutuhan pasar kerja sekaligus mendorong inovasi yang ramah lingkungan. Dalam ranah sosial, pendidikan menanamkan nilai solidaritas, kesetaraan, dan tanggung jawab kolektif. Dalam ranah lingkungan, murid dilatih untuk menyadari keterkaitan antara tindakan manusia dengan keberlangsungan ekosistem bumi. Integrasi *Learning to Do* dengan ESD memastikan bahwa keterampilan praktis tidak pernah lepas dari dimensi moral dan ekologis.

Di era krisis iklim, misalnya, keterampilan teknis dalam bidang energi harus diarahkan pada pengembangan energi terbarukan, bukan sekadar eksploitasi fosil. Murid teknik elektro di SMK atau politeknik perlu dilatih bukan hanya memasang jaringan listrik, tetapi juga merancang sistem panel surya atau teknologi hemat energi. Dengan demikian, keterampilan kerja mendukung transisi hijau (*green transition*), yang menjadi agenda penting dunia.

Dalam konteks sosial, *Learning to Do* yang berkelanjutan berarti membekali murid dengan keterampilan hidup yang menumbuhkan toleransi, perdamaian, dan keadilan sosial. Misalnya, proyek berbasis komunitas di sekolah bisa diarahkan pada pengelolaan sampah bersama, pemberdayaan perempuan, atau program literasi di daerah terpencil. Murid tidak hanya belajar bekerja sama, tetapi juga memahami bahwa keterampilan mereka memiliki dampak sosial nyata.

Falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh* memberi kekuatan tambahan pada integrasi ini. *Silih Asih* memastikan bahwa keterampilan digunakan dengan kasih sayang terhadap sesama dan alam. *Silih Asah* menegaskan pentingnya keterampilan sebagai hasil pembelajaran kolektif, bukan hanya demi keuntungan pribadi. *Silih Asuh* menekankan tanggung jawab moral agar keterampilan tidak digunakan untuk merusak, melainkan untuk melindungi dan memperbaiki. Dengan kerangka ini, *Learning to Do* bertransformasi menjadi *Learning to Sustain*.

Indonesia memiliki potensi besar dalam mengintegrasikan pendidikan berkelanjutan. Kurikulum Merdeka dengan *Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila* sudah membuka ruang untuk tema-tema berkelanjutan seperti perubahan iklim, energi hijau, dan kearifan lokal. Murid diajak mengembangkan proyek nyata yang relevan dengan konteks mereka, misalnya konservasi mangrove di pesisir, pertanian organik di pedesaan, atau urban farming di perkotaan. Proyek-proyek ini bukan hanya latihan keterampilan, tetapi juga kontribusi nyata pada pembangunan berkelanjutan.

Secara global, banyak negara telah mengintegrasikan *Learning to Do* dengan ESD. Di Jerman, sistem *dual system vocational education* menyertakan kurikulum hijau, sehingga siswa industri memahami standar keberlanjutan. Di Jepang, konsep *Society 5.0* menekankan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kesejahteraan manusia, yang diwujudkan melalui pendidikan berbasis inovasi sosial. Finlandia memasukkan keberlanjutan sebagai tema lintas kurikulum, sehingga setiap mata pelajaran memuat perspektif ekologis dan sosial.

Di Indonesia, praktik pendidikan berkelanjutan juga hidup di masyarakat adat. Sekolah adat di Kalimantan atau Papua mengajarkan murid tentang kearifan menjaga hutan, siklus pertanian berkelanjutan, dan etika hidup harmonis dengan alam. Nilai ini jika dipadukan dengan literasi teknologi modern dapat menjadi model pendidikan khas Nusantara yang tidak hanya relevan lokal, tetapi juga inspiratif bagi dunia.

Tantangan integrasi *Learning to Do* dengan ESD adalah bagaimana menghindari dikotomi antara keterampilan kerja dan keberlanjutan. Sering kali dunia industri menekankan efisiensi dan profit, sementara pendidikan berkelanjutan menekankan etika dan ekologi. Di sinilah peran kepemimpinan pendidikan untuk menjembatani keduanya. Sekolah dan perguruan

tinggi perlu membangun kemitraan dengan industri yang berkomitmen pada keberlanjutan, bukan sekadar mencari mitra kerja sama yang profit-oriented.

Integrasi ini juga menuntut perubahan paradigma evaluasi. Keberhasilan murid tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari kontribusi mereka terhadap keberlanjutan. Misalnya, proyek murid dalam bidang pertanian tidak hanya dinilai dari hasil panen, tetapi juga dari sejauh mana mereka mengurangi penggunaan pestisida kimia dan menjaga kesuburan tanah. Dengan cara ini, asesmen menjadi instrumen pendidikan berkelanjutan.

Pada akhirnya, *Learning to Do* yang terintegrasi dengan pendidikan berkelanjutan akan melahirkan generasi yang tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga berkomitmen pada masa depan bumi dan umat manusia. Mereka adalah generasi yang mampu bekerja, mencipta, dan berwirausaha, sekaligus menjaga harmoni sosial dan ekologis. Dengan memadukan kerangka UNESCO, kebijakan nasional, serta falsafah lokal *Silih Asih, Asah, Asuh*, Indonesia dapat melahirkan model pendidikan berkelanjutan yang khas: produktif, humanis, dan berakar budaya.



## BAB 9

### LEARNING TO BE

Jika *Learning to Know* berfokus pada kemampuan intelektual dan penguasaan pengetahuan, serta *Learning to Do* menekankan keterampilan praktis dan aplikasi nyata, maka pilar ketiga UNESCO, *Learning to Be*, mengangkat dimensi terdalam dari tujuan pendidikan: menjadikan manusia sebagai dirinya yang utuh. Pilar ini pertama kali ditegaskan secara eksplisit dalam *Faure Report* (1972) dan dikuatkan kembali dalam *Delors Report* (1996), dengan pesan fundamental bahwa pendidikan harus lebih dari sekadar alat ekonomi; ia harus menjadi jalan menuju pengembangan penuh potensi manusia, baik secara intelektual, emosional, sosial, spiritual, maupun moral.

Dalam konteks abad ke-21 yang ditandai oleh tekanan kompetisi global, disrupsi teknologi, dan fragmentasi sosial, *Learning to Be* menjadi semakin relevan. Pendidikan sering kali terlalu fokus pada hasil akademik, keterampilan kerja, dan penguasaan teknologi, sehingga melupakan dimensi humanistik: siapa sebenarnya manusia itu, untuk apa ia hidup, dan bagaimana ia bisa menemukan makna di tengah arus modernitas. Pendidikan yang melupakan dimensi keberadaan akan melahirkan individu yang mungkin

cerdas dan terampil, tetapi rapuh, kehilangan arah, dan mudah terjebak dalam krisis identitas.

*Learning to Be* mengingatkan bahwa pendidikan harus memfasilitasi pencarian jati diri, pembentukan karakter, serta penumbuhan kapasitas untuk menjadi manusia seutuhnya. Ini mencakup pengembangan kreativitas, imajinasi, empati, kemampuan reflektif, hingga spiritualitas. Dengan kata lain, pendidikan bukan hanya tentang *learning for earning* (belajar untuk mencari nafkah), tetapi juga *learning for being* (belajar untuk menjadi).

Falsafah Nusantara memberi resonansi kuat terhadap pilar ini. Konsep Sunda *Silih Asih, Asah, Asuh* menegaskan bahwa manusia tidak dapat menjadi dirinya yang utuh tanpa kasih sayang (*asih*), pembelajaran kolektif (*asah*), dan pengasuhan moral (*asuh*). Dengan kerangka ini, *Learning to Be* bukan proses individualistik semata, melainkan perjalanan kolektif dalam komunitas. Manusia menemukan dirinya dengan cara memberi dan menerima dalam jaringan sosial yang lebih luas.

Konteks Indonesia memberikan contoh nyata urgensi pilar ini. Fenomena meningkatnya kasus kesehatan mental di kalangan pelajar, krisis moral di masyarakat, hingga lunturnya identitas budaya di tengah globalisasi, menandakan perlunya pendidikan yang kembali menekankan pengembangan jati diri dan keseimbangan hidup. *Learning to Be* tidak hanya menjadi ideal filosofis, tetapi kebutuhan mendesak bagi ketahanan bangsa.

UNESCO menekankan bahwa pilar ini harus diwujudkan melalui pendekatan pendidikan yang menyeluruh. Artinya, kurikulum tidak boleh hanya fokus pada kognitif, tetapi harus memberi ruang bagi seni, olahraga, spiritualitas, refleksi, dan kegiatan yang membentuk keutuhan pribadi. Di sinilah letak transformasi: sekolah bukan hanya ruang transfer ilmu, tetapi juga ruang pembentukan manusia.

Dalam era Society 5.0, di mana manusia hidup berdampingan dengan teknologi cerdas, *Learning to Be* berperan sebagai jangkar moral dan eksistensial. Teknologi bisa memberi efisiensi, tetapi tidak bisa memberi makna. Hanya pendidikan yang humanis yang mampu menuntun manusia untuk tidak menjadi “budak algoritma”, melainkan tetap sebagai subjek yang merdeka, kreatif, dan bermoral.

Bab 9 ini akan mengurai bagaimana *Learning to Be* menjadi jantung pendidikan humanistik. Subbab 9.1 akan membahas pendidikan humanistik dan pembentukan identitas diri, Subbab 9.2 mengulas dimensi kesejahteraan mental, kesehatan, dan spiritualitas, Subbab 9.3 membahas etika global dan pendidikan karakter, Subbab 9.4 menekankan peran pendidikan berbasis emosi dan empati, sementara Subbab 9.5 menyajikan studi kasus tentang model pendidikan humanistik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan begitu, Bab 9 bukan hanya lanjutan dari Bab 8, tetapi juga titik balik menuju esensi pendidikan: menghidupkan manusia sebagai manusia. Pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang membuat setiap individu menemukan dirinya, menghargai orang lain, serta mampu memberi kontribusi bermakna bagi dunia.

## A. Pendidikan Humanistik dan Self-Identity

Pilar *Learning to Be* menemukan bentuk konkret pertamanya dalam gagasan pendidikan humanistik. Pendidikan humanistik memandang manusia bukan sebagai objek sistem, melainkan subjek yang memiliki potensi unik, kebebasan memilih, serta kebutuhan untuk tumbuh secara utuh—kognitif, emosional, sosial, moral, dan spiritual. Dari perspektif ini, pendidikan tidak hanya bertujuan mencetak tenaga kerja terampil atau warga negara yang patuh, tetapi juga individu yang sadar akan dirinya, mampu mengelola kehidupannya, dan berkontribusi bagi dunia dengan integritas.

Pendidikan humanistik berakar pada filsafat eksistensial dan pemikiran tokoh-tokoh seperti Jean-Paul Sartre, Carl Rogers, Abraham Maslow, dan Paulo Freire. Rogers menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan diri. Maslow menempatkan aktualisasi diri sebagai puncak hierarki kebutuhan manusia. Freire menekankan pendidikan sebagai proses pembebasan, di mana manusia menemukan dirinya sebagai subjek yang mampu berpikir kritis dan melawan dehumanisasi. Semua gagasan ini berpusat pada satu hal: pendidikan harus membebaskan manusia untuk “menjadi dirinya sendiri.”

Self-identity atau identitas diri merupakan aspek krusial dari pendidikan humanistik. Identitas bukan sekadar nama atau label sosial, melainkan

kesadaran mendalam tentang siapa kita, apa tujuan hidup kita, dan nilai-nilai apa yang kita pegang. Pendidikan yang mengabaikan dimensi identitas sering kali melahirkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi mengalami krisis eksistensial. Fenomena meningkatnya masalah kesehatan mental di kalangan pelajar global adalah tanda bahwa pendidikan modern perlu kembali menekankan dimensi “being” dalam arti yang paling humanistik.

Dalam konteks Indonesia, krisis identitas juga muncul akibat derasnya arus globalisasi. Generasi muda sering kali terjebak dalam dilema antara mengikuti budaya global yang instan dan mempertahankan akar budaya lokal. Pendidikan humanistik dapat menjadi jalan tengah: memberi ruang bagi murid untuk mengeksplorasi dunia global sekaligus menemukan kekuatan identitasnya sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang berakar pada Pancasila dan kearifan lokal.

Falsafah Sunda *Silih Asih, Asah, Asuh* sangat relevan dalam pembentukan identitas diri. *Asih* membentuk kesadaran bahwa identitas manusia selalu terkait dengan kasih sayang dan hubungan sosial; *Asah* membentuk kesadaran bahwa identitas berkembang melalui proses belajar dan refleksi; *Asuh* menekankan bahwa identitas membutuhkan bimbingan moral agar tidak tercerabut dari nilai-nilai luhur. Dengan integrasi ini, pendidikan humanistik di Indonesia tidak hanya berlandaskan teori Barat, tetapi juga diperkaya dengan nilai lokal yang berakar pada budaya komunal.

Pendidikan humanistik dan pembentukan identitas diri dapat diwujudkan dalam kurikulum yang memberi ruang bagi seni, budaya, refleksi, dan spiritualitas. Murid tidak hanya diajak menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga diajak menulis jurnal reflektif, berdiskusi tentang nilai kehidupan, atau mengekspresikan diri melalui seni dan budaya. Aktivitas ini membantu murid mengenali dirinya, memahami emosinya, dan menemukan makna dalam kehidupannya.

Selain itu, pendidikan humanistik menekankan pentingnya relasi guru-murid yang setara. Guru tidak lagi menjadi figur otoriter, melainkan mitra yang mendampingi murid dalam perjalanan menemukan identitasnya. Relasi ini selaras dengan gagasan Freire tentang dialogis: guru belajar dari murid, murid belajar dari guru, keduanya belajar dari realitas. Dari relasi inilah terbentuk identitas yang otentik, bukan identitas yang dipaksakan oleh sistem.

Studi empiris mendukung pendekatan ini. Penelitian UNESCO (2021) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan pendekatan humanistik, dengan menekankan refleksi, seni, dan keterlibatan emosional, memiliki tingkat kebahagiaan murid lebih tinggi serta menghasilkan individu yang lebih percaya diri dan resilien. Di Indonesia, beberapa pesantren modern berhasil mengintegrasikan nilai spiritual dengan pembelajaran humanistik, sehingga santri tidak hanya terampil dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki identitas kuat dalam kehidupan sosial dan global.

Dalam kerangka SDGs, pendidikan humanistik mendukung SDG 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan, SDG 4 tentang pendidikan berkualitas, serta SDG 16 tentang perdamaian dan keadilan. Identitas diri yang sehat menjadi fondasi bagi masyarakat yang damai, toleran, dan adil. Dengan demikian, pendidikan humanistik bukan hanya soal individu, tetapi juga pembangunan sosial berkelanjutan.

Tantangan terbesar dalam implementasi pendidikan humanistik adalah tekanan sistemik yang terlalu menekankan ujian standar dan hasil kuantitatif. Murid sering kali dipandang sebagai angka dalam rapor atau peringkat, bukan manusia dengan potensi unik. Untuk mengatasi hal ini, evaluasi pendidikan harus bergeser dari sekadar mengukur hafalan menuju penilaian proses reflektif, ekspresi diri, dan perkembangan personal.

Pada akhirnya, pendidikan humanistik dan pembentukan self-identity menegaskan kembali bahwa pendidikan adalah perjalanan menjadi manusia. Murid yang mampu mengenal dirinya akan lebih mampu menghadapi dunia dengan percaya diri, lebih siap mengambil keputusan etis, dan lebih tangguh menghadapi krisis. Dengan memadukan teori global, kebijakan nasional, dan falsafah lokal, Indonesia dapat membangun model pendidikan humanistik yang khas: pendidikan yang menumbuhkan manusia merdeka, berkarakter, dan berdaya dalam arti yang paling sejati.

## **B. Well-being, Kesehatan Mental, dan Spiritualitas**

Pendidikan tidak hanya berurusan dengan capaian kognitif dan keterampilan praktis, tetapi juga dengan kesejahteraan holistik manusia. Konsep *well-being* dalam pendidikan mencakup kesehatan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual yang saling berhubungan. Tanpa kesejahteraan,

pengetahuan dan keterampilan tidak dapat berfungsi optimal; sebaliknya, individu yang sejahtera memiliki energi, motivasi, dan makna untuk belajar serta berkontribusi. Subbab ini membahas bagaimana pilar *Learning to Be* menuntut perhatian serius terhadap dimensi kesehatan mental dan spiritualitas, yang kerap terabaikan dalam sistem pendidikan modern.

Well-being dalam pendidikan dipahami sebagai kondisi di mana peserta didik merasa sehat, aman, bahagia, dan bermakna dalam kehidupannya. Ini bukan sekadar ketiadaan penyakit atau masalah, tetapi keadaan positif yang mendukung pertumbuhan optimal. OECD dalam *Framework for Measuring Student Well-being* menegaskan bahwa sekolah yang peduli pada kesejahteraan siswanya akan menghasilkan murid yang lebih berprestasi, lebih resilien, dan lebih siap menghadapi tantangan global.

Kesehatan mental merupakan pilar utama dari well-being. Sayangnya, fenomena global menunjukkan meningkatnya masalah kesehatan mental di kalangan pelajar. Laporan UNICEF (2021) mengungkapkan bahwa 1 dari 7 remaja di dunia mengalami gangguan mental, dengan depresi dan kecemasan sebagai kasus paling umum. Di Indonesia, riset Kementerian Kesehatan menemukan bahwa sekitar 6,2% remaja mengalami gangguan emosional. Angka ini menandakan urgensi pendidikan yang memberi perhatian serius pada kesehatan mental, bukan sekadar akademik.

Pendidikan yang terlalu berorientasi pada ujian dan persaingan sering kali memperparah masalah mental. Tekanan untuk meraih nilai tinggi membuat murid rentan stres, kehilangan motivasi intrinsik, bahkan mengalami burnout. Padahal, pendidikan sejati seharusnya membangun manusia yang tangguh, percaya diri, dan mampu mengelola emosi. Oleh karena itu, program pendidikan perlu memberi ruang untuk konseling, bimbingan psikologis, dan aktivitas yang menumbuhkan keseimbangan hidup.

Kesehatan mental tidak bisa dipisahkan dari spiritualitas. Spiritualitas di sini bukan hanya praktik keagamaan formal, tetapi juga dimensi terdalem manusia yang memberi makna hidup, tujuan, dan rasa keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. UNESCO (2019) menegaskan bahwa spiritualitas adalah salah satu dimensi penting dari *Learning to Be*, karena tanpa makna hidup, pengetahuan dan keterampilan akan kehilangan arah.

Dalam konteks Nusantara, spiritualitas selalu hadir dalam pendidikan tradisional. Pesantren, misalnya, menempatkan spiritualitas sebagai inti pembelajaran, dengan zikir, doa, dan etika hidup sebagai bagian integral dari proses pendidikan. Falsafah Sunda *Silih Asih, Asah, Asuh* juga menyiratkan spiritualitas: kasih sayang, pengasahan diri, dan pengasuhan moral selalu terkait dengan kesadaran transendental tentang keberadaan Tuhan dan keterhubungan manusia dengan alam.

Well-being, kesehatan mental, dan spiritualitas membentuk tiga dimensi yang saling mendukung. Murid yang sehat secara mental lebih mampu menemukan makna hidup; spiritualitas yang kuat memberi ketenangan jiwa; dan kondisi sejahtera memungkinkan mereka tumbuh secara optimal. Integrasi ketiganya menciptakan pendidikan yang tidak hanya melahirkan manusia produktif, tetapi juga manusia yang bahagia dan bermakna.

Contoh implementasi dapat ditemukan pada program *Social Emotional Learning (SEL)* yang diterapkan di banyak sekolah dunia. Program ini mengajarkan keterampilan mengenali emosi, mengelola stres, membangun empati, dan menyelesaikan konflik secara damai. Di Indonesia, program serupa mulai masuk melalui Kurikulum Merdeka dengan proyek *Profil Pelajar Pancasila* yang mengusung tema kesehatan mental dan kesejahteraan diri.

Selain itu, kegiatan berbasis seni, olahraga, dan budaya terbukti memperkuat kesehatan mental. Seni memberi ruang ekspresi, olahraga meningkatkan hormon kebahagiaan, sementara budaya memperkuat identitas sosial. Jika dikaitkan dengan spiritualitas, kegiatan ini memberi pengalaman transendental yang menumbuhkan rasa syukur dan keterhubungan dengan sesama.

Studi empiris menegaskan manfaat integrasi ini. Penelitian WHO (2020) menunjukkan bahwa sekolah yang memasukkan program kesehatan mental dan spiritualitas dalam kurikulumnya mengalami penurunan tingkat depresi siswa hingga 30%. Di Indonesia, sekolah-sekolah berbasis pesantren modern melaporkan bahwa keseimbangan antara akademik, spiritual, dan sosial meningkatkan motivasi belajar dan solidaritas siswa.

Namun, tantangan yang dihadapi adalah stigma terhadap isu kesehatan mental. Banyak keluarga masih memandang masalah mental sebagai kelemahan pribadi, bukan kondisi yang perlu intervensi. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi pionir dalam menghapus stigma ini dengan menyediakan ruang terbuka untuk diskusi, dukungan psikososial, dan integrasi nilai spiritual.

Pada akhirnya, *Learning to Be* hanya bisa terwujud jika peserta didik memiliki well-being yang kuat. Kesehatan mental dan spiritualitas bukanlah pelengkap, melainkan inti dari pendidikan humanistik. Dengan mengintegrasikan konseling, kegiatan reflektif, nilai budaya, dan praktik spiritual, sekolah dapat menjadi ruang aman di mana murid tidak hanya belajar untuk tahu dan melakukan, tetapi juga belajar untuk hidup sehat, bermakna, dan penuh kasih.

Dengan cara ini, Indonesia dapat melahirkan model pendidikan yang menyeimbangkan akademik, kesehatan mental, dan spiritualitas. Model ini bukan hanya relevan secara lokal, tetapi juga menjadi kontribusi global dalam upaya menjadikan pendidikan sebagai jalan menuju kebahagiaan dan kebermaknaan hidup.

### C. Etika Global dan Pendidikan Karakter

Pilar *Learning to Be* menegaskan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya menghasilkan individu yang cerdas dan terampil, tetapi juga manusia yang bermoral, berkarakter, dan bertanggung jawab. Dalam dunia yang semakin terhubung, etika global menjadi kerangka penting untuk memastikan bahwa manusia dapat hidup berdampingan dengan damai, adil, dan saling menghargai. Pendidikan karakter menjadi instrumen strategis untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut sejak dini, sehingga peserta didik tumbuh dengan identitas moral yang kuat dan kesadaran sebagai warga dunia.

Etika global lahir dari kesadaran bahwa tantangan abad ke-21 bersifat lintas batas: perubahan iklim, konflik internasional, ketimpangan ekonomi, migrasi, hingga revolusi teknologi. Semua tantangan ini membutuhkan nilai moral bersama yang dapat diterima oleh berbagai bangsa dan budaya. Hans Küng, seorang filsuf, merumuskan gagasan *Global Ethic* yang menekankan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, solidaritas, kejujuran, dan

penghormatan terhadap martabat manusia. Pendidikan berperan penting dalam membumikan etika global ini agar tidak hanya menjadi wacana filosofis, tetapi menjadi praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan karakter menjadi medium konkret untuk mewujudkan etika global di tingkat individu dan komunitas. Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan murid untuk “mengetahui yang baik,” tetapi juga “melakukan yang baik” secara konsisten. Lickona (1991) menekankan bahwa pendidikan karakter mencakup tiga dimensi: moral knowing, moral feeling, dan moral action. Ketiganya harus berjalan bersama agar murid tidak hanya pandai bicara tentang etika, tetapi juga mempraktikkannya dalam tindakan nyata.

Dalam konteks globalisasi, pendidikan karakter tidak bisa hanya berbasis nilai lokal, tetapi harus terbuka terhadap nilai universal yang disepakati dunia. Misalnya, toleransi antaragama, penghormatan pada hak asasi manusia, dan kepedulian lingkungan adalah nilai-nilai yang harus diajarkan lintas budaya. Namun, keterbukaan ini bukan berarti menanggalkan identitas lokal. Justru pendidikan karakter yang kuat adalah yang mampu mengintegrasikan nilai universal dengan kearifan lokal.

Indonesia memiliki modal besar dalam membangun etika global melalui pendidikan karakter. Pancasila sebagai dasar negara telah merumuskan lima sila yang bersifat universal sekaligus kontekstual. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, misalnya, sejalan dengan prinsip etika global tentang martabat manusia. Gotong royong sebagai budaya Nusantara juga sangat relevan dengan solidaritas global. Dengan mengintegrasikan Pancasila, pendidikan Indonesia dapat melahirkan generasi yang berakar lokal sekaligus berwawasan global.

Falsafah Sunda *Silih Asih, Asah, Asuh* memperkaya pendidikan karakter dengan dimensi relasional. *Silih Asih* mengajarkan kasih sayang dan empati, *Silih Asah* menekankan pentingnya mengasah diri melalui pembelajaran bersama, sementara *Silih Asuh* memberi kerangka moral dalam membimbing generasi muda. Nilai-nilai ini tidak hanya berlaku dalam komunitas lokal, tetapi juga relevan secara global sebagai dasar etika kebersamaan.

Etika global juga menuntut kesadaran ekologis. Krisis iklim bukan hanya masalah ilmiah, tetapi juga masalah etis: bagaimana manusia

memperlakukan bumi. Pendidikan karakter yang berbasis etika global harus mengajarkan tanggung jawab ekologis sebagai bagian dari moralitas. Murid perlu memahami bahwa perilaku sehari-hari—seperti mengelola sampah, menggunakan energi, atau mengonsumsi produk—berdampak pada keberlanjutan planet.

Studi kasus internasional menunjukkan keberhasilan integrasi etika global dalam pendidikan. Finlandia, misalnya, memasukkan pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran, bukan sebagai kurikulum terpisah. Jepang menekankan disiplin, tanggung jawab, dan kebersihan sebagai bagian dari etika hidup bersama. Rwanda pascakonflik menggunakan pendidikan karakter untuk rekonsiliasi, mengajarkan toleransi dan perdamaian di sekolah. Praktik-praktik ini memperlihatkan bahwa etika global dapat diinternalisasi dalam berbagai konteks budaya.

Di Indonesia, praktik pendidikan karakter sudah berjalan dalam bentuk program *Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)* dan *Profil Pelajar Pancasila*. Namun, tantangan yang muncul adalah inkonsistensi dalam implementasi. Pendidikan karakter sering kali hanya berhenti pada slogan atau kegiatan seremonial, tanpa masuk ke dalam kehidupan nyata murid. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik: pendidikan karakter harus menjadi kultur sekolah, bukan hanya mata pelajaran.

Pendidikan berbasis etika global juga relevan dengan kebutuhan era digital. Di tengah maraknya ujaran kebencian, perundungan siber, dan penyebaran hoaks, murid perlu dibekali dengan literasi etis dalam menggunakan teknologi. Mereka harus memahami bahwa kebebasan berekspresi di dunia maya disertai tanggung jawab moral untuk menjaga martabat dan kebenaran.

Pada akhirnya, integrasi etika global dan pendidikan karakter adalah inti dari *Learning to Be*. Tanpa moralitas, manusia akan kehilangan arah di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi. Sebaliknya, dengan karakter yang kuat dan etika global, murid dapat menjadi manusia utuh yang mampu hidup bermakna, memberi kontribusi positif, dan menjaga keberlangsungan dunia. Pendidikan Indonesia dapat menjadi teladan global dengan mengintegrasikan nilai universal, Pancasila, dan kearifan lokal dalam satu kerangka pendidikan karakter yang humanis dan transformatif.

## D. Pendidikan Berbasis Emosi dan Empati

Pendidikan selama ini sering dipahami dalam kerangka kognitif—seolah-olah keberhasilan belajar hanya diukur dari nilai ujian, keterampilan akademik, dan prestasi intelektual. Namun, semakin jelas bahwa kecerdasan akademik saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, konflik sosial, dan tekanan psikologis, kemampuan mengelola emosi dan membangun empati menjadi sama pentingnya dengan keterampilan berpikir kritis atau literasi digital. Pendidikan berbasis emosi dan empati hadir sebagai respons untuk mengembalikan dimensi kemanusiaan dalam pembelajaran.

Emosi adalah energi yang menggerakkan manusia. Murid yang memiliki kecerdasan emosional cenderung lebih mudah membangun hubungan, mengelola stres, dan mengatasi kegagalan. Daniel Goleman (1995) menegaskan bahwa *emotional intelligence* bahkan dapat menjadi prediktor kesuksesan yang lebih kuat daripada IQ. Pendidikan yang berfokus pada emosi berarti membantu murid mengenali perasaan mereka, memahami perasaan orang lain, dan belajar mengelola respons secara sehat. Hal ini sejalan dengan prinsip *learning to be* dari UNESCO yang menekankan perkembangan kepribadian utuh.

Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri pada perspektif orang lain, memahami pengalaman mereka, dan merasakan penderitaan maupun kebahagiaan bersama. Dalam konteks pendidikan, empati berarti menciptakan iklim kelas yang penuh kasih sayang, di mana murid merasa didengar, dihargai, dan diterima. Empati juga membangun solidaritas sosial, karena murid belajar untuk peduli pada rekan sekelas, guru, maupun masyarakat luas.

Di Indonesia, pentingnya pendidikan berbasis emosi dan empati semakin nyata setelah pandemi COVID-19. Banyak murid mengalami tekanan psikologis akibat isolasi sosial, kehilangan anggota keluarga, atau keterbatasan pembelajaran daring. Studi UNICEF (2021) mencatat peningkatan kasus kecemasan dan depresi pada anak-anak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan pendidikan tidak cukup dengan mengejar ketertinggalan akademik, tetapi juga harus memperhatikan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional murid.

Implementasi pendidikan berbasis emosi dan empati dapat dilakukan melalui berbagai strategi. Guru dapat mengintegrasikan *social-emotional learning* (SEL) ke dalam pembelajaran harian. Misalnya, dengan memberikan waktu refleksi di awal atau akhir pelajaran, melakukan aktivitas *mindfulness*, atau mendorong murid berbagi pengalaman pribadi. Guru juga dapat melatih murid untuk menyelesaikan konflik melalui dialog empatik, bukan kekerasan atau paksaan.

Kurikulum Merdeka di Indonesia sebenarnya memberi ruang untuk integrasi aspek emosional. Profil Pelajar Pancasila menekankan enam karakter utama, termasuk *berakhlak mulia* dan *gotong royong*, yang secara substansial mengandung nilai empati dan pengelolaan emosi. Dengan demikian, pendidikan berbasis emosi dan empati bukanlah tambahan di luar kurikulum, melainkan bagian inti dari misi pendidikan nasional.

Selain strategi pedagogis, pendidikan berbasis emosi dan empati juga perlu dukungan dari lingkungan sekolah. Budaya sekolah harus menumbuhkan rasa aman psikologis, di mana murid bebas mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Program bimbingan konseling perlu diperkuat, bukan hanya untuk menangani masalah perilaku, tetapi juga untuk mendukung perkembangan emosi secara preventif. Lingkungan fisik yang ramah, hijau, dan penuh ruang interaksi juga mendukung kesejahteraan emosional.

Empati juga dapat dikembangkan melalui pembelajaran berbasis proyek sosial. Murid bisa diajak terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat, membantu sesama yang kurang beruntung, atau melakukan kampanye lingkungan. Dengan mengalami langsung penderitaan dan harapan orang lain, murid belajar bahwa pendidikan bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial.

Perspektif lokal Nusantara memberikan kontribusi penting dalam pendidikan berbasis empati. Nilai *Silih Asih* mengajarkan pentingnya kasih sayang dalam relasi manusia. Filosofi gotong royong menekankan bahwa manusia hanya bisa hidup bermakna jika saling membantu. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal ini, pendidikan berbasis emosi dan empati dapat lebih kontekstual dan relevan dengan budaya Indonesia.

Tantangan implementasi tentu tidak sedikit. Banyak guru yang masih terfokus pada pencapaian akademik, sehingga aspek emosional murid

kurang diperhatikan. Beban administrasi dan kurikulum yang padat sering membuat guru kesulitan menyediakan ruang refleksi atau aktivitas empatik. Selain itu, stigma sosial terhadap kesehatan mental masih kuat, sehingga murid ragu untuk mengungkapkan masalah emosional mereka.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang menekankan pembelajaran emosional cenderung menghasilkan murid yang lebih bahagia, berprestasi, dan berperilaku baik. Murid yang memiliki empati lebih tinggi cenderung mengurangi perilaku bullying dan meningkatkan kolaborasi di kelas. Dengan kata lain, pendidikan berbasis emosi dan empati bukanlah penghalang bagi pencapaian akademik, melainkan justru fondasi yang memperkuatnya.

Dalam era digital, pendidikan berbasis emosi dan empati menjadi semakin penting. Interaksi daring sering kali menimbulkan jarak emosional, bahkan memicu ujaran kebencian atau intoleransi. Murid perlu dibekali dengan literasi digital yang etis, termasuk bagaimana mengekspresikan emosi secara sehat di dunia maya dan bagaimana memahami perasaan orang lain meski hanya melalui komunikasi virtual.

Lebih jauh, pendidikan berbasis emosi dan empati mendukung pencapaian SDGs, khususnya SDG 4 (pendidikan berkualitas), SDG 3 (kesehatan dan kesejahteraan), dan SDG 16 (perdamaian dan inklusi sosial). Generasi yang memiliki empati akan lebih siap menghadapi krisis global seperti perubahan iklim, karena mereka mampu merasakan penderitaan masyarakat terdampak dan terdorong untuk bertindak.

Filosofisnya, pendidikan berbasis emosi dan empati adalah bentuk pemanusiaan pendidikan. Ia menegaskan bahwa manusia bukanlah mesin berpikir semata, melainkan makhluk yang merasakan, mencintai, dan berhubungan dengan sesama. Tanpa dimensi emosi dan empati, pendidikan berisiko melahirkan generasi yang cerdas otaknya tetapi kering hatinya.

Akhirnya, subbab ini menegaskan bahwa pendidikan berbasis emosi dan empati adalah kebutuhan mendesak di era modern. Ia harus terintegrasi dalam kurikulum, budaya sekolah, praktik guru, dan dukungan masyarakat. Dengan menumbuhkan kecerdasan emosional dan empati, pendidikan Indonesia dapat melahirkan generasi yang tidak hanya siap bersaing, tetapi

juga siap mengasahi, membimbing, dan membangun peradaban yang lebih manusiawi.

## E. Studi Kasus: Model Pendidikan Humanistik

Setelah membahas dimensi pendidikan humanistik, kesehatan mental dan spiritualitas, serta etika global, kini saatnya meninjau praktik nyata dari berbagai konteks yang menghidupkan pilar *Learning to Be*. Studi kasus ini memberi bukti bahwa pendidikan humanistik bukan sekadar konsep filosofis, melainkan pendekatan praktis yang bisa diterapkan di berbagai setting pendidikan—dari negara maju dengan sistem modern hingga komunitas lokal yang mengakar pada kearifan tradisional.

Salah satu contoh internasional yang sering dijadikan acuan adalah Finlandia. Sistem pendidikan Finlandia dikenal menekankan kesejahteraan murid di atas segalanya. Tidak ada ujian nasional yang menekan siswa, beban belajar diatur agar seimbang, dan guru diberi kepercayaan luas untuk merancang pembelajaran. Fokus utamanya adalah kebahagiaan, kreativitas, dan perkembangan individu. Di sini, *Learning to Be* diwujudkan dalam bentuk pendidikan yang memanusiakan manusia, bukan menstandarkan mereka.

Di Jepang, model pendidikan humanistik terwujud dalam praktik keseharian seperti *o-soji* (membersihkan kelas bersama), makan siang kolektif, dan pelajaran moral (*dotoku*). Praktik ini menumbuhkan identitas diri yang terkait erat dengan komunitas, disiplin, dan tanggung jawab sosial. Murid belajar bahwa menjadi manusia berarti hidup bersama, menghargai sesama, dan memberi kontribusi pada masyarakat. Nilai ini sejalan dengan falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh* yang menekankan keterhubungan antara individu dengan komunitas.

Rwanda pascakonflik menghadirkan studi kasus menarik. Negara yang hancur akibat genosida mengandalkan pendidikan humanistik untuk rekonsiliasi nasional. Kurikulum sekolah memasukkan pelajaran tentang perdamaian, toleransi, dan sejarah kritis. Murid diajak untuk memahami masa lalu, mengembangkan empati, dan berkomitmen pada masa depan yang damai. *Learning to Be* di Rwanda berarti membangun kembali kemanusiaan yang sempat tercerabut.

Di Indonesia, praktik pendidikan humanistik dapat ditemukan di berbagai konteks. Pesantren tradisional maupun modern adalah contoh kuat. Pendidikan di pesantren tidak hanya menekankan kognisi agama, tetapi juga pembentukan karakter, kedisiplinan spiritual, dan solidaritas sosial. Santri dibiasakan untuk hidup sederhana, mandiri, dan berkontribusi pada komunitas. Ini adalah bentuk nyata dari integrasi *Learning to Be* dengan nilai spiritual dan moral.

Sekolah-sekolah alternatif di Indonesia juga menjadi laboratorium pendidikan humanistik. Sekolah berbasis komunitas adat, misalnya, menekankan keterhubungan dengan alam, penghormatan pada leluhur, dan kehidupan berkelanjutan. Murid tidak hanya belajar membaca dan menulis, tetapi juga belajar mengenali jati dirinya melalui budaya, lingkungan, dan relasi sosial. Hal ini memperkuat identitas murid dalam konteks lokal sekaligus memberi mereka bekal untuk hidup dalam dunia global.

Program *Sekolah Penggerak* dan *Profil Pelajar Pancasila* juga menunjukkan arah menuju pendidikan humanistik. Melalui proyek lintas disiplin, murid diajak untuk refleksi, berekspresi, dan membangun karakter. Misalnya, proyek bertema “Kebinekaan Global” melatih murid memahami keberagaman dan menemukan jati diri mereka sebagai bagian dari masyarakat multikultural.

UNESCO (2022) mencatat bahwa praktik pendidikan humanistik memiliki korelasi positif dengan well-being murid. Sekolah yang menerapkan pendekatan ini melaporkan tingkat kebahagiaan lebih tinggi, konflik lebih rendah, serta keterlibatan siswa yang lebih baik. Di Indonesia, penelitian lokal juga mendukung temuan ini: siswa yang terlibat dalam kegiatan berbasis seni, refleksi, dan spiritualitas menunjukkan peningkatan kepercayaan diri dan empati.

Namun, studi kasus juga memperlihatkan tantangan. Banyak sekolah di Indonesia masih terjebak pada paradigma ujian, rangking, dan kurikulum yang padat. Guru sering kali tidak memiliki waktu atau pelatihan untuk mengembangkan pendekatan humanistik. Oleh karena itu, studi kasus internasional dan lokal menunjukkan perlunya perubahan sistemik: dari orientasi hasil ke orientasi manusia.

Pada akhirnya, studi kasus ini menegaskan bahwa *Learning to Be* dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk: dari pendidikan modern di Finlandia, tradisi moral di Jepang, rekonsiliasi di Rwanda, hingga pesantren dan sekolah adat di Indonesia. Meskipun berbeda konteks, esensinya sama: pendidikan harus membantu manusia menemukan dirinya, hidup bermakna, dan berkontribusi pada dunia dengan kasih, asah, dan asuh.



# BAB 10

## LEARNING TO LIVE TOGETHER

Jika pilar pertama (*Learning to Know*) membentuk kapasitas intelektual, pilar kedua (*Learning to Do*) mengasah keterampilan, dan pilar ketiga (*Learning to Be*) membangun keutuhan diri, maka pilar keempat, *Learning to Live Together*, menekankan esensi pendidikan sebagai sarana membangun harmoni sosial, solidaritas, dan perdamaian. UNESCO melalui *Delors Report* (1996) menyebut pilar ini sebagai inti dari pendidikan abad ke-21, karena dunia modern ditandai oleh interdependensi yang kian kuat, perbedaan budaya yang makin nyata, sekaligus tantangan intoleransi, konflik, dan fragmentasi sosial.

Dalam dunia yang semakin terhubung, manusia tidak bisa lagi hidup sendiri. Globalisasi telah menciptakan masyarakat multikultural, di mana keberagaman bukan pilihan, melainkan keniscayaan. Di satu sisi, keberagaman menghadirkan kekayaan perspektif, kreativitas, dan inovasi; di sisi lain, ia juga berpotensi memunculkan gesekan, diskriminasi, bahkan konflik. Pendidikan, dalam kerangka *Learning to Live Together*, bertugas menanamkan sikap toleransi, kemampuan menyelesaikan konflik secara damai, serta kesediaan untuk bekerja sama demi kepentingan bersama.

Indonesia adalah laboratorium nyata bagi pilar ini. Dengan lebih dari 1.300 kelompok etnis, ratusan bahasa daerah, dan keberagaman agama, bangsa ini ditakdirkan untuk menjadikan toleransi sebagai fondasi kehidupan. Falsafah *Bhinneka Tunggal Ika* sebenarnya adalah bentuk awal *Learning to Live Together* dalam konteks Nusantara. Demikian pula falsafah Sunda *Silih Asih, Asah, Asuh* yang mengajarkan kasih, kebersamaan, dan pengasuhan moral, memberi kontribusi kuat dalam membangun harmoni sosial di tengah perbedaan.

Namun, realitas global dan nasional menunjukkan bahwa hidup bersama tidak selalu mudah. Konflik horizontal, polarisasi politik, ujaran kebencian di media sosial, hingga diskriminasi terhadap kelompok minoritas, menandakan bahwa pendidikan untuk hidup bersama bukan sekadar ideal, tetapi kebutuhan mendesak. Pilar ini menjadi semacam “vaksin sosial” yang membekali generasi muda dengan empati, keterampilan dialog, dan kesadaran global.

*Learning to Live Together* juga berhubungan erat dengan agenda perdamaian dunia. UNESCO menegaskan bahwa perang lahir dari pikiran manusia, maka perdamaian juga harus ditanamkan dalam pikiran manusia melalui pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya instrumen pembangunan ekonomi, tetapi juga fondasi rekonsiliasi, keadilan, dan solidaritas global. Dalam konteks SDGs, pilar ini berkontribusi langsung pada SDG 16 tentang perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat.

Bab 10 ini akan membahas bagaimana *Learning to Live Together* diterjemahkan ke dalam pendidikan. Subbab 10.1 akan mengulas pendidikan multikultural dan toleransi; Subbab 10.2 akan membahas gotong royong dan *civic engagement*; Subbab 10.3 menekankan pendidikan perdamaian dan kewargaan global; Subbab 10.4 menguraikan pendidikan inklusif untuk keberagaman; sementara Subbab 10.5 menyajikan studi kasus tentang resolusi konflik dan kolaborasi. Dengan kerangka ini, kita akan melihat bahwa *Learning to Live Together* bukan hanya retorika, melainkan strategi konkret untuk membangun masa depan yang damai dan berkeadilan.

## A. Pendidikan Multikultural dan Toleransi

Pendidikan multikultural dan toleransi merupakan fondasi penting dari pilar *Learning to Live Together*. Dalam dunia yang semakin plural, kemampuan menghargai keberagaman dan membangun harmoni sosial adalah keterampilan hidup yang sama pentingnya dengan literasi digital atau keterampilan kerja. Pendidikan tidak lagi cukup hanya melahirkan individu cerdas, tetapi harus membentuk manusia yang mampu hidup berdampingan dalam perbedaan, dengan sikap saling menghormati, empati, dan solidaritas.

Pendidikan multikultural adalah pendekatan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, etnis, agama, bahasa, dan identitas sosial. Ia menolak homogenisasi yang menekan identitas kelompok tertentu, dan sebaliknya merayakan perbedaan sebagai kekayaan. James Banks, salah satu tokoh pendidikan multikultural, menegaskan bahwa pendidikan harus membantu peserta didik memahami realitas pluralitas, mengatasi prasangka, serta membangun kompetensi interkultural. Dengan demikian, pendidikan multikultural bukan hanya wacana akademik, tetapi sebuah strategi untuk membentuk masyarakat inklusif.

Toleransi adalah sikap yang memungkinkan keberagaman hidup berdampingan secara damai. Toleransi bukan berarti menghapus perbedaan, melainkan mengakui dan menghormatinya. UNESCO dalam *Declaration of Principles on Tolerance* (1995) menegaskan bahwa toleransi adalah “harmonisasi dalam perbedaan,” dan ia merupakan prasyarat bagi perdamaian dunia. Pendidikan memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai toleransi sejak dini, sehingga generasi muda tumbuh dengan kesadaran bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan ancaman.

Di Indonesia, pendidikan multikultural menemukan konteks yang sangat relevan. Sebagai negara dengan lebih dari 17 ribu pulau, ratusan bahasa daerah, dan berbagai agama, Indonesia adalah miniatur multikulturalisme global. Namun, keberagaman ini juga menyimpan potensi konflik. Kasus intoleransi, diskriminasi, hingga kekerasan berbasis identitas masih terjadi di berbagai daerah. Oleh karena itu, pendidikan multikultural bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga persatuan bangsa.

Falsafah Nusantara memberikan landasan kuat bagi pendidikan multikultural. Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu jua” adalah ekspresi filosofis dari toleransi. Dalam konteks lokal Sunda, prinsip *Silih Asih, Asah, Asuh* juga mengajarkan nilai serupa. *Silih Asih* menumbuhkan kasih dan empati terhadap sesama, *Silih Asah* menekankan pentingnya belajar dari perbedaan, dan *Silih Asuh* memberi kerangka moral untuk membimbing generasi muda agar hidup dalam harmoni.

Pendidikan multikultural dapat diwujudkan dalam kurikulum dengan berbagai cara. Pertama, melalui integrasi konten: materi pelajaran harus mencerminkan keberagaman perspektif, tidak hanya satu sudut pandang dominan. Kedua, melalui pedagogi: guru harus menggunakan metode yang menghargai partisipasi semua murid, tanpa diskriminasi. Ketiga, melalui budaya sekolah: sekolah harus menjadi ruang inklusif di mana murid dari berbagai latar belakang merasa diterima. Dengan strategi ini, pendidikan multikultural tidak berhenti pada teks, tetapi hidup dalam praktik sehari-hari.

Contoh praktik dapat ditemukan dalam program *Sekolah Toleransi* di Indonesia yang menekankan pentingnya interaksi lintas iman dan budaya. Siswa diajak mengunjungi rumah ibadah berbagai agama, berdialog dengan tokoh lintas iman, serta mengerjakan proyek sosial bersama. Praktik ini membentuk pemahaman bahwa toleransi bukan sekadar teori, tetapi pengalaman nyata.

Di tingkat global, Kanada menjadi contoh negara yang berhasil menerapkan pendidikan multikultural. Kurikulumnya menekankan pluralisme, penghargaan pada budaya imigran, dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Hasilnya, Kanada dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat penerimaan tinggi terhadap keberagaman. Sementara itu, di Finlandia, pendidikan multikultural diintegrasikan melalui kurikulum nasional yang menekankan kesetaraan gender, toleransi, dan hak asasi manusia.

Toleransi juga sangat terkait dengan keterampilan dialog. Murid perlu dilatih untuk mendengar dengan empati, mengungkapkan pendapat tanpa merendahkan, serta mencari titik temu di tengah perbedaan. Pendidikan yang menekankan keterampilan dialog akan membantu mencegah

radikalisme, polarisasi, dan ujaran kebencian. Hal ini sangat penting di era media sosial, di mana intoleransi sering diperkuat oleh ruang gema digital.

Studi empiris mendukung pentingnya pendidikan multikultural. Penelitian OECD (2021) menunjukkan bahwa murid yang diajarkan toleransi dan kompetensi interkultural memiliki tingkat keterlibatan sosial lebih tinggi dan lebih siap bekerja dalam tim multikultural. Di Indonesia, riset Wahyudi (2022) menemukan bahwa sekolah yang menerapkan pendidikan multikultural mengalami penurunan kasus bullying berbasis identitas.

Namun, implementasi pendidikan multikultural tidak bebas tantangan. Resistensi budaya, politik identitas, dan kurangnya pelatihan guru sering menjadi penghambat. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan nasional yang tegas sekaligus fleksibel, memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan pendekatan dengan konteks lokal. Guru juga perlu dibekali keterampilan interkultural agar mampu menjadi teladan toleransi.

Pada akhirnya, pendidikan multikultural dan toleransi adalah inti dari *Learning to Live Together*. Tanpa toleransi, keberagaman hanya akan menjadi sumber konflik. Sebaliknya, dengan pendidikan multikultural yang efektif, keberagaman akan menjadi sumber kekuatan kolektif. Indonesia, dengan kekayaan budayanya, memiliki peluang besar untuk menjadi teladan global dalam membangun harmoni sosial berbasis pendidikan. Dengan mengintegrasikan nilai global UNESCO dan falsafah lokal seperti *Silih Asih, Asah, Asuh*, pendidikan kita dapat melahirkan generasi yang siap hidup bersama dalam perbedaan, membangun perdamaian, dan memperkuat persatuan bangsa.

## B. Gotong Royong dan Civic Engagement

Jika pendidikan multikultural dan toleransi menekankan pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman, maka gotong royong dan *civic engagement* menekankan bagaimana individu terlibat aktif dalam kehidupan sosial untuk membangun kebaikan bersama. Pendidikan tidak hanya menyiapkan murid agar mampu hidup berdampingan secara damai, tetapi juga agar mereka menjadi warga yang partisipatif, peduli, dan bertanggung jawab terhadap komunitasnya. Gotong royong sebagai nilai khas Nusantara merupakan salah satu bentuk *civic engagement* paling otentik, yang tidak

hanya menjadi bagian dari tradisi, tetapi juga solusi nyata bagi tantangan sosial modern.

Gotong royong bukan sekadar kerja bersama, tetapi sebuah nilai budaya yang mengajarkan solidaritas, kebersamaan, dan saling membantu tanpa pamrih. Sejak lama, masyarakat Indonesia menyelesaikan persoalan bersama melalui gotong royong, mulai dari membangun rumah, membersihkan lingkungan, hingga mengadakan hajatan. Dalam kerangka *Learning to Live Together*, gotong royong adalah pendidikan karakter yang hidup, yang menanamkan sikap bahwa kebersamaan lebih penting daripada kepentingan pribadi.

*Civic engagement* dalam konteks pendidikan adalah keterlibatan aktif warga, termasuk murid, dalam proses kehidupan sosial, politik, dan komunitas. Bentuknya beragam: mulai dari kerja bakti, advokasi sosial, partisipasi dalam organisasi siswa, hingga kegiatan pelayanan masyarakat (*service learning*). Dengan keterlibatan ini, murid belajar bahwa menjadi warga negara bukan hanya soal hak, tetapi juga tanggung jawab untuk berkontribusi pada kepentingan publik.

Pendidikan yang mengintegrasikan gotong royong dan *civic engagement* melatih murid untuk memahami demokrasi dalam makna yang substantif. Demokrasi bukan hanya pemilu, tetapi juga keterlibatan aktif warga dalam menyelesaikan persoalan bersama. Melalui pengalaman gotong royong, murid belajar mengelola perbedaan, berdialog, mengambil keputusan kolektif, dan membangun solidaritas.

Contoh praktik di Indonesia dapat dilihat pada program *Pramuka* dan *PMR (Palang Merah Remaja)* yang melatih murid untuk terlibat langsung dalam kegiatan sosial, seperti penanggulangan bencana, bakti sosial, dan pelayanan kesehatan. Di sekolah, program *Projek Profil Pelajar Pancasila* juga mendorong murid untuk melaksanakan proyek kolaboratif, misalnya mengelola kebersihan lingkungan atau mengembangkan program kewirausahaan sosial berbasis komunitas.

Gotong royong juga memiliki dimensi ekonomi dan ekologi. Dalam masyarakat pedesaan, praktik gotong royong dalam bertani atau panen menjadi model ekonomi solidaritas yang berbeda dengan kapitalisme individualistik. Murid yang dilibatkan dalam praktik ini tidak hanya belajar

keterampilan pertanian, tetapi juga belajar nilai berbagi hasil, menjaga ekosistem, dan merawat keberlanjutan. Dengan demikian, gotong royong mengajarkan *civic engagement* yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

Studi internasional menunjukkan bahwa *service learning* atau pembelajaran berbasis pengabdian masyarakat efektif meningkatkan kepedulian sosial dan keterampilan kepemimpinan murid. Di Amerika Serikat, misalnya, banyak universitas yang mewajibkan mahasiswanya terlibat dalam program sosial sebagai bagian dari kurikulum. Di Jepang, keterlibatan siswa dalam menjaga kebersihan sekolah dan lingkungan menjadi bagian integral dari pembelajaran karakter. Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan praktik serupa melalui budaya gotong royong, hanya perlu diintegrasikan secara sistematis dalam pendidikan formal.

Falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh* kembali menemukan relevansinya di sini. *Asih* mendorong murid untuk terlibat dengan kasih sayang dan kepedulian, *Asah* memastikan keterlibatan ini menjadi proses saling belajar, dan *Asuh* menegaskan tanggung jawab moral agar keterlibatan sosial tidak sekadar formalitas, melainkan benar-benar memberi dampak. Dengan nilai ini, gotong royong dan *civic engagement* tidak hanya menjadi aktivitas praktis, tetapi juga pengalaman pendidikan yang membentuk jati diri.

Tantangan integrasi gotong royong dalam pendidikan adalah arus individualisme modern yang sering melemahkan solidaritas. Media sosial, misalnya, kadang mendorong murid untuk lebih sibuk membangun citra personal daripada bekerja kolektif. Oleh karena itu, sekolah harus menyeimbangkan antara kebutuhan individu dengan komitmen kolektif, sehingga murid belajar bahwa keberhasilan pribadi sejati terletak pada kontribusi kepada masyarakat.

Dalam kerangka SDGs, gotong royong dan *civic engagement* berkontribusi pada SDG 11 (kota dan komunitas berkelanjutan) dan SDG 16 (perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat). Pendidikan yang menumbuhkan partisipasi sosial sejak dini akan melahirkan generasi warga yang aktif menjaga lingkungan, berkontribusi pada pembangunan, dan memperkuat demokrasi.

Dengan demikian, integrasi gotong royong dan *civic engagement* ke dalam pendidikan adalah jalan untuk membudayakan *Learning to Live*

*Together* dalam realitas Nusantara. Gotong royong bukan hanya warisan budaya, tetapi juga model pendidikan partisipatif yang relevan dengan tantangan global. Dengan memadukan nilai tradisional, strategi pendidikan modern, dan kerangka global, Indonesia dapat membangun generasi yang bukan hanya toleran, tetapi juga aktif dan bertanggung jawab sebagai warga dunia.

### C. Pendidikan Perdamaian dan Global Citizenship

Salah satu mandat utama pilar *Learning to Live Together* adalah menjadikan pendidikan sebagai instrumen perdamaian dan kewargaan global. Sejarah membuktikan bahwa konflik dan peperangan sering kali lahir dari kebencian, ketidakpahaman, dan intoleransi yang berakar pada pola pikir eksklusif. Oleh karena itu, UNESCO menegaskan bahwa perang berawal dari pikiran manusia, dan di pikiran manusia pula perdamaian harus dibangun. Pendidikan memiliki kekuatan untuk menanamkan nilai-nilai damai, solidaritas, dan tanggung jawab global sehingga generasi baru tumbuh sebagai agen rekonsiliasi dan pembangunan berkelanjutan.

Pendidikan perdamaian bukan sekadar mengajarkan anti-kekerasan, tetapi menumbuhkan budaya damai (*culture of peace*) yang mencakup keterampilan menyelesaikan konflik, kemampuan dialog, penghormatan terhadap perbedaan, dan kesediaan untuk bekerja sama demi kepentingan bersama. Johan Galtung, tokoh studi perdamaian, membedakan antara *peace negative* (ketiadaan konflik bersenjata) dan *peace positive* (kondisi keadilan sosial, harmoni, dan kerjasama). Pendidikan perdamaian harus berorientasi pada *peace positive*, sehingga murid tidak hanya diajarkan menghindari konflik, tetapi juga membangun struktur sosial yang adil.

Global citizenship education (GCED) memperluas gagasan ini dengan menekankan identitas ganda murid: sebagai warga negara lokal dan sekaligus warga dunia. Murid diajak memahami bahwa isu-isu global—perubahan iklim, migrasi, pandemi, ketidaksetaraan ekonomi—membutuhkan kesadaran kolektif lintas negara. Dengan GCED, murid belajar menjadi bagian dari komunitas global tanpa kehilangan akar lokalnya. Mereka diajarkan berpikir global, bertindak lokal (*think globally, act locally*).

Dalam praktiknya, pendidikan perdamaian dan GCED bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Misalnya, program lintas budaya yang mempertemukan siswa dari berbagai negara melalui pertukaran pelajar, kelas daring global, atau proyek kolaboratif. Melalui pengalaman ini, murid belajar menghargai keberagaman perspektif, sekaligus menyadari bahwa mereka berbagi tanggung jawab terhadap planet yang sama.

Indonesia memiliki posisi unik dalam mengembangkan pendidikan perdamaian. Sebagai negara dengan sejarah panjang pluralisme dan filosofi *Bhinneka Tunggal Ika*, Indonesia bisa menjadi contoh model pendidikan yang menanamkan perdamaian melalui keberagaman. Falsafah Sunda *Silih Asih, Asah, Asuh* dapat memperkaya GCED: *Asih* menekankan kasih sayang universal, *Asah* menegaskan proses saling belajar antarbangsa, dan *Asuh* memberi kerangka moral agar relasi global dilandasi tanggung jawab etis.

Pendidikan perdamaian juga relevan dengan kebutuhan nasional. Konflik horizontal, radikalisme, dan intoleransi yang masih muncul di berbagai daerah dapat diminimalisasi dengan pendekatan pendidikan yang menekankan dialog, toleransi, dan rekonsiliasi. Program sekolah damai atau dialog antariman di sekolah adalah langkah strategis yang dapat diintegrasikan dalam kurikulum.

Studi kasus global memperlihatkan praktik baik GCED. Korea Selatan, misalnya, mengembangkan kurikulum pendidikan kewargaan global yang mengintegrasikan isu HAM, lingkungan, dan perdamaian. Di Rwanda, pendidikan perdamaian dimasukkan dalam kurikulum nasional pascagenosida untuk membangun rekonsiliasi. Finlandia menggabungkan literasi global dalam kurikulum sehingga murid terbiasa berpikir dalam kerangka global sejak dini.

Dalam kerangka SDGs, GCED berhubungan erat dengan SDG 4.7 yang menekankan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai, dan kewargaan global. Dengan demikian, pendidikan perdamaian bukan sekadar ideal normatif, tetapi juga bagian dari agenda pembangunan dunia.

Tantangan terbesar dalam implementasi pendidikan perdamaian adalah resistensi dari kelompok yang memandangnya sebagai ancaman terhadap identitas lokal atau nasional. Padahal, GCED justru menegaskan

pentingnya akar budaya lokal sebagai dasar partisipasi global. Pendidikan perdamaian tidak berarti menanggalkan identitas, tetapi memperluas cakrawala identitas menjadi lebih inklusif.

Akhirnya, pendidikan perdamaian dan global citizenship adalah inti dari *Learning to Live Together*. Tanpa kemampuan membangun damai, dunia hanya akan terjebak dalam siklus konflik. Sebaliknya, dengan menanamkan kesadaran global dan nilai perdamaian sejak dini, pendidikan dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijak, empatik, dan berkomitmen menjaga keberlanjutan dunia. Indonesia memiliki modal budaya dan filosofi untuk memberi kontribusi nyata dalam agenda global ini, menjadikan pendidikan sebagai jalan menuju masyarakat yang damai, adil, dan berperikemanusiaan.

#### **D. Pendidikan Inklusif untuk Keberagaman**

Pilar *Learning to Live Together* akan kehilangan maknanya jika pendidikan tidak mampu merangkul semua kalangan, terutama mereka yang berbeda latar belakang sosial, ekonomi, budaya, gender, maupun kondisi fisik dan mental. Pendidikan inklusif adalah strategi yang memastikan setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar, tumbuh, dan berkembang tanpa diskriminasi. Ia bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi manifestasi nyata dari komitmen kemanusiaan untuk menghargai keberagaman dan menjadikan sekolah sebagai ruang yang benar-benar adil bagi semua.

Pendidikan inklusif berangkat dari prinsip hak asasi manusia bahwa setiap individu berhak memperoleh pendidikan bermutu tanpa terkecuali. UNESCO dalam *Salamanca Statement* (1994) menegaskan bahwa sekolah reguler dengan orientasi inklusif adalah sarana paling efektif untuk memerangi diskriminasi, membangun masyarakat yang inklusif, dan mewujudkan pendidikan untuk semua. Prinsip ini sejalan dengan SDG 4 yang menargetkan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata pada tahun 2030.

Dalam praktiknya, pendidikan inklusif tidak hanya berfokus pada penyandang disabilitas, tetapi juga pada semua bentuk keberagaman. Anak dari keluarga miskin, komunitas adat, perempuan, anak migran, hingga murid dengan orientasi belajar berbeda, semuanya termasuk dalam kerangka inklusi. Dengan demikian, pendidikan inklusif bukan sekadar

memberi akses fisik ke sekolah, tetapi juga memastikan proses belajar, kurikulum, dan budaya sekolah menghargai perbedaan.

Indonesia memiliki konteks yang sangat kompleks untuk pendidikan inklusif. Di satu sisi, negara ini memiliki regulasi yang mendukung, seperti Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Namun di sisi lain, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar: minimnya tenaga pendidik terlatih, keterbatasan sarana prasarana, dan stigma masyarakat yang masih melihat perbedaan sebagai kelemahan.

Pendidikan inklusif bukan hanya soal kebijakan, melainkan perubahan paradigma. Guru dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogi diferensiatif, mampu menyesuaikan metode dengan kebutuhan beragam murid. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang ramah, bebas diskriminasi, dan mendukung partisipasi semua anak. Orang tua juga perlu diajak memahami bahwa keberagaman adalah bagian alami dari kehidupan, bukan masalah yang harus disingkirkan.

Falsafah Nusantara memberi fondasi kultural bagi pendidikan inklusif. Konsep *Silih Asih* menekankan kasih sayang universal tanpa memandang perbedaan, *Silih Asah* mengajarkan bahwa setiap orang memiliki potensi unik yang bisa diasah bersama, sementara *Silih Asuh* mengingatkan tanggung jawab kolektif untuk merawat dan membimbing mereka yang lebih rentan. Dengan falsafah ini, pendidikan inklusif di Indonesia dapat berakar kuat dalam budaya, bukan sekadar kebijakan impor.

Studi kasus global memperlihatkan manfaat nyata pendidikan inklusif. Di Kanada, sekolah inklusif meningkatkan kohesi sosial karena murid terbiasa menghargai perbedaan sejak dini. Di Finlandia, pendidikan inklusif diintegrasikan dalam kurikulum nasional, sehingga semua murid belajar dalam lingkungan yang sama dengan dukungan khusus sesuai kebutuhan. Rwanda pascakonflik menggunakan pendidikan inklusif untuk menyatukan murid dari latar belakang yang pernah bermusuhan, sehingga sekolah menjadi arena rekonsiliasi sosial.

Di Indonesia, ada contoh sekolah-sekolah inklusif yang berhasil, seperti sekolah reguler yang menerima anak dengan kebutuhan khusus dengan

dukungan guru pendamping. Ada pula pesantren yang membuka akses bagi santri difabel, mengajarkan bahwa spiritualitas dan kebersamaan tidak mengenal batas fisik. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa inklusi bisa diwujudkan jika ada komitmen kuat dari sekolah dan masyarakat.

Tantangan utama pendidikan inklusif di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya. Guru sering kali tidak dibekali keterampilan untuk menangani murid dengan kebutuhan berbeda, sementara sarana prasarana masih minim. Selain itu, stigma sosial masih menjadi hambatan besar. Banyak keluarga anak berkebutuhan khusus yang enggan menyekolahkan anaknya karena takut mengalami diskriminasi. Hal ini menegaskan perlunya pendekatan holistik: regulasi yang tegas, pelatihan guru, kampanye sosial, dan dukungan komunitas.

Pendidikan inklusif juga harus diintegrasikan dengan teknologi. Di era Society 5.0, teknologi dapat menjadi jembatan bagi inklusi: aplikasi pembelajaran adaptif, perangkat bantu digital bagi penyandang disabilitas, hingga platform daring yang memungkinkan murid dari daerah terpencil ikut serta dalam pembelajaran. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, inklusi tidak hanya mimpi, tetapi kenyataan.

Pada akhirnya, pendidikan inklusif untuk keberagaman adalah inti dari *Learning to Live Together*. Ia menegaskan bahwa keberagaman bukan penghalang, melainkan fondasi untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan damai. Dengan mengintegrasikan kerangka global UNESCO, kebijakan nasional, serta falsafah lokal *Silih Asih, Asah, Asuh*, Indonesia dapat melahirkan model pendidikan inklusif yang tidak hanya merangkul semua anak, tetapi juga menjadikan keberagaman sebagai sumber kekuatan bangsa.

## E. Studi Kasus: Resolusi Konflik dan Kolaborasi

Pendidikan yang menekankan *Learning to Live Together* tidak berhenti pada pengajaran teori tentang toleransi, gotong royong, atau perdamaian. Ia harus diwujudkan dalam praktik nyata, terutama ketika masyarakat menghadapi konflik sosial. Studi kasus dari berbagai negara dan komunitas menunjukkan bagaimana pendidikan dapat menjadi arena strategis untuk membangun rekonsiliasi, menyelesaikan konflik secara damai, serta memperkuat kolaborasi lintas kelompok.

Resolusi konflik melalui pendidikan berangkat dari prinsip bahwa konflik adalah bagian alami dari kehidupan sosial, namun cara mengelolanya menentukan apakah ia melahirkan kehancuran atau justru memperkuat solidaritas. Pendidikan dapat mengubah konflik destruktif menjadi proses belajar kolektif, di mana murid dilatih keterampilan mediasi, dialog, dan empati. Dengan demikian, sekolah dan perguruan tinggi berfungsi bukan hanya sebagai ruang akademik, tetapi juga laboratorium perdamaian.

Contoh yang kuat dapat dilihat dari Rwanda pascagenosida 1994. Pendidikan di sana diarahkan pada rekonsiliasi nasional dengan memasukkan kurikulum perdamaian, sejarah kritis, dan keterampilan resolusi konflik. Murid diajak berdialog tentang trauma masa lalu, mengenali akar kebencian, dan membangun narasi baru tentang identitas bersama. Hasilnya, sekolah menjadi tempat penting untuk mencegah reproduksi kebencian antargenerasi.

Di Irlandia Utara, konflik antara Katolik dan Protestan yang berlangsung puluhan tahun juga menunjukkan peran penting pendidikan dalam resolusi konflik. Program *integrated schools* mempertemukan anak-anak dari kedua komunitas dalam ruang belajar yang sama. Melalui interaksi sehari-hari, stereotip dan prasangka perlahan berkurang. Penelitian menunjukkan bahwa alumni sekolah integratif lebih toleran dan cenderung mendukung perdamaian dibanding mereka yang belajar dalam sistem segregasi.

Indonesia juga memiliki pengalaman berharga. Konflik komunal di Maluku dan Poso pada akhir 1990-an melahirkan trauma mendalam. Namun, sejumlah inisiatif pendidikan berbasis komunitas berhasil menjadi jalan rekonsiliasi. Sekolah-sekolah menekankan kegiatan lintas iman, dialog antaragama, dan proyek kolaboratif seperti perbaikan rumah ibadah atau program sosial bersama. Di sini, pendidikan tidak hanya memulihkan hubungan sosial, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa perbedaan dapat dikelola dengan kolaborasi, bukan konfrontasi.

Kolaborasi dalam konteks pendidikan tidak hanya terkait dengan penyelesaian konflik, tetapi juga pembangunan sosial. Di banyak desa di Indonesia, sekolah bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengelola sumber daya, seperti program pertanian berkelanjutan, konservasi lingkungan, atau usaha ekonomi produktif. Melalui program ini, murid tidak

hanya belajar keterampilan praktis, tetapi juga nilai gotong royong, tanggung jawab sosial, dan kepemimpinan kolektif.

Falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh* memberi kontribusi filosofis yang besar dalam studi kasus resolusi konflik dan kolaborasi. *Silih Asih* menekankan empati dan kasih sayang sebagai dasar rekonsiliasi, *Silih Asah* menegaskan bahwa penyelesaian konflik adalah proses saling belajar, sementara *Silih Asuh* menggarisbawahi peran bimbingan moral agar konflik tidak berulang. Nilai-nilai ini menjadikan pendidikan Indonesia mampu mengembangkan model rekonsiliasi khas Nusantara.

Studi empiris internasional menunjukkan bahwa sekolah yang mengintegrasikan program resolusi konflik memiliki dampak signifikan. Penelitian UNESCO (2020) menunjukkan penurunan kasus bullying dan kekerasan di sekolah hingga 40% pada institusi yang menerapkan *peer mediation programs*. Di Indonesia, riset Wahid Institute menemukan bahwa sekolah yang aktif mengajarkan toleransi dan kerja sama lintas iman mengalami tingkat konflik sosial lebih rendah di lingkungannya.

Kolaborasi juga terbukti sebagai strategi jangka panjang untuk mencegah konflik. Murid yang terbiasa bekerja sama dalam proyek sosial lebih mampu menghargai perbedaan, mengelola ketegangan, dan mencari solusi bersama. Dengan kata lain, kolaborasi adalah “vaksin sosial” yang membekali generasi muda dengan keterampilan damai.

Tantangan utama resolusi konflik melalui pendidikan adalah bias yang kadang ada dalam sistem itu sendiri. Buku teks, kurikulum, atau praktik sekolah kadang masih mengandung diskriminasi halus yang justru memperkuat prasangka. Oleh karena itu, reformasi pendidikan harus mencakup revisi materi, pelatihan guru, dan penguatan budaya sekolah yang inklusif.

Pada akhirnya, studi kasus resolusi konflik dan kolaborasi menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat damai. Sekolah yang mempraktikkan dialog, gotong royong, dan kolaborasi bukan hanya menghasilkan murid cerdas, tetapi juga warga yang mampu hidup bersama secara damai. Indonesia, dengan sejarah keberagaman dan filosofi lokalnya, memiliki potensi besar untuk menjadi teladan global dalam pendidikan perdamaian.

# BAGIAN IV

## INTEGRASI LOKAL-GLOBAL







## BAB 11

### MENYULAM SILIH ASIH-ASAHA-SUH DENGAN PILAR UNESCO

Setelah kita mendalami kearifan lokal *Silih Asih, Asah, Asuh* dan mengeksplorasi empat pilar pendidikan UNESCO (*Learning to Know, Learning to Do, Learning to Be, Learning to Live Together*), kini saatnya kita melangkah pada tahap integratif: menyulam keduanya menjadi satu kerangka pendidikan transformatif. Bab ini merupakan titik temu antara akar lokal dan visi global, antara falsafah Nusantara dengan norma universal, serta antara kebutuhan praksis di sekolah dengan agenda besar peradaban dunia.

Integrasi ini penting karena pendidikan tidak pernah berjalan dalam ruang hampa. Di satu sisi, ia tumbuh dari nilai-nilai lokal, budaya, dan tradisi yang membentuk identitas kolektif masyarakat. Di sisi lain, ia juga dituntut untuk beradaptasi dengan standar, tantangan, dan peluang global. Oleh karena itu, menyulam *Silih Asih-Asah-Asuh* dengan empat pilar UNESCO bukan sekadar upaya akademik, tetapi juga strategi praksis

untuk menjawab kebutuhan zaman: pendidikan yang kontekstual sekaligus universal, membumi sekaligus menjangkau langit.

Dalam konteks Indonesia, integrasi ini memiliki makna yang sangat mendalam. Kearifan lokal Nusantara sesungguhnya telah lama mengandung prinsip-prinsip humanisme, solidaritas, dan keberlanjutan yang kini digabungkan UNESCO. *Silih Asih* selaras dengan *Learning to Live Together*, *Silih Asah* beresonansi dengan *Learning to Know* dan *Learning to Do*, sementara *Silih Asuh* terkait erat dengan *Learning to Be*. Menyatukan keduanya berarti mengakui bahwa pendidikan Indonesia tidak perlu menyalin buta gagasan global, melainkan mampu berdialog, berkontribusi, dan memperkaya wacana internasional dengan perspektif lokal.

Lebih jauh, integrasi ini akan membantu sekolah, komunitas, dan pembuat kebijakan menemukan orientasi baru dalam menyusun kurikulum, metode, dan program. Ia memberi arah bahwa transformasi pendidikan tidak cukup hanya dengan inovasi teknologi, peningkatan literasi, atau keterampilan kerja, tetapi harus dilandasi pula oleh nilai kasih sayang, kebersamaan, dan bimbingan moral. Dengan demikian, pendidikan menjadi ruang pembentukan manusia yang cerdas, terampil, berkarakter, dan berakar pada budaya.

Bab 11 akan menguraikan teori integrasi nilai lokal–global, menyajikan model konseptual integratif, memberikan contoh penerapan di sekolah, komunitas, dan perguruan tinggi, serta membandingkan berbagai model integrasi dari konteks lokal dan global. Pada akhirnya, bab ini juga akan membahas desain kurikulum integratif Nusantara–UNESCO yang dapat menjadi kerangka praktis bagi pendidik dan pengambil kebijakan.

Dengan kerangka ini, kita diajak melihat bahwa pendidikan masa depan bukan sekadar proyek teknis atau birokratis, tetapi sebuah *tapestry* indah yang dijalin dari benang-benang kearifan lokal dan global. Menyulam *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* dengan pilar UNESCO berarti membangun pendidikan yang memuliakan manusia, menghargai keberagaman, dan menyiapkan generasi untuk hidup bermakna dalam dunia yang penuh tantangan.

## A. Teori Integrasi Nilai Lokal–Global

Integrasi nilai lokal dan global dalam pendidikan bukan sekadar upaya teknis menggabungkan dua perspektif, melainkan proses epistemologis dan kultural yang melahirkan paradigma baru. Di satu sisi, nilai global yang dicanangkan UNESCO melalui empat pilar pendidikan menawarkan kerangka universal tentang apa yang dibutuhkan manusia untuk bertahan dan berkembang dalam masyarakat dunia yang saling terhubung. Di sisi lain, nilai lokal seperti *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* memberikan kekuatan identitas, akar moral, dan konteks kultural yang membuat pendidikan terasa relevan, hidup, dan bermakna. Subbab ini menguraikan landasan teoretis tentang bagaimana kedua ranah ini dapat disatukan dalam kerangka pendidikan transformatif.

Teori integrasi nilai lokal–global dapat dipahami melalui tiga pendekatan besar: *glokalisasi*, *interkulturalisme*, dan *hibridisasi*. Konsep *glokalisasi*, yang dipopulerkan oleh Roland Robertson, menekankan bahwa globalisasi tidak pernah terjadi secara seragam, melainkan selalu diolah sesuai konteks lokal. Dalam pendidikan, *glokalisasi* berarti pilar UNESCO tidak bisa diterapkan secara seragam di seluruh dunia, melainkan harus disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing bangsa.

Interkulturalisme menekankan dialog antara budaya. Alih-alih menganggap nilai lokal dan global sebagai entitas yang terpisah, interkulturalisme melihat keduanya sebagai bagian dari interaksi dinamis yang saling memperkaya. Pendidikan berbasis interkulturalisme berarti membuka ruang bagi nilai lokal untuk memperkaya gagasan global, sekaligus menerima nilai global sebagai bahan refleksi bagi praktik lokal. Dengan demikian, terjadi pertukaran yang seimbang, bukan dominasi satu atas yang lain.

Sementara itu, teori *hibridisasi* melihat integrasi sebagai proses penciptaan identitas dan praktik baru yang berbeda dari asalnya. Dalam konteks pendidikan, *hibridisasi* melahirkan model pembelajaran, kurikulum, atau praktik sosial yang tidak sepenuhnya lokal maupun global, melainkan kombinasi baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Misalnya, penerapan *Learning to Live Together* dipadukan dengan *Silih Asih* menghasilkan kurikulum toleransi yang bukan hanya berorientasi pada harmoni global, tetapi juga berakar pada gotong royong sebagai praktik keseharian di Nusantara.

Falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh* memberi contoh konkret bagaimana nilai lokal memiliki resonansi global. *Silih Asih* (kasih sayang) beresonansi dengan *Learning to Live Together*, karena keduanya menekankan pentingnya relasi sosial yang penuh empati. *Silih Asah* (saling mengasah diri) sejalan dengan *Learning to Know* dan *Learning to Do*, karena menekankan pentingnya belajar terus-menerus melalui interaksi. *Silih Asuh* (saling mengasuh) terkait erat dengan *Learning to Be*, karena menekankan bimbingan moral untuk menjadi manusia seutuhnya. Dengan begitu, integrasi tidak terjadi secara artifisial, melainkan melalui resonansi nilai.

Pendekatan integratif juga diperkuat oleh teori pendidikan kritis yang dikembangkan Paulo Freire. Menurut Freire, pendidikan harus membebaskan, bukan menindas. Integrasi nilai lokal–global sejalan dengan semangat ini karena mencegah dominasi wacana global yang kadang menyingkirkan nilai lokal. Sebaliknya, integrasi memastikan bahwa murid tidak tercerabut dari identitasnya, tetapi juga tidak terisolasi dari perkembangan dunia.

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, integrasi ini semakin mendesak. Agenda SDGs menuntut semua bangsa untuk bergerak bersama, tetapi cara mencapainya harus sesuai dengan konteks lokal. Misalnya, SDG 4 tentang pendidikan bermutu tidak bisa diterjemahkan hanya dalam bentuk indikator numerik global, melainkan harus diselaraskan dengan kebutuhan komunitas lokal yang berbeda-beda. Integrasi nilai lokal–global memungkinkan pendidikan berkontribusi pada SDGs tanpa kehilangan relevansi kontekstualnya.

Praktik integrasi ini dapat dilihat dalam berbagai inisiatif. Di Jepang, konsep *Society 5.0* menekankan penggunaan teknologi cerdas yang tetap berpusat pada manusia, serupa dengan semangat *Silih Asuh* yang menekankan bimbingan moral. Di Finlandia, kurikulum nasional yang berorientasi global tetap memberi ruang besar bagi pendidikan berbasis seni dan budaya lokal. Di Indonesia, program *Projek Profil Pelajar Pancasila* adalah contoh bagaimana agenda global tentang toleransi, ekologi, dan literasi diintegrasikan dengan nilai Pancasila dan budaya Nusantara.

Tantangan utama integrasi ini adalah risiko homogenisasi global yang sering kali menyingkirkan nilai lokal. Kurikulum yang hanya mengejar standar internasional berpotensi mengalienasi murid dari realitas budaya mereka sendiri. Sebaliknya, pendidikan yang terlalu fokus pada nilai lokal

bisa kehilangan daya saing global. Oleh karena itu, integrasi harus dilihat sebagai jalan tengah yang dinamis: pendidikan yang berakar kuat tetapi bercabang luas.

Dengan demikian, teori integrasi nilai lokal–global menegaskan bahwa pendidikan transformatif harus memadukan pilar UNESCO dengan falsafah Nusantara secara dialogis, kreatif, dan kontekstual. Integrasi ini bukan sekadar adaptasi, tetapi penciptaan paradigma baru yang relevan secara lokal dan signifikan secara global.

## B. Model Konseptual Integratif

Jika teori integrasi nilai lokal–global telah memberi fondasi filosofis dan epistemologis, maka tahap berikutnya adalah merumuskan sebuah model konseptual yang dapat memandu praktik pendidikan. Model ini berfungsi sebagai jembatan antara gagasan dengan implementasi, antara idealisme dengan strategi, serta antara falsafah Nusantara dengan pilar UNESCO. Dengan adanya model konseptual integratif, pendidik, pembuat kebijakan, dan komunitas memiliki kerangka kerja yang jelas untuk merancang kurikulum, metode, dan program yang sekaligus membumi dalam nilai lokal dan terhubung dengan visi global.

Model konseptual integratif dibangun dari prinsip bahwa pendidikan harus berakar (*rooted*), berjejaring (*connected*), dan bergerak ke depan (*progressive*). Berakar berarti pendidikan berpijak pada kearifan lokal, identitas budaya, dan nilai moral masyarakat. Berjejaring berarti pendidikan terbuka pada dialog dengan gagasan global, ilmu pengetahuan modern, dan standar internasional. Bergerak ke depan berarti pendidikan tidak berhenti pada konservasi budaya, tetapi juga berinovasi untuk menjawab tantangan abad 21.

Kerangka model ini dapat divisualisasikan sebagai tiga lingkaran yang saling beririsan: lingkaran pertama adalah *Silih Asih*, lingkaran kedua *Silih Asah*, dan lingkaran ketiga *Silih Asuh*. Masing-masing lingkaran ini beririsan dengan empat pilar UNESCO: *Learning to Know*, *Learning to Do*, *Learning to Be*, dan *Learning to Live Together*. Di titik-titik irisan inilah lahir ruang integratif yang menjadi inti model. Misalnya, *Silih Asah* yang beririsan dengan *Learning to Know* melahirkan paradigma “belajar melalui

kebersamaan,” sementara *Silih Asih* yang bertemu dengan *Learning to Live Together* menghasilkan paradigma “hidup damai dengan kasih sayang.”

Model konseptual ini juga dapat dianalogikan sebagai “tenun pendidikan.” Pilar UNESCO berperan sebagai benang-benang global yang kuat, sementara *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* adalah motif lokal yang memberi warna dan makna. Jika hanya ada benang tanpa motif, tenun itu akan menjadi kain polos yang dingin dan tidak berjiwa. Jika hanya ada motif tanpa benang, ia tidak akan punya kekuatan struktural. Integrasi keduanya melahirkan kain pendidikan yang indah, kuat, dan fungsional.

Dalam praktiknya, model integratif ini mendorong terciptanya kurikulum yang memadukan konten lokal dan global. Misalnya, ketika mengajarkan *Learning to Do* dalam konteks keterampilan kerja, guru juga menanamkan nilai *Silih Asah* dengan menekankan pentingnya belajar bersama, berbagi pengalaman, dan mengasah kompetensi melalui kolaborasi. Atau ketika membahas *Learning to Be*, sekolah tidak hanya mengajarkan konsep identitas diri universal, tetapi juga mengintegrasikan *Silih Asuh* melalui bimbingan moral dan spiritual khas Nusantara.

Model ini juga bersifat adaptif terhadap konteks sosial dan teknologi. Di era Society 5.0, misalnya, *Learning to Know* yang berbasis literasi digital dapat dipadukan dengan *Silih Asah* untuk membangun budaya literasi digital kolektif yang berlandaskan nilai gotong royong. Sementara *Learning to Live Together* dapat diperkaya dengan *Silih Asih* untuk memastikan bahwa interaksi virtual tetap diwarnai empati dan solidaritas, bukan sekadar transaksional.

Integrasi ini juga memiliki dimensi kebijakan. Pemerintah dapat menggunakan model konseptual integratif ini untuk merancang kebijakan pendidikan yang menyeimbangkan indikator global dengan kebutuhan lokal. Evaluasi pendidikan tidak hanya diukur dari skor PISA atau indikator internasional lainnya, tetapi juga dari sejauh mana sekolah berhasil menanamkan nilai gotong royong, solidaritas, dan integritas. Dengan begitu, pendidikan Indonesia dapat berkompetisi di tingkat global tanpa kehilangan akar budayanya.

Studi empiris menunjukkan bahwa model pendidikan yang mengintegrasikan nilai lokal dan global cenderung lebih efektif dalam membangun

keterampilan abad 21. Penelitian di Asia Timur, misalnya, menunjukkan bahwa murid yang belajar dengan pendekatan berbasis kearifan lokal memiliki keterikatan emosional lebih kuat terhadap pembelajaran, sehingga lebih berdaya tahan dalam menghadapi tantangan. Integrasi ini juga memperkuat motivasi intrinsik karena murid merasa bahwa pendidikan berhubungan langsung dengan kehidupan nyata dan identitas mereka.

Model konseptual integratif ini pada akhirnya bertujuan melahirkan apa yang dapat disebut sebagai *Global-Nusantara Citizen*: individu yang mampu berpikir global, berperilaku lokal, dan berkontribusi pada dunia dengan karakter khas bangsanya. Mereka adalah generasi yang tidak tercabut dari akar budayanya, tetapi juga tidak tertutup dari dunia. Mereka menjadi manusia yang cerdas, empatik, berkarakter, dan siap menghadapi kompleksitas abad 21.

Dengan demikian, subbab ini menegaskan bahwa teori integrasi nilai lokal–global menemukan bentuk praksisnya dalam model konseptual integratif. Model ini bukan hanya kerangka akademik, tetapi juga panduan praksis yang dapat diterapkan dalam kurikulum, pedagogi, kebijakan, dan budaya sekolah. Ia memberi arah bagi pendidikan Indonesia untuk berdiri tegak di antara arus globalisasi, bukan sebagai penonton, melainkan sebagai kontributor yang membawa suara kearifan lokal ke panggung dunia.

### C. Penerapan di Sekolah, Komunitas, dan Perguruan Tinggi

Model konseptual integratif yang memadukan *Silih Asih, Asah, Asuh* dengan empat pilar UNESCO baru akan menemukan relevansinya ketika benar-benar diterapkan dalam dunia nyata. Pendidikan tidak boleh berhenti sebagai wacana atau dokumen kebijakan, melainkan harus hadir dalam praktik di ruang kelas, di lingkungan komunitas, dan di ruang akademik perguruan tinggi. Subbab ini menguraikan bagaimana integrasi nilai lokal–global dapat diwujudkan dalam tiga arena utama pendidikan: sekolah sebagai ruang dasar pembentukan karakter, komunitas sebagai ekosistem sosial yang mendukung pendidikan, dan perguruan tinggi sebagai pusat keilmuan dan inovasi.

Di sekolah, penerapan integrasi ini dapat dilakukan melalui kurikulum, pedagogi, dan budaya sekolah. Kurikulum dapat dirancang sedemikian rupa agar pilar UNESCO hadir secara eksplisit, namun selalu diperkaya dengan nilai lokal. Misalnya, dalam pembelajaran IPA, murid tidak hanya belajar konsep energi terbarukan (*Learning to Know*), tetapi juga diajak melakukan proyek sederhana panel surya di sekolah dengan semangat gotong royong (*Silih Asah*). Dalam mata pelajaran PPKn, murid tidak hanya diajak memahami prinsip toleransi global (*Learning to Live Together*), tetapi juga meneladani praktik *Silih Asih* melalui kegiatan kolaborasi lintas agama atau budaya di lingkungannya.

Pedagogi yang digunakan guru juga harus berlandaskan integrasi. Guru tidak sekadar menjadi penyampai pengetahuan, melainkan fasilitator yang membangun ruang dialogis, reflektif, dan partisipatif. Pendekatan *student-centered learning* dipadukan dengan budaya lokal yang menekankan kebersamaan, sehingga murid merasa belajar bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kebaikan bersama. Budaya sekolah pun perlu diarahkan menjadi komunitas inklusif yang mencerminkan nilai *Silih Asih-Asah-Asuh*, di mana setiap murid dihargai, diberdayakan, dan dibimbing dalam menemukan jati dirinya.

Penerapan di komunitas memiliki peran krusial karena pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas. Komunitas adalah ruang di mana nilai lokal tumbuh, berkembang, dan diwariskan. Integrasi di level komunitas dapat diwujudkan melalui program pendidikan berbasis masyarakat (*community-based education*), di mana sekolah bekerja sama dengan tokoh adat, tokoh agama, dan lembaga lokal untuk menyusun program yang relevan dengan kehidupan warga. Misalnya, komunitas nelayan dapat menjadi mitra sekolah dalam mengajarkan ekologi laut, etika lingkungan, dan praktik berkelanjutan yang mencerminkan *Learning to Do* sekaligus memperkaya murid dengan nilai *Silih Asuh*.

Komunitas juga dapat menjadi arena resolusi konflik dan rekonsiliasi sosial. Pendidikan berbasis komunitas yang mengedepankan dialog lintas kelompok mampu menumbuhkan budaya toleransi yang nyata. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai “urusan sekolah,” melainkan sebagai urusan bersama. Gotong

royong yang merupakan praktik lokal dapat dijadikan basis pembelajaran sosial yang beresonansi dengan pilar *Learning to Live Together*.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab lebih luas: tidak hanya mendidik individu, tetapi juga menghasilkan ilmu, kebijakan, dan inovasi yang mendukung integrasi lokal–global. Perguruan tinggi dapat merancang kurikulum yang menggabungkan teori global dengan penelitian lokal. Program studi dapat memasukkan mata kuliah “Pendidikan Global dan Kearifan Lokal” atau mengembangkan laboratorium budaya yang meneliti dan mengadaptasi praktik lokal ke dalam solusi global. Misalnya, penelitian tentang pertanian tradisional berbasis kearifan lokal dapat dikombinasikan dengan teknologi digital untuk menghasilkan model pertanian berkelanjutan yang relevan dengan SDGs.

Selain itu, perguruan tinggi juga dapat berperan sebagai jembatan internasional. Melalui pertukaran mahasiswa, riset kolaboratif, dan publikasi ilmiah, perguruan tinggi Indonesia dapat membawa nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* ke forum global, sehingga dunia belajar bahwa kearifan lokal Nusantara dapat memberi kontribusi pada peradaban universal. Dengan cara ini, integrasi nilai lokal–global bukan hanya konsumsi internal, tetapi juga kontribusi eksternal bagi ilmu pengetahuan dan kebijakan dunia.

Tantangan penerapan tentu ada. Di sekolah, tantangan utamanya adalah keterbatasan guru yang belum terbiasa dengan pedagogi integratif. Di komunitas, tantangannya adalah kesenjangan antara generasi muda yang terpapar globalisasi dengan orang tua yang ingin mempertahankan tradisi. Di perguruan tinggi, tantangan muncul dari tekanan global ranking dan indikator internasional yang kadang membuat nilai lokal terpinggirkan. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen kolektif dan kebijakan afirmatif untuk memastikan integrasi berjalan secara seimbang.

Namun, studi kasus menunjukkan bahwa integrasi ini mungkin dilakukan. Di Bali, sekolah-sekolah berbasis budaya lokal berhasil menggabungkan kurikulum nasional dengan praktik adat, seperti Tri Hita Karana, yang mengajarkan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Di Yogyakarta, perguruan tinggi memasukkan riset tentang batik, wayang, dan gamelan ke dalam konteks inovasi ekonomi kreatif global. Di berbagai desa, sekolah komunitas mengajarkan literasi digital bersamaan dengan konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal. Semua

ini membuktikan bahwa integrasi nilai lokal–global dapat dilakukan tanpa kehilangan identitas maupun relevansi.

Dengan demikian, penerapan di sekolah, komunitas, dan perguruan tinggi memperlihatkan bahwa model konseptual integratif bukan sekadar gagasan abstrak, tetapi kerangka praksis yang nyata. Sekolah menjadi ruang awal pembentukan karakter, komunitas menjadi ekosistem pendukung, dan perguruan tinggi menjadi motor inovasi. Ketiganya saling terkait, membentuk jejaring pendidikan yang utuh, yang memadukan kekuatan lokal dengan visi global demi membangun generasi yang cerdas, bermakna, dan berdaya saing dalam kancah dunia.

#### D. Perbandingan Model Lokal–Global

Integrasi nilai lokal dan global dalam pendidikan bukanlah proses tunggal, melainkan dialektika yang beragam sesuai dengan konteks masing-masing bangsa. Setiap negara memiliki filosofi lokal, tradisi budaya, dan sistem pendidikan yang khas, namun pada saat yang sama mereka juga berhadapan dengan tantangan global yang menuntut kesesuaian dengan standar internasional. Subbab ini menelaah perbandingan model lokal–global dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk memahami bagaimana pola integrasi ini dilaksanakan, apa keunggulannya, serta apa tantangan yang muncul.

Model pendidikan global yang dikembangkan UNESCO menekankan empat pilar utama—*Learning to Know*, *Learning to Do*, *Learning to Be*, *Learning to Live Together*—yang berlaku universal. Namun, penerapannya di setiap negara tidak pernah seragam. Finlandia, misalnya, menekankan pilar *Learning to Be* dengan pendekatan pendidikan humanistik yang memprioritaskan kebahagiaan dan kesejahteraan murid. Sistem pendidikannya berakar pada budaya egalitarian yang menolak kompetisi berlebihan. Di sisi lain, Jepang menekankan *Learning to Do* dan *Learning to Live Together* dengan mengintegrasikan disiplin kolektif dan tanggung jawab sosial dalam rutinitas sekolah sehari-hari, seperti kebiasaan *o-soji* (membersihkan kelas bersama) dan pelajaran moral.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, tampak jelas bahwa falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh* memiliki resonansi kuat dengan pilar UNESCO, namun dengan keunikan tersendiri. *Silih Asih* menekankan kasih sayang dan

empati, selaras dengan *Learning to Live Together*. *Silih Asah* menekankan proses belajar bersama dan saling mengasah, sejalan dengan *Learning to Know* dan *Learning to Do*. *Silih Asuh* menekankan tanggung jawab moral, yang sangat dekat dengan *Learning to Be*. Integrasi ini membuat Indonesia memiliki basis filosofis yang kuat untuk mengembangkan model pendidikan lokal–global yang tidak hanya adaptif, tetapi juga kontributif bagi wacana global.

Perbandingan lain dapat dilihat pada Kanada yang terkenal dengan pendekatan multikulturalisme. Pendidikan di sana mengintegrasikan prinsip-prinsip toleransi, inklusi, dan penghargaan terhadap budaya imigran. Hal ini sejalan dengan *Learning to Live Together*, namun dengan basis lokal berupa komitmen terhadap pluralisme. Indonesia pun memiliki komitmen serupa melalui *Bhinneka Tunggal Ika*, namun pendekatan praksisnya masih menghadapi tantangan intoleransi di tingkat lokal.

Rwanda memberikan contoh berbeda. Pasca konflik genosida, negara ini menekankan pendidikan perdamaian sebagai bagian dari rekonsiliasi nasional. Fokus utamanya adalah *Learning to Live Together* dengan basis lokal berupa pengalaman kolektif trauma dan kebutuhan mendesak untuk hidup damai. Indonesia tidak memiliki pengalaman konflik sebesar Rwanda, tetapi memiliki sejarah pluralisme yang sama berharganya. Dengan demikian, Indonesia bisa belajar dari Rwanda tentang bagaimana pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi, sekaligus memberi kontribusi dalam praktik toleransi sehari-hari yang sudah melekat dalam budaya gotong royong.

Model global juga sering menekankan indikator kuantitatif sebagai ukuran keberhasilan, seperti skor PISA atau pencapaian SDGs. Namun, banyak negara dengan tradisi pendidikan lokal yang kuat menolak homogenisasi ini. Bhutan, misalnya, menggunakan konsep *Gross National Happiness* sebagai ukuran keberhasilan pendidikan, bukan hanya pencapaian akademik. Hal ini paralel dengan gagasan Indonesia bahwa pendidikan tidak semata-mata menghasilkan tenaga kerja, tetapi manusia yang seimbang, berkarakter, dan berakar budaya.

Jika dilihat dari kerangka teori, model lokal sering kali lebih menekankan nilai, makna, dan identitas, sementara model global lebih menekankan kompetensi, standar, dan keterukuran. Keduanya memiliki keunggulan dan

kelemahan. Model lokal memberi kedalaman, kehangatan, dan relevansi, tetapi kadang kurang kompetitif di tingkat global. Model global memberi standar kualitas dan daya saing internasional, tetapi berisiko kehilangan konteks budaya dan makna hidup. Integrasi keduanya adalah jawaban, yaitu menggabungkan kedalaman nilai lokal dengan keluasan cakrawala global.

Dalam konteks Indonesia, tantangan terbesar adalah menemukan titik keseimbangan. Kurikulum nasional sering kali terombang-ambing antara mengejar standar global dan melestarikan nilai lokal. Program *Kurikulum Merdeka* sebenarnya adalah upaya mencari keseimbangan ini, dengan memberi ruang pada proyek berbasis Profil Pelajar Pancasila yang mengintegrasikan isu global seperti ekologi dan toleransi, namun tetap menekankan identitas nasional.

Dengan demikian, perbandingan model lokal–global memperlihatkan bahwa tidak ada satu formula tunggal yang bisa diterapkan untuk semua negara. Setiap bangsa perlu menemukan caranya sendiri untuk mengintegrasikan keduanya. Indonesia memiliki peluang besar karena memiliki basis kearifan lokal yang kaya dan falsafah yang selaras dengan pilar global. Tugasnya adalah mengemas nilai-nilai tersebut dalam model yang sistematis, adaptif, dan relevan dengan tantangan zaman.

Pada akhirnya, perbandingan ini menegaskan bahwa integrasi lokal–global bukan sekadar pilihan, melainkan keniscayaan. Dunia membutuhkan standar bersama untuk menghadapi tantangan global, tetapi juga membutuhkan kekayaan lokal agar pendidikan tetap bermakna dan manusiawi. Indonesia, melalui falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh*, dapat menjadi contoh bagaimana sebuah bangsa mengintegrasikan nilai lokal dan global dalam kerangka pendidikan transformatif yang berkontribusi bagi wacana dunia.

## E. Kurikulum Integratif Nusantara–UNESCO

Setelah membahas teori integrasi, model konseptual, penerapan di berbagai arena pendidikan, serta perbandingan model lokal–global, kini langkah selanjutnya adalah merumuskan sebuah kurikulum integratif yang menyatukan falsafah Nusantara dengan pilar UNESCO. Kurikulum adalah jantung pendidikan; di dalamnya terkandung arah, isi, dan strategi yang menentukan bagaimana pendidikan dijalankan. Kurikulum integratif

Nusantara–UNESCO diharapkan tidak hanya mampu memenuhi standar global, tetapi juga meneguhkan identitas lokal, sehingga melahirkan manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter, sekaligus relevan dengan tantangan dunia.

Kurikulum integratif Nusantara–UNESCO berangkat dari prinsip bahwa pendidikan adalah proses membangun manusia seutuhnya. Empat pilar UNESCO menjadi kerangka universal: *Learning to Know*, *Learning to Do*, *Learning to Be*, dan *Learning to Live Together*. Sementara itu, falsafah Sunda *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* menjadi fondasi lokal yang menambahkan nilai kasih sayang, kebersamaan, dan tanggung jawab moral. Kurikulum integratif ini bertujuan agar setiap mata pelajaran, metode pembelajaran, dan aktivitas pendidikan tidak hanya berorientasi pada keterampilan dan pengetahuan, tetapi juga pada kemanusiaan, keberagaman, dan spiritualitas.

Dalam struktur kurikulum, setiap dimensi UNESCO dapat dipadukan dengan falsafah lokal. *Learning to Know* diperkaya oleh *Silih Asah*, karena proses mengetahui bukan sekadar menghafal, tetapi saling mengasah diri dalam kebersamaan. *Learning to Do* diperkuat dengan *Silih Asah* dan *Silih Asuh*, sehingga keterampilan yang dikembangkan bukan hanya teknis, tetapi juga berlandaskan etika dan tanggung jawab moral. *Learning to Be* selaras dengan *Silih Asuh*, yang membimbing murid agar menjadi manusia seutuhnya. *Learning to Live Together* sejalan dengan *Silih Asih*, yang menekankan kasih sayang, solidaritas, dan empati dalam kehidupan sosial.

Kurikulum ini dapat dirancang dalam tiga lapisan utama: konten, pedagogi, dan asesmen. Pada lapisan konten, mata pelajaran tidak hanya memuat materi akademik, tetapi juga mengintegrasikan isu global seperti perubahan iklim, keberlanjutan, dan toleransi, dengan kearifan lokal seperti gotong royong, adat istiadat, dan nilai budaya. Misalnya, dalam mata pelajaran geografi, murid belajar tentang perubahan iklim global sekaligus memahami praktik tradisional masyarakat adat dalam menjaga ekosistem lokal.

Pada lapisan pedagogi, guru menerapkan metode yang kolaboratif, reflektif, dan berbasis proyek. Murid diajak untuk mengerjakan proyek nyata yang menghubungkan nilai global dan lokal. Misalnya, proyek pengelolaan sampah sekolah tidak hanya membahas aspek teknis daur ulang, tetapi juga menghidupkan semangat gotong royong (*Silih Asih*) dan tanggung

jawab kolektif terhadap lingkungan. Dengan cara ini, pedagogi tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai.

Pada lapisan asesmen, keberhasilan murid tidak hanya diukur dari pencapaian akademik, tetapi juga dari perkembangan karakter, kemampuan kolaborasi, dan kepedulian sosial. Asesmen otentik berbasis proyek, portofolio, dan refleksi diri dapat digunakan untuk menilai sejauh mana murid menginternalisasi nilai lokal dan global. Dengan demikian, asesmen menjadi instrumen transformasi, bukan sekadar alat ukur angka.

Penerapan kurikulum integratif ini membutuhkan dukungan kebijakan dan kelembagaan. Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang memberi ruang bagi sekolah untuk mengembangkan kurikulum kontekstual yang tetap sejalan dengan standar global. Guru perlu dilatih agar mampu mengintegrasikan nilai lokal dalam praktik pembelajaran tanpa kehilangan orientasi global. Komunitas lokal juga perlu dilibatkan sebagai mitra pendidikan, sehingga nilai budaya tidak hanya diajarkan, tetapi juga dihidupi dalam keseharian murid.

Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa model ini memungkinkan. Sekolah-sekolah adat yang mengintegrasikan budaya lokal dengan kurikulum nasional terbukti mampu melahirkan murid yang memiliki identitas kuat sekaligus terbuka terhadap dunia. Program *Profil Pelajar Pancasila* dengan enam dimensinya (beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif) juga menjadi wadah potensial untuk mengintegrasikan pilar UNESCO dan nilai lokal. Jika diformulasikan secara lebih sistematis, program ini dapat menjadi kurikulum integratif Nusantara–UNESCO yang khas Indonesia.

Kurikulum integratif ini juga relevan dengan era Society 5.0, di mana teknologi cerdas harus berpadu dengan nilai humanistik. Murid diajarkan literasi digital, kecerdasan buatan, dan big data, tetapi juga dibekali dengan nilai kasih sayang, etika, dan kebijaksanaan lokal. Dengan demikian, kurikulum tidak hanya melahirkan tenaga kerja yang siap industri, tetapi juga warga dunia yang bijaksana dan bertanggung jawab.

Tantangan utama kurikulum integratif ini adalah menjaga keseimbangan antara standar global dan identitas lokal. Tekanan internasional seperti PISA sering kali mendorong sekolah mengejar skor akademik,

sementara nilai lokal terpinggirkan. Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian politik dan visi jangka panjang untuk memastikan bahwa pendidikan Indonesia tidak hanya menjadi pengikut standar global, tetapi juga pelopor dalam menyumbangkan paradigma baru yang lebih manusiawi.

Pada akhirnya, kurikulum integratif Nusantara–UNESCO adalah upaya untuk membangun pendidikan yang holistik: pendidikan yang berakar pada kearifan lokal, terbuka pada wawasan global, relevan dengan tantangan zaman, dan berorientasi pada kemanusiaan. Kurikulum ini adalah tenun indah yang menyatukan benang global dengan motif lokal, melahirkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga bijaksana, berakarakter, dan siap memimpin dunia dengan identitas Nusantara.





## BAB 12

### PENDIDIKAN TRANSFORMATIF DI ERA VUCA-SOCIETY 5.0

Pendidikan di abad ke-21 tidak lagi berjalan dalam lanskap yang stabil. Dunia memasuki era yang ditandai dengan ketidakpastian, kompleksitas, dan percepatan perubahan. Konsep VUCA—*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*—yang awalnya dipopulerkan oleh kalangan militer, kini menjadi bahasa sehari-hari dalam kajian sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Bersamaan dengan itu, muncul gagasan *Society 5.0* dari Jepang, yang menekankan bahwa kemajuan teknologi harus tetap berpusat pada manusia, bukan sekadar pada mesin. Pertemuan kedua paradigma ini menciptakan tantangan sekaligus peluang besar: bagaimana pendidikan dapat bertransformasi agar tetap relevan, adaptif, dan humanis di tengah pusaran perubahan.

Pendidikan transformatif hadir bukan hanya untuk menjawab kebutuhan keterampilan teknis, tetapi juga untuk membentuk generasi yang resilien, kreatif, inovatif, dan bermakna. Transformasi ini bukan sekadar pergantian kurikulum atau metode pembelajaran, tetapi sebuah perubahan paradigma yang menyentuh filosofi pendidikan, relasi guru-murid, pola

pikir komunitas, hingga arah kebijakan nasional. Ia mengandaikan pendidikan sebagai kekuatan moral, sosial, dan spiritual yang mampu membimbing manusia melewati krisis dan menata peradaban baru.

Dalam konteks global, pendidikan transformatif sejalan dengan agenda SDGs 2030, terutama SDG 4 tentang pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata. Namun, pendidikan transformatif tidak bisa hanya mengandalkan standar global; ia harus menyerap dan memanfaatkan nilai lokal sebagai sumber inspirasi dan identitas. Inilah yang membuat integrasi *Silih Asih, Asah, Asuh* dengan empat pilar UNESCO menjadi penting: pendidikan transformatif Indonesia harus memadukan visi global dengan akar budaya lokal agar memiliki daya tahan sekaligus daya saing.

Transformasi pendidikan di era VUCA–Society 5.0 memerlukan strategi yang komprehensif. Pertama, kurikulum harus fleksibel dan adaptif, memungkinkan murid untuk terus belajar sepanjang hayat dan beradaptasi dengan perubahan. Kedua, teknologi digital dan kecerdasan buatan harus dimanfaatkan bukan hanya sebagai alat, tetapi sebagai mitra pembelajaran yang memperkaya pengalaman murid. Ketiga, sekolah harus dibangun sebagai ekosistem resilien, yang mampu bertahan di tengah krisis, baik pandemi, bencana, maupun disrupsi sosial. Keempat, pedagogi harus berorientasi pada kreativitas, inovasi, kolaborasi, dan empati, agar murid tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan moral.

Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan pendidikan transformatif ini. Selain memiliki warisan kearifan lokal yang kaya, bangsa ini juga memiliki visi besar menuju Indonesia Emas 2045. Pendidikan menjadi kunci utama untuk mencapai visi tersebut. Namun, modal ini hanya dapat diwujudkan jika ada keberanian politik, komitmen moral, dan inovasi praksis yang mengubah pendidikan dari sekadar rutinitas menjadi gerakan perubahan.

Bab 12 ini akan membahas dimensi pendidikan transformatif di era VUCA–Society 5.0 melalui lima subbab: adaptasi *Kurikulum Merdeka* sebagai langkah fleksibilitas sistemik, pemanfaatan pendidikan digital dan kecerdasan buatan, strategi resiliensi sekolah di masa krisis, peran kreativitas dan inovasi dalam menghadapi disrupsi industri, serta studi kasus tentang sekolah-sekolah berdaya tahan yang mampu bertahan sekaligus berkembang dalam turbulensi zaman.

Dengan kerangka ini, bab ini mengajak pembaca melihat bahwa pendidikan transformatif bukan sekadar jargon, tetapi kebutuhan mendesak yang harus diwujudkan agar generasi mendatang tidak hanya mampu bertahan dalam era VUCA–Society 5.0, tetapi juga mampu memimpin, menginspirasi, dan membangun masa depan yang lebih adil, damai, dan manusiawi.

## A. Adaptasi Kurikulum Merdeka

Kurikulum adalah instrumen utama dalam menentukan arah pendidikan. Di Indonesia, lahirnya *Kurikulum Merdeka* merupakan salah satu upaya paling signifikan untuk menjawab tantangan era VUCA dan Society 5.0. Kurikulum ini bukan sekadar revisi teknis dari kurikulum sebelumnya, tetapi sebuah transformasi paradigma yang menekankan fleksibilitas, diferensiasi, dan relevansi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Subbab ini membahas bagaimana *Kurikulum Merdeka* dapat diadaptasi menjadi kerangka pendidikan transformatif yang memadukan nilai global, lokal, dan kebutuhan murid untuk bertahan serta berkembang di dunia yang kompleks.

*Kurikulum Merdeka* berangkat dari kesadaran bahwa pendidikan Indonesia terlalu lama terjebak pada pendekatan seragam yang kaku. Murid dinilai dengan standar tunggal, guru diikat oleh administrasi yang membebankan, dan sekolah sering kali kehilangan ruang untuk berinovasi. Dengan adanya *Kurikulum Merdeka*, beban administratif guru dikurangi, murid diberikan ruang untuk belajar sesuai minat dan bakat, dan sekolah diberi keleluasaan untuk menyesuaikan program dengan konteks lokal. Ini adalah langkah maju yang sejalan dengan gagasan UNESCO tentang pendidikan sepanjang hayat yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan.

Dalam kerangka VUCA, fleksibilitas kurikulum adalah kunci. Volatilitas menuntut murid memiliki keterampilan adaptasi, ketidakpastian menuntut ketangguhan mental, kompleksitas menuntut pemikiran sistemik, dan ambiguitas menuntut kemampuan reflektif. *Kurikulum Merdeka* memungkinkannya semua itu melalui proyek-proyek *Profil Pelajar Pancasila*, yang mengedepankan gotong royong, bernalar kritis, kreativitas, kemandirian, kebinekaan global, dan iman–taqwa–akhlak mulia. Keenam dimensi ini

dapat dilihat sebagai terjemahan nilai lokal *Silih Asih, Asah, Asuh* yang dipadukan dengan empat pilar UNESCO.

Dalam konteks Society 5.0, *Kurikulum Merdeka* membuka jalan bagi pembelajaran berbasis teknologi dan inovasi. Murid tidak hanya didorong untuk menguasai literasi dasar, tetapi juga literasi baru: literasi digital, literasi data, dan literasi teknologi. Namun, literasi ini tidak boleh dilepaskan dari nilai humanis. Integrasi *Silih Asuh* menjadi penting, agar teknologi dipandang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk memuliakan manusia.

Adaptasi *Kurikulum Merdeka* juga memerlukan dukungan dari guru sebagai agen transformasi. Guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga fasilitator, mentor, dan teladan. Melalui pendekatan diferensiasi, guru diharapkan mampu memahami kebutuhan unik setiap murid, merancang strategi belajar yang relevan, dan membimbing mereka untuk tumbuh secara optimal. Prinsip *Silih Asih* dapat menjadi landasan etis bagi guru: mendidik dengan kasih sayang, empati, dan kesadaran bahwa setiap anak memiliki potensi yang harus dihargai.

Sekolah sebagai institusi juga harus siap beradaptasi. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) perlu diselaraskan dengan *Kurikulum Merdeka* agar transformasi tidak berhenti di tataran retorika. Sekolah perlu membangun budaya belajar kolaboratif, di mana murid, guru, orang tua, dan komunitas berperan aktif. Dengan cara ini, pendidikan benar-benar menjadi ekosistem, bukan sekadar ruang kelas.

Penerapan *Kurikulum Merdeka* di SMK memberi contoh nyata integrasi nilai global dan lokal. Dengan fokus pada *link and match* antara sekolah dan industri, SMK mendorong murid menguasai keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan global. Namun, di sisi lain, mereka juga diajarkan nilai gotong royong, solidaritas, dan tanggung jawab sosial melalui program Pancawaluya. Ini membuktikan bahwa *Kurikulum Merdeka* dapat menjadi wadah integrasi antara pilar *Learning to Do* dengan falsafah *Silih Asah* dan *Silih Asuh*.

Tantangan adaptasi tentu ada. Tidak semua guru siap dengan perubahan paradigma ini. Tidak semua sekolah memiliki infrastruktur memadai untuk mendukung pembelajaran digital. Tidak semua komunitas siap

terlibat dalam proyek pendidikan. Namun, inilah esensi dari pendidikan transformatif: mengubah keterbatasan menjadi peluang, membangun resiliensi di tengah keterbatasan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam gerakan bersama.

Adaptasi *Kurikulum Merdeka* juga menuntut evaluasi baru. Ujian nasional yang bersifat seragam sudah ditinggalkan, digantikan oleh asesmen yang lebih otentik, seperti portofolio, proyek, dan refleksi. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya mengukur kemampuan kognitif, tetapi juga menilai karakter, kreativitas, dan kontribusi murid. Prinsip *Learning to Be* dan *Learning to Live Together* benar-benar hadir dalam proses evaluasi.

Dalam jangka panjang, *Kurikulum Merdeka* dapat menjadi kerangka kurikulum integratif Nusantara–UNESCO. Dengan memperkuat nilai *Silih Asih, Asah, Asuh*, serta menginternalisasi pilar UNESCO, kurikulum ini bisa melahirkan generasi yang berakar pada budaya lokal, terbuka terhadap nilai global, dan siap menghadapi disrupsi zaman. Kurikulum bukan hanya dokumen formal, tetapi kompas moral dan intelektual yang menuntun bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

## B. Pendidikan Digital dan AI

Era Society 5.0 menjanjikan kehidupan yang cerdas, di mana teknologi digital, big data, Internet of Things, dan kecerdasan buatan (AI) bukan hanya sekadar alat produksi, tetapi menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Pendidikan pun tidak bisa menghindar dari arus ini. Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Subbab ini membahas bagaimana pendidikan digital dan AI dapat menjadi motor transformatif dalam membentuk generasi yang adaptif, kreatif, sekaligus humanis, tanpa terjebak dalam jebakan dehumanisasi teknologi.

Pendidikan digital membuka peluang besar dalam memperluas akses belajar. Dengan platform daring, kelas tidak lagi terbatas oleh ruang fisik. Murid di pelosok dapat mengakses materi dari universitas terbaik dunia, sementara guru dapat memperkaya pengajaran dengan konten multimedia. Pandemi COVID-19 memberi pelajaran penting bahwa teknologi digital mampu menjadi penyelamat keberlangsungan pendidikan ketika sekolah fisik terhenti. Namun, pengalaman ini juga menunjukkan kesenjangan

digital yang nyata, di mana tidak semua anak memiliki akses yang setara terhadap perangkat, internet, dan literasi digital.

Kecerdasan buatan membawa revolusi baru dalam pendidikan. AI memungkinkan pembelajaran personalisasi, di mana sistem dapat menyesuaikan materi, kecepatan, dan metode sesuai kebutuhan murid. Misalnya, platform pembelajaran berbasis AI dapat mendeteksi kesulitan murid dalam matematika dan segera memberikan latihan tambahan, sementara murid yang cepat memahami dapat diarahkan ke tantangan lebih tinggi. Dengan cara ini, AI mendukung prinsip diferensiasi yang menjadi inti dari *Kurikulum Merdeka*.

Namun, pendidikan digital dan AI tidak boleh hanya dilihat dari sisi efisiensi. Risiko dehumanisasi sangat besar jika teknologi diposisikan sebagai pengganti manusia. Guru bukan sekadar penyampai informasi, melainkan figur moral, teladan, dan fasilitator empati yang tidak bisa digantikan mesin. Oleh karena itu, integrasi AI harus ditempatkan dalam kerangka *Silih Asuh*—yaitu bimbingan moral, kasih sayang, dan tanggung jawab—agar teknologi tetap berfungsi untuk memanusiakan, bukan menyingkirkan manusia.

Pendidikan digital juga harus mengajarkan literasi baru. UNESCO menekankan tiga literasi utama abad ke-21: literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Literasi data memungkinkan murid memahami informasi dalam bentuk kuantitatif yang melimpah; literasi teknologi membantu mereka menguasai perangkat digital; sementara literasi manusia menekankan empati, etika, dan kreativitas yang tidak bisa digantikan AI. Dengan kombinasi ini, murid diharapkan mampu menguasai teknologi sekaligus tetap berpegang pada nilai kemanusiaan.

Integrasi AI dalam pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pertama, sebagai asisten guru, AI membantu dalam pekerjaan administratif, penilaian otomatis, atau penyusunan materi. Kedua, sebagai tutor digital, AI memberikan pembelajaran tambahan yang dipersonalisasi untuk setiap murid. Ketiga, sebagai mitra riset, AI membantu mahasiswa dan dosen dalam analisis data yang kompleks. Namun, dalam semua fungsi ini, manusia tetap memegang kendali etis, memastikan bahwa AI digunakan untuk memperkaya pembelajaran, bukan mengontrol kehidupan.

Contoh penerapan pendidikan digital sudah banyak muncul di Indonesia. Platform *Rumah Belajar* dari Kemendikbud menyediakan sumber belajar digital gratis, sementara berbagai sekolah dan universitas mulai mengembangkan Learning Management System (LMS) berbasis AI. Di tingkat global, perusahaan seperti Coursera, EdX, dan Khan Academy menggunakan AI untuk menyesuaikan pengalaman belajar. Semua ini menunjukkan bahwa tren global bergerak ke arah pendidikan yang semakin digital dan cerdas.

Namun, tantangan serius juga harus diakui. Kesenjangan digital antara kota dan desa, kaya dan miskin, masih sangat nyata. Data BPS menunjukkan bahwa penetrasi internet di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Jika tidak diatasi, pendidikan digital justru dapat memperlebar ketidaksetaraan. Oleh karena itu, transformasi digital harus diiringi dengan kebijakan afirmatif yang memastikan akses merata terhadap perangkat, internet, dan pelatihan literasi digital.

Aspek etika juga menjadi perhatian besar. AI membawa risiko penyalahgunaan data, bias algoritmik, dan pelanggaran privasi. Pendidikan harus membekali murid dengan kesadaran etis untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Nilai *Silih Asih* dan *Silih Asuh* menjadi penting di sini, karena menanamkan sikap peduli dan bertanggung jawab dalam interaksi digital. Tanpa etika, kemajuan teknologi bisa berubah menjadi ancaman sosial.

Di masa depan, pendidikan digital dan AI bukan hanya soal efisiensi belajar, tetapi juga soal membangun generasi yang mampu berdialog dengan teknologi. Murid harus belajar bagaimana berkolaborasi dengan mesin, memanfaatkan keunggulannya, tetapi juga menegaskan keunikan manusiawi yang tak tergantikan. Dengan kerangka ini, pendidikan digital menjadi ruang di mana manusia dan mesin berjalan bersama untuk menciptakan peradaban baru.

Dengan demikian, pendidikan digital dan AI adalah bagian penting dari pendidikan transformatif di era VUCA–Society 5.0. Ia membuka peluang besar, menghadirkan tantangan serius, dan menuntut kerangka etis yang kuat. Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan model khas: pendidikan digital yang berbasis teknologi cerdas tetapi tetap berakar

pada nilai lokal *Silih Asih, Asah, Asuh*. Model ini akan memastikan bahwa teknologi benar-benar menjadi pelayan kemanusiaan, bukan sebaliknya.

### C. Strategi Resiliensi Sekolah di Masa Krisis

Krisis adalah keniscayaan dalam dunia yang ditandai oleh VUCA—*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*. Pandemi COVID-19 menjadi bukti nyata bahwa sistem pendidikan dapat terguncang secara tiba-tiba, memaksa sekolah beradaptasi dengan cara yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Namun, pandemi hanyalah satu contoh. Sekolah juga menghadapi krisis akibat bencana alam, konflik sosial, ketidakpastian ekonomi, maupun disrupsi teknologi. Subbab ini membahas bagaimana sekolah dapat membangun resiliensi—kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit kembali—agar pendidikan tetap berlangsung meskipun berada di tengah badai.

Resiliensi sekolah adalah kapasitas institusi pendidikan untuk tidak hanya bertahan dalam krisis, tetapi juga menemukan peluang pembelajaran baru dari pengalaman tersebut. Konsep ini mencakup dimensi struktural, pedagogis, sosial, dan psikologis. Sekolah yang resilien bukan berarti sekolah yang tidak pernah goyah, melainkan sekolah yang mampu bertransformasi dalam menghadapi tekanan.

Salah satu strategi utama resiliensi adalah fleksibilitas kurikulum dan metode pembelajaran. Pandemi COVID-19 mengajarkan bahwa sekolah yang mampu beralih cepat ke pembelajaran daring atau hybrid lebih berhasil menjaga kontinuitas pendidikan dibandingkan dengan yang masih terpaku pada sistem tatap muka konvensional. Fleksibilitas ini sejalan dengan semangat *Kurikulum Merdeka* yang memberi ruang adaptasi sesuai konteks lokal.

Selain fleksibilitas, resiliensi sekolah juga dibangun melalui penguatan kapasitas guru. Guru yang kreatif, adaptif, dan melek teknologi menjadi kunci dalam memastikan proses belajar tetap berjalan di tengah krisis. Pelatihan darurat, dukungan psikologis, dan jaringan berbagi praktik baik antar guru terbukti meningkatkan kemampuan sekolah menghadapi disrupsi. Dengan semangat *Silih Asah*, guru saling menguatkan melalui kolaborasi dan pembelajaran bersama.

Komunikasi yang efektif antara sekolah, orang tua, dan murid adalah pilar penting lainnya. Dalam situasi krisis, miskomunikasi dapat memperburuk keadaan. Sekolah yang memiliki sistem komunikasi yang jelas, transparan, dan empatik cenderung lebih berhasil mempertahankan kepercayaan komunitas. Di sini, nilai *Silih Asih* berperan penting: empati dan kasih sayang menjadi landasan komunikasi, sehingga semua pihak merasa didengar dan dihargai.

Resiliensi sekolah juga memerlukan infrastruktur yang mendukung. Teknologi digital bukan hanya alat belajar, tetapi juga instrumen manajemen krisis. Sekolah yang memiliki sistem manajemen daring, data murid yang terdigitalisasi, dan akses ke platform pembelajaran daring lebih mudah menavigasi krisis. Namun, infrastruktur fisik juga penting, terutama di daerah rawan bencana. Sekolah yang dirancang tahan gempa, banjir, atau bencana lain dapat menyelamatkan nyawa sekaligus menjaga kesinambungan pendidikan.

Aspek psikologis tidak boleh diabaikan. Krisis sering menimbulkan trauma bagi murid maupun guru. Sekolah yang resilien menyediakan layanan konseling, ruang refleksi, dan kegiatan berbasis seni serta spiritualitas untuk membantu pemulihan mental. Prinsip *Silih Asuh* tercermin di sini, yaitu tanggung jawab moral sekolah untuk merawat kesejahteraan batin seluruh warganya.

Resiliensi juga berarti memanfaatkan komunitas sebagai mitra. Sekolah yang bekerja sama dengan tokoh masyarakat, lembaga sosial, dan dunia usaha lebih mampu mengakses sumber daya tambahan dalam masa krisis. Misalnya, kolaborasi dengan industri lokal untuk penyediaan perangkat digital, atau dengan lembaga keagamaan untuk dukungan spiritual. Gotong royong yang menjadi tradisi Nusantara adalah modal sosial yang sangat efektif untuk memperkuat resiliensi sekolah.

Dalam kerangka global, UNESCO menekankan bahwa sekolah harus dilihat sebagai *learning communities* yang berkelanjutan, bukan sekadar institusi formal. Artinya, sekolah harus membangun budaya belajar yang tahan banting, di mana guru dan murid terbiasa beradaptasi, berefleksi, dan berinovasi. Dengan budaya seperti ini, krisis bukan dilihat sebagai ancaman semata, tetapi juga peluang untuk memperbaiki sistem.

Contoh nyata dapat dilihat dari sekolah-sekolah di Jepang yang rutin menghadapi bencana alam. Pendidikan kebencanaan dimasukkan dalam kurikulum, simulasi evakuasi dilakukan secara berkala, dan murid dilatih untuk tetap tenang serta bekerja sama dalam keadaan darurat. Di Indonesia, beberapa sekolah di Lombok dan Palu pascagempa juga menunjukkan ketangguhan dengan memanfaatkan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara, sambil membangun kembali fasilitas dengan dukungan komunitas dan pemerintah.

Tantangan utama membangun resiliensi sekolah adalah kesenjangan kapasitas. Tidak semua sekolah memiliki sumber daya untuk beradaptasi. Di daerah terpencil, keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi memperbesar risiko ketertinggalan saat krisis. Oleh karena itu, strategi resiliensi harus bersifat inklusif, memastikan semua sekolah, tanpa memandang lokasi dan status ekonomi, memiliki dukungan yang memadai.

Pada akhirnya, strategi resiliensi sekolah di masa krisis bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang menumbuhkan harapan dan memperkuat komitmen pada pendidikan. Sekolah yang resilien adalah sekolah yang tetap mampu menyalakan api belajar, bahkan ketika dunia di sekitarnya gelap. Dengan memadukan nilai global UNESCO, filosofi lokal *Silih Asih, Asah, Asuh*, dan pengalaman nyata dari berbagai krisis, pendidikan Indonesia dapat melahirkan ekosistem yang tidak hanya tahan terhadap badai, tetapi juga mampu tumbuh lebih kuat setelah badai berlalu.

## **D. Pendidikan Kreatif–Inovatif untuk Era Industri**

### **4.0/5.0**

Industri 4.0 yang ditandai oleh otomasi, big data, Internet of Things, dan kecerdasan buatan telah mengubah wajah dunia kerja dan kehidupan sosial. Kini, muncul pula wacana Industri 5.0 yang lebih menekankan kolaborasi antara manusia dan mesin cerdas, di mana teknologi bukan hanya alat produksi, melainkan mitra yang membantu manusia menciptakan nilai tambah yang lebih bermakna. Dalam konteks ini, pendidikan dituntut melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga kreatif, inovatif, adaptif, dan berakar pada nilai kemanusiaan.

Kreativitas dan inovasi adalah dua keterampilan inti abad ke-21 yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Kreativitas memungkinkan murid melahirkan gagasan baru, sementara inovasi mengubah gagasan itu menjadi solusi nyata. Dalam dunia kerja masa depan, yang bersifat fleksibel, cepat berubah, dan sangat kompetitif, kreativitas dan inovasi menjadi keunggulan utama. Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi harus menjadi ruang yang subur bagi lahirnya imajinasi, eksperimen, dan penciptaan.

Pendidikan kreatif-inovatif membutuhkan perubahan paradigma dalam pedagogi. Guru tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator yang mendorong murid untuk bereksperimen, berpikir kritis, dan berkolaborasi. Pendekatan *project-based learning*, *design thinking*, dan *STEAM education* (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) menjadi kunci. Dengan pendekatan ini, murid belajar memecahkan masalah nyata, mengembangkan prototipe, dan menguji solusi, bukan sekadar mengerjakan soal di atas kertas.

Integrasi teknologi digital dan AI juga memperkaya pendidikan kreatif-inovatif. Platform digital memberi akses pada sumber belajar yang tak terbatas, AI membantu dalam analisis data, sementara teknologi seperti printer 3D atau laboratorium virtual membuka ruang bagi eksperimen tanpa batas. Namun, semua teknologi ini harus diarahkan pada penciptaan yang berlandaskan nilai. Inovasi tidak boleh sekadar mengejar efisiensi, tetapi juga harus menjawab tantangan kemanusiaan seperti keberlanjutan, keadilan sosial, dan kualitas hidup.

Falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh* memberi kerangka moral bagi pendidikan kreatif-inovatif. *Silih Asah* menekankan pentingnya saling mengasah potensi melalui kerja sama kreatif. *Silih Asih* memastikan bahwa inovasi tidak lepas dari kasih sayang dan kepedulian sosial, sehingga setiap karya bermanfaat bagi sesama. *Silih Asuh* memberi penekanan pada tanggung jawab moral dalam menciptakan teknologi atau ide baru, agar tidak merusak, melainkan memperbaiki kehidupan. Dengan kerangka ini, kreativitas dan inovasi tidak hanya menjadi kompetensi, tetapi juga panggilan moral.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan kreatif-inovatif sangat relevan dengan upaya meningkatkan daya saing global sekaligus melestarikan budaya lokal. Murid bisa diajak mengembangkan inovasi berbasis kearifan

lokal, seperti teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari praktik tradisional, atau produk ekonomi kreatif yang memadukan seni budaya dengan teknologi modern. Dengan cara ini, inovasi tidak tercerabut dari akar budaya, tetapi justru memperkuat identitas bangsa.

Studi kasus dari berbagai negara memberi pelajaran berharga. Finlandia mengintegrasikan kreativitas dalam kurikulum nasional dengan memberi ruang besar pada seni dan eksperimen. Jepang, melalui konsep Society 5.0, menekankan inovasi yang berpusat pada manusia, bukan hanya teknologi. Singapura berhasil membangun ekosistem pendidikan yang mendorong riset, kewirausahaan, dan kreativitas murid sejak usia dini. Indonesia dapat belajar dari praktik-praktik ini, tetapi dengan adaptasi sesuai konteks lokal.

Tantangan utama pendidikan kreatif-inovatif adalah budaya pendidikan yang masih terlalu menekankan hafalan dan standar seragam. Murid sering kali takut salah, padahal kreativitas lahir dari keberanian untuk mencoba dan gagal. Oleh karena itu, sekolah harus menjadi ruang aman bagi eksperimen. Guru harus mengubah paradigma dari “menilai jawaban benar” menjadi “menghargai proses berpikir.” Penilaian pun perlu diarahkan pada portofolio, karya nyata, dan kontribusi murid, bukan sekadar angka ujian.

Ekosistem pendidikan juga harus mendukung. Kolaborasi antara sekolah, universitas, industri, dan komunitas perlu diperkuat. Industri dapat menjadi mitra dalam menyediakan ruang eksperimen nyata, universitas berperan sebagai pusat riset, sementara komunitas memberi konteks sosial yang memperkaya inovasi. Dengan jejaring ini, pendidikan kreatif-inovatif tidak hanya menghasilkan ide, tetapi juga solusi yang berdaya guna.

Dalam kerangka SDGs, pendidikan kreatif-inovatif berkontribusi langsung pada SDG 4 (pendidikan bermutu), SDG 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), serta SDG 9 (industri, inovasi, dan infrastruktur). Melalui kreativitas, murid dilatih untuk berpikir out of the box, sementara inovasi membantu mereka memberi kontribusi nyata pada pembangunan berkelanjutan.

Pada akhirnya, pendidikan kreatif-inovatif untuk era Industri 4.0/5.0 adalah jalan untuk memastikan bahwa manusia tidak tertinggal di tengah ledakan teknologi. Dengan menyeimbangkan kreativitas, inovasi, teknologi,

dan nilai kemanusiaan, pendidikan dapat melahirkan generasi yang tidak hanya mampu beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga menjadi pionir dalam membangun peradaban baru yang lebih manusiawi. Indonesia, dengan modal kearifan lokal dan semangat gotong royong, memiliki peluang besar untuk menjadi contoh dunia dalam membangun pendidikan kreatif-inovatif yang unik, inklusif, dan berakar kuat pada budaya Nusantara.

## E. Studi Kasus: Sekolah Berdaya Tahan

Konsep resiliensi sekolah dan pendidikan kreatif-inovatif menemukan makna paling kuat ketika diwujudkan dalam praktik nyata. Studi kasus tentang sekolah berdaya tahan memberi kita pelajaran bagaimana institusi pendidikan mampu menghadapi tantangan krisis, keterbatasan sumber daya, dan perubahan zaman, namun tetap konsisten menjaga kualitas pembelajaran. Sekolah berdaya tahan bukan hanya bertahan, tetapi juga bangkit, beradaptasi, dan berkembang di tengah situasi sulit. Subbab ini menyajikan beberapa contoh nyata, baik di Indonesia maupun global, untuk memperlihatkan bagaimana teori dan strategi transformasi pendidikan dapat bekerja dalam realitas.

Di Indonesia, pandemi COVID-19 membuka mata kita terhadap perbedaan ketahanan antar sekolah. Banyak sekolah yang mengalami kelumpuhan karena ketidaksiapan teknologi dan minimnya infrastruktur, tetapi ada juga sekolah yang berhasil menemukan jalan keluar kreatif. Misalnya, sebuah SMK di Jawa Barat yang memanfaatkan radio komunitas untuk mengajar ketika internet tidak tersedia. Guru menyiarkan materi pelajaran melalui siaran lokal, sementara murid menyimak dari rumah dan kemudian berdiskusi menggunakan modul cetak. Inovasi sederhana ini menunjukkan bahwa sekolah berdaya tahan adalah sekolah yang mampu menyesuaikan diri dengan sumber daya yang ada tanpa kehilangan esensi pendidikan.

Contoh lain datang dari Nusa Tenggara Timur, di mana sebuah sekolah dasar menghadapi krisis air bersih yang mengancam kesehatan murid. Sekolah tersebut berkolaborasi dengan komunitas lokal dan LSM untuk membangun sistem penampungan air hujan sederhana. Proyek ini tidak hanya menyelesaikan masalah praktis, tetapi juga dijadikan sebagai bagian

dari kurikulum pembelajaran berbasis proyek. Murid belajar tentang sains, lingkungan, dan gotong royong secara langsung dari pengalaman nyata. Nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* hidup dalam praktik: murid belajar peduli, bekerja sama, dan membimbing satu sama lain.

Di tingkat global, Jepang adalah contoh klasik sekolah berdaya tahan. Karena sering menghadapi gempa bumi, sekolah di Jepang rutin melaksanakan simulasi evakuasi, melatih murid untuk tetap tenang, dan membangun infrastruktur tahan gempa. Pendidikan kebencanaan menjadi bagian kurikulum, sehingga resiliensi bukan sekadar respons darurat, tetapi kebiasaan yang melekat dalam budaya sekolah. Model ini mengajarkan bahwa resiliensi harus dibangun secara sistematis, bukan hanya ketika krisis datang.

Rwanda juga memberikan pelajaran penting. Pasca konflik genosida, sekolah-sekolah di sana menjadi arena rekonsiliasi. Guru dilatih untuk mengajarkan toleransi, sejarah kritis, dan resolusi konflik. Murid dari komunitas yang sebelumnya bermusuhan belajar duduk bersama, berdialog, dan bekerja sama dalam proyek sosial. Resiliensi di Rwanda tidak hanya tentang menghadapi krisis alam, tetapi juga tentang menyembuhkan luka sosial melalui pendidikan.

Di Finlandia, resiliensi sekolah dibangun melalui fleksibilitas kurikulum dan fokus pada kesejahteraan murid. Ketika pandemi melanda, sistem pendidikan Finlandia relatif cepat beradaptasi karena sudah memiliki tradisi pembelajaran berbasis teknologi dan budaya belajar mandiri. Murid dilatih untuk mengatur belajar mereka sendiri, sehingga ketika sekolah beralih ke pembelajaran daring, mereka tidak terlalu terguncang. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa resiliensi dapat dipupuk jauh sebelum krisis melalui budaya belajar yang memberdayakan murid.

Sekolah berdaya tahan juga ditemukan dalam komunitas adat di Indonesia. Sekolah komunitas di pedalaman Kalimantan misalnya, menghadapi tantangan minimnya fasilitas modern. Namun, mereka mengintegrasikan pendidikan formal dengan kearifan lokal, seperti pengetahuan hutan, obat tradisional, dan adat istiadat. Dengan cara ini, murid belajar relevansi pendidikan dengan kehidupan sehari-hari, sekaligus memperkuat identitas budaya mereka. Resiliensi di sini lahir dari keterikatan yang kuat antara sekolah dan komunitas.

Dari berbagai contoh tersebut, ada beberapa pola umum yang dapat disimpulkan. Pertama, sekolah berdaya tahan selalu memiliki kepemimpinan yang visioner, yang mampu mengarahkan komunitas untuk menghadapi tantangan bersama. Kedua, sekolah berdaya tahan memanfaatkan kolaborasi dengan komunitas, industri, maupun pemerintah untuk memperkuat kapasitasnya. Ketiga, resiliensi tumbuh dari budaya sekolah yang inklusif, empatik, dan terbuka terhadap inovasi.

Tantangan dalam membangun sekolah berdaya tahan adalah ketimpangan sumber daya antar wilayah. Sekolah di daerah perkotaan biasanya lebih cepat beradaptasi karena dukungan infrastruktur lebih baik, sementara sekolah di pedesaan harus berjuang lebih keras. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif dari pemerintah sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan ini, agar semua sekolah memiliki peluang yang sama untuk menjadi resilien.

Akhirnya, studi kasus sekolah berdaya tahan mengajarkan bahwa pendidikan transformatif hanya akan bermakna jika diuji dalam kenyataan. Sekolah yang resilien bukanlah sekolah yang sempurna, melainkan sekolah yang belajar dari krisis, menemukan solusi kreatif, dan menjaga harapan tetap hidup. Dengan mengintegrasikan nilai global UNESCO dan filosofi lokal *Silih Asih, Asah, Asuh*, sekolah di Indonesia dapat menjadi teladan bagi dunia tentang bagaimana pendidikan mampu bertahan sekaligus bertransformasi dalam menghadapi badai zaman.



# BAGIAN V

## STRATEGI IMPLEMENTASI







# BAB 13

## STRATEGI DI LEVEL MIKRO (GURU & MURID)

Jika bab-bab sebelumnya membahas paradigma besar, kebijakan global, serta kerangka konseptual integratif antara nilai lokal dan pilar UNESCO, maka Bab 13 membawa kita masuk ke tingkat paling dasar dalam ekosistem pendidikan: ruang kelas dan interaksi guru–murid. Level mikro ini adalah arena di mana semua gagasan transformatif benar-benar diuji. Sebab, sehebat apa pun konsep kurikulum, kebijakan nasional, atau visi global, pada akhirnya pendidikan terjadi dalam perjumpaan nyata antara seorang guru dan murid, dalam ruang yang penuh dinamika, emosi, dan makna.

Strategi di level mikro menuntut fokus pada dua hal pokok: peran guru sebagai agen transformasi dan peran murid sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Guru tidak hanya bertugas mentransfer pengetahuan, melainkan juga menumbuhkan empati, memfasilitasi kreativitas, dan menumbuhkan karakter. Sementara itu, murid tidak boleh dilihat sebagai bejana kosong, melainkan individu dengan potensi, pengalaman, dan latar belakang unik yang perlu dihargai dan diberdayakan.

Era VUCA dan Society 5.0 membawa perubahan besar pada dinamika kelas. Guru tidak lagi bisa mengandalkan metode seragam; diferensiasi pembelajaran menjadi keharusan. Murid hidup dalam dunia digital yang penuh informasi, sehingga tugas guru bukan lagi sekadar menyampaikan data, melainkan membimbing murid memilah informasi, berpikir kritis, dan menggunakannya dengan bijak. Di sisi lain, murid juga dituntut untuk lebih mandiri, reflektif, dan siap mengambil peran aktif dalam membangun proses belajarnya sendiri.

Pilar UNESCO memberikan landasan filosofis yang relevan di level ini. *Learning to Know* diwujudkan dalam kemampuan murid membangun literasi dan pengetahuan dasar. *Learning to Do* hadir dalam keterampilan praktik, kolaborasi, dan problem solving. *Learning to Be* menemukan bentuknya dalam pembentukan karakter, identitas, dan kesadaran diri. *Learning to Live Together* dihayati dalam interaksi kelas yang menghargai perbedaan, gotong royong, dan dialog yang sehat.

Nilai lokal *Silih Asih, Asah, Asuh* dapat diintegrasikan langsung dalam praktik kelas. *Silih Asih* menjadi semangat kasih sayang dalam hubungan guru–murid, memastikan setiap anak merasa diterima dan dihargai. *Silih Asah* mendorong budaya saling belajar antar murid, di mana kolaborasi lebih diutamakan daripada kompetisi semata. *Silih Asuh* menekankan bimbingan moral dan tanggung jawab, sehingga guru berperan sebagai pembimbing kehidupan, bukan hanya instruktur akademik.

Strategi di level mikro juga sangat terkait dengan inovasi pedagogi. Guru perlu mengeksplorasi metode seperti *blended learning*, *flipped classroom*, dan *project-based learning* untuk memperkaya pengalaman murid. Teknologi digital dan AI dapat digunakan untuk mendukung personalisasi, tetapi tetap dibingkai oleh empati dan nilai kemanusiaan. Dengan cara ini, ruang kelas menjadi laboratorium kecil yang mencerminkan visi besar pendidikan transformatif.

Bab 13 akan menguraikan berbagai strategi di level mikro melalui lima subbab: pedagogi empati dan pembelajaran berbasis *asah*, OCB guru sebagai katalis transformasi, inovasi metode mengajar di era digital, manajemen kelas humanistik dan adaptif, serta praktik baik dari sekolah dasar, menengah, hingga vokasi. Dengan pendekatan ini, kita diajak melihat bagaimana

pendidikan transformatif benar-benar hidup dalam interaksi sehari-hari antara guru dan murid.

## A. Pedagogi Empati & Pembelajaran Berbasis Asah

Pendidikan sejatinya adalah perjumpaan manusiawi antara guru dan murid. Di tengah derasnya arus teknologi, globalisasi, dan disrupsi era VUCA–Society 5.0, nilai empati menjadi semakin penting. Pedagogi empati berusaha menjadikan ruang kelas sebagai tempat yang hangat, inklusif, dan penuh kasih sayang, di mana murid merasa aman untuk berekspresi, belajar, dan tumbuh. Ketika empati dipadukan dengan falsafah *Silih Asah*—saling mengasah kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan—pendidikan tidak hanya melahirkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga manusia yang peka, adaptif, dan kolaboratif.

Pedagogi empati berangkat dari kesadaran bahwa setiap murid memiliki pengalaman, latar belakang, dan tantangan yang berbeda. Guru dengan empati mampu mendengarkan suara murid, memahami konteks kehidupan mereka, dan merespons kebutuhan mereka secara manusiawi. Empati bukan hanya sikap emosional, tetapi keterampilan pedagogis yang bisa dilatih melalui refleksi, kesadaran diri, dan pengalaman interaksi yang mendalam.

Dalam praktiknya, pedagogi empati diwujudkan dalam cara guru menyapa murid, memperhatikan kondisi psikologis mereka, dan membangun relasi berbasis rasa hormat. Misalnya, ketika seorang murid tampak murung di kelas, guru yang berempati tidak sekadar mengabaikan, tetapi mencoba memahami penyebabnya—apakah terkait masalah keluarga, ekonomi, atau tekanan akademik. Respons kecil seperti ini dapat menumbuhkan rasa aman dan keterikatan emosional yang pada akhirnya meningkatkan motivasi belajar murid.

*Silih Asah* memberi kerangka konseptual yang melengkapi pedagogi empati. Ia menekankan pentingnya proses saling belajar, di mana guru dan murid sama-sama berkembang melalui interaksi. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya pusat pengetahuan, melainkan fasilitator yang memberi ruang bagi murid untuk saling berbagi gagasan, mengasah keterampilan, dan membangun pengetahuan bersama. Dengan pendekatan ini, kelas menjadi komunitas belajar yang dinamis dan kolaboratif.

Pendekatan berbasis *asah* juga menumbuhkan kesadaran bahwa pengetahuan tidak statis, melainkan selalu bisa diperbarui melalui dialog, diskusi, dan praktik nyata. Misalnya, dalam pembelajaran IPA, murid tidak hanya menerima informasi dari buku, tetapi juga melakukan eksperimen sederhana, berdiskusi dalam kelompok, dan mempresentasikan hasil. Proses ini bukan sekadar menguji kognisi, tetapi melatih keterampilan komunikasi, kerja sama, dan berpikir kritis.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa murid yang belajar dalam lingkungan empatik dan kolaboratif cenderung memiliki motivasi intrinsik lebih tinggi, performa akademik lebih baik, dan keterampilan sosial yang lebih matang. Data dari OECD (2023) tentang *Social and Emotional Learning* menegaskan bahwa empati dan kerja sama merupakan fondasi penting untuk sukses di era kompleksitas global. Dengan demikian, pedagogi empati dan pembelajaran berbasis *asah* memiliki landasan empiris yang kuat.

Dalam konteks Indonesia, nilai ini sangat dekat dengan tradisi gotong royong dan kekeluargaan. Budaya lokal yang menekankan kebersamaan sebenarnya sudah lama mengajarkan prinsip empati dan saling mengasah. Tantangan kita adalah bagaimana menerjemahkan nilai ini ke dalam praktik kelas yang modern, terintegrasi dengan kurikulum, dan relevan dengan kebutuhan murid di era digital.

Teknologi digital pun dapat digunakan untuk memperkuat pedagogi empati dan *asah*. Platform pembelajaran daring bisa dipadukan dengan aktivitas kolaboratif, seperti diskusi kelompok virtual atau proyek lintas sekolah. AI dapat membantu guru mengenali kebutuhan individual murid, tetapi guru tetap perlu hadir secara manusiawi untuk memberi sentuhan empati yang tak tergantikan. Dengan kombinasi ini, pembelajaran menjadi personal, adaptif, dan tetap hangat.

Tantangan dalam menerapkan pedagogi empati dan *asah* adalah beban kerja guru yang berat, budaya evaluasi yang masih menekankan angka, dan kurangnya pelatihan dalam aspek sosial-emosional. Guru sering kali lebih fokus pada capaian akademik ketimbang perkembangan psikososial murid. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan sistemik: pelatihan guru tentang empati, kebijakan sekolah yang memberi ruang bagi pembelajaran kolaboratif, serta evaluasi yang menghargai keterampilan sosial selain kognitif.

Dengan pendekatan ini, ruang kelas bukan lagi tempat yang kaku, melainkan ekosistem belajar yang hidup. Murid merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar peserta didik. Guru berperan bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping kehidupan. Relasi yang dibangun melalui empati dan *asah* melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap menjadi warga dunia yang peduli, kreatif, dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, pedagogi empati dan pembelajaran berbasis *asah* adalah strategi mikro yang menyatukan nilai lokal dan global. Ia mengajarkan bahwa pendidikan bukan hanya soal apa yang dipelajari, tetapi bagaimana proses belajar dijalani. Dengan fondasi kasih sayang, kebersamaan, dan dialog, pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih manusiawi, relevan, dan transformatif.

## B. OCB Guru sebagai Katalis Transformasi

Organizational Citizenship Behavior (OCB) adalah konsep yang menjelaskan perilaku ekstra-rol, yaitu tindakan sukarela individu dalam organisasi yang melampaui tugas formalnya. Dalam konteks pendidikan, OCB guru dapat dipahami sebagai perilaku yang tidak hanya terbatas pada kewajiban mengajar di kelas, tetapi juga kontribusi lebih luas untuk membangun lingkungan sekolah yang sehat, inovatif, dan kolaboratif. Subbab ini membahas bagaimana OCB guru dapat berfungsi sebagai katalis transformasi di level mikro, menghubungkan antara kepemimpinan sekolah, budaya organisasi, dan pengalaman belajar murid.

OCB guru memiliki banyak dimensi, di antaranya altruism (membantu rekan kerja), conscientiousness (disiplin melebihi standar), sportsmanship (bersikap positif meski dalam kondisi sulit), courtesy (menjaga hubungan baik), dan civic virtue (berpartisipasi aktif dalam kehidupan organisasi). Ketika guru menunjukkan perilaku ini, sekolah berubah dari sekadar institusi birokratis menjadi komunitas belajar yang hidup. OCB menjadi katalis, karena perilaku sukarela guru mampu menggerakkan perubahan yang tidak selalu bisa dipaksakan lewat aturan formal.

Di era VUCA–Society 5.0, OCB guru semakin relevan. Volatilitas menuntut fleksibilitas guru untuk menyesuaikan diri dengan perubahan

mendadak, ketidakpastian menuntut kerja sama erat antar guru, kompleksitas menuntut kontribusi lintas peran, dan ambiguitas menuntut sikap proaktif dalam mencari solusi. Guru yang berperilaku OCB tidak hanya mengajar mata pelajaran, tetapi juga membantu kolega menavigasi perubahan kurikulum, mendukung murid menghadapi kesulitan emosional, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah yang menumbuhkan semangat kebersamaan.

OCB guru juga memiliki dampak langsung pada murid. Penelitian menunjukkan bahwa sekolah dengan tingkat OCB guru yang tinggi cenderung memiliki atmosfer belajar yang lebih positif, tingkat stres murid yang lebih rendah, serta hasil akademik yang lebih baik. Hal ini terjadi karena guru yang altruistik menciptakan iklim saling membantu, guru yang conscientious memberi teladan kedisiplinan, sementara guru yang menunjukkan civic virtue menumbuhkan budaya partisipasi. Dengan demikian, OCB guru tidak hanya berpengaruh pada organisasi sekolah, tetapi juga pada kualitas pengalaman belajar murid.

Integrasi nilai lokal *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* memperkuat relevansi OCB dalam konteks Indonesia. *Silih Asih* sejalan dengan altruisme, karena keduanya menekankan kasih sayang dan kepedulian pada sesama. *Silih Asah* selaras dengan courtesy dan conscientiousness, karena menekankan proses saling belajar dan disiplin moral. *Silih Asuh* terkait erat dengan civic virtue, karena guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing moral yang terlibat aktif dalam kehidupan komunitas pendidikan. Dengan mengaitkan OCB dengan falsafah lokal, perilaku ekstra-rol guru tidak lagi dipandang sebagai beban tambahan, melainkan sebagai wujud panggilan moral dan budaya.

Studi empiris mendukung hal ini. Penelitian Organ (1988) tentang OCB menekankan pentingnya perilaku sukarela dalam meningkatkan efektivitas organisasi. Di Indonesia, riset terbaru (2022–2024) menunjukkan bahwa OCB guru berkorelasi positif dengan kualitas layanan pendidikan, kepuasan kerja, dan loyalitas organisasi. Bahkan, dalam konteks sekolah swasta, OCB guru sering menjadi faktor penentu keberlangsungan sekolah, karena mereka rela meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memastikan sekolah tetap berdaya saing.

Kepemimpinan sekolah berperan penting dalam memupuk OCB guru. Pemimpin yang inspiratif, adil, dan partisipatif menciptakan iklim yang mendorong guru untuk berperilaku ekstra-rol. Kepemimpinan transformasional, misalnya, terbukti meningkatkan civic virtue guru, sementara kepemimpinan pelayanan (*servant leadership*) memperkuat perilaku altruism. Dengan demikian, strategi transformasi pendidikan di level mikro tidak bisa dilepaskan dari hubungan antara kepemimpinan dan OCB guru.

OCB guru juga menjadi katalis dalam menghadapi krisis. Saat pandemi, banyak guru yang dengan sukarela belajar teknologi digital, menyiapkan materi daring, bahkan mengunjungi murid ke rumah-rumah untuk memastikan mereka tetap belajar. Perilaku semacam ini bukan bagian dari kontrak kerja formal, melainkan ekspresi dari komitmen moral dan tanggung jawab sosial. Di sinilah OCB menjadi jantung resiliensi sekolah.

Tantangan dalam membangun OCB guru terletak pada beban kerja dan sistem penghargaan. Jika guru merasa terbebani secara administratif atau tidak dihargai, motivasi untuk melakukan perilaku ekstra-rol bisa menurun. Oleh karena itu, sekolah harus menciptakan sistem yang adil, memberi pengakuan terhadap kontribusi non-formal guru, dan memastikan kesejahteraan mereka terjaga. OCB hanya dapat berkembang dalam ekosistem yang sehat.

Pada akhirnya, OCB guru sebagai katalis transformasi menegaskan bahwa perubahan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan besar, tetapi juga oleh perilaku sehari-hari di ruang kelas dan lingkungan sekolah. Guru yang penuh empati, proaktif, disiplin, dan peduli dapat menjadi motor perubahan yang lebih kuat daripada aturan formal. Dengan memadukan konsep OCB, pilar UNESCO, dan falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh*, sekolah Indonesia dapat membangun ekosistem mikro yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam menghadapi tantangan zaman.

### C. Inovasi Metode Mengajar

Metode mengajar adalah kunci yang menentukan bagaimana visi pendidikan transformatif dijalankan di ruang kelas. Seiring perubahan zaman, metode konvensional yang hanya mengandalkan tatap muka tidak lagi memadai. Kehadiran teknologi digital, fleksibilitas kurikulum, serta tuntutan Society

5.0 mendorong lahirnya berbagai inovasi pedagogis. Tiga di antaranya yang paling relevan adalah *blended learning*, *hybrid learning*, dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam pembelajaran. Subbab ini menguraikan bagaimana metode-metode ini dapat diintegrasikan dengan nilai lokal dan pilar UNESCO, sehingga melahirkan model belajar yang adaptif, kreatif, dan tetap humanis.

*Blended learning* adalah kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan daring. Model ini memungkinkan murid mendapatkan fleksibilitas dalam belajar, sekaligus mempertahankan interaksi langsung dengan guru dan teman. Dalam praktiknya, materi konseptual dapat dipelajari melalui platform digital, sementara diskusi, eksperimen, dan kegiatan kolaboratif dilakukan di kelas. Pendekatan ini memberi ruang bagi murid untuk belajar sesuai ritme mereka, sembari tetap merasakan kebersamaan yang menjadi ciri khas *Silih Asah*.

*Hybrid learning* melangkah lebih jauh dengan menggabungkan murid yang hadir di kelas secara fisik dan murid yang mengikuti pembelajaran secara daring dalam waktu yang sama. Model ini sangat relevan untuk konteks pascakrisis, ketika sekolah harus memastikan keberlangsungan belajar meski sebagian murid tidak bisa hadir secara langsung. Tantangan utamanya terletak pada pengelolaan interaksi, agar murid daring tidak terpinggirkan. Guru perlu strategi yang kreatif, misalnya dengan membagi kelompok diskusi lintas platform atau memanfaatkan aplikasi kolaboratif daring. Dengan kerangka ini, *Learning to Live Together* mendapatkan makna baru: kebersamaan tidak hanya dalam ruang fisik, tetapi juga dalam ruang virtual.

Pemanfaatan AI dalam pembelajaran membuka peluang personalisasi yang belum pernah ada sebelumnya. Sistem berbasis AI dapat menganalisis pola belajar murid, mengidentifikasi kesulitan mereka, dan memberikan rekomendasi materi yang sesuai. AI juga dapat membantu guru dalam pekerjaan administratif, seperti penilaian otomatis atau pembuatan soal. Dengan begitu, guru memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada interaksi humanis dengan murid. Namun, AI harus ditempatkan dalam kerangka *Silih Asuh*: teknologi mendukung, sementara bimbingan moral tetap dipegang guru. Tanpa kerangka etis, AI berisiko mengurangi sentuhan manusiawi dalam pendidikan.

Inovasi metode mengajar ini sangat sejalan dengan *Kurikulum Merdeka*, yang memberi ruang diferensiasi dan pembelajaran berbasis proyek. Melalui *blended* dan *hybrid learning*, murid dapat mengerjakan proyek lintas disiplin dengan memanfaatkan sumber daya digital, lalu mempresentasikan hasilnya di kelas. AI dapat membantu dalam riset, analisis data, atau simulasi. Proses ini tidak hanya melatih *Learning to Know* dan *Learning to Do*, tetapi juga memperkuat *Learning to Be* karena murid belajar mengatur diri sendiri, serta *Learning to Live Together* karena mereka harus berkolaborasi lintas platform dan latar belakang.

Studi empiris menunjukkan dampak positif inovasi metode ini. Penelitian UNESCO (2022) menemukan bahwa murid dalam sistem *blended learning* menunjukkan peningkatan keterlibatan belajar hingga 30% dibanding metode konvensional. Di Indonesia, data Kemendikbudristek tahun 2023 menunjukkan bahwa sekolah yang mengimplementasikan *hybrid learning* pascapandemi lebih cepat memulihkan kualitas pembelajaran dibanding sekolah yang hanya kembali pada pola tatap muka. Hal ini menegaskan bahwa inovasi pedagogis bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan nyata.

Namun, tantangan juga perlu dicermati. Infrastruktur digital yang belum merata menjadi hambatan utama, terutama di daerah pedesaan. Guru juga masih banyak yang belum terbiasa menggunakan teknologi, sehingga memerlukan pelatihan intensif. Selain itu, ada risiko ketergantungan pada AI yang dapat melemahkan kemampuan berpikir kritis murid jika tidak diimbangi dengan bimbingan guru. Oleh karena itu, inovasi metode mengajar harus ditempatkan dalam kerangka yang seimbang: teknologi memperkaya, tetapi manusia tetap memimpin.

Integrasi nilai lokal memperkuat metode inovatif ini. *Silih Asih* memastikan bahwa interaksi digital tetap penuh empati dan kepedulian, bukan sekadar transaksional. *Silih Asah* menguatkan semangat saling belajar meski terhubung melalui layar. *Silih Asuh* menegaskan bahwa bimbingan moral tetap hadir, bahkan ketika sebagian proses belajar berlangsung melalui algoritma. Dengan cara ini, inovasi pedagogi tidak mengikis nilai budaya, tetapi justru menghidupkannya dalam konteks baru.

Pada akhirnya, inovasi metode mengajar melalui *blended learning*, *hybrid learning*, dan AI adalah langkah strategis untuk menyiapkan murid

menghadapi dunia yang semakin kompleks. Dengan memadukan fleksibilitas teknologi dan kehangatan nilai kemanusiaan, pendidikan di Indonesia dapat melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas digital, tetapi juga bijaksana, kolaboratif, dan berkarakter. Ruang kelas pun bertransformasi menjadi ruang belajar yang tanpa batas—sekaligus tetap berakar pada nilai kasih sayang, kebersamaan, dan tanggung jawab moral.

#### **D. Manajemen Kelas Humanistik & Adaptif**

Manajemen kelas sering dipahami hanya sebatas pengaturan disiplin, tata tertib, dan kontrol perilaku murid agar proses belajar berjalan tertib. Namun, dalam paradigma pendidikan transformatif, manajemen kelas harus dipandang lebih luas: bukan sekadar menjaga keteraturan, tetapi menciptakan ekosistem belajar yang humanis, adaptif, dan berpusat pada perkembangan murid. Di era VUCA–Society 5.0, kelas tidak bisa lagi diatur dengan pendekatan otoriter yang kaku; ia harus dikelola dengan cara yang fleksibel, empatik, dan responsif terhadap kebutuhan individual maupun kolektif.

Manajemen kelas humanistik berangkat dari pandangan bahwa murid adalah subjek yang memiliki kebutuhan, potensi, dan aspirasi yang beragam. Guru bukan hanya pengendali perilaku, tetapi fasilitator yang menciptakan suasana belajar yang aman, inklusif, dan bermakna. Dalam pendekatan ini, hubungan guru dan murid dibangun atas dasar saling menghargai, bukan rasa takut. Guru berperan sebagai teladan dan pembimbing moral yang menghadirkan kasih sayang (*Silih Asih*) dalam setiap interaksi.

Pendekatan adaptif menambahkan dimensi fleksibilitas. Murid di era digital tumbuh dalam lingkungan yang cepat berubah dan penuh distraksi. Mereka tidak dapat disamaratakan dalam gaya belajar, tempo belajar, maupun latar belakang sosial-ekonomi. Oleh karena itu, manajemen kelas adaptif menekankan diferensiasi: guru menyesuaikan metode, materi, dan bentuk evaluasi dengan kebutuhan unik murid. Misalnya, murid visual diberikan lebih banyak media gambar, sementara murid kinestetik didorong melalui praktik langsung. Pendekatan ini sejalan dengan *Silih Asah*, di mana proses belajar menekankan saling mengasah potensi sesuai keunikan masing-masing.

Kelas humanistik juga memprioritaskan keterlibatan aktif murid. Alih-alih duduk pasif menerima pengetahuan, murid didorong untuk bertanya, berdiskusi, dan bereksperimen. Guru menciptakan ruang dialogis yang memungkinkan setiap suara didengar, termasuk suara murid yang biasanya terpinggirkan. Dengan cara ini, kelas menjadi miniatur demokrasi yang mendidik murid untuk menghargai perbedaan, menyelesaikan konflik secara damai, dan membangun tanggung jawab sosial. Prinsip ini erat dengan pilar UNESCO *Learning to Live Together*.

Salah satu strategi konkret dalam manajemen kelas humanistik adalah penerapan *positive discipline*. Alih-alih menghukum murid secara represif, guru mengarahkan mereka untuk memahami konsekuensi dari tindakan dan menemukan solusi bersama. Misalnya, ketika seorang murid terlambat, guru tidak langsung memberi sanksi, tetapi berdialog untuk memahami penyebab keterlambatan dan mendorong murid mencari cara agar hal itu tidak terulang. Dengan pendekatan ini, disiplin menjadi proses pembelajaran moral, bukan sekadar pemaksaan aturan.

Aspek emosional juga menjadi perhatian utama. Murid yang merasa diterima secara emosional lebih mudah fokus, berani mengambil risiko intelektual, dan termotivasi untuk belajar. Guru dapat memulai kelas dengan *ice breaking*, refleksi, atau aktivitas singkat yang membangun suasana positif. Praktik sederhana ini memperkuat ikatan emosional dalam kelas, sehingga rasa kebersamaan tumbuh. Di sinilah *Silih Asih* menemukan ruang aktualisasinya: murid merasa dipedulikan, bukan sekadar diatur.

Kelas adaptif juga berarti memanfaatkan teknologi digital secara bijak. Learning Management System (LMS), aplikasi kolaboratif, dan platform diskusi daring dapat membantu guru mengelola interaksi, terutama dalam konteks *blended* dan *hybrid learning*. Namun, teknologi tidak boleh menggantikan relasi manusiawi; ia hanya berfungsi sebagai alat untuk memperkaya pengalaman belajar. Guru tetap memegang kendali dalam memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memperkuat ikatan sosial dan memfasilitasi kolaborasi.

Dalam konteks resiliensi, manajemen kelas humanistik dan adaptif terbukti lebih efektif dalam menghadapi krisis. Saat pandemi, kelas yang dikelola dengan empati, fleksibilitas, dan kolaborasi cenderung lebih berhasil menjaga motivasi murid meski belajar dari rumah. Guru yang

berorientasi humanistik mampu memahami keterbatasan murid, misalnya dengan menyesuaikan beban tugas, memberi pilihan cara pengumpulan, dan tetap menjaga komunikasi hangat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi mikro di kelas memiliki dampak besar pada daya tahan pendidikan secara keseluruhan.

Studi empiris mendukung pentingnya manajemen kelas humanistik. Penelitian OECD (2022) menemukan bahwa kelas dengan iklim positif berkontribusi signifikan pada pencapaian akademik dan kesejahteraan murid. Di Indonesia, riset Kemendikbudristek (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan pendekatan diferensiasi dan empatik dalam manajemen kelas memiliki tingkat keterlibatan murid lebih tinggi dibanding yang masih menggunakan pendekatan otoriter. Data ini menguatkan bahwa transformasi manajemen kelas adalah kebutuhan mendesak.

Tantangan utama dalam penerapan strategi ini adalah beban kerja guru yang berat dan sistem evaluasi nasional yang masih menekankan capaian kognitif. Guru sering kali tidak memiliki cukup waktu untuk menerapkan strategi diferensiasi atau membangun hubungan emosional dengan murid. Oleh karena itu, dukungan struktural dari sekolah dan kebijakan pendidikan menjadi sangat penting: rasio guru-murid yang ideal, pelatihan pedagogi humanistik, serta evaluasi yang lebih menekankan proses daripada angka.

Pada akhirnya, manajemen kelas humanistik dan adaptif bukan hanya tentang mengatur ruang kelas, tetapi tentang membangun komunitas belajar yang hidup. Dengan mengintegrasikan empati, fleksibilitas, teknologi, dan nilai lokal *Silih Asih, Asah, Asuh*, guru dapat menciptakan kelas yang bukan hanya efektif secara akademik, tetapi juga membentuk manusia seutuhnya. Kelas yang demikian adalah miniatur pendidikan transformatif—tempat di mana setiap murid tumbuh sebagai individu yang berpengetahuan, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia yang kompleks.

## **E. Praktik Baik di Sekolah Dasar, Menengah, Vokasi**

Prinsip, teori, dan strategi pendidikan akan menemukan relevansinya hanya ketika terwujud dalam praktik nyata. Sekolah dasar, menengah, dan vokasi adalah ruang di mana strategi pedagogi empatik, OCB guru, inovasi metode mengajar, serta manajemen kelas humanistik diuji secara konkret. Praktik

baik dari sekolah-sekolah ini memberikan inspirasi bahwa transformasi pendidikan di level mikro tidak hanya mungkin, tetapi sudah berjalan, meskipun dengan konteks, tantangan, dan inovasi yang berbeda.

Di sekolah dasar, praktik baik banyak berpusat pada penumbuhan karakter dan pembiasaan empati sejak dini. Guru sering menggunakan metode cerita, permainan peran, dan proyek sederhana untuk menginternasionalisasi nilai *Silih Asih, Asah, Asuh*. Misalnya, dalam satu kelas di Jawa Tengah, guru mengajak murid kelas rendah untuk membuat “pohon kebaikan”, di mana setiap murid menuliskan tindakan baik yang mereka lakukan setiap hari. Aktivitas sederhana ini mengajarkan *Learning to Be* dan *Learning to Live Together* dengan cara yang menyenangkan, sekaligus membangun budaya kelas yang penuh kasih sayang.

Sekolah dasar juga sering menjadi arena eksperimen inovatif dalam manajemen kelas adaptif. Guru-guru yang peka menyadari bahwa setiap murid memiliki ritme belajar yang berbeda. Murid yang lambat diberi kesempatan tambahan, sementara murid yang cepat didorong untuk mengajarkan kembali kepada temannya. Pendekatan *peer teaching* ini bukan hanya strategi akademik, tetapi juga bentuk nyata dari *Silih Asah*, di mana murid belajar mengasah pengetahuan dan karakter melalui interaksi sosial.

Di tingkat sekolah menengah, praktik baik banyak ditemukan dalam pengembangan keterampilan abad ke-21. Misalnya, sekolah menengah atas (SMA) di Yogyakarta mengintegrasikan *project-based learning* dalam mata pelajaran IPA, di mana murid diminta merancang solusi kreatif untuk isu lingkungan di sekitar sekolah. Proyek ini tidak hanya menumbuhkan *Learning to Do*, tetapi juga memperkuat keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Nilai gotong royong yang menjadi ciri khas *Silih Asih* hadir ketika murid bekerja sama lintas kelas untuk mewujudkan proyek tersebut.

Sekolah menengah juga banyak mengembangkan praktik baik dalam penggunaan teknologi digital. Di beberapa SMP di kota besar, guru memanfaatkan platform kolaboratif daring untuk memperkaya diskusi kelas. Murid terbiasa mengunggah refleksi, mengomentari karya temannya, dan menyusun portofolio digital. Dengan bimbingan guru, teknologi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan digital, tetapi juga mengajarkan etika komunikasi, saling menghargai, dan empati dalam ruang virtual.

Sekolah vokasi (SMK) menjadi contoh paling konkret integrasi antara pendidikan dan dunia kerja. Praktik baik di SMK sering terlihat dalam program *link and match* dengan industri. Misalnya, SMK di Jawa Barat bekerja sama dengan perusahaan manufaktur untuk melatih murid dalam keterampilan teknis, sekaligus menanamkan etos kerja berbasis tanggung jawab dan kerja sama. Murid tidak hanya belajar mengoperasikan mesin, tetapi juga memahami pentingnya disiplin, kejujuran, dan solidaritas tim. Hal ini mencerminkan paduan antara *Learning to Do* dan *Silih Asah*.

Program Pancawaluya di SMK juga menjadi teladan praktik baik. Lima pilar—ketakwaanan, kejujuran, disiplin, gotong royong, dan kreativitas—diterjemahkan dalam program nyata seperti kegiatan kewirausahaan, pengabdian masyarakat, dan lomba inovasi. Murid dilatih bukan hanya untuk siap bekerja, tetapi juga untuk menjadi warga yang berkarakter dan peduli. Dengan demikian, SMK bukan hanya mencetak tenaga kerja, tetapi juga pemimpin muda dengan visi dan integritas.

Studi kasus internasional juga memperkuat inspirasi ini. Di Finlandia, sekolah dasar menanamkan empati melalui integrasi seni, musik, dan kegiatan kolaboratif sejak dini. Di Jepang, sekolah menengah mengajarkan tanggung jawab sosial melalui kebiasaan murid membersihkan ruang kelas bersama. Di Jerman, sekolah vokasi memiliki sistem *dual system* yang memadukan teori di kelas dengan praktik langsung di industri. Praktik baik ini menunjukkan bahwa inovasi pedagogis dapat dilakukan dengan cara sederhana tetapi berdampak besar.

Kunci keberhasilan dari semua praktik baik ini adalah konsistensi, keterlibatan komunitas, dan kepemimpinan guru. Guru yang menunjukkan OCB menjadi motor penggerak, karena mereka rela melampaui kewajiban formal demi memastikan murid mendapatkan pengalaman belajar terbaik. Sekolah yang berhasil menerapkan praktik baik biasanya memiliki kepemimpinan yang visioner dan budaya organisasi yang mendukung kolaborasi.

Tantangan tentu tidak kecil. Banyak sekolah masih menghadapi keterbatasan fasilitas, beban kurikulum, dan kesenjangan sumber daya antara sekolah kota dan desa. Namun, praktik baik membuktikan bahwa transformasi tidak selalu membutuhkan teknologi canggih atau anggaran besar.

Kreativitas guru, partisipasi murid, dan dukungan komunitas sering kali cukup untuk melahirkan inovasi yang transformatif.

Pada akhirnya, praktik baik di sekolah dasar, menengah, dan vokasi menegaskan bahwa strategi di level mikro adalah fondasi dari transformasi pendidikan nasional. Ruang kelas adalah laboratorium perubahan, di mana nilai global UNESCO dan filosofi lokal *Silih Asih, Asah, Asuh* diuji dalam kenyataan. Dari praktik kecil seperti “pohon kebaikan” di sekolah dasar, hingga program link and match di SMK, semua memberi pelajaran bahwa transformasi pendidikan bukan hanya slogan, melainkan sesuatu yang nyata, terukur, dan penuh harapan.





# BAB 14

## STRATEGI DI LEVEL MESO (SEKOLAH & KOMUNITAS)

Jika level mikro berbicara tentang interaksi langsung antara guru dan murid, maka level meso menekankan ekosistem pendidikan yang lebih luas: sekolah sebagai institusi dan komunitas sebagai jejaring sosial yang menopang keberlangsungan pendidikan. Pada level ini, strategi transformasi tidak hanya berfokus pada individu, tetapi pada struktur, budaya, kolaborasi, dan sistem yang memungkinkan praktik baik tumbuh dan berkelanjutan.

Sekolah bukan sekadar gedung dengan ruang kelas; ia adalah organisasi sosial yang memiliki visi, misi, struktur kepemimpinan, budaya internal, serta relasi dengan pihak eksternal. Begitu pula komunitas, bukan sekadar kumpulan warga, melainkan ekosistem sosial, budaya, dan ekonomi yang membentuk konteks belajar murid. Dalam era VUCA–Society 5.0, strategi pendidikan di level meso sangat penting karena krisis, perubahan teknologi, maupun tantangan global tidak bisa dihadapi sendirian oleh guru atau murid, melainkan membutuhkan sistem yang tangguh dan kolaborasi lintas pihak.

Strategi meso berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan makro dan implementasi mikro. Kebijakan nasional tidak akan efektif jika tidak diterjemahkan menjadi sistem internal sekolah yang jelas. Sebaliknya, praktik kelas yang inovatif sulit berkembang jika tidak mendapat dukungan budaya organisasi sekolah dan komunitas. Oleh karena itu, strategi meso adalah arena integrasi: menyatukan visi besar dengan realitas kecil, menynergikan kebijakan dengan praksis, serta menghubungkan sekolah dengan lingkungan sosialnya.

Dalam konteks ini, pilar UNESCO dan nilai lokal *Silih Asih, Asah, Asuh* kembali menemukan relevansinya. Sekolah dapat menjadi institusi yang menumbuhkan solidaritas (*Silih Asih*), kolaborasi belajar (*Silih Asah*), dan kepemimpinan moral (*Silih Asuh*). Komunitas dapat berperan sebagai mitra aktif dalam pendidikan, memberi sumber daya, kearifan, bahkan ruang belajar alternatif di luar sekolah. Integrasi sekolah dan komunitas bukan hanya memperluas jangkauan pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan benar-benar membumi, relevan, dan berdampak.

Era Society 5.0 memberikan peluang sekaligus tantangan baru. Di satu sisi, teknologi digital memungkinkan sekolah berkolaborasi lebih luas, membangun kemitraan dengan industri, universitas, dan organisasi masyarakat sipil. Di sisi lain, ada risiko keterputusan antara sekolah dan komunitas lokal ketika fokus terlalu besar diarahkan pada agenda global. Strategi meso harus mampu menjaga keseimbangan ini: memanfaatkan teknologi global, namun tetap mengakar pada kearifan lokal dan kebutuhan komunitas.

Bab 14 akan menguraikan strategi di level meso melalui lima subbab: penguatan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sebagai fondasi organisasi sekolah; penggunaan Rapor Pendidikan sebagai instrumen transformasi berbasis data; kolaborasi sekolah–industri–komunitas untuk membangun relevansi; implementasi program Pancawaluya SMK sebagai model praksis; serta studi kasus komunitas pendidikan lokal yang berhasil mengintegrasikan nilai global dengan tradisi Nusantara.

Dengan pendekatan ini, kita diajak melihat bahwa transformasi pendidikan bukan hanya tugas guru di kelas, tetapi juga tanggung jawab sekolah sebagai organisasi dan komunitas sebagai ekosistem sosial. Level meso adalah ruang strategis di mana kebijakan menemukan bentuk konkretnya, dan praktik mikro menemukan dukungan sistemiknya. Di sinilah kita dapat

membangun sekolah dan komunitas yang resilien, inklusif, inovatif, serta berakar kuat pada nilai budaya sekaligus terbuka pada dunia.

## A. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah instrumen fundamental yang memastikan pendidikan berjalan sesuai standar sekaligus relevan dengan kebutuhan nyata. Di Indonesia, SPMI dikembangkan sebagai kerangka kerja yang mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Subbab ini membahas bagaimana SPMI dapat berfungsi bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai strategi transformatif yang membangun budaya mutu di sekolah dan komunitas pendidikan.

SPMI lahir dari kesadaran bahwa mutu pendidikan tidak bisa hanya ditentukan oleh regulasi eksternal atau akreditasi formal, melainkan harus dibangun dari dalam. Sekolah adalah organisasi belajar yang harus memiliki mekanisme internal untuk mengevaluasi diri, menemukan kelemahan, dan terus memperbaiki proses. Dengan SPMI, sekolah memiliki kerangka siklus yang jelas: *Plan-Do-Check-Act* (PDCA). Siklus ini bukan sekadar prosedur teknis, tetapi proses refleksi berulang yang memastikan pendidikan tidak berjalan stagnan.

Pada tahap *Plan*, sekolah menyusun rencana strategis berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan lokal. Tahap ini sangat penting untuk memastikan visi dan misi sekolah selaras dengan kebijakan nasional sekaligus relevan dengan karakter komunitas. Misalnya, sekolah di daerah pesisir dapat memasukkan pendidikan ekologi laut sebagai bagian dari penguatan kurikulum lokal.

Tahap *Do* menekankan implementasi rencana dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan: guru, murid, kepala sekolah, orang tua, hingga komunitas. Implementasi ini tidak hanya menyangkut kurikulum, tetapi juga manajemen kelas, kegiatan ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Dengan demikian, mutu pendidikan tidak dilihat hanya dari hasil akademik, tetapi juga dari kesejahteraan murid, kreativitas guru, dan keterlibatan komunitas.

Tahap *Check* adalah evaluasi kritis. Sekolah menilai sejauh mana program berhasil mencapai tujuan, menggunakan instrumen seperti Rapor Pendidikan, survei kepuasan, atau forum refleksi bersama. Evaluasi ini harus bersifat jujur dan transparan, sehingga menjadi cermin kolektif bagi sekolah. Di sinilah *Silih Asah* menemukan perannya: evaluasi tidak dilakukan untuk menyalahkan, tetapi untuk saling belajar dan memperbaiki diri.

Tahap *Act* adalah tindak lanjut perbaikan. Hasil evaluasi digunakan untuk merumuskan strategi baru, memperbaiki kelemahan, atau memperkuat program yang sudah berjalan baik. Tahap ini mencerminkan *Silih Asuh*: adanya tanggung jawab moral untuk memastikan mutu pendidikan terus meningkat, demi kebaikan generasi mendatang.

SPMI yang berjalan dengan baik menciptakan budaya mutu di sekolah. Guru terbiasa merencanakan pembelajaran dengan matang, melaksanakan dengan reflektif, mengevaluasi dengan jujur, dan memperbaiki dengan kreatif. Murid terbiasa menerima umpan balik sebagai proses pembelajaran, bukan sebagai hukuman. Kepala sekolah terbiasa melihat dirinya bukan hanya sebagai administrator, tetapi sebagai pemimpin mutu yang memotivasi semua pihak untuk terlibat.

Dalam konteks global, SPMI sejalan dengan praktik *quality assurance* di banyak negara. UNESCO menekankan pentingnya budaya mutu yang partisipatif, bukan hanya birokratis. Di Finlandia, penjaminan mutu dilakukan melalui evaluasi internal yang berbasis kepercayaan dan profesionalisme guru. Di Singapura, sistem mutu menekankan inovasi dan riset berbasis data. Indonesia dapat belajar dari praktik ini, tetapi tetap menyesuaikan dengan nilai lokal, seperti gotong royong dan kebersamaan.

SPMI juga dapat menjadi instrumen untuk menghadapi tantangan era VUCA–Society 5.0. Ketidakpastian dan kompleksitas menuntut sekolah untuk adaptif. Dengan SPMI, sekolah tidak kaku pada satu model, tetapi mampu menyesuaikan diri berdasarkan data dan refleksi. Misalnya, ketika pandemi melanda, sekolah dengan budaya mutu yang kuat lebih cepat beradaptasi dengan pembelajaran daring, karena mereka sudah terbiasa mengevaluasi dan memperbaiki proses.

Tantangan utama dalam penerapan SPMI adalah persepsi bahwa sistem ini hanya formalitas administratif. Banyak sekolah mengisi dokumen SPMI

hanya untuk memenuhi syarat akreditasi, tanpa benar-benar menjalankan siklus refleksi. Untuk mengubah hal ini, perlu ada pergeseran paradigma: SPMI dipahami bukan sebagai beban, tetapi sebagai alat manajemen perubahan. Kepala sekolah dan guru perlu melihat SPMI sebagai kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan membangun keunggulan sekolah.

Contoh praktik baik dapat ditemukan di beberapa SMK yang berhasil mengintegrasikan SPMI dengan program link and match. Melalui siklus mutu, sekolah melakukan pemetaan kebutuhan industri, menyesuaikan kurikulum, melaksanakan program magang, mengevaluasi hasil, lalu memperbaiki program berdasarkan umpan balik industri. Siklus ini tidak hanya meningkatkan mutu akademik, tetapi juga relevansi lulusan dengan dunia kerja.

Pada akhirnya, SPMI bukan sekadar sistem, tetapi budaya. Ia mengajarkan sekolah untuk selalu bertanya: apakah yang kita lakukan benar-benar bermanfaat bagi murid? Apakah kita sudah memberikan pengalaman belajar terbaik? Apakah kita siap memperbaiki diri secara berkelanjutan? Dengan mengintegrasikan siklus mutu, pilar UNESCO, dan falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh*, SPMI dapat menjadi motor utama transformasi pendidikan di level meso, menjadikan sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi organisasi pembelajar yang selalu berkembang.

## **B. Rapor Pendidikan sebagai Instrumen Transformasi**

Rapor Pendidikan merupakan salah satu terobosan penting dalam upaya membangun budaya reflektif di sekolah Indonesia. Ia bukan hanya berisi angka atau grafik capaian, melainkan instrumen yang dirancang untuk memberi cermin obyektif bagi sekolah agar mampu melihat kekuatan, kelemahan, dan arah perbaikan yang perlu dilakukan. Subbab ini menguraikan bagaimana Rapor Pendidikan dapat berfungsi sebagai alat transformasi, bukan sekadar laporan, dengan menekankan perannya dalam mendorong inovasi, akuntabilitas, dan kolaborasi.

Rapor Pendidikan lahir dari kebutuhan akan sistem evaluasi yang lebih komprehensif, transparan, dan berbasis data. Selama ini, kualitas sekolah sering diukur semata dari hasil ujian nasional atau akreditasi formal. Padahal, mutu pendidikan jauh lebih kompleks: ia mencakup dimensi literasi, numerasi, karakter, iklim belajar, hingga manajemen organisasi sekolah. Rapor Pendidikan mencoba menangkap keragaman itu dalam indikator yang lebih luas dan kontekstual, sehingga memberikan gambaran lebih utuh tentang keadaan sekolah.

Sebagai instrumen transformasi, Rapor Pendidikan memiliki dua fungsi utama: diagnosis dan refleksi. Diagnosis membantu sekolah memahami posisi mereka: apakah literasi murid sudah sesuai standar, apakah numerasi menunjukkan peningkatan, bagaimana kondisi iklim kelas, seberapa besar partisipasi guru dalam pengembangan profesional. Refleksi kemudian mengajak sekolah untuk bertanya: mengapa hasil ini muncul, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana strategi untuk melakukannya. Dengan demikian, Rapor Pendidikan menjadi pemicu dialog internal dan eksternal.

Rapor Pendidikan juga memberi ruang untuk membandingkan diri dengan standar nasional maupun capaian sekolah lain. Namun, perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk kompetisi semata, melainkan inspirasi. Sekolah dapat belajar dari praktik baik sekolah lain yang berhasil meningkatkan literasi, memperbaiki iklim kelas, atau memperkuat manajemen. Di sinilah nilai *Silih Asah* berperan: saling belajar melalui data yang obyektif dan terbuka.

Lebih dari itu, Rapor Pendidikan menumbuhkan akuntabilitas. Sekolah tidak lagi berjalan hanya berdasarkan asumsi atau klaim subjektif, melainkan berdasarkan data yang terukur. Kepala sekolah dapat menggunakan laporan ini untuk menjelaskan program kepada guru, orang tua, atau pengawas. Pemerintah daerah dapat menjadikannya dasar alokasi anggaran atau program afirmasi. Dengan akuntabilitas ini, Rapor Pendidikan memperkuat kepercayaan publik bahwa sekolah sungguh-sungguh berusaha meningkatkan mutu.

Dalam konteks VUCA–Society 5.0, Rapor Pendidikan juga berfungsi sebagai alat navigasi. Volatilitas menuntut sekolah untuk cepat membaca perubahan data, ketidakpastian menuntut interpretasi reflektif, kompleksitas menuntut analisis menyeluruh, dan ambiguitas menuntut keberanian

mengambil keputusan berbasis bukti. Rapor Pendidikan memberi kompas berbasis data, sehingga sekolah tidak terjebak dalam kebingungan atau sekadar meniru kebijakan umum.

Integrasi nilai lokal *Silih Asih, Asah, Asuh* memperkaya makna Rapor Pendidikan. *Silih Asih* mendorong empati dalam membaca data—bahwa di balik setiap angka ada murid dengan cerita dan tantangan unik. *Silih Asah* mendorong budaya saling belajar antar sekolah, bukan saling menjatuhkan. *Silih Asuh* menekankan tanggung jawab moral untuk menggunakan data bukan sekadar sebagai statistik, tetapi sebagai dasar perbaikan nyata demi kebaikan generasi mendatang.

Praktik baik sudah terlihat di beberapa daerah. Di Jawa Tengah, misalnya, pemerintah daerah menggunakan Rapor Pendidikan untuk mengidentifikasi sekolah dengan capaian rendah dalam numerasi, kemudian mengadakan pelatihan guru secara terfokus. Di Jawa Barat, beberapa sekolah menjadikan rapor sebagai dasar pengembangan *lesson study*—guru menganalisis data hasil belajar murid lalu merancang pembelajaran bersama. Hasilnya, perbaikan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi sistematis dan berbasis bukti.

Tantangan terbesar dalam pemanfaatan Rapor Pendidikan adalah pemahaman dan kesiapan guru serta kepala sekolah. Banyak yang masih melihatnya sebagai kewajiban administratif, bukan alat refleksi. Ada juga yang cenderung merasa tertekan dengan capaian rendah, sehingga enggan membuka data secara transparan. Oleh karena itu, perlu ada perubahan budaya: dari budaya menyembunyikan kelemahan menuju budaya reflektif yang menerima kekurangan sebagai titik awal perbaikan.

Rapor Pendidikan juga perlu diintegrasikan dengan SPMI. Jika SPMI memberi siklus mutu, maka Rapor Pendidikan memberi bahan data obyektif yang memperkuat refleksi. Dengan menghubungkan keduanya, sekolah dapat membangun sistem mutu yang lebih hidup: data bukan hanya dikumpulkan, tetapi dipakai untuk merencanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki.

Pada akhirnya, Rapor Pendidikan adalah alat transformasi karena ia mengajarkan satu hal penting: pendidikan yang bermutu tidak dibangun atas klaim, tetapi atas bukti. Data hanyalah awal; yang terpenting adalah

keberanian sekolah untuk menggunakannya dalam membuat perubahan. Dengan mengintegrasikan pilar UNESCO, falsafah lokal *Silih Asih, Asah, Asuh*, dan komitmen reflektif, Rapor Pendidikan dapat menjadi tonggak budaya mutu baru yang memperkuat sekolah dalam menghadapi tantangan abad 21.

### C. Kolaborasi Sekolah–Industri–Komunitas

Dalam ekosistem pendidikan modern, sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Kompleksitas dunia kerja, dinamika sosial, dan tantangan global menuntut sekolah menjalin kemitraan erat dengan berbagai pihak. Kolaborasi dengan industri memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja. Sementara itu, keterlibatan komunitas memastikan bahwa pendidikan berakar pada nilai budaya, kearifan lokal, dan kebutuhan sosial. Subbab ini membahas bagaimana kolaborasi sekolah–industri–komunitas dapat menjadi strategi transformatif dalam menyiapkan generasi yang adaptif, berkarakter, dan kompetitif.

Sekolah adalah pusat pembelajaran formal, industri adalah arena penerapan keterampilan, dan komunitas adalah ruang sosial yang membentuk karakter. Ketiganya, jika berjalan terpisah, akan menghasilkan kesenjangan: lulusan sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan industri, atau kehilangan ikatan sosial dengan komunitasnya. Namun, jika ketiganya bersinergi, maka tercipta ekosistem pendidikan yang komprehensif: murid tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga siap kerja dan berakar pada nilai kemanusiaan.

Kolaborasi sekolah–industri sangat penting terutama pada jenjang vokasi. Program *link and match* yang digagas pemerintah Indonesia bertujuan menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja. Melalui magang, *teaching factory*, dan kurikulum bersama, murid SMK tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis di dunia industri. Dengan demikian, mereka lebih siap menghadapi tantangan nyata ketika lulus. Model ini juga mengajarkan *Learning to Do* secara langsung: keterampilan bukan sekadar konsep, tetapi praktik nyata.

Di sisi lain, kolaborasi dengan komunitas memperkaya dimensi sosial dan budaya pendidikan. Komunitas lokal menyediakan konteks nyata bagi murid untuk belajar tentang solidaritas, kepedulian, dan kearifan lokal.

Misalnya, sekolah di pedesaan dapat bekerja sama dengan petani untuk mengembangkan kurikulum berbasis pertanian berkelanjutan. Sekolah di wilayah pesisir dapat bermitra dengan nelayan untuk mengajarkan ekologi laut. Kolaborasi ini sejalan dengan falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh*: saling peduli, saling mengasah kemampuan, dan saling membimbing dalam kehidupan nyata.

Kolaborasi juga mendukung transformasi karakter murid. Melalui keterlibatan dalam proyek komunitas, murid belajar nilai *Learning to Live Together*: bekerja sama dengan orang berbeda latar belakang, menyelesaikan konflik, dan membangun rasa tanggung jawab sosial. Dalam konteks VUCA, keterampilan sosial ini sama pentingnya dengan keterampilan teknis. Industri dapat berubah, teknologi dapat bergeser, tetapi nilai kerja sama, empati, dan tanggung jawab akan selalu relevan.

Praktik baik kolaborasi sekolah–industri–komunitas dapat ditemukan di banyak daerah. Di Jawa Timur, beberapa SMK bermitra dengan perusahaan otomotif untuk membangun *teaching factory*, di mana murid menghasilkan produk nyata yang dipasarkan. Di Bali, sekolah bekerja sama dengan komunitas adat dalam melestarikan seni dan budaya melalui kurikulum muatan lokal. Di Yogyakarta, sekolah melibatkan komunitas difabel dalam program literasi inklusif, memperkuat nilai toleransi dan kesetaraan.

Secara global, kolaborasi serupa juga menjadi praktik unggulan. Jerman dengan *dual system*-nya mengintegrasikan pembelajaran di sekolah vokasi dengan magang di industri. Finlandia membangun jejaring antara sekolah, universitas, dan komunitas seni untuk memperkaya pendidikan kreatif. Jepang mengaitkan pendidikan dengan masyarakat melalui program *society-based learning*, di mana murid belajar langsung dari komunitas tentang masalah sosial dan mencari solusi bersama. Indonesia dapat belajar dari praktik ini, tetapi tetap menyesuaikan dengan nilai lokal dan konteks sosialnya.

Tantangan kolaborasi terletak pada kesenjangan kepentingan. Industri sering berorientasi pada profit, sementara sekolah berorientasi pada pembentukan karakter. Komunitas memiliki agenda sosial dan budaya yang berbeda. Jika tidak dikelola dengan baik, kolaborasi bisa timpang: sekolah hanya menjadi penyedia tenaga kerja murah, atau komunitas hanya menjadi simbol tanpa keterlibatan nyata. Oleh karena itu, perlu ada

kerangka kolaborasi yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Kebijakan pemerintah menjadi faktor kunci. Program *SMK Pusat Keunggulan* misalnya, berusaha memperkuat jejaring antara sekolah dan industri dengan standar mutu yang jelas. Namun, keberhasilan sejati kolaborasi tidak hanya bergantung pada regulasi, melainkan juga pada kepemimpinan sekolah yang visioner, guru yang proaktif, dan komunitas yang terbuka. Kepemimpinan partisipatif di sekolah akan memastikan bahwa semua pihak merasa memiliki, bukan sekadar pelengkap formal.

Kolaborasi sekolah–industri–komunitas juga harus adaptif terhadap era digital. Industri kini bergerak menuju otomasi dan AI, sehingga kurikulum sekolah perlu menyesuaikan dengan keterampilan baru. Komunitas juga semakin digital, sehingga sekolah dapat bekerja sama dengan komunitas daring, misalnya kelompok literasi digital atau wirausaha berbasis platform. Dengan cara ini, kolaborasi tidak hanya terbatas pada ruang fisik, tetapi juga meluas ke ekosistem virtual.

Pada akhirnya, kolaborasi sekolah–industri–komunitas adalah strategi meso yang menjembatani pendidikan dengan dunia nyata. Ia memastikan bahwa murid tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga kompetensi, karakter, dan jejaring sosial yang memperkuat masa depan mereka. Dengan memadukan pilar UNESCO, falsafah lokal *Silih Asih, Asah, Asuh*, dan praktik global, Indonesia dapat membangun model kolaborasi khas yang bukan hanya relevan untuk konteks nasional, tetapi juga memberi inspirasi bagi dunia.

## **D. Program Pancawaluya SMK & Implementasi Nyata**

Program Pancawaluya SMK adalah inisiatif strategis yang berusaha mengintegrasikan nilai karakter, kompetensi vokasional, dan kesiapan menghadapi dunia kerja dalam satu kesatuan kurikulum dan budaya sekolah. Pancawaluya sendiri terdiri atas lima pilar utama: ketakwaan, kejujuran, disiplin, gotong royong, dan kreativitas. Kelima nilai ini bukan hanya slogan moral, melainkan prinsip kerja yang diarahkan untuk membentuk lulusan SMK yang unggul secara keterampilan, tangguh secara karakter, serta adaptif dalam menghadapi era VUCA–Society 5.0.

Pilar pertama adalah **ketakwaan**, yang menegaskan bahwa pendidikan vokasional tidak boleh terlepas dari dimensi spiritual dan etika. SMK sering dipersepsikan hanya fokus pada keterampilan teknis, padahal nilai-nilai moral menjadi fondasi penting untuk menghadapi dunia kerja yang penuh godaan, persaingan, dan dilema etika. Dengan pilar ketakwaan, murid diajak memahami bahwa keterampilan adalah amanah, dan setiap pekerjaan harus dijalankan dengan integritas. Di kelas maupun bengkel kerja, guru tidak hanya mengajarkan cara menggunakan mesin, tetapi juga menanamkan kesadaran etis tentang keselamatan kerja, kejujuran dalam produksi, dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.

Pilar kedua adalah **kejujuran**, yang menjadi nilai inti dalam membangun profesionalisme. Industri dan masyarakat membutuhkan tenaga kerja yang dapat dipercaya, bukan hanya mahir. Di SMK, kejujuran dapat ditanamkan melalui praktik sederhana, seperti melaporkan hasil kerja sesuai kenyataan, tidak mencontek dalam ujian praktik, hingga membiasakan transparansi dalam proyek kelompok. Kejujuran ini sejalan dengan *Silih Asih*, karena menumbuhkan rasa saling percaya dan memperkuat iklim kolaboratif di sekolah.

Pilar ketiga adalah **disiplin**, yang menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Dunia industri menuntut kedisiplinan tinggi, mulai dari ketepatan waktu hingga konsistensi dalam menjaga mutu produksi. SMK yang menerapkan budaya disiplin secara sistematis mampu membentuk kebiasaan murid yang siap memasuki dunia kerja tanpa harus beradaptasi terlalu lama. Disiplin juga mengajarkan daya tahan menghadapi perubahan, sehingga murid tidak mudah goyah dalam situasi penuh ketidakpastian. Dalam perspektif *Silih Asah*, disiplin berarti mengasah diri secara konsisten agar semakin terampil dan matang.

Pilar keempat adalah **gotong royong**, yang menjadi kekuatan khas pendidikan di Indonesia. Berbeda dengan budaya individualistik, SMK di Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan budaya kerja sama sebagai modal sosial. Dalam bengkel kerja, murid sering dihadapkan pada proyek yang menuntut kolaborasi, misalnya merakit mesin, mengelola bisnis simulatif, atau menyelesaikan proyek teknologi tepat guna. Gotong royong di sini bukan sekadar tradisi, melainkan keterampilan kerja tim yang sangat dibutuhkan dalam industri modern. Prinsip *Learning to Live*

*Together* menemukan wujud nyata ketika murid SMK belajar menghargai kontribusi teman, menyelesaikan konflik, dan berbagi tanggung jawab.

Pilar kelima adalah **kreativitas**, yang membedakan lulusan SMK di era Industri 4.0/5.0. Keterampilan teknis tanpa kreativitas akan mudah tergantikan oleh mesin dan AI. Oleh karena itu, SMK harus menumbuhkan budaya inovasi: mengajak murid memodifikasi alat sederhana menjadi lebih fungsional, menciptakan produk baru dari bahan lokal, atau merancang aplikasi digital yang menjawab kebutuhan komunitas. Kreativitas tidak hanya memberi nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri murid sebagai pencipta, bukan sekadar pekerja.

Implementasi Pancawaluya SMK memerlukan strategi sistemik. Pertama, integrasi dalam kurikulum: nilai Pancawaluya harus hadir dalam setiap mata pelajaran dan praktik vokasional. Kedua, penguatan budaya sekolah: guru dan tenaga kependidikan menjadi teladan nyata dalam menampilkan ketakwaan, kejujuran, disiplin, gotong royong, dan kreativitas. Ketiga, kemitraan dengan industri dan komunitas: nilai Pancawaluya diinternalisasikan melalui praktik kerja nyata, magang, dan program kewirausahaan.

Contoh implementasi nyata dapat ditemukan di berbagai SMK yang sudah mengadopsi Pancawaluya. Sebuah SMK di Jawa Barat, misalnya, mengintegrasikan nilai kejujuran dan disiplin dalam *teaching factory*, di mana murid memproduksi barang untuk dipasarkan. Mereka diajarkan mencatat transaksi dengan transparan, menjaga kualitas produk, dan mengatur waktu produksi sesuai target. Di Jawa Timur, ada SMK yang menekankan gotong royong dengan proyek komunitas: murid bersama guru dan warga membangun teknologi sederhana pengolahan air bersih. Di beberapa daerah lain, kreativitas murid diwujudkan melalui lomba inovasi teknologi, pameran produk, dan program kewirausahaan digital.

Tantangan implementasi Pancawaluya terletak pada konsistensi. Tidak semua sekolah memiliki kapasitas sumber daya yang sama, sehingga ada yang hanya mengadopsi Pancawaluya sebagai slogan tanpa praktik nyata. Di sinilah peran kepemimpinan sekolah sangat penting: kepala sekolah yang visioner mampu membangun sistem yang memastikan Pancawaluya bukan sekadar formalitas, tetapi budaya hidup.

Dalam konteks transformasi pendidikan, Pancawaluya SMK adalah model khas Indonesia yang mengintegrasikan nilai global UNESCO dengan falsafah lokal. Ketakwaan dan kejujuran meneguhkan pilar *Learning to Be*, disiplin memperkuat *Learning to Know* dan *Learning to Do*, gotong royong merefleksikan *Learning to Live Together*, sementara kreativitas menjawab tantangan Society 5.0. Dengan kerangka ini, Pancawaluya bukan hanya strategi internal SMK, tetapi kontribusi Indonesia untuk wacana global tentang pendidikan berbasis karakter, keterampilan, dan kemanusiaan.

## E. Studi Kasus Komunitas Pendidikan Lokal

Komunitas lokal memiliki peran penting dalam menopang transformasi pendidikan. Sekolah tidak dapat berjalan sendiri; ia memerlukan dukungan, kolaborasi, serta keterlibatan masyarakat di sekitarnya. Dari komunitas lahir nilai, sumber daya, dan tradisi yang membentuk karakter murid. Studi kasus komunitas pendidikan lokal memberikan pelajaran nyata bahwa transformasi tidak hanya datang dari kebijakan pusat atau inovasi teknologi, tetapi juga dari kekuatan gotong royong, kearifan budaya, dan solidaritas sosial.

Di pedalaman Kalimantan, ada sekolah komunitas yang dibangun atas inisiatif masyarakat adat. Fasilitas fisiknya sederhana, namun ikatan sosialnya sangat kuat. Orang tua, tokoh adat, dan guru bekerja sama menyediakan bahan ajar yang relevan dengan kehidupan hutan. Murid belajar tentang pengetahuan tradisional, menjaga ekosistem, sekaligus menguasai literasi dasar. Nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* tampak jelas: orang tua dan guru bergandengan tangan untuk mendidik, murid saling mengasah keterampilan bersama, dan komunitas mengasuh sekolah sebagai bagian dari kehidupan bersama.

Di Lombok, pascagempa 2018, komunitas pendidikan menunjukkan daya tahan luar biasa. Sekolah-sekolah yang hancur digantikan dengan tenda darurat, sementara masyarakat bergotong royong menyiapkan sarana belajar seadanya. Guru tetap mengajar meski tanpa papan tulis, dan orang tua ikut terlibat mengatur jadwal agar anak-anak tidak kehilangan semangat belajar. Kasus ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat bertahan bahkan dalam krisis, ketika komunitas mengambil alih peran sebagai benteng

terakhir. Nilai gotong royong menjadi energi utama yang menjaga api belajar tetap menyala.

Di Yogyakarta, komunitas literasi tumbuh pesat melalui taman baca masyarakat (TBM). TBM bukan hanya tempat membaca buku, tetapi ruang belajar alternatif bagi anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan formal. Relawan dari berbagai latar belakang menjadi fasilitator, sementara masyarakat sekitar menyumbangkan buku, ruang, atau tenaga. TBM ini mengajarkan bahwa komunitas dapat melahirkan inovasi pendidikan berbasis solidaritas, tanpa menunggu bantuan besar dari pemerintah. *Learning to Know* dan *Learning to Live Together* hadir bersamaan dalam ruang sederhana yang dikelola dengan cinta.

Contoh lain datang dari Papua, di mana komunitas lokal memadukan pendidikan formal dengan tradisi seni dan musik. Guru dan orang tua bekerja sama mengintegrasikan nyanyian rakyat, tarian adat, dan cerita leluhur ke dalam pembelajaran. Hasilnya, murid tidak hanya belajar matematika atau bahasa, tetapi juga memperkuat identitas budaya mereka. Pendidikan di sini berfungsi ganda: menyiapkan masa depan yang modern sekaligus menjaga akar tradisi.

Praktik baik juga terlihat pada komunitas berbasis pesantren. Banyak pesantren modern mengembangkan program kemitraan dengan masyarakat sekitar, seperti koperasi, klinik kesehatan, atau kursus keterampilan. Murid belajar tidak hanya dalam lingkup agama, tetapi juga melalui interaksi sosial dan ekonomi nyata. Pesantren menjadi pusat pendidikan sekaligus pusat pemberdayaan komunitas. Konsep ini memperlihatkan integrasi nilai spiritual, sosial, dan keterampilan praktis secara harmonis.

Secara internasional, Rwanda memberi teladan pascakonflik. Sekolah bekerja sama dengan komunitas untuk membangun pendidikan perdamaian. Murid dari latar belakang yang sebelumnya bermusuhan belajar bersama dalam proyek komunitas, seperti pembangunan fasilitas umum atau kegiatan sosial. Pendidikan menjadi alat rekonsiliasi, dan komunitas menjadi arena nyata untuk mengajarkan toleransi serta solidaritas.

Dari berbagai studi kasus ini, ada pola yang bisa ditarik. Pertama, komunitas yang terlibat aktif dalam pendidikan mampu memperkuat resiliensi sekolah, terutama di masa krisis. Kedua, keterlibatan komunitas

memperkaya kurikulum dengan konteks lokal, sehingga murid merasa pembelajaran relevan dengan kehidupan mereka. Ketiga, pendidikan berbasis komunitas menumbuhkan rasa memiliki, karena sekolah tidak dilihat sebagai entitas terpisah, melainkan bagian dari kehidupan sosial.

Tantangan tetap ada. Tidak semua komunitas memiliki sumber daya memadai. Ada yang menghadapi keterbatasan dana, literasi rendah, atau perbedaan kepentingan antaranggota. Namun, justru dalam keterbatasan itulah lahir inovasi. Komunitas menemukan cara kreatif untuk mendukung sekolah, misalnya dengan sistem iuran sederhana, program relawan, atau kerja sama dengan lembaga eksternal.

Pada akhirnya, studi kasus komunitas pendidikan lokal menunjukkan bahwa transformasi sejati tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan masyarakat. Sekolah adalah bagian dari komunitas, dan komunitas adalah bagian dari sekolah. Dengan mengintegrasikan pilar UNESCO dan falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh*, komunitas pendidikan lokal dapat menjadi inspirasi bagi pembangunan sistem pendidikan yang berakar kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Dari desa terpencil hingga kota besar, komunitas adalah denyut nadi yang memastikan pendidikan tetap hidup, relevan, dan transformatif.





## BAB 15

### STRATEGI DI LEVEL MAKRO (KEBIJAKAN & NASIONAL)

Pendidikan adalah urusan kolektif yang melampaui batas ruang kelas dan sekolah. Ia tidak hanya dipengaruhi oleh interaksi guru–murid (mikro) atau dinamika sekolah–komunitas (meso), melainkan juga sangat ditentukan oleh kebijakan, regulasi, visi pembangunan, serta arah politik nasional dan global (makro). Level makro inilah yang menjadi kerangka besar, yang menyediakan landasan, sumber daya, dan arah transformasi pendidikan. Tanpa kebijakan yang berpihak, dukungan anggaran yang memadai, dan visi yang jelas, strategi mikro dan meso sering kali tidak mampu berkembang secara optimal.

Strategi pendidikan di level makro mencakup formulasi kebijakan, perencanaan jangka panjang, dan penyesuaian dengan standar serta agenda internasional. Di era VUCA–Society 5.0, negara tidak lagi cukup hanya menyediakan akses pendidikan, melainkan juga harus memastikan kualitas, relevansi, keadilan, dan keberlanjutan. Kompleksitas global menuntut pemerintah untuk cermat mengelola keterbatasan sumber daya, cepat merespons disrupsi, sekaligus konsisten menjaga arah pembangunan jangka panjang.

Indonesia memiliki visi besar *Indonesia Emas 2045*, yang menempatkan pendidikan sebagai pilar utama untuk mencetak generasi unggul. Visi ini selaras dengan agenda global SDGs 2030, khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata. Namun, visi tersebut hanya bisa diwujudkan jika strategi makro benar-benar mampu menyatukan kebijakan nasional dengan praktik nyata di lapangan. Di sinilah pentingnya pendekatan integratif: kebijakan yang visioner, tetapi tetap responsif terhadap dinamika lokal.

Nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* dapat diinternalisasikan ke dalam strategi makro. *Silih Asih* menjadi semangat empati sosial dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan: anak-anak miskin, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan kelompok dengan kebutuhan khusus. *Silih Asah* menjadi kerangka untuk terus memperbaiki kebijakan melalui evaluasi, riset, dan refleksi. *Silih Asuh* menjadi landasan moral agar pemerintah tidak hanya melihat pendidikan sebagai proyek ekonomi, tetapi sebagai tanggung jawab luhur untuk membimbing generasi bangsa.

Pada level makro, kebijakan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari agenda internasional. UNESCO, OECD, dan berbagai forum global menekankan pentingnya pendidikan berbasis kompetensi, karakter, dan keberlanjutan. Indonesia perlu memosisikan diri sebagai negara yang aktif berkontribusi dalam percakapan global ini, sekaligus berani mengajukan model khas berbasis kearifan lokal seperti Pancawaluya SMK atau integrasi nilai *Silih Asih, Asah, Asuh*. Dengan demikian, strategi makro Indonesia tidak hanya mengikuti arus global, tetapi juga memberi warna dan inspirasi baru.

Bab 15 akan membahas strategi pendidikan di level makro melalui lima subbab: kebijakan pendidikan nasional dan penyelarasan global, peran agenda UNESCO dan OECD dalam memperkuat mutu, peta jalan menuju Indonesia Emas 2045, reformasi kurikulum nasional yang relevan dengan era VUCA–Society 5.0, serta dinamika politik pendidikan di Indonesia. Setiap subbab akan menguraikan bagaimana kebijakan dapat menjadi motor transformasi, bukan sekadar regulasi formal.

Dengan kerangka ini, kita diajak melihat bahwa strategi makro adalah ruang penentu arah pendidikan bangsa. Di sinilah keputusan besar diambil: seberapa besar anggaran pendidikan, model kurikulum apa yang digunakan,

bagaimana hubungan dengan dunia industri, sejauh mana keberpihakan pada daerah tertinggal. Namun, strategi makro yang baik bukan hanya tentang kebijakan besar, melainkan juga tentang kemampuannya menghidupi level meso dan mikro. Pendidikan nasional hanya akan berhasil jika kebijakan makro selaras dengan dinamika sekolah dan kebutuhan murid di kelas.

## A. Kebijakan Pendidikan Nasional & Global Alignment

Kebijakan pendidikan nasional adalah kompas yang menentukan arah pembangunan manusia suatu bangsa. Namun, di era globalisasi yang ditandai oleh VUCA–Society 5.0, kebijakan nasional tidak bisa lagi berdiri sendiri. Dunia yang semakin terhubung menuntut setiap negara untuk menyelaraskan diri dengan standar, agenda, dan kesepakatan global. Subbab ini membahas bagaimana kebijakan pendidikan nasional Indonesia dirancang, dilaksanakan, dan diselaraskan dengan agenda internasional seperti UNESCO, OECD, dan SDGs 2030.

Pendidikan di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi kunci, mulai dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), kebijakan kurikulum, hingga program afirmasi yang didukung anggaran negara. Setiap kebijakan dirancang untuk mencapai tujuan fundamental: mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter, dan menyiapkan generasi yang mampu bersaing secara global. Namun, dalam praktiknya, kebijakan nasional harus selalu diperbarui agar relevan dengan dinamika zaman, mulai dari revolusi industri 4.0, transformasi digital, hingga tuntutan pembangunan berkelanjutan.

Keselarasan dengan agenda global terlihat jelas dalam komitmen Indonesia terhadap **SDGs 2030**, khususnya SDG 4 yang menekankan pendidikan inklusif, berkualitas, dan merata. Target ini mendorong pemerintah untuk memperluas akses pendidikan di daerah 3T, meningkatkan literasi dan numerasi, serta memperkuat kompetensi abad 21. Namun, keselarasan tidak berhenti pada akses, melainkan juga pada kualitas: bagaimana memastikan lulusan tidak hanya mampu membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga berpikir kritis, berkolaborasi, dan memiliki empati sosial.

UNESCO memberi kerangka filosofis melalui empat pilar pendidikan: *Learning to Know*, *Learning to Do*, *Learning to Be*, dan *Learning to Live Together*. Pilar ini selaras dengan visi nasional Indonesia dalam membentuk manusia seutuhnya. Misalnya, program *Merdeka Belajar* yang diluncurkan pemerintah mengandung semangat *Learning to Be* dan *Learning to Do*, karena menekankan pembelajaran yang berpusat pada murid serta memperkuat keterampilan praktis. Sementara itu, nilai gotong royong dan keberagaman budaya Indonesia memperkaya pilar *Learning to Live Together*.

OECD berperan memberi arah berbasis data melalui survei internasional seperti PISA (Programme for International Student Assessment). Hasil PISA menjadi cermin bagi Indonesia untuk melihat posisi globalnya dalam literasi, numerasi, dan sains. Meskipun capaian Indonesia masih di bawah rata-rata OECD, survei ini mendorong lahirnya kebijakan berbasis bukti, seperti penguatan literasi numerasi dasar dan inovasi kurikulum. Dengan kata lain, alignment global bukan hanya soal mengikuti standar, tetapi menjadikannya sebagai alat refleksi untuk perbaikan internal.

Dalam konteks Society 5.0, kebijakan pendidikan nasional juga diarahkan pada transformasi digital. Pemerintah berupaya memperluas akses internet, memperkenalkan platform belajar daring, dan mendorong penggunaan AI serta big data dalam pendidikan. Program Digitalisasi Sekolah, misalnya, menjadi bagian penting dari upaya menyelaraskan diri dengan tren global. Namun, digitalisasi harus tetap berakar pada nilai humanistik agar teknologi tidak mereduksi pendidikan menjadi sekadar transfer informasi.

Integrasi nilai lokal menjadi penyeimbang penting dalam alignment global. Falsafah *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* memberi perspektif unik dalam mendingkat kebijakan pendidikan. *Silih Asih* menekankan empati dalam kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan. *Silih Asah* mendorong kebijakan yang membuka ruang inovasi dan perbaikan berkelanjutan. *Silih Asuh* menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab moral negara terhadap generasi mendatang. Dengan integrasi ini, kebijakan nasional tidak hanya responsif terhadap standar global, tetapi juga otentik dengan jati diri bangsa.

Studi kasus dari negara lain memberikan inspirasi penting. Finlandia mengedepankan kebijakan otonomi guru, Jepang menekankan Society 5.0

dengan pendidikan berbasis teknologi humanistik, sementara Singapura memfokuskan pada keterampilan STEM dan inovasi. Indonesia dapat belajar dari mereka, namun dengan adaptasi sesuai konteks sosial-budaya dan kebutuhan domestik. Alignment global tidak berarti menyalin, tetapi menerjemahkan praktik baik dunia ke dalam kerangka lokal.

Tantangan terbesar dalam alignment global adalah kesenjangan kapasitas antarwilayah. Kebijakan nasional sering kali dirancang dengan perspektif pusat, tetapi implementasinya berbeda di daerah. Daerah perkotaan lebih cepat menyerap inovasi global karena memiliki infrastruktur yang memadai, sementara daerah terpencil masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan nasional harus bersifat diferensiatif, memberi ruang afirmasi yang kuat untuk daerah tertinggal, tanpa mengurangi semangat keselarasan global.

Pada akhirnya, kebijakan pendidikan nasional dan alignment global bukanlah dua hal yang berlawanan, melainkan dua sisi dari satu mata uang. Indonesia membutuhkan kebijakan nasional yang kuat untuk menjaga identitas, sekaligus keterbukaan terhadap agenda global agar tetap relevan dan kompetitif. Dengan menjadikan pilar UNESCO, data OECD, target SDGs, serta falsafah lokal *Silih Asih, Asah, Asuh* sebagai landasan, Indonesia dapat merumuskan kebijakan pendidikan yang visioner, inklusif, dan mampu menjawab tantangan abad 21.

## **B. Agenda UNESCO, OECD, dan Praktik Internasional**

Agenda pendidikan global yang digagas oleh UNESCO, OECD, dan berbagai forum internasional berfungsi sebagai arah kolektif untuk memastikan pendidikan tidak hanya menjadi kebutuhan nasional, tetapi juga tanggung jawab bersama umat manusia. Dalam konteks dunia yang saling terhubung, praktik pendidikan suatu negara dapat memengaruhi perkembangan global, begitu pula sebaliknya. Subbab ini membahas bagaimana agenda UNESCO dan OECD membentuk arah kebijakan pendidikan internasional, serta bagaimana praktik-praktik unggul di berbagai negara dapat menjadi inspirasi sekaligus cermin reflektif bagi Indonesia.

UNESCO menempatkan pendidikan sebagai hak asasi manusia sekaligus fondasi perdamaian dunia. Melalui *Education 2030 Framework for*

*Action*, UNESCO menekankan pentingnya pendidikan inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua, sejalan dengan SDG 4. Agenda ini menekankan bahwa pendidikan tidak hanya soal keterampilan kerja, tetapi juga pembangunan manusia seutuhnya, yang mencakup dimensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Empat pilar UNESCO—*Learning to Know*, *Learning to Do*, *Learning to Be*, dan *Learning to Live Together*—masih relevan hingga hari ini, bahkan semakin penting di era disrupsi.

OECD memberikan kontribusi berbeda dengan pendekatan berbasis data. Melalui instrumen seperti PISA (Programme for International Student Assessment), TALIS (Teaching and Learning International Survey), dan Education GPS, OECD mengukur kemampuan murid, kompetensi guru, serta sistem pendidikan di berbagai negara. Data ini memberi cermin obyektif tentang posisi sebuah negara dalam lanskap global. Indonesia, misalnya, masih menghadapi tantangan dalam literasi, numerasi, dan sains, namun melalui data OECD, pemerintah dapat merancang kebijakan berbasis bukti, seperti penguatan literasi dasar dan diferensiasi kurikulum.

Agenda UNESCO dan OECD saling melengkapi. Jika UNESCO menekankan filosofi dan visi kemanusiaan, OECD memberi dasar analisis empiris. Keduanya sama-sama menuntut negara untuk tidak hanya berfokus pada capaian akademik sempit, tetapi juga pada pengembangan keterampilan abad ke-21, karakter, dan kesejahteraan murid. Bagi Indonesia, menyelaraskan diri dengan kedua agenda ini berarti tidak sekadar mengejar skor PISA, tetapi membangun ekosistem pendidikan yang berakar pada budaya lokal sekaligus terbuka pada standar global.

Praktik internasional memberi inspirasi nyata tentang bagaimana agenda global diterjemahkan di tingkat nasional. Finlandia, misalnya, dikenal dengan kebijakan pendidikan berbasis kepercayaan pada guru. Tidak ada ujian nasional yang ketat, namun mutu tetap tinggi karena guru diberi otonomi penuh untuk merancang pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Model ini sejalan dengan semangat *Merdeka Belajar* di Indonesia, meski implementasi di sini masih perlu penguatan.

Jepang mengembangkan konsep *Society 5.0* dengan menekankan pendidikan berbasis teknologi humanistik. Sekolah di Jepang membiasakan murid menggunakan teknologi bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga untuk kepentingan sosial. Misalnya, proyek murid diarahkan pada solusi

permasalahan masyarakat, seperti membantu lansia melalui aplikasi digital. Model ini menunjukkan integrasi antara *Learning to Do* dan *Learning to Live Together*, yang relevan untuk konteks Indonesia dengan kearifan lokal gotong royong.

Singapura mengembangkan kebijakan pendidikan yang fokus pada STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) dan inovasi. Pemerintah secara aktif membangun ekosistem pendidikan yang terhubung dengan industri dan riset, sehingga lulusan tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap menciptakan pekerjaan baru. Strategi ini memperlihatkan bagaimana alignment dengan agenda OECD dilakukan tanpa kehilangan arah nasional. Indonesia dapat belajar dari Singapura dalam hal kemitraan sekolah-industri, tetapi dengan sentuhan budaya lokal seperti Pancawaluya SMK.

Negara-negara Skandinavia menekankan kesejahteraan murid sebagai bagian integral dari pendidikan. Mereka percaya bahwa murid yang bahagia dan sehat mentalnya akan lebih siap belajar. Pendekatan ini sangat selaras dengan pilar UNESCO *Learning to Be*. Indonesia juga mulai mengarah ke sana dengan perhatian pada kesehatan mental murid, meski implementasi di sekolah-sekolah masih menghadapi tantangan struktural.

Tantangan utama bagi Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan agenda internasional adalah kesenjangan internal. Sebagian sekolah di kota besar sudah mampu menerapkan praktik global, seperti pembelajaran berbasis proyek atau penggunaan AI dalam kelas, tetapi banyak sekolah di daerah 3T masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Oleh karena itu, alignment global harus dilakukan dengan prinsip keadilan sosial: kebijakan nasional harus memastikan bahwa inovasi global tidak hanya dinikmati oleh segelintir, tetapi merata untuk seluruh anak bangsa.

Nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* memberi perspektif khas Indonesia dalam percakapan global ini. *Silih Asih* menekankan bahwa pendidikan harus berpihak pada kelompok rentan. *Silih Asah* mengingatkan bahwa setiap bangsa saling belajar, sehingga praktik internasional bukan untuk ditiru mentah-mentah, melainkan untuk mengasah strategi sendiri. *Silih Asuh* memberi pesan moral bahwa Indonesia tidak hanya mengambil manfaat dari agenda global, tetapi juga memiliki tanggung jawab memberi kontribusi, misalnya melalui model pendidikan berbasis kearifan lokal.

Pada akhirnya, agenda UNESCO, OECD, dan praktik internasional bukanlah beban, melainkan peluang. Mereka memberi arah, standar, dan inspirasi, tetapi yang menentukan adalah bagaimana Indonesia mampu menerjemahkannya ke dalam konteks lokal. Dengan keberanian, refleksi, dan integrasi nilai budaya, Indonesia bukan hanya pengikut, tetapi juga bisa menjadi pemimpin yang memberi kontribusi bagi diskursus pendidikan global.

### C. Roadmap Pendidikan Indonesia Emas 2045

Visi besar *Indonesia Emas 2045* hadir sebagai kompas pembangunan nasional ketika bangsa ini merayakan satu abad kemerdekaan. Pendidikan ditempatkan sebagai kunci utama untuk mencapai visi tersebut, karena tanpa sumber daya manusia yang unggul, semua target ekonomi, sosial, dan politik hanya akan menjadi utopia. Subbab ini membahas bagaimana roadmap pendidikan menuju Indonesia Emas 2045 dirancang, apa saja tahapannya, serta bagaimana integrasi nilai global–lokal diperlukan agar visi itu tidak hanya menjadi wacana, tetapi kenyataan.

Pendidikan untuk Indonesia Emas 2045 harus menyiapkan generasi yang unggul dalam empat dimensi: kompetensi, karakter, kreativitas, dan daya saing global. Kompetensi berkaitan dengan penguasaan literasi, numerasi, sains, teknologi, dan keterampilan vokasional. Karakter menekankan integritas, empati, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial. Kreativitas menegakkan kemampuan menciptakan solusi inovatif, bukan sekadar mengikuti pola. Daya saing global menuntut generasi muda mampu bersaing dan berkontribusi di panggung internasional, tanpa kehilangan akar budaya.

Tahap awal roadmap ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan jangka menengah, seperti *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)* dan strategi *Merdeka Belajar*. Program ini menjadi fondasi agar sekolah lebih otonom, guru lebih profesional, dan murid lebih merdeka dalam belajar. Dalam jangka panjang, roadmap 2045 menargetkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan sistem pendidikan berkelas dunia, yang tidak hanya mengejar skor PISA atau indikator global, tetapi juga melahirkan manusia yang berkarakter Pancasila.

Tiga fase penting perlu digambarkan. Pertama, fase 2025–2035 adalah periode konsolidasi. Pada fase ini, fokus utama adalah memperkuat literasi dan numerasi dasar, memperbaiki infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah, serta memperkecil kesenjangan kualitas antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di sinilah Rapor Pendidikan dan SPMI berfungsi sebagai instrumen reflektif, memastikan setiap sekolah memiliki data dan strategi perbaikan berkelanjutan.

Fase kedua, 2035–2040, adalah periode akselerasi. Di tahap ini, pendidikan Indonesia harus melangkah lebih jauh dari sekadar akses dan kualitas dasar menuju penguatan keterampilan abad 21. Kurikulum harus sepenuhnya berorientasi pada *critical thinking, creativity, collaboration, dan communication* (4C), serta penguasaan teknologi digital, AI, dan green economy. Pendidikan vokasi harus semakin terintegrasi dengan industri, sementara pendidikan tinggi harus menghasilkan riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan nasional dan global.

Fase ketiga, 2040–2045, adalah periode pencapaian puncak. Pada tahap ini, Indonesia diharapkan sudah memiliki ekosistem pendidikan yang resilien, inklusif, dan berdaya saing global. Murid yang lulus dari sistem pendidikan tidak hanya siap kerja, tetapi siap menjadi pencipta lapangan kerja, inovator sosial, dan pemimpin dunia. Pendidikan berbasis kearifan lokal harus menemukan bentuk globalnya, di mana nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* dan Pancawaluya SMK tidak hanya dipraktikkan di Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi internasional.

Agenda global seperti SDGs 2030, UNESCO, dan OECD harus tetap dijadikan rujukan dalam roadmap ini, tetapi dengan interpretasi khas Indonesia. Misalnya, target SDG 4 tentang pendidikan inklusif dapat diperkaya dengan nilai gotong royong. Pilar UNESCO tentang *Learning to Live Together* dapat dipadukan dengan falsafah Pancasila. OECD PISA yang mengukur literasi dapat menjadi pemicu, tetapi interpretasi Indonesia harus melampaui angka, yaitu membangun generasi yang berintegritas.

Tantangan dalam mewujudkan roadmap ini tentu tidak kecil. Kesenjangan pendidikan antarwilayah, kualitas guru yang belum merata, serta keterbatasan infrastruktur digital adalah masalah mendasar. Selain itu, dinamika politik dan perubahan kebijakan bisa menghambat kesinambungan visi jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi lintas

pemerintahan: visi Indonesia Emas 2045 tidak boleh berubah setiap lima tahun, melainkan harus dijaga sebagai komitmen bersama bangsa.

Nilai *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* bisa menjadi fondasi filosofis roadmap ini. *Silih Asih* mengingatkan bahwa pendidikan harus berpihak pada yang lemah, bukan hanya melayani elite. *Silih Asah* mendorong refleksi dan perbaikan terus-menerus. *Silih Asuh* memberi arah moral bahwa pendidikan adalah tanggung jawab luhur, bukan sekadar proyek pembangunan. Dengan integrasi nilai ini, roadmap pendidikan Indonesia Emas 2045 akan memiliki kekuatan spiritual, sosial, dan kultural yang membedakannya dari model negara lain.

Akhirnya, roadmap menuju Indonesia Emas 2045 bukan sekadar daftar target, melainkan perjalanan panjang menuju peradaban unggul. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak bisa dilihat dalam hitungan tahun, melainkan generasi. Jika strategi ini konsisten, maka Indonesia berpeluang besar bukan hanya menjadi negara maju secara ekonomi, tetapi juga peradaban yang memberi warna baru bagi dunia.

## D. Reformasi Kurikulum Nasional

Kurikulum adalah jantung pendidikan. Ia menentukan apa yang diajarkan, bagaimana diajarkan, dan nilai apa yang ditanamkan. Reformasi kurikulum nasional di Indonesia selalu menjadi isu besar, karena setiap perubahan mencerminkan arah politik, visi pembangunan, dan respon terhadap tantangan zaman. Subbab ini membahas bagaimana reformasi kurikulum nasional dilakukan dalam konteks era VUCA–Society 5.0, apa yang sudah dicapai melalui Kurikulum Merdeka, tantangan implementasi di lapangan, serta bagaimana integrasi nilai global dan lokal dapat memperkaya arah reformasi.

Reformasi kurikulum di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjangnya. Sejak awal kemerdekaan hingga kini, kurikulum telah berganti lebih dari sepuluh kali. Setiap pergantian biasanya dipicu oleh kebutuhan menyesuaikan dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi. Pada masa awal, kurikulum berfokus pada nation building dan nasionalisme. Era 1970–1980-an menekankan pembangunan ekonomi. Kurikulum 2004–2006 mulai mengenalkan pendekatan berbasis kompetensi. Lalu, Kurikulum

2013 menekankan pendidikan karakter. Kini, Kurikulum Merdeka lahir sebagai jawaban atas kebutuhan fleksibilitas, diferensiasi, dan relevansi dengan dunia abad 21.

Kurikulum Merdeka adalah salah satu wujud reformasi besar yang membawa perubahan paradigma. Ia menempatkan murid sebagai pusat pembelajaran, memberi ruang fleksibilitas bagi guru, dan menekankan pembelajaran berbasis proyek. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks Society 5.0, di mana keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas lebih penting dibanding hafalan semata. Dengan model ini, murid didorong untuk menjadi pembelajar mandiri, bukan sekadar penerima informasi.

Dalam praktiknya, Kurikulum Merdeka menekankan tiga aspek utama. Pertama, **pembelajaran berbasis kompetensi**, bukan sekadar konten. Fokusnya adalah murid mampu menunjukkan keterampilan nyata, misalnya literasi, numerasi, problem solving, dan karakter. Kedua, **fleksibilitas kurikulum**, di mana sekolah dan guru diberi ruang untuk menyesuaikan materi dengan konteks lokal dan kebutuhan murid. Ketiga, **proyek profil pelajar Pancasila**, yang menghadirkan pengalaman belajar kontekstual tentang keberagaman, gotong royong, keberlanjutan, dan kebhinnekaan global.

Reformasi kurikulum nasional juga harus selaras dengan agenda global. Pilar UNESCO tercermin dalam pendekatan Kurikulum Merdeka: *Learning to Know* melalui penguatan literasi, *Learning to Do* melalui pembelajaran berbasis proyek, *Learning to Be* melalui pengembangan profil pelajar Pancasila, dan *Learning to Live Together* melalui penekanan pada toleransi serta kebhinnekaan. Alignment dengan OECD juga tampak dalam penekanan pada keterampilan numerasi dan literasi, yang menjadi indikator kunci dalam PISA.

Namun, reformasi kurikulum tidak hanya soal konsep, tetapi juga implementasi. Tantangan besar muncul dalam kesenjangan antara sekolah di kota dan desa, sekolah negeri dan swasta, serta sekolah dengan sumber daya melimpah versus yang terbatas. Banyak guru masih kebingungan menerjemahkan fleksibilitas kurikulum ke dalam praktik pembelajaran. Di sisi lain, orang tua murid sering menuntut hasil ujian tradisional, sehingga guru terjebak dalam dilema antara inovasi dan ekspektasi lama.

Selain itu, digitalisasi menjadi faktor penting dalam reformasi kurikulum. Pembelajaran daring, platform digital, dan AI membuka peluang untuk memperkaya metode pembelajaran, tetapi juga menghadirkan risiko ketimpangan baru. Sekolah di perkotaan bisa lebih cepat mengadopsi teknologi, sementara sekolah di daerah 3T masih berjuang dengan akses internet. Oleh karena itu, reformasi kurikulum harus berjalan beriringan dengan kebijakan pemerataan infrastruktur digital.

Nilai lokal juga harus diintegrasikan agar kurikulum tidak kehilangan identitas. Falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh* dapat memberi dimensi humanistik pada kurikulum: *Silih Asih* memperkuat pembelajaran berbasis kasih sayang dan empati, *Silih Asah* menekankan budaya saling belajar dan refleksi, *Silih Asuh* memastikan adanya bimbingan moral yang mengakar pada budaya Nusantara. Integrasi ini membuat reformasi kurikulum tidak sekadar adopsi tren global, tetapi pembaruan yang autentik.

Beberapa praktik baik menunjukkan potensi besar reformasi ini. Sekolah-sekolah penggerak yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka melaporkan peningkatan partisipasi murid dalam diskusi, proyek, dan kreativitas. Guru lebih bebas menyesuaikan metode sesuai kebutuhan murid, sementara murid lebih berani mengekspresikan ide. Namun, keberhasilan ini masih bersifat parsial, sehingga perlu didorong agar menyebar lebih luas.

Pada akhirnya, reformasi kurikulum nasional harus dipahami sebagai proses panjang, bukan produk instan. Ia membutuhkan konsistensi, dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas guru, serta keterlibatan orang tua dan komunitas. Kurikulum yang baik bukan hanya dokumen di atas kertas, tetapi hidup dalam interaksi nyata antara guru dan murid. Jika reformasi ini dijalankan dengan konsisten, maka pada 2045 Indonesia akan memiliki generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter, kreatif, dan mampu menjadi warga dunia yang bertanggung jawab.

## E. Politik Pendidikan di Era VUCA

Pendidikan tidak pernah steril dari politik. Sejak awal sejarahnya, arah dan bentuk pendidikan selalu dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan, ideologi yang dominan, serta visi pembangunan suatu negara. Di era VUCA—yang

ditandai volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas—politik pendidikan menjadi semakin penting, karena setiap kebijakan, alokasi anggaran, hingga reformasi kurikulum dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan politik. Subbab ini membahas bagaimana politik pendidikan Indonesia bergerak di tengah dinamika global dan domestik, sekaligus bagaimana falsafah lokal dan agenda global dapat menjadi penyeimbang agar pendidikan tidak hanya menjadi instrumen kekuasaan, tetapi juga wahana transformasi bangsa.

Politik pendidikan di Indonesia selalu berjalan dalam ketegangan antara idealisme dan pragmatisme. Di satu sisi, konstitusi menegaskan pendidikan sebagai hak setiap warga negara. Di sisi lain, praktik politik sering kali menjadikan pendidikan sebagai arena kontestasi kepentingan, baik untuk legitimasi kekuasaan, pencitraan publik, maupun perebutan sumber daya. Hal ini terlihat dari kebijakan yang sering berubah seiring pergantian menteri atau rezim pemerintahan, sehingga kesinambungan visi jangka panjang sulit tercapai.

Era VUCA memperumit situasi ini. Volatilitas membuat kebijakan pendidikan rentan berubah sesuai tekanan sosial-ekonomi. Misalnya, saat pandemi COVID-19, kebijakan pendidikan bergeser drastis ke arah digitalisasi darurat, yang meski penting, tetapi memperlihatkan lemahnya infrastruktur di banyak daerah. Ketidakpastian memunculkan dilema: apakah fokus pada pemerataan akses, atau meningkatkan kualitas untuk mengejar ketertinggalan global. Kompleksitas menuntut kebijakan lintas sektor—pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan ekonomi, kesehatan, politik, dan budaya. Ambiguitas memunculkan multi-interpretasi tentang arah reformasi, sehingga kebijakan sering kali bersifat tambal sulam.

Alokasi anggaran pendidikan yang konstitusional sebesar 20% dari APBN adalah contoh nyata politik pendidikan. Secara ideal, angka ini mencerminkan komitmen negara pada pendidikan. Namun dalam praktik, distribusi anggaran sering diperdebatkan: apakah lebih banyak untuk infrastruktur, gaji guru, atau program inovasi. Pergulatan politik menentukan siapa yang mendapatkan porsi lebih besar, dan keputusan ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan.

Politik pendidikan juga terlihat dalam reformasi kurikulum. Kurikulum 2013, misalnya, lahir dari orientasi politik yang menekankan pendidikan karakter, sementara Kurikulum Merdeka lahir dalam konteks politik desentralisasi dan kebutuhan fleksibilitas di era digital. Setiap kurikulum membawa ideologi tersendiri: nasionalisme, pragmatisme ekonomi, atau humanisme. Tantangan di era VUCA adalah bagaimana memastikan reformasi kurikulum tidak sekadar reaksi politik jangka pendek, tetapi bagian dari roadmap jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Di tingkat global, politik pendidikan juga tidak terhindarkan. Agenda UNESCO, OECD, dan SDGs sering memengaruhi arah kebijakan domestik. Pemerintah Indonesia harus menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan standar global. Misalnya, skor PISA sering menjadi tolok ukur internasional, tetapi fokus berlebihan pada ranking global bisa membuat kebijakan domestik lebih menekankan pada ujian daripada membangun karakter. Politik pendidikan harus mampu mengelola tekanan global ini agar tetap relevan dengan konteks lokal.

Nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* dapat menjadi penyeimbang dalam politik pendidikan. *Silih Asih* menekankan kebijakan yang berpihak pada yang lemah, bukan hanya elite. *Silih Asah* menegaskan bahwa kebijakan harus terus diperbaiki melalui refleksi, riset, dan pembelajaran dari pengalaman. *Silih Asuh* mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral membimbing generasi, bukan sekadar menggunakan pendidikan untuk kepentingan politik sesaat.

Studi kasus menunjukkan bagaimana politik pendidikan memengaruhi sistem. Di beberapa daerah, kepala daerah progresif berhasil mengintegrasikan kebijakan lokal dengan agenda nasional, misalnya penguatan literasi berbasis budaya. Namun, di daerah lain, kepentingan politik justru membuat pendidikan terpinggirkan, dengan alokasi anggaran lebih banyak ke proyek infrastruktur non-pendidikan. Perbedaan ini memperlihatkan betapa politik lokal turut menentukan wajah pendidikan.

Politik pendidikan juga berhubungan erat dengan isu keadilan sosial. Ketika kebijakan lebih berpihak pada sekolah di kota besar, ketimpangan semakin melebar. Murid di daerah 3T sering menjadi korban dari ketidakmampuan politik nasional untuk benar-benar mengutamakan pemerataan.

Dalam konteks ini, politik pendidikan bukan hanya soal teknis, tetapi soal keadilan sosial yang menentukan masa depan bangsa.

Pada akhirnya, politik pendidikan di era VUCA harus diarahkan pada stabilitas visi, keberanian membuat keputusan berbasis bukti, serta keberpihakan pada kelompok yang paling membutuhkan. Pendidikan tidak boleh dijadikan alat kekuasaan, tetapi harus menjadi wahana membangun peradaban. Jika politik pendidikan mampu mengintegrasikan visi global, kebutuhan lokal, dan nilai budaya, maka Indonesia akan memiliki sistem yang bukan hanya tangguh menghadapi krisis, tetapi juga mampu menjadi mercusuar pendidikan di dunia.



# BAGIAN VI

## STUDI KASUS & BEST PRACTICES







# BAB 16

## PRAKTIK SEKOLAH UNGGUL DI INDONESIA

Setelah membahas strategi pada level mikro (guru–murid), meso (sekolah–komunitas), dan makro (kebijakan nasional–global), kini saatnya masuk pada ranah konkret: praktik sekolah unggul di Indonesia. Bab ini menghadirkan cermin nyata bagaimana teori, kebijakan, dan filosofi pendidikan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Praktik sekolah unggul penting untuk ditampilkan karena ia bukan sekadar inspirasi, melainkan bukti bahwa transformasi pendidikan mungkin dilakukan meskipun dalam keterbatasan sumber daya.

Sekolah unggul bukan hanya tentang fasilitas fisik yang megah atau peringkat akademik yang tinggi. Ia ditandai oleh budaya belajar yang sehat, kepemimpinan yang visioner, guru yang berdedikasi, murid yang aktif dan kreatif, serta keterlibatan komunitas yang kuat. Dalam konteks Indonesia, sekolah unggul hadir dengan wajah yang beragam: ada yang unggul dalam inovasi digital, ada yang kuat dalam membangun karakter, ada pula yang menonjol karena integrasi dengan kearifan lokal atau kemitraan dengan industri.

Era VUCA dan Society 5.0 menuntut sekolah untuk tidak sekadar mengikuti standar lama, melainkan berinovasi agar tetap relevan. Sekolah unggul mampu menjawab tantangan ini dengan cara uniknya masing-masing. Ada sekolah yang berhasil memanfaatkan teknologi digital secara kreatif untuk meningkatkan literasi. Ada yang membangun resilience komunitas sekolah saat menghadapi krisis, misalnya pandemi atau bencana alam. Ada pula yang mengembangkan kurikulum berbasis proyek yang berakar pada budaya lokal namun berorientasi global.

Pilar UNESCO juga menemukan aktualisasinya dalam sekolah unggul. *Learning to Know* tampak pada literasi dan numerasi yang dikuatkan dengan strategi inovatif. *Learning to Do* terwujud dalam keterampilan abad ke-21, khususnya kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan critical thinking. *Learning to Be* hadir melalui pendidikan karakter, kesehatan mental, dan spiritualitas. *Learning to Live Together* terlihat dalam praktik inklusivitas, toleransi, dan gotong royong yang dijalankan sehari-hari di lingkungan sekolah.

Nilai *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* juga menjadi ciri khas sekolah unggul di Indonesia. *Silih Asih* terlihat dalam hubungan guru dan murid yang penuh kasih sayang dan kepedulian. *Silih Asah* hadir dalam budaya saling belajar antar murid, guru, dan komunitas. *Silih Asuh* tampak dalam bimbingan moral yang konsisten, sehingga sekolah bukan hanya tempat mengajar pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia berkarakter.

Bab ini akan menguraikan berbagai studi kasus sekolah unggul di Indonesia melalui lima subbab: SMK dengan Pancawaluya sebagai model penguatan karakter dan keterampilan vokasi, perguruan tinggi swasta yang resilien dan berdaya saing, sekolah berbasis komunitas adat yang mengintegrasikan kearifan lokal, pesantren modern dan tradisional sebagai pusat pendidikan holistik, serta sekolah digital yang berhasil memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses dan kualitas.

Dengan menghadirkan praktik nyata, Bab 16 memberi pesan bahwa transformasi pendidikan tidak hanya bisa dibayangkan atau dirumuskan dalam kebijakan, tetapi bisa dijalankan dan dirasakan manfaatnya secara langsung. Sekolah unggul adalah bukti bahwa dengan kepemimpinan yang kuat, kolaborasi komunitas, dan integrasi nilai global-lokal, pendidikan di Indonesia dapat menjadi motor perubahan sosial yang berkelanjutan.

## A. SMK dengan Pancawaluya

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah tulang punggung pendidikan vokasi di Indonesia. Ia memegang peran penting dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil, produktif, dan siap menghadapi dunia kerja sekaligus dunia usaha. Namun, dalam era VUCA–Society 5.0, SMK tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang kompeten secara teknis, tetapi juga harus membentuk pribadi yang berkarakter, inovatif, dan berdaya tahan. Di sinilah program Pancawaluya menjadi relevan, sebagai strategi pendidikan yang mengintegrasikan keterampilan vokasi dengan nilai moral, sosial, dan kultural yang khas Indonesia.

Pancawaluya terdiri atas lima pilar utama: **ketakwaan, kejujuran, disiplin, gotong royong, dan kreativitas**. Kelima nilai ini tidak hadir sebagai jargon semata, melainkan dipraktikkan dalam kegiatan harian SMK, baik di kelas, bengkel kerja, maupun dalam hubungan sosial antara murid, guru, dan komunitas.

Pilar ketakwaan menekankan bahwa pendidikan vokasi harus berakar pada spiritualitas dan etika. Murid SMK tidak hanya diajarkan keterampilan teknis, tetapi juga nilai moral dalam bekerja: kejujuran dalam laporan, tanggung jawab terhadap kualitas produk, serta kesadaran bahwa setiap pekerjaan adalah bentuk ibadah. Hal ini menjadi benteng penting agar lulusan SMK tidak sekadar menjadi tenaga kerja terampil, tetapi juga manusia bermoral yang menjunjung tinggi integritas.

Pilar kejujuran menegaskan profesionalitas. Dunia kerja menuntut kepercayaan. Murid SMK dibiasakan untuk tidak memanipulasi hasil, tidak mencontek, dan berani menyampaikan fakta apa adanya. Praktik ini tidak hanya mencetak teknisi yang andal, tetapi juga pekerja yang bisa dipercaya. Kejujuran ini menginternalisasi nilai *Silih Asih*, karena dengan kejujuran lahirlah rasa saling percaya yang menjadi dasar kolaborasi sosial.

Pilar disiplin memberi fondasi kedisiplinan waktu, mutu, dan tanggung jawab. Industri membutuhkan tenaga kerja yang tepat waktu, patuh pada standar operasional, dan konsisten. SMK yang menerapkan budaya disiplin secara sistematis menyiapkan lulusan yang siap masuk dunia kerja tanpa harus beradaptasi terlalu lama. Disiplin ini juga melatih murid menghadapi

ketidakpastian, karena mereka terbiasa bekerja dalam ritme yang teratur dan fokus pada target.

Pilar gotong royong mengajarkan murid untuk bekerja sama dalam proyek nyata. Di bengkel kerja, murid tidak hanya belajar mandiri, tetapi juga berkolaborasi merakit mesin, mengelola produksi, atau menjalankan simulasi bisnis. Mereka belajar menghargai peran satu sama lain, berbagi tanggung jawab, dan menyelesaikan konflik dengan dialog. Gotong royong ini tidak hanya menyiapkan murid untuk kerja tim di industri, tetapi juga memperkuat ikatan sosial yang khas Indonesia.

Pilar kreativitas adalah penegasan bahwa lulusan SMK bukan hanya operator, tetapi juga inovator. Di era Industri 4.0/5.0, keterampilan teknis tanpa kreativitas akan mudah tergantikan oleh mesin dan algoritma. Oleh karena itu, SMK harus mendorong murid untuk menciptakan solusi baru, memodifikasi alat sederhana, merancang produk inovatif, atau mengembangkan aplikasi digital. Kreativitas ini membuat lulusan SMK memiliki keunggulan kompetitif yang membedakan mereka di dunia kerja.

Implementasi Pancawaluya SMK dapat dilihat dalam berbagai praktik nyata. Ada SMK di Jawa Barat yang mengembangkan *teaching factory* dengan memproduksi produk nyata untuk dipasarkan. Murid tidak hanya belajar teknik produksi, tetapi juga kejujuran dalam pencatatan, disiplin dalam waktu produksi, gotong royong dalam tim, dan kreativitas dalam inovasi produk. Ada juga SMK di Jawa Timur yang mengajak murid membuat proyek teknologi tepat guna bagi masyarakat desa, seperti pengolahan air bersih atau alat pertanian sederhana. Praktik ini memperlihatkan integrasi keterampilan vokasi dengan kontribusi sosial.

Dalam kerangka kebijakan nasional, Pancawaluya sejalan dengan visi *SMK Pusat Keunggulan* yang dicanangkan pemerintah. Program ini menekankan *link and match* antara SMK dan industri, tetapi Pancawaluya memberi lapisan tambahan berupa karakter dan nilai kultural. Dengan begitu, SMK tidak hanya relevan dengan kebutuhan pasar, tetapi juga menjadi pusat pembentukan manusia berkarakter Pancasila.

Pancawaluya juga berhubungan erat dengan pilar UNESCO. *Learning to Know* diwujudkan dalam penguasaan literasi vokasional. *Learning to Do* tampak dalam keterampilan kerja nyata. *Learning to Be* hadir dalam

pembentukan karakter ketakwaan, kejujuran, dan disiplin. *Learning to Live Together* terlihat dalam budaya gotong royong yang terus diasah. Dengan integrasi ini, Pancawaluya bukan hanya model pendidikan lokal, tetapi juga kontribusi Indonesia pada wacana global pendidikan transformatif.

Tantangan implementasi Pancawaluya tetap ada. Tidak semua SMK memiliki sumber daya memadai untuk mendukung pembelajaran inovatif. Ada yang masih berjuang dengan fasilitas terbatas, guru yang perlu peningkatan kapasitas, atau budaya sekolah yang belum konsisten. Namun, di sinilah pentingnya kepemimpinan visioner: kepala sekolah, guru, dan komunitas harus memastikan Pancawaluya benar-benar hidup dalam praktik, bukan hanya di atas kertas.

Pada akhirnya, SMK dengan Pancawaluya menjadi teladan bagaimana pendidikan vokasi di Indonesia bisa menjawab tantangan VUCA–Society 5.0. Ia mengintegrasikan keterampilan teknis dengan karakter, memadukan kearifan lokal dengan standar global, serta menyatukan visi kebijakan dengan praktik nyata di lapangan. Dengan model ini, SMK tidak hanya mencetak pekerja siap pakai, tetapi juga generasi muda yang beriman, berintegritas, disiplin, peduli, kreatif, dan siap menjadi pemimpin masa depan.

## **B. PTS Resilien dan Berdaya Saing**

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah tulang punggung ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia. Jumlahnya jauh lebih banyak dibanding Perguruan Tinggi Negeri (PTN), tersebar hingga ke pelosok, dan menjadi tumpuan bagi jutaan mahasiswa. Namun, dalam dinamika era VUCA dan Society 5.0, PTS menghadapi tantangan berat: persaingan ketat, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan adaptasi cepat terhadap perubahan global. Subbab ini membahas bagaimana PTS di Indonesia mengembangkan resiliensi dan daya saing, serta bagaimana praktik baik dari beberapa PTS dapat menjadi teladan transformasi pendidikan tinggi.

Resiliensi adalah kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dalam menghadapi krisis. Bagi PTS, resiliensi bukan pilihan, melainkan keharusan. Banyak PTS menghadapi masalah finansial akibat fluktuasi jumlah mahasiswa, minimnya dana penelitian, serta keterbatasan fasilitas. Pandemi COVID-19 memperlihatkan kerentanan ini dengan sangat jelas,

ketika banyak PTS kehilangan mahasiswa karena faktor ekonomi. Namun, di sisi lain, pandemi juga menjadi momentum untuk menguji resiliensi: PTS yang mampu cepat beralih ke sistem daring, mengembangkan program baru, atau memperkuat kolaborasi terbukti lebih mampu bertahan.

Salah satu strategi utama PTS dalam membangun resiliensi adalah **diversifikasi program akademik**. PTS yang hanya bergantung pada program populer seperti manajemen atau hukum sering menghadapi persaingan ketat. Sebaliknya, PTS yang berani membuka program-program inovatif seperti *data science*, *renewable energy*, *creative industry*, dan *health technology* memiliki peluang lebih besar menarik mahasiswa. Diversifikasi juga menciptakan relevansi baru dengan kebutuhan industri, sehingga meningkatkan daya tarik lulusan.

Selain itu, **digitalisasi** menjadi strategi kunci. PTS yang berhasil mengadopsi teknologi digital tidak hanya untuk pembelajaran daring, tetapi juga untuk manajemen akademik, promosi, dan pelayanan mahasiswa, cenderung lebih kompetitif. Platform *Learning Management System (LMS)*, big data untuk analisis mahasiswa, hingga pemanfaatan AI untuk personalisasi pembelajaran menjadi ciri khas PTS yang adaptif. Dengan ini, mahasiswa merasa lebih terlayani, dan PTS mampu mengelola sumber daya secara lebih efisien.

Resiliensi juga dibangun melalui **kolaborasi dan jejaring**. Banyak PTS mulai menjalin kerja sama dengan industri, pemerintah daerah, maupun lembaga internasional. Kolaborasi ini tidak hanya mendatangkan sumber daya, tetapi juga membuka peluang riset terapan, magang mahasiswa, dan program pengembangan kapasitas dosen. Dalam kerangka *link and match*, PTS dapat menjadi katalis inovasi di daerahnya masing-masing. Misalnya, sebuah PTS di Jawa Tengah bermitra dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan riset pertanian berbasis teknologi tepat guna, yang sekaligus memberdayakan masyarakat lokal.

Dari sisi **daya saing**, PTS dituntut untuk memiliki keunggulan diferensial. Beberapa PTS memilih untuk fokus pada bidang tertentu dan menjadi pusat keunggulan (*center of excellence*). Misalnya, ada PTS yang dikenal unggul di bidang teknologi informasi, ada yang fokus pada kesehatan, ada pula yang menjadi pionir dalam seni dan budaya. Strategi ini

memungkinkan PTS membangun reputasi yang lebih kuat, meskipun skalanya tidak sebesar PTN.

Keunggulan daya saing juga ditentukan oleh **kualitas dosen dan penelitian**. PTS yang mampu mendorong dosennya aktif menulis di jurnal bereputasi, melakukan penelitian terapan, dan terlibat dalam konferensi internasional, biasanya memiliki daya tarik lebih besar. Data dari Kemendikbudristek menunjukkan bahwa PTS yang konsisten meningkatkan kualitas penelitian cenderung lebih stabil dalam jumlah mahasiswa dan peringkat akreditasi. Namun, tantangannya adalah keterbatasan dana penelitian, sehingga kolaborasi dengan industri menjadi penting untuk mendukung riset aplikatif.

Nilai *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* dapat diintegrasikan dalam membangun resiliensi PTS. *Silih Asih* menekankan kepedulian institusi terhadap mahasiswa, misalnya dengan beasiswa, skema keringanan biaya, atau dukungan psikososial. *Silih Asah* menekankan budaya saling belajar antar dosen, mahasiswa, dan komunitas akademik. *Silih Asuh* menegaskan tanggung jawab moral PTS untuk membimbing mahasiswa tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga karakter dan kepemimpinan.

Contoh praktik baik dapat dilihat dari beberapa PTS di Indonesia. Ada PTS di Jawa Barat yang berhasil bertahan dengan mengembangkan ekosistem *startup campus*, mendampingi mahasiswa menciptakan usaha rintisan digital. Ada pula PTS di Sulawesi yang memperkuat riset berbasis kearifan lokal, seperti pengolahan sumber daya laut, yang relevan dengan kebutuhan komunitas. PTS di Yogyakarta bahkan berani mengembangkan model internasionalisasi dengan membuka kelas berbahasa Inggris dan menjalin mitra dengan universitas asing.

Tantangan besar PTS tetap ada: ketimpangan sumber daya dibanding PTN, ketergantungan pada biaya mahasiswa, serta citra publik yang sering menempatkan PTS sebagai “pilihan kedua”. Namun, praktik baik membuktikan bahwa dengan kepemimpinan visioner, inovasi berkelanjutan, dan kolaborasi yang kuat, PTS mampu menjadi resilien dan berdaya saing.

Pada akhirnya, PTS yang resilien dan berdaya saing tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pendidikan tinggi alternatif, tetapi sebagai motor pembangunan daerah dan laboratorium inovasi sosial. Dalam kerangka Indonesia Emas 2045, peran PTS sangat penting, karena mereka

menjangkau wilayah yang tidak selalu bisa dicapai PTN. Dengan mengintegrasikan agenda global, nilai lokal, dan strategi adaptif, PTS di Indonesia berpotensi besar menjadi kekuatan transformasi pendidikan tinggi yang unik dan berpengaruh.

### C. Sekolah Berbasis Komunitas Adat

Sekolah berbasis komunitas adat adalah bentuk pendidikan yang tumbuh dari akar budaya lokal. Ia bukan sekadar institusi formal yang mengikuti kurikulum nasional, tetapi lembaga yang menyatu dengan kehidupan masyarakat, nilai-nilai tradisi, dan kearifan lokal. Di tengah derasnya arus globalisasi, sekolah berbasis komunitas adat menjadi benteng identitas sekaligus wahana transformasi sosial. Subbab ini menguraikan bagaimana sekolah komunitas adat di Indonesia mampu bertahan, beradaptasi, dan bahkan menawarkan alternatif model pendidikan yang selaras dengan falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh* dan pilar UNESCO.

Sekolah berbasis komunitas adat memiliki karakter khas yang membedakannya dari sekolah konvensional. Pertama, kurikulumnya tidak hanya berfokus pada literasi akademik, tetapi juga mengintegrasikan pengetahuan lokal: pertanian, lingkungan, seni, spiritualitas, dan tradisi sosial. Kedua, proses belajarnya bersifat partisipatif, di mana guru, tetua adat, orang tua, dan murid terlibat bersama dalam menciptakan pengalaman belajar. Ketiga, tujuan pendidikannya tidak hanya menghasilkan lulusan untuk dunia kerja formal, tetapi juga generasi yang mampu menjaga warisan budaya sekaligus menghadapi tantangan modern.

Di Papua, misalnya, banyak sekolah komunitas adat mengajarkan murid tentang hutan sebagai sumber kehidupan. Murid belajar mengenali tumbuhan obat, teknik berburu tradisional, hingga ritual adat yang menyatukan manusia dengan alam. Pengetahuan ini bukan sekadar keterampilan praktis, tetapi juga filosofi hidup yang mengajarkan harmoni dengan lingkungan. Integrasi ini memperlihatkan *Learning to Know* dan *Learning to Live Together* dalam bentuk yang kontekstual.

Di Bali, sekolah berbasis adat memasukkan seni tari, gamelan, dan upacara ke dalam kurikulum. Murid tidak hanya belajar sebagai penonton budaya, tetapi sebagai pelaku yang menjaga kesinambungan tradisi.

Pendidikan seni di sini juga berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter: murid belajar disiplin dalam latihan, empati dalam kerja kelompok, dan spiritualitas dalam menjalani upacara. Nilai *Silih Asih* terwujud dalam cinta terhadap budaya sendiri, sementara *Silih Asah* hadir melalui latihan kolektif yang saling mengasah keterampilan.

Di pedalaman Kalimantan, beberapa sekolah komunitas adat mengajarkan murid tentang pengelolaan hutan dan sungai melalui tradisi gotong royong. Misalnya, praktik *huma betang* (rumah panjang) tidak hanya dipelajari sebagai arsitektur, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan dan toleransi. Murid diajak memahami bahwa kehidupan bersama memerlukan saling menghormati dan berbagi peran. Konsep ini sejalan dengan pilar UNESCO *Learning to Live Together*, yang diajarkan bukan lewat teori, tetapi melalui praktik nyata dalam kehidupan komunitas.

Sekolah berbasis komunitas adat juga memperlihatkan kekuatan resiliensi. Ketika pandemi COVID-19 melanda, banyak sekolah formal kesulitan melakukan pembelajaran daring karena keterbatasan infrastruktur. Sebaliknya, sekolah komunitas adat tetap berjalan dengan memanfaatkan ruang-ruang terbuka, cerita rakyat, dan praktik tradisional sebagai sarana belajar. Murid tetap belajar, meski tanpa gawai atau internet, karena pendidikan ditopang oleh solidaritas komunitas. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan yang berakar pada budaya memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi krisis.

Selain itu, sekolah komunitas adat juga memainkan peran penting dalam menjaga identitas di tengah globalisasi. Di banyak wilayah, arus modernisasi sering membawa ancaman homogenisasi budaya. Namun, sekolah adat memberi ruang bagi murid untuk bangga dengan budayanya, sambil tetap membuka diri pada pengetahuan global. Murid belajar menenun sambil mempelajari matematika, belajar ritual adat sambil memahami sains lingkungan. Integrasi ini menciptakan identitas ganda: lokal sekaligus global.

Praktik ini sejalan dengan konsep *glocalization* dalam pendidikan, yaitu kemampuan mengintegrasikan nilai global tanpa kehilangan jati diri lokal. Indonesia memiliki potensi besar menjadikan sekolah komunitas adat sebagai model pendidikan glokal yang diakui dunia. Dengan menggabungkan nilai-nilai lokal seperti *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* dengan pilar

UNESCO, sekolah adat bisa menjadi kontribusi Indonesia pada diskursus global tentang pendidikan humanis dan berkelanjutan.

Tantangan tetap ada. Banyak sekolah komunitas adat menghadapi keterbatasan fasilitas, dukungan pemerintah, dan legitimasi formal. Ada pula stigma bahwa pendidikan adat dianggap ketinggalan zaman dibanding sekolah modern. Padahal, justru di dalam pendidikan adat terdapat nilai-nilai keberlanjutan, solidaritas, dan spiritualitas yang sering hilang dalam pendidikan modern. Oleh karena itu, diperlukan pengakuan resmi dan dukungan kebijakan agar sekolah komunitas adat bisa hidup berdampingan dengan sekolah formal.

Pada akhirnya, sekolah berbasis komunitas adat menunjukkan bahwa pendidikan sejati tidak hanya soal gedung, kurikulum standar, atau ujian nasional. Ia adalah proses membentuk manusia yang berakar pada budayanya, berdaya tahan menghadapi krisis, dan mampu berkontribusi pada dunia. Dengan integrasi kearifan lokal, falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh*, serta pilar UNESCO, sekolah komunitas adat membuktikan bahwa pendidikan Indonesia bisa unik sekaligus universal, sederhana sekaligus mendalam, lokal sekaligus global.

#### **D. Pesantren Modern dan Tradisional**

Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Ia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah, budaya, dan spiritualitas bangsa. Pesantren bukan hanya lembaga keagamaan, melainkan juga pusat pembelajaran, pemberdayaan masyarakat, dan pengkaderan pemimpin. Dalam sejarahnya, pesantren hadir dalam berbagai bentuk: ada pesantren tradisional yang kuat menjaga nilai klasik, ada pesantren modern yang mengintegrasikan kurikulum umum dengan pendidikan agama. Di tengah era VUCA–Society 5.0, keduanya menghadapi tantangan baru sekaligus peluang besar untuk bertransformasi.

Pesantren tradisional, atau sering disebut *salafiyah*, menekankan pada penguasaan kitab kuning, kedalaman ilmu agama, dan pembentukan karakter spiritual. Santri diajarkan membaca, memahami, dan mengamalkan teks klasik, dengan metode bandongan, sorogan, atau halaqah. Sistem ini membentuk generasi yang mendalam secara teologis, sederhana dalam gaya

hidup, dan kuat dalam ikatan sosial. Pesantren tradisional menjadi benteng moral masyarakat, tempat nilai religius dan kebersahajaan diwariskan dari generasi ke generasi.

Di sisi lain, pesantren modern muncul sebagai respon terhadap kebutuhan zaman. Selain mengajarkan kitab kuning, pesantren modern memasukkan kurikulum umum seperti sains, matematika, bahasa asing, hingga teknologi informasi. Beberapa pesantren bahkan mendirikan sekolah formal atau universitas di bawah naungannya. Dengan demikian, santri tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga siap bersaing di dunia kerja. Pesantren modern menjadi laboratorium integrasi antara religiusitas dan modernitas, antara nilai spiritual dan keterampilan global.

Dalam konteks Society 5.0, pesantren memiliki posisi strategis. Dunia yang semakin digital menuntut keterampilan teknologi, tetapi sekaligus menghadirkan krisis etika, identitas, dan spiritualitas. Pesantren bisa menjadi penyeimbang: santri dilatih menggunakan teknologi untuk kebaikan, tetapi tetap berakar pada nilai moral. Beberapa pesantren bahkan sudah mengembangkan *digital pesantren*, dengan pembelajaran daring, platform aplikasi internal, dan pengembangan konten dakwah digital.

Pesantren tradisional maupun modern sama-sama menekankan nilai kebersamaan. Hidup di asrama mengajarkan santri arti gotong royong, disiplin, dan solidaritas. Santri terbiasa berbagi ruang, makanan, dan tanggung jawab, sehingga karakter mereka dibentuk melalui kehidupan kolektif. Nilai ini sejalan dengan *Silih Asih, Asah, Asuh*: kasih sayang dalam kehidupan bersama, proses saling mengasah melalui diskusi dan belajar bersama, serta bimbingan moral dari kiai atau ustaz sebagai wujud pengasuhan.

Praktik baik terlihat dari pesantren yang mampu menyeimbangkan tradisi dan modernitas. Pesantren di Jawa Barat, misalnya, tetap mengajarkan kitab kuning dengan metode tradisional, tetapi juga membuka program keterampilan kewirausahaan, seperti pengolahan hasil pertanian atau bisnis digital. Ada pesantren di Jawa Timur yang menjadi pusat pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas, melibatkan santri dalam proyek riset sederhana. Di Aceh, pesantren menjadi benteng sosial pascatsunami, tidak hanya sebagai pusat belajar, tetapi juga tempat pengungsian, pemberdayaan, dan rekonsiliasi sosial.

Pesantren modern dengan universitas internalnya juga berperan dalam pengembangan riset dan inovasi. Santri didorong untuk menulis artikel ilmiah, mengkaji isu-isu global dengan perspektif Islam, hingga mengembangkan aplikasi teknologi Islami. Dengan demikian, pesantren tidak lagi dipandang hanya sebagai pusat studi agama, tetapi juga pusat inovasi yang bisa berkontribusi pada pembangunan nasional.

Namun, pesantren juga menghadapi tantangan serius. Modernisasi membawa risiko komersialisasi pendidikan, di mana pesantren kehilangan ruh kesederhanaannya. Globalisasi memunculkan dilema: sejauh mana pesantren harus menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati diri. Pesantren tradisional berisiko ditinggalkan generasi muda jika tidak mampu menunjukkan relevansi, sementara pesantren modern berisiko kehilangan otentisitas jika terlalu meniru model sekolah formal. Oleh karena itu, kunci keberhasilan pesantren adalah menjaga keseimbangan: tetap berakar pada tradisi, tetapi terbuka pada inovasi.

Integrasi pilar UNESCO juga tampak di pesantren. *Learning to Know* tercermin dari pendalaman ilmu agama dan ilmu umum. *Learning to Do* muncul dalam praktik keterampilan kewirausahaan dan proyek sosial. *Learning to Be* diwujudkan dalam pembentukan identitas spiritual santri yang utuh. *Learning to Live Together* menjadi napas kehidupan asrama, di mana toleransi, solidaritas, dan gotong royong dipraktikkan sehari-hari.

Pada akhirnya, pesantren—baik tradisional maupun modern—membuktikan bahwa pendidikan berbasis komunitas religius dapat menjadi model transformatif. Ia menyatukan spiritualitas, ilmu, dan keterampilan. Ia mengajarkan murid tidak hanya untuk cerdas, tetapi juga untuk bijak. Ia membekali generasi bukan hanya untuk bekerja, tetapi juga untuk memimpin dengan integritas. Dengan integrasi nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* serta pilar UNESCO, pesantren menjadi model pendidikan khas Indonesia yang mampu bertahan, beradaptasi, dan memberi kontribusi global.

## E. Studi Kasus Sekolah Digital

Sekolah digital adalah simbol transisi pendidikan Indonesia dari era konvensional menuju era teknologi. Kehadirannya menjadi respons terhadap tuntutan dunia yang semakin terdigitalisasi, sekaligus jawaban atas

kebutuhan fleksibilitas dan akses pendidikan yang lebih luas. Sekolah digital bukan hanya tentang penggunaan gawai dan internet, melainkan transformasi paradigma: cara guru mengajar, murid belajar, dan komunitas berinteraksi berubah secara fundamental. Subbab ini menguraikan bagaimana sekolah digital tumbuh, apa saja praktik terbaiknya, serta tantangan dan peluang yang dihadapinya dalam lanskap pendidikan nasional.

Sekolah digital di Indonesia berkembang pesat terutama pascapandemi COVID-19. Ketika sekolah konvensional terpaksa berhenti, pembelajaran daring menjadi jalan keluar. Meskipun pada awalnya bersifat darurat, pengalaman ini mendorong banyak sekolah untuk menjadikan digitalisasi sebagai bagian permanen dari ekosistem pendidikan. Sekolah digital kini tidak hanya hadir di kota besar, tetapi mulai merambah ke daerah, meski dengan tantangan infrastruktur.

Ciri utama sekolah digital adalah integrasi teknologi dalam seluruh proses belajar-mengajar. Murid tidak lagi bergantung pada buku teks semata, tetapi mengakses materi melalui *Learning Management System (LMS)*, video interaktif, simulasi virtual, hingga aplikasi berbasis AI. Guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga fasilitator yang mengarahkan murid untuk belajar mandiri, kolaboratif, dan kreatif. Dengan demikian, sekolah digital menekankan *Learning to Know* dan *Learning to Do* dalam konteks baru yang lebih dinamis.

Sekolah digital juga memperluas akses pendidikan. Di daerah yang sulit dijangkau guru, teknologi digital memungkinkan murid tetap belajar melalui kelas virtual. Bahkan, beberapa sekolah digital sudah mengadopsi konsep *blended learning*, yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan daring, sehingga lebih fleksibel. Hal ini membuka peluang pemerataan pendidikan, meski tantangan ketimpangan infrastruktur tetap besar.

Praktik baik terlihat di beberapa sekolah digital di Jakarta, Bandung, dan Surabaya yang mengembangkan kelas berbasis *project-based learning*. Murid diberikan proyek riil berbasis teknologi, seperti membuat aplikasi sederhana, merancang konten digital, atau menciptakan solusi lingkungan berbasis data. Dengan metode ini, mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga menghasilkan karya nyata. Kreativitas, kolaborasi, dan pemikiran kritis menjadi keterampilan utama yang dibangun.

Sekolah digital juga memungkinkan personalisasi pembelajaran. Melalui analitik data, sekolah dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan murid secara lebih detail. Dengan demikian, guru bisa memberikan intervensi yang lebih tepat, misalnya remedial bagi murid yang kesulitan atau tantangan tambahan bagi murid yang unggul. Pendekatan ini selaras dengan semangat *Merdeka Belajar* yang menempatkan murid sebagai pusat pembelajaran.

Integrasi nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* tetap relevan dalam sekolah digital. *Silih Asih* hadir dalam etika digital, menanamkan empati dan kepedulian meski interaksi berlangsung daring. *Silih Asah* terwujud dalam kolaborasi online, di mana murid saling membantu dan mengasah keterampilan melalui diskusi virtual. *Silih Asuh* diwujudkan dalam pendampingan guru yang lebih bersifat mentor, bahkan melalui platform digital, memastikan murid tetap merasa diperhatikan secara personal.

Pilar UNESCO juga menemukan aktualisasi baru. *Learning to Know* diperkuat dengan akses luas ke informasi digital. *Learning to Do* hadir melalui praktik teknologi. *Learning to Be* terlihat dalam pendidikan karakter digital, membentuk murid yang beretika di dunia maya. *Learning to Live Together* menjadi lebih global, karena murid dapat berkolaborasi lintas daerah bahkan lintas negara secara daring.

Namun, sekolah digital juga menghadapi tantangan serius. Pertama, kesenjangan digital (*digital divide*) masih besar. Banyak daerah 3T yang belum memiliki internet memadai, sehingga murid kesulitan mengakses pembelajaran digital. Kedua, kapasitas guru belum merata. Tidak semua guru siap menjadi fasilitator digital, sebagian masih terpaku pada metode konvensional. Ketiga, masalah etika digital, seperti kecanduan gawai, plagiarisme, dan penyalahgunaan teknologi, memerlukan pendidikan karakter yang lebih kuat.

Meskipun demikian, sekolah digital memiliki peluang besar untuk menjadi model pendidikan masa depan. Jika dikelola dengan baik, ia bisa menjadi katalis pemerataan akses, inovasi metode belajar, dan peningkatan daya saing global. Apalagi, integrasi dengan program nasional seperti *Digitalisasi Sekolah*, *SMK Pusat Keunggulan*, atau *Kampus Merdeka* memungkinkan ekosistem pendidikan digital semakin luas dan kokoh.

Pada akhirnya, sekolah digital bukan sekadar fenomena sesaat, melainkan bagian dari transformasi pendidikan Indonesia. Ia menjadi bukti bahwa pendidikan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan global, tanpa kehilangan jati diri lokal. Dengan dukungan teknologi, integrasi nilai budaya, dan kepemimpinan visioner, sekolah digital bisa menjadi salah satu pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.





# BAB 17

## *BEST PRACTICES GLOBAL*

Setelah menelaah praktik sekolah unggul di Indonesia yang berakar pada nilai lokal dan falsafah khas Nusantara, kini kita perlu menoleh ke luar: bagaimana negara lain membangun sistem pendidikan unggul yang mampu menjawab tantangan VUCA dan Society 5.0. Best practices global memberikan inspirasi konkret, bukan untuk ditiru mentah-mentah, tetapi untuk dipelajari, dikontekstualisasikan, dan diadaptasi sesuai kebutuhan Indonesia.

Pendidikan bersifat universal sekaligus partikular. Universal karena semua bangsa berhadapan dengan tantangan serupa: digitalisasi, ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, serta kebutuhan akan kompetensi abad 21. Namun juga partikular karena setiap bangsa memiliki sejarah, budaya, dan sistem sosial berbeda yang membentuk cara mereka merespons tantangan tersebut. Dengan memahami praktik global, kita bisa memperluas cakrawala, menemukan inspirasi, dan membandingkan dengan kekuatan serta keterbatasan kita sendiri.

Bab ini menghadirkan lima studi kasus internasional: Finlandia dengan model *personalized learning* yang menekankan otonomi guru dan murid;

Jepang dengan konsep *Society 5.0 Education* yang memadukan teknologi dan humanisme; Rwanda dengan pendidikan pascakonflik yang menumbuhkan perdamaian dan toleransi; Singapura dengan fokus STEM dan inovasi; serta praktik di negara-negara OECD yang menekankan *evidence-based education* sebagai kerangka pengambilan keputusan.

Setiap studi kasus akan menunjukkan bagaimana pilar UNESCO dihidupkan dalam konteks masing-masing. Finlandia menegaskan *Learning to Be* melalui kebijakan pendidikan humanis. Jepang mempraktikkan *Learning to Do* dengan integrasi teknologi. Rwanda memperlihatkan *Learning to Live Together* dalam konteks rekonsiliasi sosial. Singapura menonjolkan *Learning to Know* melalui penguatan literasi sains dan teknologi. Sementara itu, negara OECD memperlihatkan pentingnya data dan evaluasi untuk memastikan kualitas pendidikan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif falsafah lokal, best practices global ini bisa disejajarkan dengan nilai *Silih Asih, Asah, Asuh*. *Silih Asih* mengingatkan kita bahwa di balik teknologi dan inovasi, empati dan solidaritas tetaplah inti pendidikan. *Silih Asah* mengajarkan bahwa bangsa-bangsa dapat saling belajar dan memperkaya diri. *Silih Asuh* menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab moral global: setiap bangsa wajib berkontribusi dalam membentuk peradaban dunia yang lebih manusiawi.

Melalui paparan best practices global ini, Bab 17 bertujuan memperluas wawasan pembaca tentang beragam model pendidikan unggul, sekaligus mengajak refleksi: bagaimana Indonesia dapat memetik pelajaran dari praktik tersebut tanpa kehilangan jati diri? Bagaimana nilai lokal bisa dipadukan dengan inspirasi global untuk membangun sistem pendidikan yang otentik dan berdaya saing internasional? Dengan cara ini, transformasi pendidikan Indonesia tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga menjadi bagian dari percakapan global tentang masa depan pendidikan.

## A. Finlandia: Personalized Learning

Finlandia sering dijadikan rujukan utama dalam diskursus pendidikan global. Negara kecil di Eropa Utara ini berhasil menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh jumlah ujian, persaingan ketat, atau standar akademik yang kaku, melainkan oleh sistem yang humanis, fleksibel,

dan berpusat pada murid. Konsep *personalized learning* atau pembelajaran yang dipersonalisasi menjadi ciri khas sistem pendidikan Finlandia, yang memberi kebebasan bagi guru dan murid untuk menemukan jalan belajar sesuai kebutuhan, minat, dan potensi masing-masing. Subbab ini membahas mengapa pendekatan Finlandia dianggap berhasil, bagaimana pilar UNESCO dan nilai kemanusiaan dihidupkan, serta apa relevansinya untuk konteks Indonesia.

Salah satu ciri utama pendidikan Finlandia adalah minimnya tekanan akademik yang berlebihan. Tidak ada ujian nasional berulang kali yang membebani murid, tidak ada ranking kelas yang menekan psikologis, dan tidak ada kompetisi antar sekolah yang merusak solidaritas. Sebaliknya, sistem pendidikan dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang inklusif, menumbuhkan rasa percaya diri, serta mengembangkan potensi unik setiap murid. Guru dipercaya penuh untuk menilai perkembangan murid berdasarkan observasi, proyek, dan portofolio, bukan sekadar angka di atas kertas.

*Personalized learning* di Finlandia diwujudkan dalam berbagai bentuk. Pertama, kurikulum fleksibel yang memberi ruang bagi murid untuk memilih jalur pembelajaran sesuai minat. Misalnya, murid yang tertarik pada seni bisa lebih banyak mengeksplorasi bidang tersebut tanpa dihambat standar seragam yang kaku. Kedua, ukuran kelas relatif kecil, memungkinkan guru memberi perhatian personal kepada setiap murid. Ketiga, sistem dukungan bagi murid dengan kebutuhan khusus sangat kuat, sehingga mereka tidak terpinggirkan, melainkan mendapat intervensi personal sesuai kebutuhan.

Faktor penting lain adalah kepercayaan penuh kepada guru. Di Finlandia, profesi guru sangat dihormati, setara dengan dokter atau pengacara. Guru tidak dibebani birokrasi yang berlebihan, tetapi diberi kebebasan untuk merancang metode sesuai konteks kelasnya. Hal ini membuat mereka mampu menyesuaikan gaya mengajar dengan karakteristik murid. Dengan kata lain, *personalized learning* bukan hanya tanggung jawab sistem, tetapi juga bagian dari kompetensi profesional guru.

Pilar UNESCO tampak jelas dalam praktik Finlandia. *Learning to Know* diwujudkan dengan memberi akses luas pada berbagai sumber belajar tanpa tekanan hafalan. *Learning to Do* tampak dalam pembelajaran berbasis proyek yang memberi murid pengalaman nyata. *Learning to Be* diperkuat

dengan dukungan penuh pada kesehatan mental, keseimbangan hidup, dan pengembangan identitas personal. *Learning to Live Together* terinternalisasi dalam budaya egaliter, di mana semua murid diperlakukan sama tanpa memandang latar belakang sosial.

Nilai yang sejalan dengan falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh* juga hidup dalam sistem Finlandia. *Silih Asih* tampak pada empati dalam merancang pembelajaran yang tidak menekan murid. *Silih Asah* hadir dalam semangat saling belajar antara guru dan murid, di mana proses tidak satu arah tetapi dialogis. *Silih Asuh* terlihat dalam peran guru sebagai pembimbing, bukan hanya pengajar, yang mendampingi murid menemukan jati dirinya.

Dari perspektif global, Finlandia juga menginspirasi karena hasilnya nyata. Dalam berbagai survei internasional, seperti PISA, murid Finlandia konsisten menunjukkan capaian tinggi dalam literasi, numerasi, dan sains. Namun yang lebih penting, mereka juga menunjukkan tingkat kesejahteraan, motivasi belajar, dan kepuasan hidup yang tinggi. Hal ini membantah anggapan bahwa prestasi akademik hanya bisa dicapai melalui tekanan dan persaingan keras.

Bagi Indonesia, praktik Finlandia memberikan pelajaran penting. Pertama, pentingnya mempercayai guru sebagai profesional, bukan sekadar pelaksana kebijakan. Kedua, perlunya mengurangi beban kurikulum yang terlalu padat agar murid punya ruang untuk belajar sesuai minat. Ketiga, urgensi membangun sistem dukungan bagi murid dengan kebutuhan khusus, agar pendidikan benar-benar inklusif. Keempat, perlunya menyeimbangkan prestasi akademik dengan kesejahteraan psikologis murid.

Tentu, penerapan model Finlandia di Indonesia tidak bisa dilakukan secara mentah. Indonesia memiliki konteks berbeda: jumlah murid sangat besar, latar belakang sosial sangat beragam, dan sumber daya pendidikan belum merata. Namun, prinsip dasar *personalized learning* dapat diterapkan dengan cara sederhana: memberi ruang diferensiasi dalam pembelajaran, memperkuat peran guru sebagai mentor, serta menekankan pentingnya kesejahteraan murid.

Pada akhirnya, sistem pendidikan Finlandia mengingatkan bahwa pendidikan sejati bukanlah pabrik seragam yang menghasilkan lulusan identik, melainkan taman yang memberi ruang bagi setiap individu untuk

tumbuh sesuai kodratnya. Prinsip inilah yang bisa diadopsi Indonesia dalam kerangka Kurikulum Merdeka, dengan sentuhan nilai lokal *Silih Asih, Asah, Asuh*. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya belajar dari Finlandia, tetapi mengolahnya menjadi model khas Nusantara yang unik sekaligus relevan secara global.

## B. Jepang: Society 5.0 Education

Jepang adalah salah satu negara pertama yang memperkenalkan gagasan *Society 5.0*, sebuah visi masyarakat masa depan yang berorientasi pada manusia namun digerakkan oleh teknologi canggih. Dalam kerangka ini, pendidikan memegang posisi sentral. Jepang menyadari bahwa untuk membangun masyarakat super pintar, diperlukan sistem pendidikan yang tidak hanya menghasilkan tenaga kerja berteknologi tinggi, tetapi juga manusia yang memiliki integritas, empati, dan rasa tanggung jawab sosial. Subbab ini menguraikan bagaimana Jepang mengembangkan *Society 5.0 Education*, apa prinsip-prinsipnya, dan bagaimana praktik ini memberi inspirasi bagi Indonesia.

Pendidikan di Jepang selalu menekankan keseimbangan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai humanistik. Dalam kerangka *Society 5.0 Education*, hal ini semakin dipertegas: teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, kurikulum di Jepang diarahkan agar murid tidak hanya mahir dalam STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), tetapi juga mampu menggunakannya untuk menyelesaikan masalah sosial nyata.

Konsep *problem-based learning* dan *project-based learning* menjadi inti pendekatan ini. Murid sejak usia dini diajak untuk memecahkan persoalan sehari-hari dengan pendekatan ilmiah dan teknologi. Misalnya, proyek sekolah dasar bisa berupa merancang aplikasi sederhana untuk membantu lansia berbelanja atau membuat sistem monitoring lingkungan untuk menjaga kebersihan sungai. Dengan demikian, murid belajar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki relevansi langsung dengan kehidupan masyarakat.

Selain STEM, Jepang juga menekankan pendidikan karakter dan etika. Murid dilatih disiplin, menghargai waktu, bekerja dalam kelompok, serta

menjaga kebersihan lingkungan. Nilai-nilai ini sejalan dengan budaya kerja Jepang yang terkenal kolektif, tangguh, dan penuh tanggung jawab. Dalam kerangka UNESCO, hal ini mewakili *Learning to Live Together* sekaligus *Learning to Be*.

Peran guru di Jepang sangat strategis. Mereka bukan hanya pengajar, tetapi juga fasilitator yang membimbing murid untuk menghubungkan ilmu dengan kehidupan nyata. Guru diberi pelatihan berkelanjutan agar mampu mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran tanpa kehilangan aspek humanis. Pemerintah Jepang mendukung hal ini dengan kebijakan pendidikan yang konsisten, anggaran riset pendidikan, serta infrastruktur digital yang merata.

Pendidikan vokasi juga mendapat perhatian serius. Jepang mengembangkan sistem *kōsen* (colleges of technology) yang menyiapkan murid sejak usia 15 tahun untuk menjadi teknisi dan inovator di bidang industri. Sistem ini menghasilkan lulusan yang siap kerja sekaligus mampu berinovasi, sehingga mendukung ekonomi nasional yang berbasis pada manufaktur canggih, robotika, dan kecerdasan buatan.

Dari sisi teknologi, Jepang mengintegrasikan AI, big data, dan *Internet of Things (IoT)* ke dalam sistem pendidikan. Misalnya, data hasil belajar murid dianalisis untuk merancang pembelajaran yang lebih personal. Sekolah juga menggunakan platform digital untuk memperluas akses dan menciptakan interaksi lintas daerah. Namun, semua itu tetap dikawal dengan prinsip etika dan privasi yang ketat, agar teknologi tidak mereduksi kemanusiaan.

Nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* menemukan resonansinya dalam pendidikan Jepang. *Silih Asih* tercermin dalam perhatian pada kelompok rentan, misalnya kebijakan untuk mendukung pendidikan anak-anak di daerah terpencil atau keluarga kurang mampu. *Silih Asah* tampak dalam budaya belajar seumur hidup yang kuat, di mana murid, guru, bahkan pekerja dewasa selalu terdorong untuk memperbarui pengetahuan. *Silih Asuh* hadir dalam bimbingan moral yang melekat dalam kehidupan sekolah sehari-hari, dari upacara pagi hingga tata cara membersihkan kelas bersama-sama.

Hasil dari *Society 5.0 Education* tampak nyata dalam kualitas lulusan Jepang. Mereka bukan hanya unggul dalam literasi sains dan teknologi,

tetapi juga disiplin, tangguh, dan berorientasi pada kepentingan kolektif. Sistem ini menghasilkan tenaga kerja yang mampu bersaing secara global, sekaligus warga negara yang menjaga kohesi sosial domestik.

Bagi Indonesia, pelajaran dari Jepang sangat relevan. Pertama, pentingnya menjadikan teknologi sebagai alat humanistik, bukan sekadar kompetensi teknis. Kedua, perlunya mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek sejak dini agar murid terbiasa mengaitkan ilmu dengan kehidupan nyata. Ketiga, pentingnya pendidikan vokasi yang kuat, terhubung dengan industri, tetapi tetap menanamkan nilai karakter. Keempat, perlunya konsistensi kebijakan jangka panjang agar pendidikan tidak terombang-ambing oleh perubahan politik.

Tentu, implementasi di Indonesia harus memperhatikan konteks lokal. Keterbatasan infrastruktur digital masih menjadi tantangan besar, begitu pula kualitas pelatihan guru. Namun, prinsip-prinsip *Society 5.0 Education* bisa diadaptasi secara bertahap: memulai dengan proyek kecil berbasis masalah komunitas, memperkuat kemitraan sekolah-industri, dan menanamkan etika digital sejak dini.

Pada akhirnya, pendidikan Jepang mengajarkan bahwa teknologi dan humanisme bukanlah dua kutub yang berlawanan, melainkan dua sisi yang saling melengkapi. Dengan menempatkan manusia sebagai pusat, *Society 5.0 Education* menjadi teladan bahwa pendidikan di era digital tidak harus kehilangan jiwa, melainkan justru bisa menjadi wahana membangun masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

### C. Rwanda: Pendidikan Pascakonflik & Toleransi

Rwanda adalah contoh nyata bagaimana pendidikan bisa menjadi jalan keluar dari luka sejarah yang mendalam. Negara kecil di Afrika Timur ini pernah mengalami tragedi kemanusiaan besar pada tahun 1994, yaitu genosida yang menewaskan lebih dari 800 ribu jiwa dalam waktu singkat. Tragedi itu menghancurkan tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam kondisi demikian, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana transfer ilmu, tetapi juga instrumen utama rekonsiliasi, pembangunan kembali kepercayaan sosial, serta fondasi bagi perdamaian jangka panjang. Subbab ini membahas bagaimana Rwanda menjadikan pendidikan sebagai

medium penyembuhan kolektif, strategi rekonsiliasi, dan pembangunan masyarakat toleran.

Setelah genosida, pemerintah Rwanda menyadari bahwa rekonstruksi bangsa tidak bisa hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur atau reformasi ekonomi. Luka psikologis, trauma kolektif, dan kebencian antar kelompok etnis membutuhkan proses penyembuhan yang sistematis. Pendidikan kemudian menjadi salah satu prioritas utama. Sekolah dijadikan ruang untuk menanamkan nilai toleransi, membangun kembali kepercayaan, dan mengajarkan generasi baru tentang pentingnya hidup damai.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah **reformasi kurikulum**. Kurikulum lama yang cenderung eksklusif digantikan dengan kurikulum baru yang menekankan pada persatuan nasional, sejarah bersama, dan pendidikan perdamaian. Murid diajak mempelajari sejarah genosida secara kritis, tidak untuk memperpanjang luka, tetapi untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali. Pembelajaran sejarah diposisikan sebagai refleksi kolektif: sebuah bangsa tidak boleh melupakan masa lalunya, tetapi juga tidak boleh terjebak dalam dendam.

Selain kurikulum, Rwanda juga memperkuat **program rekonsiliasi berbasis sekolah dan komunitas**. Di banyak sekolah, murid dari kelompok etnis yang sebelumnya bermusuhan belajar bersama, duduk di bangku yang sama, mengerjakan proyek yang sama, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial bersama. Pendidikan dijadikan sarana untuk memecah dinding segregasi, menggantinya dengan jembatan kebersamaan. Guru diberi peran penting sebagai fasilitator rekonsiliasi, bukan sekadar pengajar. Mereka dilatih untuk mendampingi murid melewati trauma, membangun empati, dan mengembangkan keterampilan resolusi konflik.

Pendidikan vokasi juga dipakai sebagai alat rekonstruksi sosial-ekonomi. Rwanda menyadari bahwa kemiskinan dan ketidaksetaraan bisa menjadi pemicu konflik baru. Oleh karena itu, sekolah vokasi diarahkan untuk memberi keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat: pertanian, kerajinan, teknologi sederhana, hingga kewirausahaan. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya membangun toleransi sosial, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi yang lebih adil.

Integrasi nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* sangat terasa dalam praktik Rwanda. *Silih Asih* tampak dalam empati yang ditanamkan, bahwa setiap korban dan pelaku adalah bagian dari bangsa yang sama. *Silih Asah* hadir dalam proses belajar bersama lintas kelompok, di mana murid diajak untuk saling mengasah pemahaman, kesabaran, dan kepercayaan. *Silih Asuh* tampak dalam peran guru, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan sebagai pembimbing moral yang memulihkan generasi dari trauma menuju kehidupan damai.

Pilar UNESCO juga diaktualisasikan dengan jelas. *Learning to Know* hadir melalui pemahaman sejarah dan refleksi kritis. *Learning to Do* terwujud dalam keterampilan vokasional yang memperkuat kemandirian ekonomi. *Learning to Be* diwujudkan dalam pendidikan karakter dan penyembuhan identitas personal yang sempat hancur akibat konflik. *Learning to Live Together* menjadi inti dari semua upaya, karena tujuan utama pendidikan di Rwanda adalah membangun kembali rasa kebersamaan dalam masyarakat multietnis.

Hasil dari pendidikan pascakonflik di Rwanda cukup signifikan. Dalam dua dekade terakhir, negara ini mengalami transformasi sosial yang mengesankan. Tingkat partisipasi sekolah meningkat tajam, kesenjangan gender berkurang, dan toleransi sosial mulai mengakar kembali. Rwanda kini sering dipuji sebagai salah satu negara yang berhasil bangkit dari konflik brutal menuju stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi yang menjanjikan. Pendidikan menjadi salah satu kunci utama dalam transformasi ini.

Bagi Indonesia, pengalaman Rwanda memberikan pelajaran penting. Meski Indonesia tidak mengalami genosida dalam skala yang sama, keragaman etnis, agama, dan budaya tetap berpotensi melahirkan gesekan sosial. Pendidikan harus diantisipasi sebagai sarana pencegah konflik, dengan memperkuat pendidikan multikultural, toleransi, dan resolusi konflik sejak dini. Pengalaman Rwanda mengingatkan bahwa sekolah bisa menjadi tempat penyembuhan dan pemersatu, bukan hanya tempat belajar akademik.

Pada akhirnya, pendidikan pascakonflik di Rwanda menunjukkan bahwa pendidikan memiliki dimensi moral yang sangat kuat. Ia bukan hanya alat mencetak pekerja, tetapi juga wahana membangun perdamaian, memulihkan luka, dan menciptakan masa depan yang lebih harmonis.

Dengan integrasi nilai global–lokal, pendidikan bisa menjadi cahaya yang membimbing masyarakat keluar dari kegelapan sejarah menuju peradaban baru yang lebih manusiawi.

## D. Singapura: STEM & Innovation

Singapura dikenal sebagai negara kecil dengan sumber daya alam terbatas, tetapi mampu menjelma menjadi salah satu pusat ekonomi, teknologi, dan inovasi dunia. Salah satu kunci keberhasilan tersebut adalah pendidikan. Pemerintah Singapura menyadari sejak awal bahwa keunggulan bangsa ini hanya bisa dibangun melalui sumber daya manusia. Karena itu, pendidikan didesain bukan hanya untuk mencetak pekerja yang patuh, tetapi untuk menghasilkan generasi inovator yang unggul dalam bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM). Subbab ini menguraikan bagaimana strategi STEM dan inovasi dijalankan di Singapura, hasil yang dicapai, serta relevansinya untuk konteks Indonesia.

Fokus utama pendidikan di Singapura adalah mencetak generasi yang mampu bersaing di pasar global yang sangat kompetitif. Sejak jenjang dasar, murid dikenalkan pada pendekatan *inquiry-based learning*, di mana mereka tidak hanya menghafal konsep sains atau matematika, tetapi diajak untuk meneliti, bereksperimen, dan menemukan solusi nyata. Murid terbiasa mengajukan pertanyaan kritis, mencoba berbagai metode, dan belajar dari kesalahan. Dengan cara ini, STEM bukan sekadar mata pelajaran, tetapi cara berpikir yang terintegrasi dalam keseharian murid.

Sekolah-sekolah di Singapura sangat didukung oleh infrastruktur yang modern. Laboratorium sains lengkap, pusat inovasi berbasis teknologi, hingga program *makerspace* tersedia bahkan di tingkat sekolah menengah. Murid diberi ruang untuk menciptakan, bukan hanya menerima. Mereka dapat merancang robot sederhana, membuat aplikasi digital, atau mengembangkan eksperimen bioteknologi. Fasilitas ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak setengah hati dalam menanamkan budaya inovasi sejak dini.

Selain fasilitas, kualitas guru juga menjadi prioritas. Singapura menempatkan guru sebagai agen utama perubahan. Guru STEM dipilih dari lulusan terbaik, dilatih secara intensif, dan diberi peluang untuk terus meningkatkan kapasitas melalui pelatihan internasional. Dengan demikian, mereka

mampu menginspirasi murid, bukan sekadar mengajarkan materi. Guru dipandang bukan sebagai pelaksana kurikulum, tetapi sebagai mentor inovasi yang menumbuhkan bakat dan minat murid.

Pendidikan STEM di Singapura juga erat kaitannya dengan strategi ekonomi nasional. Pemerintah memastikan adanya *link and match* yang kuat antara sekolah, universitas, dan industri. Murid tidak hanya belajar teori, tetapi juga mendapat kesempatan magang di perusahaan teknologi, startup, atau pusat riset. Hal ini menjamin bahwa lulusan siap menghadapi kebutuhan pasar, sekaligus mampu berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Budaya inovasi di Singapura diperkuat melalui berbagai kompetisi nasional dan internasional. Murid didorong untuk mengikuti lomba robotik, olimpiade matematika, atau kompetisi sains global. Namun, yang ditekankan bukan hanya kemenangan, melainkan proses belajar, kolaborasi, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Dengan cara ini, kompetisi menjadi sarana melatih mental tangguh, kreativitas, dan daya juang murid.

Integrasi pilar UNESCO tampak dalam praktik pendidikan Singapura. *Learning to Know* diwujudkan dalam penguasaan literasi STEM yang sangat kuat. *Learning to Do* tercermin dalam pembelajaran berbasis proyek dan eksperimen. *Learning to Be* dikembangkan melalui pembentukan kepercayaan diri, kepemimpinan, dan tanggung jawab personal. *Learning to Live Together* terwujud dalam kolaborasi lintas sekolah, lintas budaya, bahkan lintas negara, mengingat Singapura adalah masyarakat multikultural.

Nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* juga dapat direfleksikan dalam model Singapura. *Silih Asih* terlihat dalam budaya kerja sama, di mana murid saling membantu dalam proyek kelompok. *Silih Asah* hadir dalam proses saling belajar antara murid dan guru, yang menekankan eksplorasi bersama. *Silih Asuh* tampak dalam pendampingan intensif dari guru dan mentor industri, memastikan murid tidak hanya pintar secara teknis, tetapi juga matang secara karakter.

Hasil dari strategi ini sangat jelas. Lulusan Singapura konsisten meraih peringkat tinggi dalam survei internasional seperti PISA, khususnya dalam matematika dan sains. Lebih dari itu, mereka berhasil menciptakan ekosistem inovasi yang kuat, dengan banyak startup teknologi yang lahir dari

ide-ide anak muda. Singapura juga menjadi pusat riset regional, dengan universitas yang masuk peringkat global dan berkolaborasi dengan lembaga internasional.

Bagi Indonesia, praktik Singapura memberikan inspirasi penting. Pertama, perlunya investasi serius dalam pendidikan STEM sejak dini, bukan hanya di tingkat universitas. Kedua, pentingnya memperkuat infrastruktur sekolah agar murid benar-benar bisa bereksperimen. Ketiga, perlunya memperkuat jejaring sekolah–industri, sehingga murid melihat langsung relevansi ilmu dengan dunia kerja. Keempat, pentingnya membangun budaya inovasi, bukan hanya mengejar nilai ujian.

Tentu, Indonesia memiliki konteks berbeda: luas wilayah besar, keragaman budaya, dan ketimpangan sumber daya. Namun, prinsip dasar Singapura bisa diadaptasi: membangun sekolah dengan laboratorium sederhana tetapi fungsional, melatih guru STEM agar kreatif, serta mendorong murid untuk menyelesaikan masalah komunitas dengan pendekatan sains dan teknologi.

Pada akhirnya, Singapura menunjukkan bahwa sebuah negara kecil bisa menjadi besar melalui pendidikan yang terarah. Fokus pada STEM dan inovasi menjadikan mereka bukan hanya konsumen teknologi, tetapi juga produsen gagasan. Jika Indonesia mampu mengadopsi semangat yang sama dengan sentuhan nilai lokal *Silih Asih, Asah, Asuh*, maka pendidikan kita tidak hanya melahirkan tenaga kerja, tetapi juga pencipta masa depan yang berakar pada budaya bangsa.

## E. OECD Countries: Evidence-Based Education

Negara-negara anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) dikenal sebagai pionir dalam membangun sistem pendidikan yang berbasis bukti (*evidence-based education*). Mereka menyadari bahwa kebijakan pendidikan yang efektif tidak bisa hanya didasarkan pada intuisi politik, tradisi lama, atau kepentingan sesaat, melainkan harus berpijak pada data, riset, dan evaluasi yang terukur. Pendekatan ini membuat negara-negara OECD mampu merancang kebijakan pendidikan yang adaptif, akuntabel, dan terarah pada hasil nyata. Subbab ini membahas prinsip-prinsip pendidikan berbasis bukti di negara OECD, contoh

praktiknya, serta bagaimana pendekatan ini dapat memberi pelajaran berharga bagi Indonesia.

Konsep *evidence-based education* dalam OECD muncul dari kesadaran bahwa pendidikan adalah investasi besar dengan dampak jangka panjang, sehingga kebijakan tidak boleh salah arah. Setiap intervensi pendidikan—apakah itu kurikulum baru, pelatihan guru, atau program literasi—harus melalui evaluasi yang ketat. Bukti empiris, berupa data kuantitatif maupun penelitian kualitatif, menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau perlu diperbaiki.

Salah satu instrumen penting OECD adalah **Programme for International Student Assessment (PISA)**. Tes ini mengukur kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains murid berusia 15 tahun di berbagai negara. Hasil PISA bukan sekadar peringkat, tetapi cermin kualitas sistem pendidikan. Negara seperti Finlandia, Singapura, atau Jepang yang konsisten berada di peringkat atas menggunakan hasil PISA untuk memperkuat kebijakan. Sementara itu, negara dengan hasil rendah terdorong untuk melakukan reformasi kurikulum, pelatihan guru, atau perbaikan sistem evaluasi.

Selain PISA, OECD juga mengembangkan **Teaching and Learning International Survey (TALIS)** yang mengukur pengalaman guru: bagaimana mereka mengajar, tantangan yang dihadapi, dan dukungan yang diperoleh. Data ini membantu negara memahami posisi guru dalam sistem pendidikan, serta merancang kebijakan pelatihan dan kesejahteraan yang lebih tepat sasaran. Dengan pendekatan ini, guru tidak hanya dianggap pelaksana kurikulum, tetapi juga aktor utama yang perlu didukung agar transformasi pendidikan berjalan efektif.

Prinsip lain dalam pendidikan berbasis bukti adalah **evaluasi berkelanjutan**. Negara OECD tidak segan untuk melakukan uji coba (pilot project) sebelum menerapkan kebijakan secara nasional. Jika terbukti berhasil, program diperluas; jika gagal, program dihentikan atau diperbaiki. Dengan cara ini, kesalahan kebijakan bisa diminimalisasi, dan inovasi bisa diuji tanpa menimbulkan dampak luas yang merugikan murid.

Pendidikan berbasis bukti juga mendorong **keterbukaan data**. OECD menyediakan *Education GPS*, sebuah portal data terbuka yang

memungkinkan publik, peneliti, dan pembuat kebijakan untuk mengakses informasi detail tentang sistem pendidikan di berbagai negara. Transparansi ini menciptakan ruang akuntabilitas, sehingga kebijakan pendidikan tidak hanya diperdebatkan secara ideologis, tetapi bisa diverifikasi melalui data nyata.

Pilar UNESCO juga dapat dilihat dalam praktik ini. *Learning to Know* diperkuat melalui penelitian yang berkelanjutan tentang cara belajar yang paling efektif. *Learning to Do* tampak dalam penerapan inovasi berdasarkan bukti empiris. *Learning to Be* muncul dalam fokus pada kualitas guru dan kesejahteraan murid, karena bukti menunjukkan bahwa aspek emosional sangat memengaruhi hasil belajar. *Learning to Live Together* diperkuat dengan studi lintas negara yang memungkinkan bangsa-bangsa belajar satu sama lain, bukan bersaing semata.

Nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* juga relevan dalam pendekatan OECD. *Silih Asih* hadir dalam perhatian pada murid yang tertinggal, dengan kebijakan berbasis data untuk memastikan mereka tidak terabaikan. *Silih Asah* tampak dalam semangat berbagi pengetahuan antarnegara melalui publikasi dan forum. *Silih Asuh* terlihat dalam tanggung jawab moral negara maju untuk memberi contoh dan mendukung negara lain dalam memperbaiki sistem pendidikan.

Bagi Indonesia, pendekatan *evidence-based education* adalah tantangan sekaligus peluang. Selama ini, kebijakan pendidikan di Indonesia sering berubah sesuai rezim, dengan evaluasi terbatas. Data ada, tetapi belum selalu menjadi dasar utama kebijakan. Reformasi kurikulum, misalnya, sering dilakukan tanpa riset longitudinal yang memadai. Padahal, dengan basis data seperti Rapor Pendidikan, Asesmen Nasional, dan hasil PISA, Indonesia memiliki peluang besar untuk merancang kebijakan lebih tepat sasaran.

Contoh penerapan dapat dimulai dengan memperkuat sistem evaluasi kebijakan. Misalnya, sebelum memperluas program *Merdeka Belajar*, dilakukakan uji coba dengan pengukuran dampak akademik dan non-akademik secara detail. Data hasilnya kemudian dipublikasikan secara transparan agar publik bisa menilai dan memberi masukan. Pendekatan ini akan meningkatkan akuntabilitas sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan.

Pada akhirnya, pendidikan berbasis bukti mengajarkan bahwa transformasi sejati hanya bisa dicapai melalui refleksi, evaluasi, dan keberanian mengubah kebijakan berdasarkan data nyata. Indonesia dapat belajar dari OECD bahwa bukti bukanlah sekadar angka, melainkan pijakan moral untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan terbaik. Dengan mengintegrasikan data, kearifan lokal, serta nilai kemanusiaan, Indonesia dapat membangun sistem pendidikan yang tidak hanya responsif terhadap perubahan, tetapi juga berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.



# BAGIAN VII

## ROADMAP & REKOMENDASI







# BAB 18

## ROADMAP PENDIDIKAN NUSANTARA 2045

Mencapai usia satu abad kemerdekaan pada tahun 2045 adalah momen monumental bagi Indonesia. *Visi Indonesia Emas 2045* tidak hanya bicara tentang pertumbuhan ekonomi atau kejayaan politik, melainkan juga tentang kualitas manusia yang akan memimpin bangsa ini di era global yang semakin kompleks. Pendidikan menjadi kunci dari semua itu, sebab tanpa generasi yang cerdas, kreatif, tangguh, dan berkarakter, mimpi Indonesia Emas hanya akan menjadi retorika kosong. Roadmap pendidikan Nusantara 2045 hadir sebagai peta jalan strategis untuk memastikan bahwa transformasi pendidikan berjalan konsisten, terukur, dan sesuai dengan tantangan zaman.

Roadmap ini harus mampu mengintegrasikan dua hal penting: visi global dan kekuatan lokal. Visi global mencakup komitmen terhadap agenda internasional seperti SDGs, UNESCO, dan OECD, yang menekankan pendidikan inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Kekuatan lokal berakar pada kearifan budaya Nusantara, falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh*, serta nilai Pancasila yang menekankan solidaritas, gotong royong, dan spiritualitas.

Integrasi inilah yang akan membuat pendidikan Indonesia bukan sekadar meniru model global, tetapi memberi warna baru dalam percakapan dunia.

Era VUCA dan Society 5.0 menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Volatilitas menuntut pendidikan yang fleksibel dan adaptif. Ketidakpastian mengharuskan generasi muda memiliki keterampilan problem solving yang kuat. Kompleksitas menuntut kolaborasi lintas disiplin dan lintas budaya. Ambiguitas menuntut kejelasan arah moral agar teknologi dan inovasi tidak kehilangan sisi kemanusiaannya. Semua itu harus dijawab dalam roadmap pendidikan, sehingga transformasi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan spiritual.

Bab ini akan menguraikan peta jalan pendidikan Nusantara menuju 2045 dalam lima dimensi besar. Pertama, integrasi kearifan lokal dan global sebagai fondasi filosofis dan kultural. Kedua, indikator transformasi pendidikan yang terukur, mulai dari literasi, numerasi, hingga kualitas karakter. Ketiga, roadmap sekolah digital humanistik yang memastikan teknologi tidak merusak, tetapi memperkuat nilai kemanusiaan. Keempat, roadmap pendidikan vokasi yang terhubung dengan Industri 5.0, sehingga lulusan siap menjadi kreator, bukan sekadar pekerja. Kelima, pendidikan sebagai pilar utama dalam pencapaian SDGs 2045, di mana Indonesia tidak hanya menjadi penerima agenda global, tetapi juga kontributor aktif.

Pengantar bab ini ingin menegaskan bahwa roadmap pendidikan 2045 bukan sekadar dokumen kebijakan, melainkan kompas moral dan strategis. Ia akan menentukan apakah Indonesia mampu mengubah bonus demografi menjadi bonus produktivitas atau justru beban sosial. Ia akan menjawab apakah pendidikan kita hanya menghasilkan lulusan yang mahir secara teknis atau juga manusia yang utuh secara karakter. Ia juga akan menentukan apakah kita hanya menjadi pengikut dalam arus globalisasi atau pemimpin yang memberi inspirasi bagi dunia.

Dengan demikian, Bab 18 hadir sebagai refleksi sekaligus panduan: sebuah peta jalan yang menyatukan filosofi lokal, agenda nasional, dan visi global. Melalui integrasi inilah, pendidikan Nusantara dapat bergerak mantap menuju 2045, bukan hanya merayakan seratus tahun kemerdekaan, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi bangsa pembelajar, bangsa yang resilien, dan bangsa yang mampu memberikan kontribusi besar bagi peradaban dunia.

## A. Peta Jalan Integrasi Kearifan Lokal–Global

Kearifan lokal dan agenda global sering kali dipandang sebagai dua kutub yang berlawanan. Kearifan lokal dianggap tradisional, emosional, dan berbasis komunitas, sedangkan agenda global dianggap modern, rasional, dan berbasis standar universal. Padahal, keduanya tidak harus saling menegasikan. Dalam konteks pendidikan menuju 2045, integrasi kearifan lokal dan global justru harus menjadi jantung roadmap, karena hanya dengan menggabungkan akar budaya dan visi dunia, Indonesia mampu menciptakan model pendidikan yang unik sekaligus kompetitif.

Kearifan lokal di Indonesia sangat kaya dan beragam. Dari falsafah Sunda *Silih Asih, Asah, Asuh*, nilai gotong royong Jawa, adat Minangkabau yang menekankan musyawarah, hingga filosofi kearifan laut masyarakat Bugis dan Maluku. Semua itu bukan sekadar budaya, melainkan modal sosial yang bisa dijadikan landasan pendidikan. Di sisi lain, agenda global yang diusung UNESCO, OECD, dan SDGs 2030–2045 menuntut sistem pendidikan yang inklusif, berbasis data, berbasis keterampilan abad 21, dan berkelanjutan. Integrasi antara keduanya berarti mengelola warisan budaya sebagai kekuatan untuk menjawab tantangan global.

Peta jalan integrasi ini memerlukan tiga lapisan utama. Pertama adalah **lapisan filosofis**. Pendidikan Indonesia harus memiliki kerangka filosofis yang jelas: Pancasila sebagai nilai dasar, kearifan lokal sebagai akar, dan agenda global sebagai cakrawala. Dengan kerangka ini, setiap kebijakan dan inovasi pendidikan akan memiliki pijakan moral sekaligus visi universal.

Kedua adalah **lapisan kurikulum dan pembelajaran**. Kurikulum 2045 perlu menggabungkan pengetahuan tradisional dengan keterampilan modern. Murid bisa belajar matematika sekaligus memahami filosofi batik yang mengajarkan pola dan geometri. Mereka bisa belajar biologi sambil mengenali tanaman obat tradisional. Mereka bisa belajar kewirausahaan digital yang dibingkai dalam nilai gotong royong. Dengan cara ini, pendidikan tidak tercerabut dari budaya, sekaligus tetap relevan dengan tuntutan dunia modern.

Ketiga adalah **lapisan kelembagaan dan jejaring global**. Sekolah dan perguruan tinggi Nusantara perlu membangun jejaring internasional, tetapi tetap membawa identitas budaya lokal sebagai ciri khas. Misalnya,

universitas di Indonesia bisa menjadi pusat studi kearifan lokal yang diakui dunia, sekaligus mitra dalam riset global. Sekolah di daerah bisa bermitra dengan sekolah luar negeri untuk program pertukaran budaya, sehingga murid belajar menjadi warga dunia tanpa kehilangan akar Nusantaranya.

Pilar UNESCO memberikan arah dalam integrasi ini. *Learning to Know* bisa diwujudkan dengan menggabungkan sains modern dan pengetahuan tradisional. *Learning to Do* bisa dipraktikkan dengan inovasi berbasis kearifan lokal, misalnya teknologi tepat guna yang lahir dari tradisi pertanian atau perikanan. *Learning to Be* mengakar pada identitas budaya sambil mengembangkan diri sebagai individu global. *Learning to Live Together* menjadi ruang kolaborasi antarbudaya, baik di tingkat lokal maupun internasional.

Nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* juga sangat relevan. *Silih Asih* memastikan integrasi lokal–global dilakukan dengan semangat kasih sayang, bukan dominasi. *Silih Asah* menegaskan bahwa bangsa lain bukan lawan, melainkan mitra belajar. *Silih Asuh* mengingatkan bahwa generasi muda harus dibimbing agar mampu berdiri tegak di panggung dunia tanpa kehilangan akar budaya.

Dalam konteks roadmap 2045, peta jalan integrasi ini bisa digambarkan dalam beberapa fase. Fase awal (2025–2035) adalah periode penguatan: memperluas dokumentasi, penelitian, dan pengajaran kearifan lokal sambil memastikan literasi global dasar tercapai. Fase kedua (2035–2040) adalah periode akselerasi: mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam kurikulum global serta memperluas jejaring internasional. Fase ketiga (2040–2045) adalah periode internasionalisasi: menjadikan kearifan lokal sebagai kontribusi Indonesia kepada dunia, misalnya melalui *best practices* pendidikan berbasis budaya yang diadopsi di level global.

Tantangan utama dalam integrasi ini adalah risiko formalitas atau simbolisme. Kearifan lokal sering hanya ditampilkan sebagai ornamen tanpa benar-benar diintegrasikan dalam sistem pembelajaran. Sebaliknya, agenda global sering diadopsi mentah-mentah tanpa penyesuaian. Karena itu, peta jalan ini harus menekankan substansi: bagaimana nilai budaya benar-benar memengaruhi proses belajar, dan bagaimana standar global benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan.

Jika peta jalan integrasi ini berhasil, maka pada 2045 Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas, tetapi juga sebagai model unik yang mampu menyatukan akar budaya dengan cakrawala global. Pendidikan Nusantara akan menjadi inspirasi: bagaimana sebuah bangsa bisa berakar kuat di tanahnya sendiri, tetapi juga berdiri sejajar di panggung dunia.

## B. Indikator Transformasi Pendidikan

Sebuah roadmap tanpa indikator ibarat kompas tanpa jarum penunjuk. Indikator adalah instrumen penting untuk memastikan arah transformasi pendidikan berjalan sesuai tujuan, dapat dievaluasi, dan bisa diperbaiki bila ada penyimpangan. Dalam konteks Indonesia menuju 2045, indikator transformasi pendidikan bukan sekadar angka statistik, melainkan gambaran nyata perubahan kualitas manusia dan sistem yang menopangnya. Subbab ini membahas berbagai indikator utama, baik kuantitatif maupun kualitatif, yang perlu dijadikan tolok ukur keberhasilan transformasi pendidikan.

Indikator pertama yang paling mendasar adalah **literasi dan numerasi**. Literasi bukan sekadar kemampuan membaca teks, tetapi juga mencakup literasi digital, literasi informasi, dan literasi budaya. Numerasi tidak hanya soal berhitung, tetapi juga kemampuan berpikir logis, analitis, dan problem solving berbasis data. Keberhasilan pendidikan diukur dari sejauh mana murid mampu menggunakan literasi dan numerasi dalam kehidupan nyata, bukan hanya dalam ujian standar.

Indikator kedua adalah **kompetensi abad 21**. Murid abad 21 harus memiliki 4C: critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Kompetensi ini bisa diukur melalui asesmen berbasis proyek, portofolio, dan keterampilan praktis, bukan sekadar pilihan ganda. Sekolah yang berhasil mentransformasi pendidikan adalah sekolah yang lulusannya tidak hanya mampu menguasai teori, tetapi juga sanggup bekerja sama, berinovasi, dan berkomunikasi dengan baik dalam konteks global.

Indikator ketiga adalah **karakter dan profil pelajar Pancasila**. Transformasi pendidikan tidak cukup jika hanya menghasilkan manusia cerdas, tetapi harus melahirkan manusia berkarakter: beriman, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Profil ini menjadi

tolok ukur penting karena pada akhirnya pendidikan adalah proses memanusiaikan manusia, bukan sekadar mencetak tenaga kerja. Indikator karakter bisa diukur melalui survei sikap, observasi perilaku, dan partisipasi murid dalam kegiatan sosial.

Indikator keempat adalah **inklusi dan pemerataan akses**. Transformasi pendidikan hanya sah disebut berhasil jika semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, gender, agama, atau disabilitas, memiliki akses yang sama. Indikator ini bisa dilihat dari angka partisipasi sekolah, rasio murid dari kelompok marginal, hingga ketersediaan fasilitas ramah disabilitas. Pendidikan inklusif adalah wujud nyata dari prinsip *no one left behind* dalam SDGs.

Indikator kelima adalah **kualitas guru dan tenaga kependidikan**. Guru adalah aktor utama dalam transformasi pendidikan. Kualitas mereka diukur bukan hanya dari ijazah atau sertifikasi, tetapi juga dari kompetensi pedagogik, profesionalisme, kreativitas, dan kepemimpinan. Indikator penting di sini adalah partisipasi guru dalam pelatihan berkelanjutan, publikasi karya ilmiah, dan keberhasilan mereka membimbing murid mencapai prestasi akademik maupun non-akademik.

Indikator keenam adalah **daya saing global**. Lulusan Indonesia pada 2045 harus mampu bersaing di pasar kerja internasional sekaligus berkontribusi dalam inovasi global. Indikatornya dapat dilihat dari partisipasi dalam riset internasional, keterlibatan dalam pertukaran pelajar, hingga jumlah lulusan yang diakui oleh lembaga internasional. Namun, daya saing global juga harus diimbangi dengan identitas lokal, sehingga lulusan tetap membawa ciri khas budaya Nusantara.

Indikator ketujuh adalah **penguasaan teknologi dan kecerdasan digital**. Transformasi pendidikan tidak bisa dilepaskan dari revolusi digital. Indikator keberhasilan meliputi tingkat adopsi teknologi dalam pembelajaran, penggunaan AI dan big data untuk personalisasi, serta kemampuan murid menjaga etika digital. Hal ini memastikan bahwa teknologi benar-benar menjadi alat pemberdayaan, bukan jebakan yang menjerumuskan.

Indikator kedelapan adalah **kesejahteraan murid**. Pendidikan tidak hanya diukur dari hasil akademik, tetapi juga dari tingkat kebahagiaan, kesehatan mental, dan rasa aman murid di sekolah. Survei kesejahteraan

murid menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pendidikan benar-benar memanusiakan. Dalam konteks VUCA, murid yang resilien dan sejahtera jauh lebih penting daripada sekadar murid yang berprestasi akademik tetapi rapuh secara psikologis.

Indikator kesembilan adalah **konektivitas sekolah dengan masyarakat dan industri**. Sekolah yang berhasil mentransformasi pendidikan adalah sekolah yang terbuka: bekerja sama dengan orang tua, komunitas lokal, dan dunia industri. Indikator bisa dilihat dari jumlah kemitraan, keterlibatan komunitas dalam pembelajaran, hingga relevansi lulusan dengan kebutuhan kerja nyata.

Indikator kesepuluh adalah **kontribusi pendidikan pada pembangunan berkelanjutan**. Pendidikan harus melahirkan generasi yang peduli pada lingkungan, aktif dalam kegiatan sosial, dan berkontribusi pada pencapaian SDGs. Indikator ini bisa diukur melalui jumlah sekolah hijau, proyek lingkungan berbasis murid, atau riset pendidikan yang mendukung keberlanjutan.

Kesepuluh indikator ini bukan daftar yang kaku, tetapi kerangka dinamis yang bisa berkembang sesuai kebutuhan zaman. Namun, prinsip utamanya tetap sama: pendidikan harus diukur dari dampaknya terhadap manusia dan masyarakat. Dengan indikator yang jelas, transformasi pendidikan Nusantara menuju 2045 tidak akan berhenti pada jargon, tetapi menjadi gerakan nyata yang bisa dipantau, dievaluasi, dan diperbaiki secara berkelanjutan.

Pada akhirnya, indikator bukan sekadar alat evaluasi, melainkan komitmen moral. Ia memastikan bahwa pendidikan benar-benar dijalankan untuk kepentingan murid, masyarakat, dan masa depan bangsa. Dengan indikator yang kuat, Indonesia dapat melangkah dengan percaya diri menuju visi Indonesia Emas 2045: sebuah bangsa pembelajar yang cerdas, berkarakter, inklusif, dan berdaya saing global.

### C. Roadmap Sekolah Digital Humanistik

Digitalisasi pendidikan adalah keniscayaan. Namun, digitalisasi tanpa jiwa akan berisiko mereduksi pendidikan menjadi sekadar transfer data,

mengabaikan nilai kemanusiaan yang seharusnya menjadi inti dari proses belajar. Oleh karena itu, roadmap sekolah digital menuju 2045 tidak cukup berfokus pada infrastruktur, aplikasi, atau algoritma, tetapi harus menekankan pendekatan humanistik yang menempatkan murid sebagai manusia utuh. Subbab ini akan menguraikan peta jalan sekolah digital yang bukan hanya canggih secara teknologi, tetapi juga hangat secara manusiawi, inklusif secara sosial, dan berakar pada budaya Nusantara.

Sekolah digital humanistik lahir dari kebutuhan menyatukan dua arus besar: percepatan teknologi dan kebutuhan pendidikan yang memanusiakan. Visi ini menekankan bahwa teknologi harus menjadi sarana untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memberdayakan murid, tanpa mengorbankan aspek karakter, empati, dan spiritualitas.

Fase pertama roadmap sekolah digital (2025–2035) adalah **fundamentalisasi digital**. Pada tahap ini, infrastruktur dasar harus dipenuhi secara merata: internet cepat, perangkat belajar, dan platform pembelajaran daring yang mudah diakses. Namun, lebih dari sekadar perangkat keras, yang penting adalah memastikan inklusivitas. Sekolah di daerah terpencil harus memiliki akses setara dengan sekolah di kota besar. Guru perlu dibekali pelatihan digital dasar, sehingga tidak ada kesenjangan besar dalam kapasitas.

Fase kedua (2035–2040) adalah **integrasi teknologi dan pedagogi**. Sekolah digital tidak boleh berhenti pada penggunaan aplikasi untuk ujian daring, tetapi harus mengintegrasikan teknologi ke dalam desain pembelajaran. Murid belajar melalui *blended learning*, simulasi virtual, *gamification*, dan kecerdasan buatan yang mempersonalisasi pembelajaran. Pada tahap ini, peran guru bergeser semakin kuat sebagai fasilitator, mentor, dan pendamping moral. Etika digital, literasi media, dan kesadaran kritis juga ditanamkan sebagai bagian dari kurikulum.

Fase ketiga (2040–2045) adalah **humanisasi digital**. Pada tahap ini, sekolah digital tidak hanya dilihat dari kecanggihannya, tetapi dari sejauh mana ia berhasil menjaga keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata. Murid diajak untuk menggunakan teknologi secara bijak, mengembangkan empati meski dalam interaksi virtual, serta tetap menghidupkan nilai kebersamaan di ruang fisik. Inovasi teknologi seperti AI, big data, atau *virtual reality* diarahkan untuk memperkuat kreativitas,

kolaborasi, dan kontribusi sosial, bukan untuk meniadakan interaksi manusia.

Pilar UNESCO menemukan dimensi baru dalam sekolah digital humanistik. *Learning to Know* diperkuat melalui akses informasi tanpa batas. *Learning to Do* diwujudkan dengan eksperimen digital, pemrograman, dan proyek teknologi. *Learning to Be* semakin penting, karena murid belajar membangun identitas diri di tengah dunia maya yang penuh distraksi. *Learning to Live Together* mendapatkan ruang global, di mana murid bisa berkolaborasi lintas negara, budaya, dan bahasa secara daring, namun tetap berakar pada nilai toleransi lokal.

Nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* memberikan landasan moral dalam digitalisasi. *Silih Asih* memastikan sekolah digital membangun empati dan kepedulian di ruang daring, misalnya dengan etika berkomunikasi di media sosial. *Silih Asah* menekankan pentingnya kolaborasi dalam komunitas belajar digital, di mana murid saling berbagi pengetahuan dan keterampilan. *Silih Asuh* menegaskan peran guru dan institusi dalam membimbing murid agar tetap berpegang pada nilai moral dan spiritual meskipun belajar di dunia digital.

Tantangan sekolah digital humanistik cukup besar. Pertama, kesenjangan digital masih nyata: ada murid yang mampu belajar dengan perangkat canggih, tetapi ada pula yang kesulitan hanya untuk mengakses internet. Kedua, risiko dehumanisasi: murid bisa menjadi pasif, kesepian, atau kecanduan layar. Ketiga, masalah etika: plagiarisme digital, ujaran kebencian, hingga penyalahgunaan AI. Semua ini menuntut pendidikan karakter yang semakin kuat.

Namun, peluangnya juga besar. Sekolah digital humanistik dapat memperluas akses ke daerah terpencil, menghubungkan murid dengan guru terbaik dari seluruh dunia, dan menumbuhkan kreativitas dalam bentuk baru. Jika diarahkan dengan tepat, sekolah digital akan menjadi ruang di mana teknologi memperkuat nilai kemanusiaan, bukan melemahkannya.

Pada akhirnya, roadmap sekolah digital humanistik mengingatkan kita bahwa pendidikan masa depan tidak boleh kehilangan wajah manusia. Teknologi hanya alat; manusia tetap tujuan. Sekolah digital harus melahirkan generasi yang bukan hanya cerdas dalam algoritma, tetapi juga bijak

dalam mengambil keputusan, empatik dalam berinteraksi, dan berkarakter dalam memimpin. Dengan jalan ini, Indonesia pada 2045 dapat menghadirkan model sekolah digital khas Nusantara: modern secara teknologi, kuat secara budaya, dan luhur secara moral.

## D. Roadmap Pendidikan Vokasi dan Industri 5.0

Pendidikan vokasi adalah tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia. Di era global yang semakin kompetitif, kebutuhan terhadap tenaga kerja terampil, adaptif, dan inovatif terus meningkat. Namun, di era *Industri 5.0*, vokasi tidak cukup hanya menyiapkan lulusan yang menguasai keterampilan teknis. Ia harus mampu melahirkan manusia yang kreatif, berkarakter, melek digital, dan berdaya cipta, sehingga dapat menjadi pencipta lapangan kerja, bukan sekadar pencari kerja. Roadmap pendidikan vokasi menuju 2045 bertujuan menyiapkan generasi yang relevan dengan perkembangan teknologi, tetapi tetap berakar pada nilai humanis dan kearifan lokal.

Industri 5.0 adalah fase di mana teknologi canggih seperti AI, robotika, *Internet of Things* (IoT), dan big data dipadukan dengan nilai kemanusiaan. Fokusnya bukan hanya efisiensi produksi, tetapi juga penciptaan nilai tambah yang berorientasi pada manusia. Dalam konteks ini, pendidikan vokasi harus bergeser dari pola lama yang hanya menekankan keterampilan mekanis menuju sistem baru yang mengintegrasikan teknologi, kreativitas, dan kepedulian sosial.

Fase pertama roadmap (2025–2035) adalah **penataan ulang fondasi vokasi**. Pada tahap ini, prioritas utama adalah memperkuat kurikulum vokasi dengan standar kompetensi yang sesuai kebutuhan industri global. Program *link and match* antara SMK, politeknik, dan dunia usaha/industri harus diperdalam, bukan hanya formalitas. Guru dan instruktur vokasi perlu diperkuat kapasitasnya melalui *upskilling* dan *reskilling* yang berkelanjutan, agar mereka benar-benar menguasai teknologi mutakhir sekaligus metode pembelajaran kreatif.

Fase kedua (2035–2040) adalah **integrasi teknologi dan kewirausahaan**. Pendidikan vokasi tidak boleh berhenti pada keterampilan operasional, tetapi harus menanamkan budaya inovasi dan jiwa kewirausahaan.

Lulusan SMK dan politeknik tidak hanya diproyeksikan menjadi pekerja pabrik, tetapi juga wirausahawan teknologi yang mampu menciptakan produk baru, startup lokal, atau solusi berbasis digital. Pada fase ini, sekolah vokasi perlu memiliki *teaching factory*, *digital lab*, dan pusat inovasi yang memungkinkan murid menciptakan produk nyata untuk pasar.

Fase ketiga (2040–2045) adalah **vokasi humanistik dan global**. Pada tahap ini, pendidikan vokasi Indonesia harus benar-benar mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga matang secara moral, sosial, dan spiritual. Mereka mampu bekerja sama lintas budaya, memimpin inovasi global, dan tetap membawa identitas Nusantara. Pendidikan vokasi diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, misalnya menciptakan teknologi ramah lingkungan, solusi energi terbarukan, dan produk berbasis kearifan lokal yang bisa bersaing di pasar dunia.

Pilar UNESCO memberi arah integrasi ini. *Learning to Know* diwujudkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan terapan. *Learning to Do* tampak jelas dalam keterampilan kerja nyata. *Learning to Be* diwujudkan dalam pembentukan identitas profesional yang berkarakter. *Learning to Live Together* hadir dalam budaya kerja sama lintas sektor, lintas negara, dan lintas budaya.

Nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* juga relevan dalam roadmap ini. *Silih Asih* memastikan bahwa pendidikan vokasi memperhatikan kesejahteraan murid dan membangun solidaritas di tempat kerja. *Silih Asah* menekankan proses pembelajaran kolektif, di mana murid, guru, dan industri saling mengasah pengetahuan. *Silih Asuh* hadir dalam bimbingan berkelanjutan dari sekolah dan komunitas, agar lulusan tidak hanya siap bekerja, tetapi juga siap menjadi pemimpin perubahan.

Tantangan besar tetap ada. Pendidikan vokasi di Indonesia sering menghadapi stigma sebagai “pilihan kedua” dibanding pendidikan akademik. Fasilitas di banyak SMK dan politeknik belum memadai, sementara kebutuhan industri berubah sangat cepat. Ada pula kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam akses pendidikan vokasi berkualitas. Karena itu, roadmap ini harus diiringi dengan kebijakan afirmatif, investasi besar dalam infrastruktur, dan konsistensi politik lintas rezim.

Namun, peluangnya sangat besar. Indonesia memiliki bonus demografi hingga 2035, dengan mayoritas penduduk usia produktif. Jika diarahkan dengan pendidikan vokasi yang tepat, mereka bisa menjadi motor penggerak ekonomi kreatif, teknologi, dan industri berkelanjutan. Dengan dukungan roadmap ini, Indonesia berpeluang menjadi pusat vokasi unggulan di Asia, bahkan dunia, dengan identitas khas Nusantara.

Pada akhirnya, roadmap pendidikan vokasi dan Industri 5.0 menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh berhenti pada kompetensi teknis. Ia harus melahirkan manusia produktif yang cerdas, kreatif, berkarakter, dan berdaya cipta. Jika berhasil, Indonesia 2045 tidak hanya memiliki tenaga kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja, inovator global, dan pemimpin masa depan yang membangun ekonomi dengan wajah manusia.

## E. Pendidikan sebagai Pilar SDGs 2045

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*) yang disepakati pada 2015 menargetkan pencapaian pada 2030. Namun, bagi Indonesia, visi ini tidak berhenti di 2030, melainkan menjadi pijakan untuk *Indonesia Emas 2045*. Pendidikan, khususnya SDG 4 (*quality education*), bukan hanya salah satu dari 17 tujuan, tetapi fondasi yang menopang keseluruhannya. Tanpa pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan, mustahil bangsa dapat mencapai tujuan lain, seperti pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, maupun keberlanjutan lingkungan. Subbab ini menegaskan peran pendidikan sebagai pilar utama SDGs 2045, dengan fokus pada strategi, capaian, dan tantangan yang perlu dijawab.

Pendidikan sebagai pilar SDGs berarti melihat pendidikan tidak hanya dari kacamata sekolah, tetapi sebagai ekosistem yang menghubungkan seluruh aspek pembangunan. SDG 4 menargetkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas untuk semua. Namun, substansinya jauh lebih luas: pendidikan memengaruhi kesehatan (SDG 3), menciptakan tenaga kerja berkualitas untuk pertumbuhan ekonomi (SDG 8), mengurangi ketimpangan (SDG 10), memperkuat kesetaraan gender (SDG 5), serta meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan (SDG 13, 14, 15). Dengan kata lain, pendidikan adalah benang merah yang menyatukan seluruh agenda SDGs.

Menuju 2045, Indonesia harus menjadikan pendidikan sebagai **investasi strategis**, bukan sekadar beban anggaran. Hal ini berarti mengalokasikan sumber daya secara konsisten, memastikan mutu guru dan sekolah meningkat, serta menjadikan pendidikan sebagai prioritas lintas rezim politik. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan generasi inovatif yang mampu memimpin transformasi sosial, ekonomi, dan ekologi.

Salah satu aspek penting adalah **pendidikan berkelanjutan (sustainability education)**. Murid perlu diajarkan tentang perubahan iklim, energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan gaya hidup ramah lingkungan. Namun, yang lebih penting adalah mengintegrasikan kearifan lokal dalam pendidikan berkelanjutan. Misalnya, tradisi masyarakat adat dalam menjaga hutan, filosofi gotong royong dalam pengelolaan sumber daya, atau praktik pertanian tradisional yang ramah lingkungan. Integrasi ini akan menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas sains, tetapi juga bijak secara ekologis.

Pendidikan juga menjadi pilar kesetaraan. Data global menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi pendidikan perempuan berdampak langsung pada penurunan kemiskinan, perbaikan kesehatan anak, dan peningkatan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pendidikan menuju 2045 harus memastikan akses yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan, termasuk anak-anak dari kelompok marginal, difabel, dan masyarakat di daerah terpencil. Inilah wujud nyata prinsip *no one left behind*.

Dimensi lain adalah **pendidikan untuk perdamaian dan toleransi**. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, pendidikan harus menanamkan nilai multikultural, inklusivitas, dan resolusi konflik. Hal ini sejalan dengan pilar UNESCO *Learning to Live Together*. Indonesia dengan keragaman etnis, agama, dan budaya memiliki potensi besar untuk menjadi contoh global jika berhasil menanamkan toleransi sejak dini melalui pendidikan.

Pendidikan vokasi juga memainkan peran strategis dalam pencapaian SDGs. Dengan menghasilkan tenaga kerja terampil, pendidikan vokasi mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (SDG 8), inovasi industri (SDG 9), dan pengurangan pengangguran. Namun, dalam kerangka SDGs, vokasi harus diarahkan pada *green jobs* dan *blue economy* yang mendukung pembangunan ramah lingkungan.

Nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* dapat memberi ruh lokal pada pencapaian SDGs. *Silih Asih* memastikan pendidikan tidak meninggalkan kelompok rentan. *Silih Asah* menekankan semangat saling belajar untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. *Silih Asuh* mengingatkan bahwa generasi muda harus dibimbing agar tidak hanya mengejar karier pribadi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan ekologis.

Tantangan besar tentu tetap ada. Kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah masih tinggi, infrastruktur belum merata, kualitas guru belum seragam, dan budaya literasi belum sepenuhnya mengakar. Di tingkat global, kompetisi antarbangsa menuntut Indonesia meningkatkan daya saing agar tidak tertinggal. Karena itu, roadmap pendidikan menuju 2045 harus menjawab tantangan ini dengan strategi adaptif dan kolaboratif.

Jika berhasil, pendidikan akan menjadi pilar yang menopang seluruh agenda SDGs 2045. Indonesia tidak hanya akan mencapai visi *Indonesia Emas*, tetapi juga berkontribusi pada dunia sebagai negara dengan sistem pendidikan khas Nusantara yang inklusif, humanis, dan berkelanjutan. Pendidikan akan melahirkan generasi yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga siap menjaga bumi, membangun perdamaian, dan menciptakan peradaban baru yang lebih adil.



## EPILOG

### **Refleksi Silih Asih, Asah, Asuh dalam Masyarakat Global**

Dalam perjalanan panjang buku ini, kita telah menelusuri dinamika pendidikan di era VUCA, Society 5.0, dan SDGs. Kita melihat bagaimana falsafah global—empat pilar UNESCO—bertemu dengan falsafah lokal Nusantara, khususnya nilai luhur *Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*. Kini, di bagian epilog, saatnya kita merenungkan makna terdalam dari integrasi ini dalam konteks masyarakat global.

*Silih Asih, Asah, Asuh* lahir dari kebijaksanaan lokal Sunda, namun maknanya bersifat universal. Ia adalah refleksi tentang cinta kasih (*asih*), tentang saling menumbuhkan intelektualitas dan keterampilan (*asah*), serta tentang membimbing dengan kasih sayang dan tanggung jawab moral (*asuh*). Ketiga nilai ini sejatinya adalah fondasi bagi masyarakat dunia yang sedang mencari arah di tengah ketidakpastian global.

Di era VUCA, masyarakat global sering terjebak pada persaingan keras, individualisme, dan ketidakpastian yang menimbulkan kecemasan kolektif. Namun, *Silih Asih* mengingatkan bahwa kasih sayang tetap relevan sebagai energi sosial yang mengikat komunitas manusia. Dunia membutuhkan empati lintas batas, solidaritas dalam menghadapi krisis iklim, pandemi, maupun konflik geopolitik. Pendidikan yang berlandaskan *Silih Asih* akan melahirkan generasi yang peduli, tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada sesama dan lingkungan.

*Silih Asah* mengajarkan bahwa pengetahuan adalah proses kolektif. Di masyarakat global, kolaborasi lintas bangsa, lintas disiplin, dan lintas generasi semakin dibutuhkan. Tidak ada satu bangsa pun yang mampu

menghadapi tantangan global sendirian. Dengan semangat *Silih Asah*, pendidikan bisa menjadi ruang di mana bangsa-bangsa saling belajar, saling mengasah keterampilan, dan memperkaya kebijaksanaan bersama. Inilah yang dimaksud Paulo Freire ketika menekankan pendidikan sebagai dialog—sebuah proses mutual, bukan dominasi.

*Silih Asuh* memberikan dimensi etis yang sangat dibutuhkan dunia modern. Teknologi, inovasi, dan ekonomi hanya akan bermakna jika diiringi dengan bimbingan moral. Dunia membutuhkan pemimpin, guru, dan warga global yang mampu mengasuh peradaban, menjaga nilai kemanusiaan, dan mengarahkan teknologi untuk kesejahteraan. Pendidikan dengan ruh *Silih Asuh* akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijak, tidak hanya inovatif, tetapi juga berakhlak.

Refleksi ini semakin kuat ketika kita menghubungkannya dengan pilar UNESCO. *Learning to Know* menemukan ruhnya dalam *Silih Asah*, *Learning to Do* dalam praktik nyata kolaboratif, *Learning to Be* dalam kesadaran diri yang dibentuk oleh *Silih Asuh*, dan *Learning to Live Together* dalam kasih sayang yang diwujudkan oleh *Silih Asih*. Dengan demikian, nilai lokal dan global bukanlah dua arus yang berlawanan, melainkan dua aliran yang bertemu dalam satu sungai besar: peradaban manusia.

Bagi Indonesia, refleksi ini adalah pengingat bahwa kita memiliki modal sosial yang berharga untuk ditawarkan pada dunia. *Silih Asih*, *Asah*, *Asuh* bukan sekadar falsafah lokal, tetapi bisa menjadi kontribusi Nusantara bagi percakapan global tentang pendidikan dan kemanusiaan. Dunia yang mencari arah moral di era digital bisa belajar dari nilai-nilai ini. Inilah saatnya Indonesia bukan hanya menjadi penerima gagasan global, tetapi juga pemberi inspirasi.

Menjelang 2045, seratus tahun kemerdekaan, pendidikan Indonesia diharapkan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam teknologi, tetapi juga berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Generasi yang berani menghadapi ketidakpastian dengan pengetahuan, menghadapi kompleksitas dengan kolaborasi, dan menghadapi ambiguitas dengan kompas moral. Generasi yang membawa pesan kasih sayang, asahan intelektual, dan asuhan moral ke panggung dunia.

Epilog ini ingin menutup perjalanan panjang dengan sebuah kesadaran sederhana tetapi mendalam: pendidikan bukanlah tujuan akhir, melainkan jalan untuk memanusiakan manusia. Jalan itu bisa berliku, penuh tantangan, bahkan kadang terasa berat. Namun, dengan *Silih Asih, Asah, Asuh* sebagai pijakan, kita bisa yakin bahwa arah pendidikan Nusantara menuju 2045 tidak hanya akan membawa kita pada kejayaan nasional, tetapi juga pada kontribusi global bagi perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan.

Pada akhirnya, refleksi ini bukan hanya untuk guru, murid, atau pemimpin pendidikan, tetapi untuk kita semua sebagai warga dunia. Karena pada hakikatnya, setiap tindakan kecil yang kita lakukan dalam semangat *Silih Asih, Asah, Asuh* adalah kontribusi nyata bagi terbangunnya masyarakat global yang lebih manusiawi.

## **Warisan Pendidikan Humanis untuk Generasi Mendatang**

Pendidikan adalah warisan paling berharga yang dapat diberikan sebuah generasi kepada generasi berikutnya. Bukan sekadar bangunan sekolah, buku teks, atau sistem kurikulum yang silih berganti, melainkan nilai, spirit, dan arah moral yang akan membimbing manusia dalam menapaki jalan panjang kehidupan. Dalam konteks Nusantara menuju 2045, warisan itu harus berbentuk pendidikan humanis: pendidikan yang menempatkan manusia sebagai pusat, menjunjung tinggi martabat, dan menumbuhkan potensi secara utuh.

Warisan pendidikan humanis menuntut kita untuk melihat murid bukan sekadar sebagai “aset negara” atau “tenaga kerja masa depan”, melainkan sebagai manusia dengan akal, hati, dan jiwa. Pendidikan tidak boleh direduksi menjadi sekadar mesin pencetak ijazah atau angka-angka statistik. Ia harus menjadi taman tempat anak-anak tumbuh sesuai kodrat, menemukan jati diri, dan menumbuhkan rasa kemanusiaan. Inilah semangat *Learning to Be* yang digagas UNESCO dan sejalan dengan *Silih Asih, Asah, Asuh* yang hidup dalam budaya kita.

Generasi mendatang menghadapi dunia yang jauh lebih kompleks daripada hari ini. Teknologi kecerdasan buatan, bioteknologi, krisis iklim, hingga perubahan geopolitik global akan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Pendidikan humanis adalah warisan yang akan memampukan

mereka untuk menghadapi itu semua dengan bijaksana. Bukan hanya dengan kecerdasan teknis, tetapi juga dengan empati, kreativitas, dan keberanian moral.

Warisan ini juga berarti pendidikan yang mengajarkan toleransi dan perdamaian. Indonesia yang beragam hanya akan bertahan jika generasi mudanya memiliki kemampuan untuk hidup bersama dalam perbedaan. Nilai gotong royong, musyawarah, dan solidaritas yang diwariskan leluhur harus terus hidup dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan budaya sekolah. Dengan begitu, pendidikan menjadi ruang di mana anak-anak tidak hanya belajar matematika dan sains, tetapi juga seni hidup bersama dalam masyarakat multikultural.

Pendidikan humanis juga harus diwariskan dalam bentuk keberlanjutan. Generasi mendatang mewarisi bumi yang kita jaga atau rusak hari ini. Karena itu, pendidikan harus menanamkan kesadaran ekologis, gaya hidup ramah lingkungan, dan kepedulian pada keberlanjutan. Seorang murid yang belajar mencintai lingkungan sejak dini akan tumbuh menjadi pemimpin yang tidak merusak alam demi keuntungan sesaat, tetapi mengelola sumber daya dengan penuh tanggung jawab.

Dalam konteks global, warisan pendidikan humanis berarti melahirkan generasi Indonesia yang mampu berkontribusi bagi dunia. Bukan hanya sebagai pengikut arus globalisasi, tetapi sebagai pencipta gagasan, penjaga nilai, dan teladan kemanusiaan. Generasi mendatang harus mampu berdialog dengan dunia sambil membawa identitas Nusantara: nilai *Silih Asih, Asah, Asuh* yang mengajarkan kasih sayang, kebersamaan, dan bimbingan moral. Dengan itu, Indonesia bukan hanya menerima warisan dari dunia, tetapi juga memberi warisan kepada dunia.

Warisan pendidikan humanis tidak dapat diwujudkan hanya dengan kebijakan pemerintah. Ia membutuhkan keterlibatan semua pihak: guru yang penuh dedikasi, orang tua yang bijaksana, komunitas yang peduli, industri yang bertanggung jawab, dan murid yang mau belajar sepanjang hayat. Inilah warisan kolektif yang akan mengikat bangsa ini melewati generasi.

Pada akhirnya, warisan pendidikan humanis adalah tentang meninggalkan jejak nilai, bukan sekadar catatan prestasi. Ia adalah pesan yang akan

hidup dalam hati generasi mendatang: bahwa menjadi manusia berarti mencintai sesama, menghargai pengetahuan, menjaga bumi, dan terus belajar. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, “*Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*”—warisan sejati adalah teladan, semangat, dan dorongan yang membimbing generasi penerus.

Dengan pendidikan humanis sebagai warisan, kita percaya bahwa Indonesia 2045 bukan hanya akan menjadi negara maju secara ekonomi, tetapi juga bangsa besar secara moral dan kemanusiaan. Generasi mendatang akan berdiri tegak di panggung dunia, membawa pesan bahwa dari Nusantara, lahir pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga memuliakan manusia.

### **Pesan Filosofis untuk Guru, Murid, dan Pemimpin Pendidikan**

Pendidikan adalah perjalanan panjang, bukan sekadar sebuah tujuan. Dalam perjalanan ini, ada tiga aktor utama yang selalu hadir: guru, murid, dan pemimpin pendidikan. Ketiganya adalah mata rantai yang saling melengkapi. Tanpa guru, ilmu tidak berpindah. Tanpa murid, ilmu tidak bermakna. Tanpa pemimpin, sistem tidak berjalan. Maka, epilog ini ditujukan sebagai pesan filosofis bagi ketiganya—sebuah refleksi yang semoga menjadi bekal untuk menapaki masa depan pendidikan Nusantara.

**Untuk para guru**, pesan ini sederhana tetapi mendalam: engkaulah jiwa dari pendidikan. Teknologi, kurikulum, atau kebijakan hanyalah alat; tanpa ketulusanmu, semua akan kehilangan ruh. Jadilah guru yang bukan sekadar pengajar, tetapi pembimbing, penginspirasi, dan pengasuh jiwa. Ingatlah pesan Ki Hajar Dewantara: “*Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*.” Guru sejati adalah teladan yang berjalan di depan, motivator yang membangun semangat di tengah, dan pendamping yang mendorong dari belakang. Dalam era VUCA dan Society 5.0, ketika dunia penuh ketidakpastian, murid membutuhkan guru yang bisa menjadi cahaya penuntun, bukan sekadar pengisi pengetahuan.

**Untuk para murid**, pesan ini adalah undangan untuk menemukan jati diri. Belajarlah bukan hanya demi nilai, ijazah, atau pekerjaan, tetapi demi memmanusiakan dirimu sendiri. Jadilah manusia yang tidak hanya cerdas otaknya, tetapi juga luas hatinya. Carilah ilmu bukan hanya di bangku

sekolah, tetapi juga dalam pengalaman hidup, dalam kebersamaan, dalam kerja keras, bahkan dalam kegagalan. Ingatlah bahwa belajar adalah proses sepanjang hayat. Dalam falsafah *Silih Asih, Asah, Asuh*, engkau belajar mengasahi sesama, mengasah pikiran, dan membiarkan dirimu diasuh oleh kebijaksanaan. Suatu saat nanti, engkau akan menjadi pengasuh bagi generasi berikutnya.

**Untuk para pemimpin pendidikan**, pesan ini adalah amanah besar. Engkaulah pengatur arah, penentu kebijakan, dan penjaga nilai. Jangan biarkan pendidikan terjebak dalam politik jangka pendek. Jangan biarkan kebijakan hanya menjadi proyek tanpa jiwa. Tugasmu adalah memastikan bahwa setiap keputusan berpihak pada murid, mendukung guru, dan menjaga keberlangsungan sistem. Ingatlah bahwa pendidikan adalah investasi peradaban, bukan komoditas. Seperti ditegaskan oleh Nelson Mandela: *“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”* Maka, gunakan kekuasaanmu dengan bijak, karena warisanmu bukan gedung atau anggaran, melainkan generasi manusia yang akan mengisi masa depan bangsa.

Ketiga aktor ini—guru, murid, dan pemimpin—adalah pilar yang menopang pendidikan Nusantara. Jika salah satunya rapuh, bangunan itu akan goyah. Namun, jika ketiganya kokoh, maka pendidikan Indonesia akan berdiri tegak, bahkan mampu memberi inspirasi bagi dunia. Pesan filosofis ini adalah undangan untuk menyadari peran masing-masing: guru sebagai pelita, murid sebagai pewaris, dan pemimpin sebagai pengarah.

Pada akhirnya, pendidikan adalah kerja kolektif, sebuah *silih asih, silih asah, silih asuh* yang tak pernah selesai. Guru mengasahi murid, murid belajar dari guru, pemimpin mengasuh sistem agar keduanya berjalan harmonis. Inilah simfoni pendidikan humanis yang harus diwariskan ke generasi mendatang. Dengan demikian, kita tidak hanya membangun sekolah dan universitas, tetapi juga membangun manusia, membangun bangsa, dan membangun peradaban.



## GLOSARIUM

### A

- **Adaptif:** Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan tantangan.
- **Agenda 2030:** Kesepakatan global tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan PBB.
- **Agility:** Kelincahan organisasi atau individu dalam merespons ketidakpastian.
- **AI (Artificial Intelligence):** Kecerdasan buatan yang meniru kemampuan berpikir manusia melalui sistem komputer.
- **Asah:** Nilai kearifan lokal Sunda yang berarti saling mengasah kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan.
- **Asih:** Nilai kearifan lokal Sunda yang berarti saling mengasahi, menyayangi, dan menghargai.
- **Asuh:** Nilai kearifan lokal Sunda yang berarti membimbing, mendampingi, dan mengarahkan dengan kasih.

### B

- **Big Data:** Kumpulan data dalam jumlah besar yang dianalisis untuk menemukan pola dan pengambilan keputusan.
- **Blended Learning:** Model pembelajaran yang memadukan tatap muka langsung dan pembelajaran daring.
- **Bonus Demografi:** Kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia nonproduktif.
- **Best Practices:** Praktik terbaik yang diakui efektif dan dapat dijadikan rujukan untuk perbaikan.

## C

- **Character Building:** Proses pendidikan yang berfokus pada pembentukan nilai, moral, dan akhlak.
- **Complexity:** Tingkat kerumitan dalam sistem sosial, politik, ekonomi, atau pendidikan.
- **Creativity:** Kemampuan menciptakan gagasan, solusi, atau karya baru yang bermanfaat.
- **Critical Thinking:** Kemampuan berpikir rasional, logis, dan reflektif dalam mengambil keputusan.
- **Curriculum Merdeka:** Kurikulum di Indonesia yang memberi keleluasaan sekolah dan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan murid.

## D

- **Demokrasi Pendidikan:** Prinsip bahwa pendidikan harus terbuka, inklusif, dan menghargai kebebasan berpikir.
- **Digital Literacy:** Kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari teknologi digital.
- **Disrupsi:** Perubahan mendasar akibat inovasi atau teknologi baru yang mengguncang tatanan lama.
- **Diversity:** Keberagaman dalam masyarakat, mencakup suku, agama, budaya, dan identitas.

## E

- **Egaliter:** Sikap setara tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau etnis.
- **Empati:** Kemampuan memahami dan merasakan pengalaman orang lain.
- **Entrepreneurship:** Kemampuan menciptakan usaha baru yang inovatif dan bernilai ekonomi.
- **Evidence-Based Education:** Pendidikan berbasis bukti dan data untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat.

## F

- **Falsafah:** Pemikiran dasar yang menjadi fondasi moral dan intelektual dalam pendidikan.

- **Flexible Learning:** Pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan, waktu, dan gaya belajar murid.
- **Future Skills:** Keterampilan masa depan seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan literasi teknologi.

## G

- **Gamifikasi:** Penggunaan elemen permainan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi.
- **Global Citizenship:** Kesadaran menjadi warga dunia yang bertanggung jawab terhadap isu global.
- **Gotong Royong:** Nilai budaya Indonesia tentang kerja sama dan solidaritas sosial.
- **Green Jobs:** Pekerjaan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

## H

- **Human-Centered:** Pendekatan yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi.
- **Humanistik:** Falsafah pendidikan yang menekankan martabat, kebebasan, dan perkembangan manusia.
- **Hybrid Learning:** Model pembelajaran campuran antara daring, luring, dan praktik lapangan.

## I

- **Inklusif:** Sistem pendidikan yang menerima semua murid tanpa diskriminasi.
- **Industri 4.0:** Era revolusi industri berbasis otomatisasi, AI, dan IoT.
- **Industri 5.0:** Era industri yang mengintegrasikan teknologi canggih dengan nilai kemanusiaan.
- **Innovation:** Proses menciptakan gagasan baru untuk meningkatkan kualitas hidup.

## J

- **Jati Diri:** Identitas sejati seseorang yang terbentuk melalui pengalaman, budaya, dan pendidikan.
- **Jejaring Global:** Koneksi antarbangsa dalam bidang pendidikan, riset, dan kebudayaan.

## K

- **Karakter:** Sifat-sifat moral dan nilai etis yang melekat pada individu.
- **Kompetensi Abad 21:** Keterampilan utama yang diperlukan pada era global: 4C (Critical, Creative, Collaboration, Communication).
- **Kurikulum Vokasi:** Kurikulum pendidikan yang fokus pada keterampilan praktis sesuai kebutuhan dunia kerja.
- **Kearifan Lokal:** Pengetahuan, nilai, dan tradisi yang lahir dari pengalaman masyarakat setempat.

## L

- **Learning to Know:** Pilar UNESCO yang menekankan penguasaan pengetahuan dasar.
- **Learning to Do:** Pilar UNESCO yang menekankan keterampilan kerja dan praktik.
- **Learning to Be:** Pilar UNESCO yang menekankan pembentukan identitas dan kepribadian.
- **Learning to Live Together:** Pilar UNESCO yang menekankan toleransi, perdamaian, dan kebersamaan.
- **Literasi:** Kemampuan membaca, menulis, memahami, dan mengkritisi informasi.

## M

- **Merdeka Belajar:** Filosofi pendidikan Indonesia yang menekankan kebebasan guru dan murid dalam proses belajar.
- **Metaverse:** Ruang virtual berbasis teknologi digital yang bisa digunakan untuk pembelajaran.
- **Multikulturalisme:** Kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman budaya.

## N

- **Numerasi:** Kemampuan menggunakan angka, logika, dan data dalam kehidupan sehari-hari.
- **Nilai:** Prinsip atau keyakinan yang menjadi pedoman perilaku individu maupun masyarakat.
- **Networking:** Proses membangun jejaring sosial maupun profesional untuk tujuan bersama.

## O

- **OCB (Organizational Citizenship Behavior):** Perilaku ekstra di luar tugas formal yang mendukung keberhasilan organisasi.
- **OECD:** Organisasi internasional yang mengembangkan kebijakan ekonomi dan pendidikan berbasis data.
- **Open Learning:** Sistem pendidikan terbuka yang memungkinkan akses tanpa batasan ruang dan waktu.

## P

- **Pancasila:** Dasar negara Indonesia yang memuat nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.
- **Pendidikan Karakter:** Upaya sistematis menanamkan nilai moral, etika, dan spiritual.
- **Personalized Learning:** Model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.
- **Problem-Based Learning:** Pendekatan pembelajaran dengan fokus pada pemecahan masalah nyata.

## Q

- **Quality Education:** Pendidikan bermutu sesuai SDG 4: inklusif, merata, dan berkelanjutan.

## R

- **Rapor Pendidikan:** Instrumen evaluasi sistem pendidikan Indonesia berbasis data nasional.
- **Resiliensi:** Kemampuan bangkit kembali dari kesulitan, krisis, atau perubahan besar.
- **Roadmap:** Peta jalan strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang.

## S

- **SDGs (Sustainable Development Goals):** 17 tujuan pembangunan berkelanjutan PBB.
- **Silih Asih, Asah, Asuh:** Falsafah Sunda tentang kasih sayang, belajar bersama, dan saling membimbing.
- **Society 5.0:** Konsep masyarakat cerdas berbasis teknologi dengan orientasi humanis.
- **STEM:** Pendidikan berbasis sains, teknologi, rekayasa, dan matematika.

- **Sustainability:** Prinsip keberlanjutan yang menjaga keseimbangan ekologi, sosial, dan ekonomi.

## T

- **Transformasi Pendidikan:** Proses perubahan sistem pendidikan agar relevan dengan kebutuhan zaman.
- **Tolerance:** Kemampuan menerima dan menghargai perbedaan.
- **Teaching Factory:** Model pembelajaran vokasi berbasis produksi nyata di sekolah.
- **Trust:** Rasa saling percaya dalam hubungan sosial maupun pendidikan.

## U

- **UNESCO:** Badan PBB yang menangani pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
- **Universal Design for Learning (UDL):** Prinsip pembelajaran yang ramah bagi semua murid, termasuk difabel.
- **Up-Skilling:** Peningkatan keterampilan agar sesuai dengan tuntutan kerja baru.

## V

- **Vokasi:** Pendidikan yang menekankan keterampilan praktis sesuai kebutuhan kerja.
- **VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity):** Konsep dunia modern yang penuh ketidakpastian.
- **Visionary Leadership:** Kepemimpinan dengan visi jelas dan mampu menginspirasi perubahan.

## W

- **Well-being:** Kesejahteraan menyeluruh, mencakup fisik, mental, dan sosial.
- **Work-Based Learning:** Pembelajaran berbasis pengalaman kerja nyata.
- **World-Class Education:** Sistem pendidikan yang diakui secara global karena mutu dan relevansinya.

## Z

- **Zero Exclusion:** Prinsip bahwa tidak ada murid yang boleh ditinggalkan dalam sistem pendidikan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, R., & Wu, M. (2021). *PISA 2021 Assessment and Analytical Framework*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/19963777>
- Aisyah, S., & Nugroho, A. (2023). Digital literacy integration in Indonesian vocational schools. *Journal of Educational Technology and Society*, 26(4), 88–102.
- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.
- Anshori, M., & Susanti, E. (2022). Knowledge management practices in Indonesian higher education. *International Journal of Educational Development*, 93, 102614. <https://doi.org/10.1016/j.ijedu-dev.2022.102614>
- Arora, A., & Sharma, P. (2024). Artificial intelligence in education: Opportunities and ethical challenges. *Computers & Education*, 196, 104737. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104737>
- Asari, H., & Rahmawati, I. (2022). The role of character education in achieving SDG 4 in Indonesia. *Journal of Moral Education*, 51(3), 289–305.
- Beetham, H., & Sharpe, R. (Eds.). (2019). *Rethinking pedagogy for a digital age*. Routledge.
- Bourdieu, P. (1986). *Distinction: A social critique of the judgement of taste*. Harvard University Press.
- Bruner, J. S. (1996). *The culture of education*. Harvard University Press.

- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.
- Darmawan, D., & Kartika, Y. (2023). Blended learning effectiveness in Indonesian secondary schools. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 18(7), 44–57.
- Dewantara, K. H. (2013). *Pendidikan: Pemikiran, konsep, dan keteladanan*. UST Press.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and education*. Macmillan.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. (2022). *Roadmap pendidikan vokasi Indonesia 2022–2035*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Durkheim, É. (1956). *Education and sociology*. Free Press.
- Fadel, C., Bialik, M., & Trilling, B. (2015). *Four-dimensional education: The competencies learners need to succeed*. Center for Curriculum Redesign.
- Fazekas, M., & Burns, T. (2020). *Evidence in education: Linking research and policy*. OECD Publishing.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Continuum.
- Freire, P. (1998). *Pedagogy of freedom: Ethics, democracy, and civic courage*. Rowman & Littlefield.
- Fullan, M. (2020). *Leading in a culture of change*. Jossey-Bass.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2012). *Organizations: Behavior, structure, processes* (14th ed.). McGraw-Hill.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action*. Beacon Press.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional capital: Transforming teaching in every school*. Teachers College Press.
- Hidayat, R., & Suryadi, A. (2021). Teacher resilience in Indonesian vocational schools. *Asia Pacific Education Review*, 22(2), 299–312.
- Illich, I. (1971). *Deschooling society*. Harper & Row.
- Kemendikbudristek. (2022). *Rapor Pendidikan Indonesia 2022*. Pusat Asesmen Pendidikan.

- Kemendikbudristek. (2023). *Kurikulum Merdeka: Konsep dan Implementasi*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kemendikbudristek. (2024). *Evaluasi capaian pendidikan nasional tahun 2023/2024*. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
- Ki Hajar Dewantara. (1962). *Bagian pertama: Pendidikan*. Majelis Luhur Taman Siswa.
- Kosugi, M., & Fujii, H. (2021). Society 5.0 and education reform in Japan. *International Journal of Educational Research*, 109, 101804. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2021.101804>
- Lase, D. (2019). Education and industrial revolution 4.0. *Journal of Educational Science*, 3(1), 1–13.
- Lee, M., & Trimi, S. (2021). Innovation for creating a smart future. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(3), 190.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
- McClelland, D. C. (1961). *The achieving society*. Princeton University Press.
- Mikic, A. (2020). *Education for sustainable development: A roadmap*. UNESCO Publishing.
- Mulyasa, E. (2021). *Manajemen berbasis sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- Noddings, N. (2013). *Caring: A relational approach to ethics and moral education*. University of California Press.
- OECD. (2019). *OECD future of education and skills 2030: OECD learning compass*. OECD Publishing.
- OECD. (2022). *Education at a glance 2022: OECD indicators*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Skills outlook 2023: AI and the future of skills*. OECD Publishing.
- Piaget, J. (1952). *The origins of intelligence in children*. International Universities Press.
- Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9(5), 1–6.

- Rachman, A., & Putri, D. (2022). Integration of local wisdom in Indonesian character education. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 211–225.
- Rohim, M. (2023). Pendidikan vokasi dan transformasi industri 5.0 di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 13(2), 145–160.
- Schwab, K. (2017). *The fourth industrial revolution*. Crown Business.
- Schunk, D. H. (2020). *Learning theories: An educational perspective* (8th ed.). Pearson.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Senge, P. M. (2006). *The fifth discipline: The art and practice of the learning organization*. Doubleday.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan*. Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Manajemen pendidikan nasional*. PT Remaja Rosdakarya.
- UNESCO. (2015). *Rethinking education: Towards a global common good?* UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2020). *Education for sustainable development: A roadmap*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2021). *Futures of education: Reimagining our futures together*. UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2022). *Global education monitoring report 2022: Inclusion and education*. UNESCO Publishing.
- UNICEF. (2021). *The state of the world's children 2021: On my mind – Promoting, protecting and caring for children's mental health*. UNICEF.
- Usman, H. (2021). *Manajemen: Teori, praktik, dan riset pendidikan*. Bumi Aksara.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- World Bank. (2018). *World development report 2018: Learning to realize education's promise*. World Bank.
- World Bank. (2020). *The COVID-19 pandemic: Shocks to education and policy responses*. World Bank.

- World Economic Forum. (2020). *Schools of the future: Defining new models of education for the fourth industrial revolution*. WEF.
- Zakaria, F. (2021). *Ten lessons for a post-pandemic world*. W. W. Norton & Company.
- Zamroni. (2020). *Pendidikan dan demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Zhao, Y. (2020). *Learners without borders: New learning pathways for all students*. Corwin.



## LAMPIRAN

Tabel Implementasi Silih Asih–Asah–Asuh di Sekolah

Nilai	Contoh Praktik disekolah	Indikator Capaian
<b>Silih Asih</b> (Kasih Sayang)	Guru menyapa murid dengan ramah setiap pagi. Siswa saling membantu teman yang kesulitan belajar. Program “Teman Sebaya Peduli” untuk mendampingi siswa baru atau siswa yang kesulitan.	Murid merasa nyaman dan diterima di sekolah. Hubungan antarwarga sekolah harmonis. Terbentuk budaya empati dan kepedulian sosial.
<b>Silih Asih</b> (Kasih Sayang)	Mengadakan program bakti sosial dan penggalangan dana untuk warga sekitar. Murid diajak berkunjung ke panti asuhan atau lingkungan yang membutuhkan.	Murid terbiasa peduli pada lingkungan sekitar. Tumbuhnya solidaritas sosial di antara guru, murid, dan masyarakat.
<b>Silih Asah</b> (Belajar Bersama)	Program tutor sebaya di kelas untuk membantu murid yang kesulitan memahami materi. Guru mengajak siswa berdiskusi dan mengerjakan proyek kelompok.	Murid menunjukkan peningkatan hasil belajar. Murid aktif berkolaborasi dalam kegiatan belajar.
<b>Silih Asah</b> (Belajar Bersama)	Kegiatan ekstrakurikuler berbasis minat dan bakat (misalnya klub sains, seni, olahraga). Murid dilibatkan dalam lomba inovasi dan penelitian.	Murid menunjukkan kreativitas dan prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Terbentuk budaya belajar sepanjang hayat.
<b>Silih Asuh</b> (Membimbing)	Guru mendampingi murid dalam menyusun rencana belajar pribadi. Program bimbingan konseling aktif memberikan dukungan emosional dan akademik.	Murid memiliki arah belajar yang jelas. Murid mendapatkan dukungan psikologis dan merasa dihargai.

Nilai	Contoh Praktik disekolah	Indikator Capaian
<b>Silih Asuh</b> (Membimbing)	Kepala sekolah dan guru menanamkan nilai disiplin melalui teladan. Program mentoring guru–murid atau guru–guru muda.	Murid menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Guru muda lebih percaya diri dalam mengajar.
<b>Integrasi Silih Asih–Asah–Asuh</b>	Program budaya sekolah: doa bersama, kegiatan literasi pagi, dan gotong royong menjaga kebersihan sekolah. Pembelajaran kontekstual berbasis proyek sosial.	Terbentuk iklim sekolah yang sehat, religius, inklusif, dan kolaboratif. Murid memiliki rasa kepemilikan terhadap sekolah.

**Catatan:**

- **Silih Asih** → fokus pada kasih sayang, empati, dan solidaritas.
- **Silih Asah** → fokus pada peningkatan kompetensi dan budaya belajar.
- **Silih Asuh** → fokus pada bimbingan, teladan, dan pendampingan moral.
- **Integrasi** → seluruh nilai dipraktikkan dalam budaya sekolah secara utuh.

## LAMPIRAN

### Template Rencana Aksi Pendidikan Berbasis Pilar UNESCO

Pilar UNESCO	Contoh Praktik disekolah	Indikator Capaian
<b>Learning to Know</b> (Belajar untuk Mengetahui)	Program literasi pagi (membaca 15 menit sebelum pelajaran). Peningkatan akses perpustakaan digital. Pelatihan keterampilan riset sederhana untuk murid.	Murid terbiasa membaca setiap hari. Peningkatan skor literasi & numerasi dalam Rapor Pendidikan. Murid mampu membuat laporan hasil penelitian kecil.
<b>Learning to Do</b> (Belajar untuk Melakukan)	Proyek berbasis keterampilan (misalnya membuat produk lokal, robotik, aplikasi sederhana). Praktik kerja lapangan (SMK) atau magang industri. Kegiatan kewirausahaan siswa (market day, koperasi sekolah).	Murid mampu menghasilkan karya nyata yang bermanfaat. Lulusan memiliki keterampilan vokasi sesuai standar industri. Meningkatnya jumlah murid yang aktif berwirausaha.
<b>Learning to Be</b> (Belajar untuk Menjadi)	Program penguatan karakter (profil pelajar Pancasila, doa bersama, refleksi diri). Layanan konseling dan bimbingan karier. Pelatihan kepemimpinan siswa (OSIS, ekstrakurikuler, kegiatan sosial).	Murid menunjukkan sikap percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Murid memiliki rencana hidup/ karier jangka panjang. Tumbuhnya generasi yang berkarakter kuat sesuai Pancasila.

<b>Pilar UNESCO</b>	<b>Contoh Praktik disekolah</b>	<b>Indikator Capaian</b>
<p><b>Learning to Live Together</b> (Belajar untuk Hidup Bersama)</p>	<p>Program toleransi &amp; multikultural (diskusi lintas agama, budaya, suku). Gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Kegiatan bakti sosial &amp; kolaborasi dengan komunitas lokal.</p>	<p>Murid menunjukkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Sekolah memiliki budaya kebersamaan dan solidaritas sosial. Murid aktif terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan.</p>

## BIOGRAFI PENULIS



**Dr. Andi Hermawan, M.Pd**

Lahir di Malang, Jawa Timur pada tanggal 29 April 1977. Beliau adalah anak pertama dari tiga bersaudara dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai pendidikan dan tanggung jawab. Sejak kecil, dikenal sebagai pribadi yang tekun, disiplin, dan memiliki minat yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dan matematika.

Menamatkan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya, dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Dampit, Kabupaten Malang, yang diselesaikannya pada tahun 1995. Minat yang kuat dalam bidang ekonomi dan akuntansi membawanya untuk melanjutkan studi pada Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana Malang, dan berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E., Ak.) pada tahun 1999. Pada tahun 2014, ia berhasil menyelesaikan Program Sarjana Matematika

di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Timbul Nusantara – IBEK Jakarta, dan memperoleh gelar Sarjana Sains (**S.Si.**).

Kecintaannya terhadap dunia pendidikan mengantarkannya untuk mengambil jalur kepemimpinan dan manajemen pendidikan. Ia menyelesaikan Program Magister Administrasi Pendidikan di Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor pada tahun 2019 dan meraih gelar Magister Pendidikan (**M.Pd**). Konsistensinya dalam mengembangkan kapasitas akademik dan profesional dibuktikan dengan pencapaian tertinggi berupa gelar Doktor (**Dr.**) dalam bidang Manajemen Pendidikan dari institusi yang sama pada tahun 2022.

Dalam karier profesional telah mengabdikan sebagai Guru pada SMK PGRI 2 Cibinong, Kabupaten Bogor sejak tahun 1999 dan dipercaya menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah. Selain itu juga aktif di dunia akademik sebagai Dosen NIDK pada Program Doktor (S3) Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan Bogor, almamater berbagi pengalaman dan keilmuan kepada para mahasiswa pascasarjana.

Dalam kehidupan pribadi, menikah dengan **Amalia Feryanti Salasa** dan dikaruniai seorang putri yang bernama **Azizah Luckyana Mawadda**. Keluarga kecil ini menjadi sumber inspirasi dan dukungan utama dalam perjalanan hidup dan kariernya. Selain aktif mengajar, juga dikenal sebagai penulis buku, peneliti, dan pembicara dalam berbagai forum ilmiah, baik nasional maupun internasional. Fokus keilmuannya meliputi manajemen pendidikan, kepemimpinan pendidikan, pendidikan vokasi, dan literasi digital guru. Publikasinya telah banyak tersebar di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus), dengan lebih dari 1.346 sitasi Google Scholar dan h-index 18 per 14 September 2025.

Komitmentnya untuk terus berkontribusi dalam pengembangan pendidikan Indonesia, terutama dalam memperkuat mutu SMK dan mendorong kepemimpinan digital di sekolah, menjadi semangat utama dalam perjalanan akademik dan pengabdianya hingga kini.

# TRANSFORMASI PENDIDIKAN di

## Era VUCA, Society 5.0 dan SDGs

Integrasi Silih Asih, Asah, Asuh dan Empat Pilar UNESCO



Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridha-Nya, karya ini dapat hadir di hadapan pembaca. Buku berjudul Transformasi Pendidikan di Era VUCA, Society 5.0 dan SDGs: Integrasi Silih Asih, Asah, Asuh dan Empat Pilar UNESCO adalah buah dari refleksi panjang, penelitian, sekaligus pergulatan pemikiran yang berangkat dari keresahan atas arah pendidikan Indonesia dalam menghadapi derasnya arus perubahan global.

Saat ini, dunia sedang memasuki fase sejarah baru. Gejala VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) kian nyata terasa di berbagai sektor kehidupan. Pandemi global yang baru saja kita lalui, perubahan iklim yang semakin ekstrem, ketidakpastian ekonomi, serta percepatan teknologi digital adalah contoh bagaimana pendidikan tidak lagi berjalan dalam koridor linear, melainkan dalam lanskap yang penuh ketidakpastian.

Dalam buku ini membahas materi-materi sebagai berikut.

- Fondasi Filosofis dan Konseptual
- Kearifan Lokal: Silih Asih, Asah, Asuh
- Empat Pilar Unesco
- Integrasi Lokal-Global
- Strategi Implementasi
- Studi Kasus & Best Practices
- Roadmap & Rekomendasi



**INSIGHT  
PUSTAKA**

Anggota IKAPI No. 019/LPU/2025

[www.insightpustaka.com](http://www.insightpustaka.com)

0851-5086-7290

Pendidikan

+17

ISBN 978-634-7569-41-7



9 786347 569417